



# MODUL

## PENGUATAN PARTISIPASI PEREMPUAN BELA NEGARA

MODUL  
PENGUATAN PARTISIPASI PEREMPUAN BELA NEGARA



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110  
Telepon/Fax. (021) 381 3351  
website: [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)

KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
2018

**MODUL I :**  
**WAWASAN KEBANGSAAN DAN  
JATI DIRI BANGSA**

**MODUL II :**  
**BELA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEREMPUAN INDONESIA**

**MODUL III :**  
**ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN**

**MODUL IV :**  
**PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DAN  
PEMBUDAYAAN BELA NEGARA  
KAUM PEREMPUAN**

**MODUL V :**  
**NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA  
BAGI PEREMPUAN**



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



# **TIM PENYUSUN**

## **Pembina**

**Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA**  
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia

## **Penanggung jawab**

**Ir. Agustina Erni, M.Si**

Deputi Bidang Kesetaraan Gender

## **Pengarah Materi**

**Dr. A. Darsono Sudibyo, M.Si**

Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam

## **Koordinator**

**Dr. Tri Yoga Budi Prasetyo, M.Si**

## **Tim Penyusun Modul :**

- 1. Riza Mahardhika, M.Si**
- 2. Jeanne Francois, M.Si (Han)**
- 3. Juniawan Priono, M.Si (Han)**
- 4. Lifani Kurnia, M.Si (Han)**
- 5. Zuhria Ninda, M.Si**

## **Kontributor :**

- 1. Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan**
- 2. Ses LP2M Universitas Pertahanan**
- 3. Kapuslit Bela Negara, Universitas Pertahanan**
- 4. Universitas UPN Veteran**
- 5. Peneliti Universitas Pertahanan**

6. **Kepala Pusat Pertahanan, Kementerian Pertahanan**
7. **Kepala LEMHANAS**
8. **Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan**
9. **Kalemdiklat Polri**
10. **Pimpinan Dewan Ketahanan Nasional**
11. **Kabadiklat Kementerian Pertahanan**
12. **Aster Mabes TNI**
13. **Asterad TNI AD**
14. **Aspers TNI AU**
15. **Aspers TNI AL**
16. **Pusat Kajian Politik UI**
17. **CEPP UI**
18. **Kaukus Perempuan Politik**
19. **Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI**

### **Pendukung Teknis :**

1. **Rina Nursanti, SH, M.Si**
2. **Mohamad Udin, S.Sos**
3. **Agam Bakti Nugraha, S.Pd, M.Pd**
4. **Dr. Nurdin, M.Si**

### **Pendukung Administrasi :**

1. **Wiyarso Suwarsono, SH**
2. **Sri Murni, SAP**
3. **Thomas Rizal, SP**
4. **Ratna Oeni Cholifah, SE, MM**
5. **Supriyanto**
6. **Agnes Rarasati, S.Pd**



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan syukur khadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, kini telah terbit Modul Pengutan Partisipasi Perempuan Bela Negara. Modul ini merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas perempuan yang secara khusus untuk menyiapkan peran perempuan dalam pembangunan karakter bangsa yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan global.

Peran perempuan dalam bela negara, secara filosofis merupakan naluri keterpanggilan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar bangsa Indonesia tetap eksis untuk memiliki karakter dan jati diri yang memiliki jiwa patriotik dan nasionalisme yang kuat. Dalam perspektif historis, kegiatan bela negara sebagai dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi secara berkelanjutan mengikuti irama sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada zaman penjajahan maupun zaman kemerdekaan serta zaman pembangunan. Secara sosiokultural, bela negara merupakan keniscayaan dari suatu bangsa yang religious yang mampu mempertahankan eksistensi bangsa dan negaranya.

Berdasarkan landasan Inpres Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018 – 2019 yang mewajibkan pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018 – 2019 bahwa setiap warga negara tidak terkecuali perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara. Hak dan kewajiban ini menjadi tanggung jawab yang melekat pada setiap warga negara. Sebagai program ini perlu terus digalakkan di tengah mudarnya nasionalisme dan patriotisme akibat kikisan gelombang globalisasi yang menerpa sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berkenaan dengan posisi strategis kaum perempuan dalam usaha-usaha bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepatutnya mereka memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran berpartisipasi dalam bela negara ini meliputi upaya sadar akan hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara. Kesadaran ini diawali dengan pemahaman akan wawasan kebangsaan sebagai suatu cara pandang untuk melihat bangsa dan negara sebagai satu kesatuan yang utuh dalam suatu landasan idiil, ideologi negara Pancasila dan didasarkan pada landasan konstitusional UUD 1945 baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Maka Modul Penguatan Partisipasi Perempuan Bela Negara ini dapat menjadi wahana pembelajaran guna memotivasi perempuan dimanapun keberadaan baik di perdesaan maupun perkotaan termasuk perempuan yang terhimpun dalam lembaga masyarakat dan perempuan kader partai politik, serta perempuan profesional. Perempuan sebagai calon ibu dan ibu yang melahirkan generasi bangsa dapat memberikan kontribusi positif dalam melangsungkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang tercinta. Perempuan yang memiliki kesadaran hak dan kewajiban bela negara secara sadar dan sungguh-sungguh menjaga

dan mempertahankan keutuhan NKRI dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan partisipasi perempuan bela negara dalam berbagai bidang pembangunan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan.

Kami juga menyadari bahwa modul ini masih perlu menerima masukan guna penyempurnaan sesuai dengan perkembangan baru terkait partisipasi belana. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut aktif dalam penyusunan modul ini, semoga modul ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan bagi perempuan di seluruh Indonesia.

Jakarta, Nopember 2018

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia

ttd

**Yohana Susana Yembise**







**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, JAKARTA 10110,  
Telepon (021) 3842638, 3805562 FAXIMILE (021) 3805559, 3805562  
Situs [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id)

## **PENGANTAR**

Puja dan puji syukur senantiasa kami persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, cq Deputi Kesetaraan Gender bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dapat menyusun Modul Penguatan Partisipasi Perempuan Bela Negara. Penyusunan Modul ini adalah bagian dari upaya dan langkah strategis Deputi Kesetaraan Gender untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan landasan Inpres Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018 – 2019 yang mewajibkan pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018 – 2019 bahwa setiap warga negara tidak terkecuali perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara. Salah satu upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat Modul Penguatan Partisipasi Perempuan Bela Negara. Perempuan sebagai bagian warga negara niscaya memiliki sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Pelatihan Penguatan Partisipasi Perempuan

Bela Negara merupakan wahana strategis untuk membentuk watak dan mental yang kuat sebagai modal guna membangun bangsa dan negara. Perempuan yang memiliki watak atau kepribadian dan mental yang kuat akan menjadikan negara dan bangsa yang kuat.

Modul pelatihan ini terdiri dari lima bagian yaitu: (1) Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Bangsa; (2) Bela Negara di Lingkungan Perempuan di Indonesia; (3) Ancaman terhadap Perempuan; (4) Pengembangan Nilai –Nilai dan Pemberdayaan Bela Negara Kaum Perempuan; (5) Nilai – Nilai Dasar Bela Negara bagi Perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cq Deputi Kesetaraan Gender mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan tokoh-tokoh politik yang terlibat secara aktif dalam memberikan masukan dan kritikan demi menjaga kualitas materi modul ini. Meskipun demikian, kami menerima masukan ide-ide baru terkait dengan bela negara. Semoga modul pelatihan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh semua pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan partisipasi perempuan bela negara.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menerima amal ibadah yang tulus bagi para pihak yang ikut serta aktif dalam penyusunan modul ini. Terima Kasih.

Deputi Kesetaraan Gender,

ttd

**Ir. Agustina Erni, M.Sc**



## DAFTAR ISI

<b>Sampul</b> .....	i
<b>Tim Penyusun</b> .....	iii
<b>Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia</b> .....	v
<b>Kata Pengantar Deputi Bidang Kesetaraan Gender</b> .....	ix
<b>Daftar Isi</b> .....	xi
<b>Modul I</b> Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Bangsa .....	1
<b>Modul II</b> Bela Negara di Lingkungan Perempuan Indonesia.....	83
<b>Modul III</b> Ancaman Terhadap Perempuan .....	125
<b>Modul IV</b> Pengembangan Nilai-nilai dan Pembudayaan Bela Negara Kaum Perempuan.....	229
<b>Modul V</b> Nilai-nilai Dasar Bela Negara Bagi Perempuan....	283

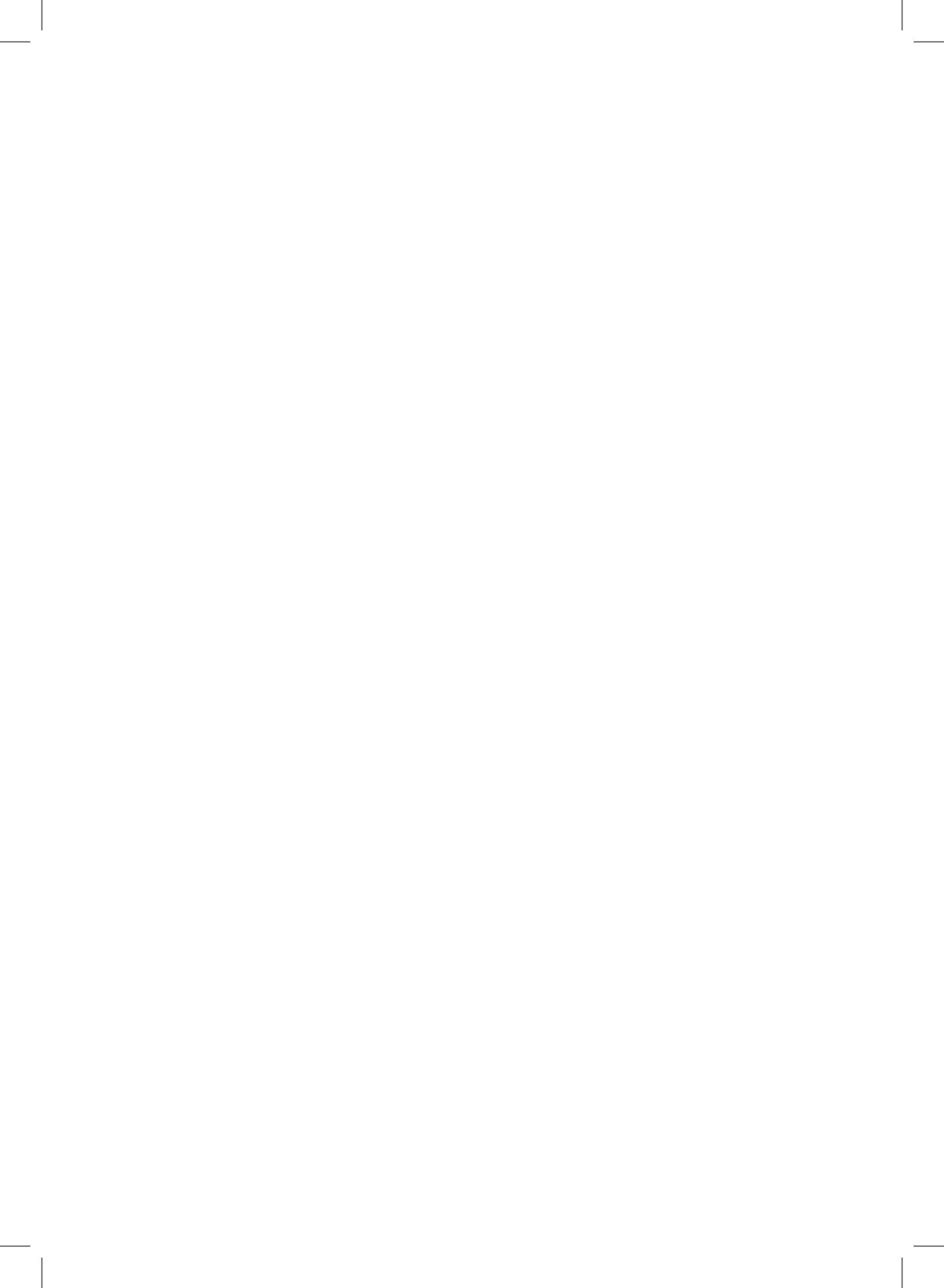


## MODUL PERTAMA

# WAWASAN KEBANGSAAN DAN JATI DIRI BANGSA



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



## MODUL 1

### WAWASAN KEBANGSAAN DAN JATI DIRI BANGSA

Materi	Modul ini berisi pengetahuan dasar tentang Wawasan kebangsaan dan jatidiri bangsa terutama tentang pengertian sistem nilai, norma dan moral dalam keluarga sebagai bagian dari identitas nasional yang menjadi dasar pemenuhan hak perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat
Kompetensi Utama	Kompetensi Utama Peserta mampu memahami mengenai Wawasan Kebangsaan dan Jati diri Bangsa terutama untuk menanamkan sistem nilai,moralitas dan norma dalam keluarga sebagai bagian dari jatidiri bangsa
Kompetensi Pendukung	Kompetensi Pendukung Pada akhir sesi pembelajaran, peserta diharapkan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peran dan aktifitas perempuan dalam keluarga dan lingkungannya untuk menanamkan pemahaman tentang sistem nilai,norma, dan moral sebagai bagian dari Jati Diri Bangsa</li><li>2. Mampu berperan dalam keluarga dan lingkungannya untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya wawasan kebangsaan.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="425 201 1025 449">3. Dapat menunjukkan contoh-contoh di kalangan kaum perempuan tentang pentingnya memahami wawasan kebangsaan dan jatidiri bangsa di lingkungan keluarga yang telah menjadi kesepakatan bersama.</li><li data-bbox="425 474 1025 679">4. Dapat menjelaskan hubungan antara pentingnya menanamkan nilai moral, etika dan norma sebagai bagian dari karakter bangsa di lingkungan rumah, sekolah maupun tempat bekerja.</li></ol>
--	---

## **SESI 1: WAWASAN KEBANGSAAN DAN JATI DIRI BANGSA**

- **WAKTU** : 120 Menit
- **KOMPETENSI UTAMA** :

Peserta mampu memahami mengenai Wawasan Kebangsaan dan Jati diri Bangsa dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memenuhi hak dan kewajiban sebagai perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

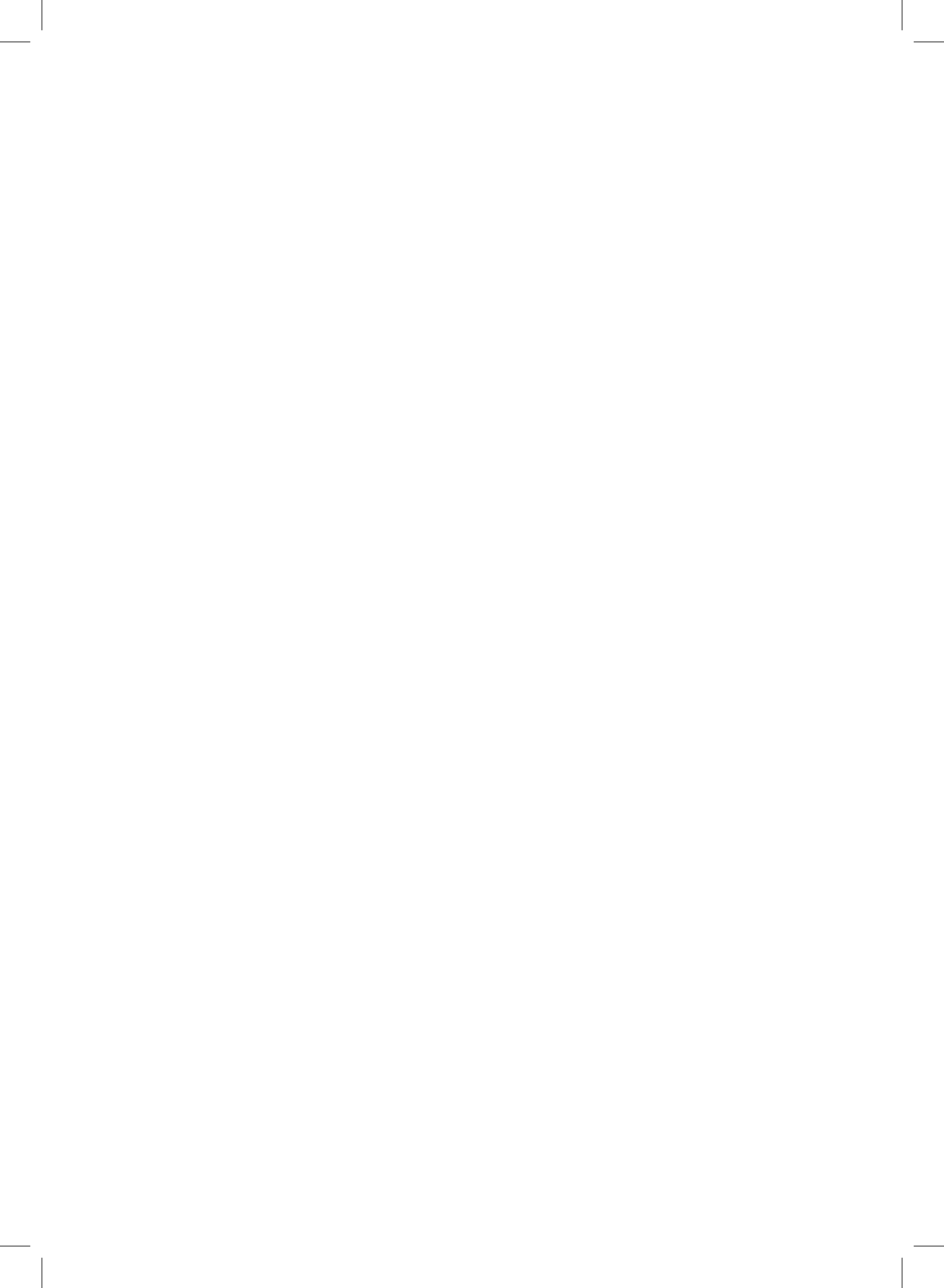
- **KOMPETENSI PENDUKUNG**:

1. Memahami peran dan aktifitas perempuan dalam kegiatan yang bertemakan Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Bangsa
2. Mampu Menyusun strategi yang harus dilakukan untuk berperan dalam aksi yang dilakukan kaum perempuan terkait dengan Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Bangsa
3. Dapat menunjukkan contoh-contoh di kalangan kaum perempuan tentang empat pilar kebangsaan, nilai, norma, etika, moral dan karakter bangsa serta identitas nasional yang telah menjadi kesepakatan bersama.
4. Dapat menjelaskan hubungan pilar kebangsaan dan nilai, norma, etika, moral bangsa Indonesia serta karakter bangsa yang harus diketahui oleh kaum perempuan di lingkungan rumah, sekolah maupun tempat bekerja.

- **METODE :**
  1. Paparan
  2. Diskusi/ Curah Pendapat
- **ALAT / BAHAN :**
  1. Modul
  2. Presentasi Power Point
  3. Alat Tes
  4. Formulir merumuskan rencana aksi
- **ALUR FASILITASI :**
  1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi awal dan sesi selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang alur pelatihan secara keseluruhan. Sesi ini akan dibuka dengan pemaparan oleh narasumber yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya perempuan dalam memahami makna Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Perempuan Indonesia serta implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Waktu pembukaan dan pengenalan alur pelatihan selama 15 menit.
  2. Narasumber memaparkan materinya selama 30 menit. Posisi fasilitator adalah sebagai moderator yang mengatur lalu lintas perbincangan dan diskusi di dalam forum.
  3. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan curah pendapat dan berbagi pengalaman untuk menggali pemahaman awal tentang mengapa perempuan harus memahami Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Bangsa. Pertanyaan penting ini dapat muncul sebagai bentuk pengalaman

para peserta yang baru terlibat dalam kegiatan implementasi Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Bangsa.

4. Narasumber memberikan respon dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta
5. Fasilitator menutup sesi.



## MODUL 1

# WAWASAN KEBANGSAAN DAN JATI DIRI BANGSA BAGI PEREMPUAN

### PENGANTAR

Dalam memahami peran perempuan dalam mengenal wawasan nusantara dan jati diri bangsa lebih dalam, diperlukan adanya tinjauan dari masa lalu. Oleh karenanya, pembelajaran sejarah dan masa lalu bangsa menjadi penting, karena dari situlah wawasan nusantara dan jati diri bangsa berasal.

Salah satunya, dengan melihat perjuangan perempuan pada masa kolonialisme maka akan memberikan gambaran bagaimana kebijakan masa lalu maupun paradigma sebagian suku masih terbawa hingga sekarang. Oleh karenanya, dengan mengetahui perjuangan dan perlakuan perempuan di masa lalu dapat memberikan pembelajaran yang kemudian bisa memacu motivasi perempuan di masa kini untuk merubah kebijakan maupun paradigma di masa lalu yang dinilai mencederai hak perempuan.

Mengetahui dan memahami sejarah suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih berhati hati di masa yang akan datang. Dengan begitu bangsa itu tidak salah langkah dalam mengambil tindakan maupun merumuskan kebijakan-kebijakan. Mengamalkan serta melestarikan sejarah yang ada menjadi implementasi paling mudah bagi seluruh bangsa untuk menghargai perjuangan para pahlawan terdahulu.

## TINJAUAN HISTORIKAL WAWASAN KEBANGSAAN

### 1. Karakteristik Indonesia dan Peranan Sejarah Islam dalam Proses Integrasi

Kondisi geografis kepulauan Indonesia merupakan salah satu faktor yang paling sulit dalam membentuk kesatuan Nusantara. Kesulitan itu akan bertambah besar dengan keanekaragaman suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan bahasa ber beda yang tinggal di pulau-pulau yang terpisah itu. Oleh karena itu, makna integrasi bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang paling penting. Dalam peta terlihat bahwa wilayah Indonesia terdiri dari kepulauan besar dan kecil yang jumlahnya belasan ribu. Banyak di antara pulau-pulau tersebut dipisahkan oleh selat dan laut yang jaraknya ratusan bahkan ribuan kilometer. Misalnya, jarak antara Pulau Sumatra dan Sulawesi, Maluku dan Papua, lebih dari 2000 km. Begitu juga jarak antara Kepulauan Nusa Tenggara di selatan dan Kepulauan Sangir Talaud di ujung paling utara lebih dari 2000 km. Pulau-pulau besar dan kecil tersebut dihuni oleh berbagai suku bangsa yang masing-masing memiliki keragaman etnis dan budaya. Dalam konsep integrasi, laut-laut dan selat yang berada di wilayah Indonesia merupakan penyatu. Demikian pula keragaman suku-suku bangsa, budaya, dan bahasa yang secara alami telah mengalami proses evolusi sejak migrasi bangsa Austronesia ribuan tahun yang lalu. Terintegrasinya kepulauan yang tersebar di garis khatulistiwa dan memiliki keragaman budaya daerah, bahasa, dan bentuk fisik tersebut menuju kesatuan politis merupakan proses yang sulit dan panjang. Untuk itu diperlukan keinginan, tekad, dan upaya suku-suku



bangsa yang tinggal di kepulauan tersebut. Bagi penganut Islam, semua orang yang menganut Islam dianggap sebagai saudara dan memiliki kedudukan yang sama. Cara pandang seperti ini dipraktekkan oleh para pedagang Islam di seluruh Nusantara, dalam pergaulan di kota-kota pelabuhan Nusantara. Di kota-kota dagang penting Nusantara, seperti Malaka, Pasai, Banten, Cirebon, Tuban, Demak, Makassar, Ambon, dan lain-lain terjadi hubungan yang egaliter (berada dalam posisi yang sama). Misalnya, para pedagang yang berada di Malaka, Banten, dan lain-lain menganggap para pedagang Islam yang berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa Indonesia sebagai saudara. Terjadilah keterikatan diantara mereka dan perasaan sebagai saudara. Perbedaan-perbedaan latar belakang suku, adat-istiadat, bahasa, tradisi, dan lain-lain menjadi tidak begitu penting kenasemuanya merasa berada dalam satu pandangan dan kedudukan yang sama. Mereka merasa bersatu karena pandangan mereka yang sama tersebut.

## **2. Perspektif sejarah Indonesia**

Konstitusi dan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan sesuai tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elite politik dalam suatu masa.

Sejarah administrasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1816, dimana setelah pemerintahan diambilalih oleh Belanda dari pihak Inggris, segera dibentuk suatu dinas pemerintahan tersendiri. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, maka dinas pemerintahan setempat mulai merasakan perlun-



ya diterapkan sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Desentralisasi mulai dilakukan pada tahun 1905, dan dibentuklah wilayah-wilayah setempat (*locale ressorten*) dengan dewan-dewannya (*locale raden*) di seluruh Jawa. Namun ternyata, tugas-tugas yang dilimpahkan kepada *locale ressorten* tersebut sangat sedikit, sehingga desentralisasi yang direncanakan tersebut dianggap kurang bermanfaat<sup>1</sup>.

Semenjak tanggal 1 Maret 1942, Pasukan Jepang mendarat di beberapa tempat di Pulau Jawa, yakni Banten serta dekat Kota Indramayu di Pantai Laut Jawa lainnya antar Tayu dan Juana dan di daerah Kragan. Masa itu merupakan awal masa pendudukan Jepang, yang diikuti dengan penyerahan diri panglima sekutu dan penawanan terhadap pembesar-pembesar Belanda.

Perubahan penting dalam perkembangan tata pemerintahan selama jaman pendudukan Jepang, ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang No.27 yang berlaku secara efektif mulai tanggal 8 Agustus 1942. Menurut Undang-Undang ini maka tata pemerintahan daerah pada jaman tersebut yang berlaku di tanah Jawa dan Madura, kecuali Kooti (Swapraja), susunan pemerintah daerahnya terbagi atas Syuu (Karesidenan), Si (Kota), Ken (Kabupaten), Gun (Kawedanan), Sen (Kecamatan) dan Ku (Desa). Aturan-aturan tentang tata pemerintahan daerah terdahulu tidak berlaku lagi, kecuali aturan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta aturan yang berlaku buat Kooti. Kemudian dalam Undang-Undang No. 28 tanggal 11 Agustus 1942 diberikan aturan mengenai pemerintahan Syuu dan Tokubotu-Si. Sedangkan mengenai ketentuan tentang Kooti disebutkan pada bagian penjelasan

---

<sup>1</sup> Purbopranoto Kuntjoro, 1981. *Perkembangan hukum dan administrasi Indonesia*. Bincipta. Bandung. Hlm 73-75



kedua Undang-Undang tersebut yang menerangkan tentang kedudukan Kooti Surakarta dan Yogyakarta yang dianggap mempunyai keadaan istimewa, akan ditetapkan aturan tata pemerintahan yang bersifat istimewa juga.

Pada awal masa kemerdekaan, perubahan sistem administrasi negara di Indonesia masih dalam keadaan darurat, karena adanya transisi pemerintahan. Sehingga Bangsa Indonesia berusaha sebisa mungkin untuk membentuk piranti-piranti yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan negara sebagai suatu negara yang berdaulat. Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan, disebabkan oleh berakhirnya Perang Dunia Kedua. Maka belum dapat segera dibentuk suatu susunan pemerintahan yang lengkap dan siap untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintahan seperti dikehendaki oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Bangsa Indonesia baru memulai sejarah sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, semenjak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan. Sebagai suatu Badan Perwakilan seluruh rakyat Indonesia yang mewakili daerah-daerah dan beranggotakan pemimpin yang terkenal, kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ditugaskan oleh pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan perpindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia. Sebelum hal tersebut terlaksana, untuk sementara waktu dalam masa peralihan tersebut, pasal IV Aturan peralihan UUD menetapkan bahwa:

*“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.*

Pada awal masa berlakunya UUD 1945, seluruh mekanisme ketatanegaraan belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan amanat dalam UUD 1945. Semua masih didasarkan pada aturan peralihan yang menjadi kunci berjalannya roda pemerintahan negara. Pada saat itu lembaga-lembaga kenegaraan seperti DPR, MA, MPR, DPA maupun BPK belum dapat terbentuk, kecuali Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih untuk pertama kalinya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945<sup>2</sup>.

Hal ini disebabkan oleh karena proses pengisian atau pembentukan lembaga – Lembaga kenegaraan seperti tersebut diatas memakan waktu yang relatif lama, karena harus melalui mekanisme perundang – undangan. Sedangkan DPR sebagai partner Presiden belum juga dapat terbentuk. Menyadari hal ini, maka pembentuk UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan dibantu Komite Nasional (Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945).

Selanjutnya ditetapkanlah Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945, yang meningkatkan maka kedudukan Komite Nasional menjadi badan legislatif yang

---

<sup>2</sup> Marbun, S. F. 1997. *Peradilan Administrasi dan Upaya administratif di Indonesia*. liberty, Yogyakarta. Hlm 43



berkedudukan sejajar dengan DPR. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tersebut, telah membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan negara. Perubahan tersebut adalah perubahan Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlementer, yang berarti Menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada Presiden melainkan kepada parlemen. Perubahan sistem kabinet tersebut menghendaki dibentuknya partai-partai sebagai wadah politik dalam negara. Namun cabinet parlementer tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat 1949. Pada saat itu, sistem pemerintahan saling berganti dari kabinet parlementer ke presidensiil kepada kabinet parlementer dan sebaliknya dari presidensiil ke parlementer. Mekanisme pemerintahan negara dapat dikatakan belum menentu atau stabil dan pasal-pasal dalam aturan tambahan juga tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan UUD 1945 masih terbatas pada penataan dan pembentukan lembaga– lembaga kenegaraan, karena pemerintah Indonesia juga harus menghadapi pergolakan politik dalam negeri. Pembentukan lembaga-lembaga kenegaraan ternyata juga belum berhasil, mengingat usaha untuk mengokohkan negara kesatuan mendapat tantangan dari pihak Belanda melalui agresi-agresi yang dilancarkanya dalam usaha menanamkan kembali imperialisme.

Penyerahan kekuasaan oleh sekutu kepada pemerintah Belanda setelah Perang Dunia II dijadikan momentum untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menghancurkan pemerintah negara Republik Indonesia yang sah. Pada tanggal

3 Juli 1946 bertenpat di Yogyakarta, kekuasaan atas Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku diserahkan oleh sekutu kepada pemerintahan Hindia Belanda. Demikian juga pada tanggal 7-8 Desember 1946, telah dibentuk Negara Indonesia Timur di bawah kekuasaan Belanda<sup>3</sup>.

Agresi Belanda terus berlanjut dengan tindakan polisional yang pertama dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dan yang kedua pendudukan Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Selama perang melawan agresi Belanda tersebut, telah dilakukan beberapa kali persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak negara Republik Indonesia, antara lain persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947 dan persetujuan Renville. Kesemuanya ini berakhir dengan terbentuknya negara-negara bagian yang bertujuan untuk memperlemah negara Indonesia, sehingga mempermudah pemerintah Belanda untuk menguasai dan menanamkan kembali kekuasaannya.

Dengan terbentuknya negara-negara bagian tersebut sebagai negara boneka, pada akhirnya terbentuk negara serikat pada tahun 1949. Dengan sendirinya penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi terhambat atau terputus. Pada saat itu, UUD 1945 hanya berlaku dalam negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian yang berkedudukan di Yogyakarta. Prinsip-prinsip negara hukum Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan mekanisme kenegaraan Indonesia yang juga merupakan landasan pokok bagi pengembangan administrasi negara tidak berjalan. Pembentukan

---

<sup>3</sup> Yamin, Moh. 1960. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid III*. Yayasan Prapantja. Jakarta. Hlm 27



tukan hukum maupun pengembangan perundang –undangan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 belum dapat diwujudkan karena tatanan hukum yang berlaku masih tetap diwarnai oleh hukum pada penjajah Belanda.

Produk hukum dan perundang-undangan yang dibentuk pada masa ini belum banyak yang menyangkut kepentingan umum dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hubungan Indonesia-Belanda semakin memburuk setelah agresi kedua tanggal 18 Desember 1948. Atas jasa baik Komisi PBB untuk Indonesia, telah diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag antara Pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Hasil KMB tersebut adalah bahwa Kerajaan Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Pada saat itulah negara Indonesia berubah menjadi negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian.

Sejak saat itu, Negara Indonesia resmi berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat dengan Konstitusi RIS (KRIS) 1949 sebagai Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, dimana pertanggungjawaban seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah ditangan menteri-menteri sedangkan presiden tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, dilain pihak yang dimaksud dengan pemerintah adalah presiden dengan seorang atau beberapa orang menteri. Tugas eksekutif adalah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia, khususnya mengurus supaya konstitusi, undang-undang federal dan peraturan lain yang berlaku untuk RIS dijalankan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa sekalipun presiden termasuk pemerintah, namun pertanggungjawabannya ada di tangan menteri. Mengingat DPR yang ada pada waktu itu bukan DPR hasil pemilihan umum, maka terdapat ketentuan bahwa parlemen tidak dapat menjatuhkan menteri atau kabinet. Sehingga sistem pemerintahan parlementer yang dianut KRIS adalah tidak murni (*quasi parlementer cabinet*). Dalam KRIS 1949 juga tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai siapa pemegang kedaulatan dalam negara RIS. Tetapi dalam KRIS 1949 tersebut secara implisit disebutkan bahwa pemegang kedaulatan dalam negara RIS bukan rakyat, melainkan negara. Dengan kata lain, RIS menganut paham kedaulatan negara dan pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh menteri-menteri sesuai dengan sistem pemerintahan parlementer. Tugas-tugas yang menyangkut kepentingan umum dilaksanakan oleh menteri dengan ketentuan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam kabinet yang didalamnya terdapat menteri-menteri lain dari beberapa partai. Mengingat berbagai kebijaksanaan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam sidang kabinet, maka dalam pelaksanaannya sering timbul benturan kepentingan dikarenakan perbedaan pandangan, sehingga sulit ditemukan jalan keluarnya. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan berjalan tidak stabil. Selain itu, kesulitan di bidang ekonomi dan politik sulit dikendalikan oleh pemerintah dalam suasana sistem multi partai tersebut.

Pembentukan negara-negara bagian menimbulkan pertentangan dalam negara, antara lain terjadi antara golongan federalis dan kaum republik. Struktur negara federal tidak diterima oleh sebagian besar aliran-aliran politik yang sejak proklamasi kemerdekaan 1945 menghendaki bentuk negara kesatuan. Pertentangan tersebut berakhir dengan diadakannya



persetujuan antara Negara RIS yang menghasilkan perubahan kepada bentuk negara kesatuan berdasarkan UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950. Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanah mukadimah KRIS tidak dapat terealisasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan yang berumur sekitar tiga bulan tersebut, pemerintahan diwarnai dengan pertentangan mengenai bentuk negara Indonesia.

Administrasi negara tidak dapat menunjukkan peranan yang menonjol dalam upaya menegakkan negara hukum kepada terciptanya masyarakat yang sejahtera, karena pada masa itu aktivitas kenegaraan lebih banyak diwarnai oleh pertentangan politik khususnya mengenai paham bentuk negara. Dengan demikian, menurut Marbun (2001), meskipun KRIS 1949 menganut paham negara hukum dengan tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat, tetapi administrasi negara tidak memperoleh tempat untuk mengambil posisi sebagai sarana hukum yang menjembatani pemerintah sebagai administrasi negara yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umumdengan rakyat sebagai sarana dan tujuannya. Atau dapat dikatakan bahwa dalam bidang administrasi negara telah terjadi kevakuman yang disebabkan oleh adanya pergolakan dalam bidang politik sebagai usaha untuk menuju terciptanya kembali bentuk negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 19 Mei Tahun 1950 telah disepakati bersama untuk mewujudkan kembali negara kesatuan dengan mem berlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Dengan UU Federal No. 7 Tahun 1970, ditetapkanlah UUDS 1950 berdasarkan pasal 190 KRIS 1950 untuk kemudian menjadi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mulai ber-



laku efektif sejak tanggal 17 Agustus Tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut, tampak bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan rakyat. Akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga yaitu Pemerintah dan DPR. Kekuasaan di bidang eksekutif tetap merupakan wewenang penuh pihak pemerintah. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam KRIS 1949 yang menyatakan bahwa pemerintah adalah presiden dengan menteri-menteri, maka dalam UUDS 1950 tidak terdapat ketentuan semacam itu.

Ketidakstabilan pemerintahan pada saat ini disebabkan pula oleh kedudukan Presiden Soekarno yang menjadi simbol pemimpin rakyat, disamping sebagai symbol kenegaraan. Dalam kedudukannya tersebut sering terjadi konsepsi-konsepsi yuridis yang seharusnya menjadi sendi-sendi negara hukum tidak dilaksanakan sepenuhnya, karena tindakannya sering melanggar konstitusi. Dalam masa ini, kedudukan hukum berada di bawah kekuasaan dan kedudukan Presiden sebagai pemimpin besar revolusi atau rakyat. Bahkan bukan konstitusi melainkan ketokohan (figur) yang berlaku sebagai pedoman dalam pemerintahan. Keadaan ini bukanlah pemerintahan *ruled by the law tetapi rule by the person*. Di samping itu kedudukan Perdana Menteri yang tidak jelas dalam UUD 1950 juga merupakan salah satu sebab ketidakstabilan pemerintah. Dengan sistem banyak partai, menteri-menteri secara terang-terangan membelak kepentingan dari golongannya sendiri, sehingga bagi Perdana Menteri sulit untuk menjamin solidaritas maupun kebulatan suara dalam putusan-putusan kabinet. Akibatnya tidak pernah tercipta adanya pemerintahan yang relatif lama dalam melaksanakan tugasnya karena kabinet silih berganti dalam waktu relatif cepat. Adanya banyak partai cenderung menimbulkan



gejala perpecahan diantara Bangsa Indonesia. Karena itulah negara terus menerus dilanda krisis kabinet yang ditimbulkan oleh koalisi kabinet multipartai. Inilah yang melatar belakangi dikeluarkannya Konsep Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957.

Di bidang parlemen, ketidakstabilan politik timbul karena adanya oppositionisme terhadap segala aktivitas pemerintahan. Hal ini timbul selain dari akibat paham demokrasi liberal yang menjiwai percaturan politik pada kurun waktu itu, juga diakibatkan oleh pengaruh sikap oposisi Bangsa Indonesia terhadap pemerintah Belanda pada masa lampau. Parpol pada saat itu masih lebih banyak berkisar pada kepribadian pemimpin-pemimpin daripada ideologinya. Dalam menghadapi pemerintahan nasional seringkali parpol masih dipengaruhi oleh cara pandang lama seperti pada saat menghadapi pemerintahan penjajahan. Seperti halnya KRIS 1949, UUDS 1950 dibentuk dengan sifat sementara. Selain dari namanya, sifat sementara ini dapat juga dilihat dari pembentukan Konstituante (sidang pembuat UUD) yang bersama-sama dengan pemerintah bertugas secepat-cepatnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD 1950. Konstituante ini diharapkan cukup representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang permanen mengingat keanggotaannya akan dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, sidang Konstituante menjadi medan perdebatan dan pertentangan diantara partai-partai dan pemimpin-pemimpin politik dalam memilih dasar negara. Selama 2,5 tahun sidang Konstituante tidak menghasilkan UUD sebagaimana diamanatkan oleh UUDS 1950.



Mengingat kebuntuan sidang Konstituante, pemerintah mengusulkan ide **"demokrasi terpimpin"** dalam usahanya menuju kembali kepada UUD 1945, untuk mengganti sistem demokrasi liberal. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara karena macetnya sidang Konstituante, maka pada tanggal 5 Juli Tahun 1959 dikeluarkanlah Dekrit Presiden yang berisi pemberlakuan kembali UUD 1945, membubarkan Konstituante dan tidak memberlakukan UUDS 1950.

Dari uraian di atas, pada masa UUDS 1950, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada sistem parlementer tidak menghasilkan suatu rintisan kearah tercapainya tujuan negara yang sejahtera sesuai dengan amanat dari konstitusi. Mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang menjadi tugas pemerintah dalam sistem banyak partai sebagai akibat pengaruh liberal, justru menimbulkan perpecahan diantara penyelenggara pemerintahan. Kepentingan golongan sebagai aspirasi partai lebih menonjol daripada kepentingan umum masyarakat Indonesia. Akibatnya perkembangan Tata Negara tidak jauh berbeda dengan perkembangan didalam negara liberal yang masih tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dalam arti sempit.

Dalam perkembangan yang tidak stabil tersebut, negara kesatuan yang demokratis ternyata menimbulkan perpecahan diantara partai-partai politik yang ada. Negara hukum (Pancasila) seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan sebaliknya tersisih oleh mekanisme penyelenggaraan yang bersifat liberal. Artinya, pada masa UUDS 1950, administrasi negara tidak dapat tumbuh dalam suatu wadah yang penyelenggaraan negaranya tidak mengindahkan norma norma hukum dan asas-asas hukum yang hidup berdasarkan falsafah hukum atau ideologi, yang berakar kepada faham demokra-



si dan berorientasi kepadapenyelenggaraan kepentingan masyarakat.

Kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dicanangkan kembali melalui Dekrit Presiden Tahun 1959 dengan diwarnai oleh pertentangan politik antara parpol-parpol sebagai warisan dari sistem pemerintahan parlementer berdasarkan UUDS 1950. Dengan dalih untuk mengatasi keadaan negara, menyelamatkan kelangsungan negara, menyelamatkan kelangsunagn negara dan kepentingan revolusi,peranan presiden sangatlah besar. Kehidupan demokrasi yang belum dapat berjalan secara lancar menurut UUD 1945 berimbas terhadap hubungan antar lembaga lembaga kenegaraan, seperti MPR, DPR yang ditentukan oleh Presiden sebagai pengendalinya. Ditambah pula munculnya lembaga inskonstitusional yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Presiden sebagai kepala eksekutif terlalu turut campur dalam bidang legislatif dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang notabene bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula dalam bidang Yudikatif, Presiden telah campur tangan dalam masalah peradilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa ini kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif terpusat di tangan Presiden. Konsep negara hukum yang menggunakan landasan Pancasila dan UUD 1945 telah diinjak-injak oleh kepentingan politik. Hukum hanya dijadikan sebagai alat politik untuk memperkokoh kekuasaan yang ada. Hukum telah tergeser bersama-sama dengan demokrasi dan hak asasi yang justru menjadi ciri dan pilar sebuah negara hukum.

Puncak kekacauan terjadi pada saat Partai Komunis Indonesia (PKI) menjalankan dominasi peranannya di bidang pemerintahan yang diakhiri dengan pengkhianatan total terhadap falsafah Pancasila dan UUD 1945 pada tanggal 30 September



Tahun 1965. Kondisi ini memaksa Presiden RI saat itu yaitu Soekarno untuk mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” yang ditujukan kepada Letnan Jenderal. Soeharto dengan wewenang sangat besar dalam usaha untuk menyelamatkan negara menuju kestabilan pemerintahan. Peristiwa ini menjadikan tonggak baru bagi sejarah Indonesia untuk kembali melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta tanda dimulainya jaman orde baru.

Keinginan untuk pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen telah dituangkan dalam bentuk yuridis dalam Pasal 2 Tap MPRS No. XX Tahun 1966 dengan Pancasila sebagai landasan atau sumber dari segala sumber hukum. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, telah ditetapkan beberapa ketentuan antara lain tentang Pemilihan Umum, kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kesatuan bangsa dan sebagainya. Kewenangan-kewenangan lembaga lainnya sudah mulai disesuaikan dengan UUD 1945, walaupun undang-undang sebagai dasar pembentukannya belum dibuat bersama dengan DPR.

Pada masa orde baru, keberadaan administrasi negara lebih berperan seiring dengan perkembangan dan keterlibatan pemerintah sebagai pemeran administrasi negara dalam lingkup tugas publik untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Landasan pengembangan dan arah serta posisi administrasi negara dalam konteks negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, merupakan masalah yang dihadapi dalam negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mengacu pada kronologi sejarah Negara Indonesia, maka pada hakekatnya, UUD 1945 sebagai konstitusi negara disusun pertama kali sebagai sarana



bagi negara bangsa untuk dapat survive dalam melalui masa revolusi kemerdekaan. UUD 1945 menjadi dasar pembentukan sistem administrasi negara yang memecahkan masalah legitimasi, penetrasi, identitas, distribusi, dan integrasi sesuai dengan nilai nilai revolusioner waktu itu. Semangat *national brotherhood* yang kuat tertuang dalam UUD 1945 dengan gagasan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mewakili seluruh kelompok dalam masyarakat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Disisi lain UUD 1945 mengakomodir dan ide kepemimpinan paternalistik dimana konsentrasi kekuasaan pemerintahan berada pada tangan Presiden. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang efisien berhadapan dengan masalah masalah pembangunan *nation-state* waktu itu. Namun demikian, tanpa pembatasan masa jabatan yang tegas tidak adanya mekanisme *check and balance* yang memadai membuka peluang bagi terwujudnya kekuasaan otoriter. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Presiden Sukarno pada tahun 1959 yang menjadikan UUD 1945 untuk melegitimasi konsep Demokrasi terpimpin. Demikian juga halnya dengan Presiden Suharto yang menjadikan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen merupakan dasar untuk menjalankan demokrasi kekeluargaan.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru menggambarkan perubahan mendasar dari harapan sebagian besar masyarakat dan sikap elite yang berkuasa mengenai cara cara mengatasi permasalahan pembangunan negara bangsa. Salah satu perubahan mendasar dari amandemen disini adalah adanya *sharing of power* dan penguatan *balance of power* baik di antara unsur unsur penye-



lenggara negara maupun antara negara dan masyarakat (*civil society*). Setiap organ negara menjalankan kekuasaannya secara fungsional dengan tidak lagi menganut paham *distribution of power* sesuai Trias Politica (eksekutif, legislatif dan yudikatif), Presiden tidak lagi disebut Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, prinsip *check and balances system* dikembangkan sebagai mekanisme kontrol. Desentralisasi pemerintahan ditekankan, dengan pemberian otonomi kepada daerah. Namun demikian implementasi konstitusi masih menyisakan sejumlah persoalan, seperti kedudukan dan peran DPD, anggaran pendidikan 20%, susunan kementerian negara, dan yang lebih mendasar adalah belum ada peningkatan yang signifikan terhadap keadilan dan kemakmuran rakyat yang lebih baik.

## A. PENGERTIAN WAWASAN KEBANGSAAN

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Kebangsaan”. Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) istilah wawasan berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Dalam kamus tersebut diberikan contoh “Wawasan Nusantara” yaitu wawasan (konsepsi cara pandang) dalam mencapai Tujuan Nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.

Wawasan Kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang dan mengkrystal tidaklepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam membentuk negara ini. Konsep wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi nasional ten-



tang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu: satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wawasan seperti itu pada hakikatnya tidak membedakan asal suku, keturunan, ataupun perbedaan warna kulit. Dengan perkataan lain wawasan tersebut mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa atau yang dapat disebut sebagai wawasan kebangsaan Indonesia. Dalam hubungan ini Bintoro (1996) mengemukakan bahwa: *Reason d'etre* negara Indonesia bukan berdasar *sosio antropologis* (etnik), tetapi karena pengalaman sejarah ditindas kolonialisme dan mengaspirasikan kehidupan kebangsaan yang bebas. Wawasan kebangsaan didukung oleh ideologi (gerakan pemikiran) yang timbul di abad ke 18 yaitu Nasionalisme.

## 1. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

- 1) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
- 2) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu;
- 3) Cinta akan Tanah Air dan Bangsa;
- 4) Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat;
- 5) Kesetiakawanan Sosial;
- 6) Masyarakat adil makmur.

## 2. Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan Indonesia mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan,



serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa.

Sehubungan dengan itu hendaknya dipupuk penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada tanah air dan bangsa, demokrasi dan kesetiakawanan sosial. Wawasan Kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Persatuan tidak boleh mematikan keanekaan dan kemajemukan. Sebaliknya keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah namun menjadi kekuatan yang memperkaya persatuan. Wawasan Kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik. Misi yang diamanatkan ialah agar para warga negara Indonesia membina dengan jiwa besar dengan setia terhadap Tanah Air, tetapi tanpa kepicikan jiwa. Cinta Tanah Air dan Bangsa selalu sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antara ras, antar bangsa dan antar negara. Mencermati makna Wawasan Kebangsaan tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa Wawasan Kebangsaan Indonesia pada hakikatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa kita. Dengan Wawasan Kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menyelenggarakan misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka dan suka berkoeksistensi dengan bangsa lain. Sudah sejak dulu kala bangsa Indonesia menikmati dan menghayati arti hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain. Dengan letak geostrategik nusantara di posisi silang hubungan antar bangsa, maka wawasan kebangsaan Indonesia tidak hanya bersifat



*“inward looking”* dan mengisolasi diri. Laut bagi bangsa Indonesia bukan menjadi pemisah tetapi justru ke luar sebagai wahana dalam berhubungan dengan bangsa lain, sedangkan ke dalam merupakan unsur pemersatu. Wawasan Nusantara yang mengemuka di tengahnya silang pendapat antara *federalisme* dan *unitarisme* di masa setelah lahirnya Indonesia Serikat, esensinya dapat dikatakan implementasi dari wawasan kebangsaan yang dijiwai semangat bangsa bahari. Dalam wawasan nusantara dinyatakan bahwa wilayah laut adalah bagian dari wilayah negara kepulauan yang kemudian diakui dunia sebagai *“Archipelagic Principle”*<sup>4</sup>.

## **B. EMPAT PILAR KEBANGSAAN**

Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai yang melekat pada diri setiap warga negara atau norma kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu bersumber dari nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara. Bangsa Indonesia selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain. Rasa kebangsaan adalah paham dan semangat kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NRI 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan peri-

---

<sup>4</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2006, *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, hlm. 22-26

laku setiap warga negara sebagai bangsa Indonesia. Sikap dan perilaku tersebut senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Empat pilar Kebangsaan tersebut adalah :

- (1) Pancasila,
- (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945,
- (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
- (4) Bhinneka Tunggal Ika.

Meskipun hal ini telah menjadi kesepakatan bersama, atau tepatnya sebagian besar rakyat Indonesia, masih ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut adalah sekedar berupa slogan-slogan, sekedar suatu ungkapan indah, yang kurang atau tidak bermakna dalam menghadapi era globalisasi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut sekedar sebagai jargon politik. Yang diperlukan adalah landasan riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam persaingan menghadapi globalisasi.

Untuk itulah perlu dipahami secara memadai makna empat pilar tersebut, sehingga kita dapat memberikan penilaian secara tepat, arif dan bijaksana terhadap empat pilar dimaksud, dan dapat menempatkan secara akurat dan proporsional dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut disampaikan secara singkat:

- (a) arti pilar,
- (b) pilar Pancasila,
- (c) pilar UUD NRI 1945/1945,
- (d) pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia,



- (e) pilar sesanti Bhinneka Tunggal Ika, serta
- (f) peran dan fungsi empat pilar dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

### C. NILAI KEBANGSAAN

Dari segi semantik nilai-nilai kejuangan terdiri dari dua istilah yaitu “Nilai” dan “Kejuangan”. “Nilai” adalah konsep yang berkenaan dengan sesuatu, sedangkan “juang” sebagai kata kerja berarti “laga, lawan, kelahi, perang memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga”. Berjuang adalah berlaga, berkelahi, berperang dan berlawan (KBBI, 1989). Dengan demikian nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut perihal perang, kelahi, lawan dan laga. Kata nilai kejuangan dikenal terhadap konsepsi abstrak, anutan, paham dan pendorong yang menyebabkan orang dapat berperang, berkelahi, berlawan dan berlaga, sehingga bermanfaat bagi dirinya untuk menang. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya dorong perlawanan dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan bebas merdeka. Nilai kejuangan diletakkan pada upaya selama bergenerasi-generasi untuk mencapai kemerdekaan. Nilai kejuangan seperti ini dimiliki oleh generasi pra 45 dan generasi 45. Sebutan generasi 1945 sangat mengemuka karena pada tahun 1945 inilah keberhasilan kemerdekaan bangsa itu datang. Namun, tentu saja keberhasilan itu bukan dibuat oleh generasi 45 belaka. Nilai perjuangan ini mewaris terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya <sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI, *Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan I*, hlm.48

Bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Sekumpulan manusia tersebut yang dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarahnya.

Sebagai jati diri bangsa, nilai-nilai kebangsaan tersebut berwujud menjadi sikap dan perilaku yang nampak pada atau ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya, bagaimana seseorang bangsa Indonesia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai anggota masyarakat, bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku sebagai komponen bangsa, serta bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan nilai kebangsaan teridentifikasi sejumlah nilai sebagai berikut.

- a) **Religius** : Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
- b) **Jujur** : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat di percaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- c) **Toleransi** : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku etnis, sikap, pendapat, dan tindakan orang lain yang berbeda darinya.
- d) **Disiplin** : Tindakanyang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.



- e) **Kerja keras** : Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajardan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f) **Kreatif** : Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
- g) **Mandiri** : Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas.
- h) **Demokrasi** : Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- i) **Rasa ingin tahu** : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar.
- j) **Semangat kebangsaan** : Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa, diatas kepentingan kelompok maupun individu.
- k) **Cinta tanah air** : Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
- l) **Menghargai prestasi** : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.



- m) **Bersahabat / komunikatif** : Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.
- n) **Cinta damai** : Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
- o) **Gemar membaca** : Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebangkitan bagi dirinya.
- p) **Peduli lingkungan** : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- q) **Peduli sosial** : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- r) **Tanggung jawab** : Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya) , negara dan Tuhan Yang Maha Esa (Kemendiknas, 2010: hal 9-10).<sup>6</sup>

Ke 18 nilai-nilai diatas perlu dimengerti oleh bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama dalam kaitanya dengan peran wanita. Wanita yang merupakan gardu terdepan Pendidikan anak perlu mengerti pentingnya peran dan pengaruh didikan mereka terhadap

---

<sup>6</sup> Arief Tri Wibowo, 2013, *Pelaksanaan Pendidikan Nilai Kebangsaan Melalui Kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang*, hlm.23-26

masa depan bangsa. Yang dimaksudkan ialah peranan wanita sebagai ibu, dimana orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak. Pendidikan ini perlu diselipkan ke-18 nilai diatas agar sedini mungkin suatu bangsa dapat memahami nilai pendidikan yang dapat membantu pribadi mereka.

Bangsa Indonesia mengandung nilai kebangsaan yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada 3 (tiga) tingkatan nilai, yaitu: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.

1. Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi.
2. Nilai instrumental sebagai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
3. Nilai praktis yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut termasuk nilai etik atau nilai moral. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk dalam nilai tingkat dasar. (Winarno, 2009)

Pancasila sebagai ideologi nasional melandasi pandangan (cara pandang) atau falsafah hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta sekaligus menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Sebagai nilai



instrumental, nilai-nilai kebangsaan tersebut melandasi segala kegiatan pemerintahan negara, baik dalam pengelolaan pemerintahan negara maupun dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain, juga menjadi etika bagi penyelenggara negara. Sebagai jati diri bangsa, nilai-nilai kebangsaan tersebut berwujud menjadi sikap dan perilaku yang nampak pada atau ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya, bagaimana seseorang bangsa Indonesia harus bersikap dan berperilaku dalam kebersamaan sebagai anggota masyarakat, bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku sebagai komponen bangsa, serta bagaimana ia harus bersikap dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia. Nilai kebangsaan tersebut dapat menghilang apabila tidak di internalisasikan atau ditanamkan kepada generasi selanjutnya. Terutama pada generasi muda sebagai tonggak pembangunan.

### **Perspektif Teoritis Nilai-nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Bernegara**

Titik temu antara agama dan negara pada akhirnya memberi berkah bagi Indonesia menuju negara modern dan demokratis. Modernisasi dan demokratisasi memerlukan prakondisi berupa adanya kompromi antara otoritas sekuler (kebangsaan) dan otoritas agama. Tidak benar bahwa perlu ada sekularisasi (pemisahan) antara negara dan agama bagi negara modern dan demokratis. Beberapa negara di Eropa bahkan punya gereja milik negara. Di banyak negara Eropa, pemerintah memberi subsidi kepada sekolah-sekolah agama dan rumah sakit agama. Dalam bidang politik, partai-partai agama juga berperan dalam pemerintahan. Di Amerika Serikat, yang memisahkan secara tegas gereja dan negara, peran gereja dalam kehidupan masyarakat justru kuat.



Dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara.

Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat memeluk kepercayaan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain.<sup>7</sup>

Nilai-nilai ketuhanan yang dianut masyarakat berkaitan erat dengan kemajuan suatu bangsa. Ini karena nilai-nilai yang dianut masyarakat membentuk pemikiran mereka dalam memandang persoalan yang terjadi. Maka, selain karena sejarah ketuhanan masyarakat Indonesia yang mengakar, nilai-nilai ketuhanan menjadi faktor penting yang mengiringi perjalanan bangsa menuju kemajuan.

Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti persatuan, kemanusiaan,

---

<sup>7</sup> <http://diklat.bnn.go.id/wp-content/uploads/2018/02/Nasionalisme-Gol-III.pdf>, hlm. 16-18

permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai silasila yang lain dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat.

#### **D. NORMA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA BAGI PEREMPUAN INDONESIA**

Pengertian Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat dan Peraturan Setiap individu dalam kehidupan sehari-harimelakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu “tata”. Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran-ukuran. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud: perintah dan larangan. Apakah yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi norma tersebut? Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan ke-



wajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Ada bermacam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Macam-macam norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu:

- a. Norma Agama : ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa” kelak di akhirat. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Seluruh warga negara harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Menaati norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menciptakan ketertiban dan keadilan. Hal itu sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.
- b. Norma Kesusilaan : ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal dapat diterima oleh seluruh umat manusia.
- c. Norma Kesopanan : ialah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma keso-



panan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup. Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat.

- d. Norma Hukum : ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat

negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara.

Arti Penting Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain:

1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial.
2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.
3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi, hlm.72-73

Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara.

### **Perilaku sesuai dengan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari**

Norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk sosial, hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma, dan aturan tersebut wajib ditaati oleh anggota masyarakat. Penetapan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat ada yang ditentukan oleh kepala adat (tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu), ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (konsensus), baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam



kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara.

### **Hubungan Antar-Norma**

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

## **E. PENGERTIAN ETIKA DAN MORALITAS**

Dalam kehidupan masyarakat modern bahkan *post modern* dewasa ini, setiap individu anggota masyarakat dalam interaksi pergaulannya dengan anggota masyarakat lainnya atau dengan lingkungannya, tampaknya cenderung semakin bebas, leluasa, dan terbuka. Akan tetapi tidak berarti tidak ada batasan sama sekali, karena sekali saja seseorang melakukan kesalahan dengan menyinggung atau melanggar batasan hak-hak

---

<sup>9</sup> Nilai, Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat, Etika, Moral, Zoon Politikon, *Peraturan, Hukum, Penduduk, Warga Negara, Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII*, hlm.4-7



asasi seorang lainnya, maka seseorang tersebut akan berhadapan dengan sanksi hukum berdasarkan tuntutan dari orang yang merasa dirugikan hak asasinya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kondisi masyarakat dimasa lalu, yang cenderung bersifat kaku dan tertutup karena kehidupan sehari-harinya sangat dibatasi oleh berbagai nilai normatif serta tabu-tabu atau berbagai larangan yang secara adat wajib dipatuhinya. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap anggota masyarakat akan berhadapan dengan batasan-batasan nilai normatif, yang berlaku pada setiap situasi tertentu yang cenderung berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat itu sendiri. Batasan-batasan nilai normatif dalam interaksi dengan masyarakat dan lingkungannya itulah yang kemudian dapat kita katakan sebagai nilai-nilai etika. Sedangkan nilai-nilai dalam diri seseorang yang akan mengendalikannya dimunculkan atau tidaknya kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dapat kita sebut dengan moral atau moralitas.

Etika berasal dari Bahasa Yunani kuno. Dalam Bahasa Yunani disebut *ethos* yaitu bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, pada rumput, kandang kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak *ta etha* artinya adalah adat istiadat. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika”, yang oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles (384- 322 SM) menunjukkan arti sebagai filsafat moral. Jadi jika kita membatasi diri pada asal usul kata ini, maka “etika” berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat. Kata yang cukup dekat dengan “etika” adalah “moral”. Moral berasal dari Bahasa latin, *mos* fiamak : noresl yang berarti juga kebiasaan, adat. Jadi etimologi kata “etika” sama dengan



etimologi kata “moral”, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Etika dan moral, sekalipun dari Bahasa asalnya yang berbeda, namun keduanya memiliki arti yang sama secara etimologis. Perilaku yang baik mengandung nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keutamaan yang berhubungan erat dengan hakekat dan kodrat manusia yang luhur. Oleh karena itu kehidupan politik pada jaman Yunani kuno dan Romawi kuno, bertujuan untuk mendorong, meningkatkan dan mengembangkan manifestasi-manifestasi unsur moralitas.

Franz Magnis suseno mengemukakan pendapat tentang, etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Etika adalah pemikiran sistematis dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian ini perlu dicari dengan landasan pemikiran sebagai berikut:

1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral. Dalam keseharian kita banyak bertemu dan bergaul dengan berbagai orang dan karakter yang serba berbeda dari suku yang beragam, daerah asal yang bervariasi, agama berbeda, dan sebagainya. Kita ada ditengah-tengah pandangan mengenai etika dan moral yang beraneka ragam bahkan tidak jarang saling bertentangan sehingga kita bingung mengikuti moralitas yang mana. Untuk menentukan pilihan itulah perlu refleksi kritis etika.
2. Kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang kian lama menuju modernisasi. Meski masih belum dijumpai batasan baku tentang makna modernisasi,

konsep ini membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menentang pandangan-pandangan moral tradisional.

3. Proses perubahan sosial budaya dan moral ternyata tidak jarang digunakan berbagai pihak untuk memancing di air keruh. Adanya berbagai ideologi yang ditawarkan sebagai penuntun hidup, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup. Etika dapat dijadikan tatanan untuk mengkritisi secara objektif dan memberi penilaian agar tidak mudah terpancing, tidak naif, atau ekstrem untuk cepat-cepat menolak hanya karena masih relatif baru dan belum biasa.

James J. Spillane SJ berpendapat bahwa etika atau *ethics* memperhatikan dan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Lain halnya dalam kamus besar bahasa Indonesia :

1. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Moral memiliki arti,
  - a. Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, asusila;
  - b. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan. Moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kehidupan

sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang terpenting moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol untuk penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan.

Etika merupakan hasil perenungan dari moralitas yang dirasakan perludanya etika dalam kehidupan, karena merupakan kewajiban moral untuk mewujudkan sesuatu yang baik-baik bagi diri sendiri, kelompok, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pendapat Imanuel Kant, diterjemahkan oleh Lili lahjadi tentang membedakan moralitas menjadi dua:

1. Moralitas Heteronom, sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku sendiri, misalnya karena mau mencapai tujuan yang diinginkan ataupun karena perasaan takut pada penguasa yang memberi tugas kewajiban itu
2. Moralitas Otonom, kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai suatu yang dikehendaknya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik. Didalam moralitas otonom orang mengikuti dan menerima hukum bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya ataupun lantaran takut pada penguasa, melainkan itu dijadikan kewajiban sendiri berkat nilainya yang baik. Moralitas demikian menurut Kant disebut sebagai otonom kehendak yang merupakan prinsip tertinggi moralitas, sebab ia berkaitan dengan kebebasan, hal yang hakiki dari tindakan makhluk rasional atau manusia.

Pendapat lain menyatakan moral berasal dari dalam relung hati yang terdalam sehingga perbuatan baik ataupun buruk sebenarnya dirinya sendiri sebagai penilai utama, sedangkan etika merupakan manifestasi dari moral yang berasal dari adat kebiasaan dan sosial kemasyarakatan yang telah berproses menjadi suatu bentuk etika sebagai pedoman bertindak baik ranah formal maupun non formal sehingga sering dikatakan suatu perbuatan baik bila dilaksanakan maka telah beretika serta sebaliknya dikatakan tidak beretika.

Etika adalah termasuk filsafat dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Dalam konteks filsafat Yunani Kuno, etika sudah terbentuk dengan kematangan yang mengagumkan. Etika adalah ilmu, sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, tetapi sebagai filsafat ia tidak merupakan suatu ilmu empiris. Sedangkan yang biasanya dimaksudkan sebagai ilmu adalah justru ilmu empiris, artinya ilmu yang didasarkan pada fakta dalam pembicaraannya tidak pernah meninggalkan fakta. Etika adalah refleksi ilmiah tentang tingkah laku manusia dari sudut pandang norma-norma. Segi normatif itu merupakan sudut pandang yang khas bagi etika, dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain yang membahas tingkah laku manusia. Ketika kita mengatakan bahwa perbuatan seseorang tidak bermoral, maksudnya bahwa kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat, atau ketika kita mengatakan bahwa para pengedar/bandar narkoba, para koruptor, para pemerkosa mempunyai moral yang bejat, artinya mereka berpegang pada nilai-nilai dan norma yang tidak baik/sangat buruk.



## F. PENGERTIAN DAN HAKEKAT MORAL

Moral, diambil dari bahasa Latin *mos* (jamak, *mores*) yang berarti kebiasaan, adat. Sementara *moralitas* secara lughawi juga berasal dari kata *mos* bahasa Latin (jamak, *mores*) yang berarti kebiasaan, adat istiadat. Kata 'bermoral' mengacu pada bagaimana suatu masyarakat yang berbudaya berperilaku. Dan kata *moralitas* juga merupakan kata sifat latin *moralis*, mempunyai arti sama dengan *moral* hanya ada nada lebih abstrak. Kata *moral* dan *moralitas* memiliki arti yang sama, maka dalam pengertiannya lebih ditekankan pada penggunaan *moralitas*, karena sifatnya yang abstrak. *Moralitas* adalah sifat *moral* atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Senada dengan pengertian tersebut, W. Poespoprodjo mendefinisikan *moralitas* sebagai "kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. *Moralitas* mencakup tentang baik buruknya perbuatan manusia. Baron, dkk mengatakan, sebagaimana dikutip *Moral* berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan: ajaran kesusilaan. *Moralitas* berarti hal mengenai kesusilaan (Salam, 2000). Driyakara mengatakan bahwa "moral atau kesusilaan" adalah nilai yang sebenarnya bagi manusia. Dengan kata lain *moral* atau kesusilaan adalah kesempurnaan sebagai manusia atau kesusilaan sebagai tuntutan kodrat manusia (Daroeso, 1986). Kata *moral* sendiri berasal dari bahasa Latin "mores" yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat dan kebiasaan. Huky (da-



lam Daroeso, 1986) mengatakan terdapat tiga cara dalam memahami moral, yaitu:<sup>10</sup>

1. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.
2. Moral sebagai perangkat ide – ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu.
3. Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Dari beberapa pengertian moral, dapat dilihat bahwa moral memegang peran penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik buruk terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku ini mendasarkan diri pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang dikatakan bermoral, bilamana orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Seorang individu yang tingkah lakunya mentaati kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakatnya disebut baik secara moral, dan jika sebaliknya, ia disebut jelek secara moral (*immoral*). Dengan demikian moral selalu berhubungan dengan nilai-nilai. Ciri khas yang menandai nilai moral yaitu tindakan manusia yang dilakukan secara sengaja, dan tindakan itu secara langsung berkenaan dengan nilai pribadi (person) manusia dan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/2963/3/4104034\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/2963/3/4104034_Bab2.pdf)

<sup>11</sup> MOS Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo 2013/2014, *Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Moral Remaja*, hlm.2-3



## PERAN KELUARGA DALAM MENANAMKAN NILAI MORAL

Pendidikan moral atau kita kenal pendidikan budi pekerti secara operasional adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal bagi masa depannya, agar memiliki hatinurani yang bersih, berperangai baik, sertamenjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan terhadap sesama makhluk, sehingga terbentuk pribadi seutuhnya yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya berdasarkannilai-nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa. Moral berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, norma budaya/adat istiadat masyarakat. Budi pekerti akan mengidentifikasi perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian peserta didik Strategi yang dilakukan dari Kurikulum saat ini adalah pengintegrasian pendidikan moral. Pendidikan moral atau budi pekerti terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran terutama dalam pada mata pelajaran Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Secara konseptual sudah cukup bagus, tetapi jika kita lihat produknya, kemerosotan moral bangsa ini makin jelas dan kompleks. Mensikapi hal ini, tentunya segera dilakukan evaluasi dan inovasi secepatnya untuk segera menemukan formula baru untuk memperbaiki moral. Menurut Suyanto (2002) salah satu upaya dalam meningkatkan moral dan ahlak adalah melalui peran pendidikan dalam keluarga.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm.4



## PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA

Perbedaan jenis kelamin yang berimplikasi pada fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ini pada dasarnya tidak dipermasalahkan jika itu didasarkan pada pilihan sadar dan bukan unsur keterpaksaan dan atau diskriminasi. Namun ketika dicermati lebih mendalam, perbedaan dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender. Yakni salah satu jenis kelamin terutama yang banyak terjadi pada perempuan terabaikan hak-hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan, bahkan terjadi diskriminasi peran terhadap perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara kodrati dan nonkodrati.

Berbeda dengan perbedaan kodrati yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin yang perannya tidak dapat diubah dan dipertukarkan, maka perbedaan nonkodrati sangat mungkin peran masing-masing laki-laki dan perempuan dapat berubah, baik disebabkan oleh kultur maupun oleh struktur. Pada umumnya budaya di Indonesia, perempuan mempunyai peran ganda. Beberapa peran dalam keluarga yang sifatnya nonkodrati, hampir seluruhnya dibebankan kepada perempuan. Berbeda dengan laki-laki, di balik kodrat yang diembannya, perempuan tetap tidak dapat meninggalkan peran domestiknya.<sup>13</sup>

Sehingga kuatnya peran perempuan dengan tugas utama dan pertama di sektor domestik, membuat orang percaya sepenuhnya bahwa semua peran domestik itu memang garis

---

<sup>13</sup> *Peran yang berhubungan dengan urusan atau pekerjaan rumah tangga.* Widodo, et.al., Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Pembentukan Istilah (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm.107.



takdir perempuan atau kodrat yang telah diciptakan dan ditentukan Tuhan. Misalnya peran dan kedudukan perempuan menjadi ibu rumah tangga dengan semua pekerjaan yang ada di dalamnya terkesan mutlak semua milik perempuan, semutlak ia memiliki rahim atau seabsolut laki-laki memiliki sperma untuk pembuahan.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kodrati dan nonkodrati, maka perempuan mempunyai beberapa peran dalam hidupnya, terutama dalam lingkungan keluarga (peran domestik). Perempuan adalah sebagai istri (pendamping suami), pengelola rumah tangga, sebagai ibu (penerus keturunan dan pendidik anak), pencari nafkah, dan sebagai warga masyarakat. Beberapa peran pada perempuan tersebut ada yang tidak bisa digantikan oleh siapa pun walau oleh suami, seperti hamil, melahirkan dan menyusui (kodrati), sedangkan pengelola rumah tangga, pencari nafkah tambahan, keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga, memasak, dan mencuci pakaian adalah peran nonkodrati yang dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan secara bersama, atau bisa jadi secara sendirian sebagai single parent, baik laki-laki atau perempuan.

Pada umumnya peran domestik lebih banyak dipahami dan diposisikan sebagai milik perempuan yang melekat dan memiliki *stereotype* beda dengan laki-laki yang dianggap peran rendah dan tidak punya nilai. Oleh kare-

---

<sup>14</sup> Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 65

na itu, baik laki-laki maupun perempuan tidak atau kurang menghargai pekerjaan domestic ini.<sup>15</sup>

Pekerjaan yang ada dalam rumah tangga atau keluarga begitu banyak ragamnya, mulai mengatur keuangan; memasak dengan kelincahan; kepiawaian belanja yang kadang-kadang harus menyiapkan beberapa menu sesuai dengan masing-masing selera jumlah anggota keluarga, merawat dan menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan rumah; merawat, menjaga dan merawat serta mendidik anak; serta memenuhi keperluan keluarga yang lain. Begitu banyaknya pekerjaan yang harus ditangani perempuan (ibu/istri), tapi ketika ditanyakan kepada laki-laki (suami tentang pekerjaan istrinya) atau kepada perempuan (istri), hampir pasti jawabannya adalah bahwa dia tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal, dengan begitu banyak dan berat pekerjaan perempuan dinilai tidak bekerja.

## PEREMPUAN PADA MASA KOLONIALISME

Ideologi yang menekankan bahwa peran perempuan yang utama adalah disekitar rumah tangga sebagai ibu dan istri telah berabad-abad disosialisasikan dan diinternalisasikan dalam masyarakat Jawa<sup>16</sup>. Ideologi tersebut dalam masyarakat Jawa telah didefinisikan melalui hukum-hukum adat, kepercayaan-kepercayaan, negara dan pemerintah yang pernah ada dalam sejarah. Di zaman kerajaan, perempuan kelas atas digambarkan sebagai makhluk anggun, halus, rapi, tetapi tidak punya pikir tinggi dan tidak memiliki kemampuan serta tidak spiritual se-

---

<sup>15</sup> Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan: Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 63.

<sup>16</sup> Irwan Abdullah, ed. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. hlm. 90.



hingga dianggap tidak mampu menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan masyarakat<sup>17</sup>. Pandangan tersebut berbeda pada masyarakat umum atau miskin yang justru mempunyai peran ganda sebagai ibu rumah tangga (*housewifization*) dan mencari nafkah. Meskipun demikian pekerjaan perempuan dikatakan “bukan produktif”<sup>18</sup>.

Disejumlah masyarakat petani pembagian kerja berdasarkan gender merupakan cara efisien untuk menjamin kelangsungan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan tertentu<sup>19</sup>. Pemerintah kolonial mengambil peran perempuan dalam masyarakat Hindia Belanda sebagai model dan beranggapan bahwa perempuan tidak bisa dan seharusnya tidak bisa atau tidak bekerja untuk mendapat upah<sup>20</sup>. Masa liberalisasi di Hindia Belanda jumlah tenaga perempuan sedikit atau 10 : 1, sepuluh tenaga pria 1 tenaga wanita<sup>21</sup>. Lebih banyak kuli laki-laki di perkebunan berlaku untuk semuanya baik orang Eropa, Jawa, maupun Cina. Pada akhir abad ke 19 buruh perempuan hanya sekitar 10% hingga 12% dari jumlah keseluruhan buruh Asia yang berjumlah 55.000 orang lebih dan pada 1912 terdapat sekitar 100.000 di perkebunan di Deli<sup>22</sup>. Kebutuhan akan tenaga laki-laki di perkebunan Deli tidak sama dengan di perkebunan the Malabar yang justru lebih banyak buruh perempuannya.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Mansoer Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. hlm. 21.

<sup>19</sup> Julia Cleves Mosse. *Gender Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. hlm. 28,

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991, hlm. 152.

<sup>22</sup> RP Suyono. *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial. Penelusuran Kepustakaan Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005, hlm. 115-116

Sejalan dengan kebijaksanaan ekonomi kolonial adalah pengerahan tenaga kerja khususnya di Priangan, maka penyediaannya bertumpu pada kerangka rumah tangga. Dalam hal ini perempuan punya andil besar ketika sektor agraris tidak lagi mampu menampung mereka. Mengalirnya tenaga kerja perempuan di perkebunan teh merupakan fenomena yang menarik setelah terbukanya wilayah Priangan. Pengerahan tenaga kerja untuk perkebunan the dibedakan dua. Pertama, pengerahan tenaga dalam rangka kerja wajib penduduk desa. Kedua, pengerahan tenaga melalui perantara yang biasanya dikuasai oleh orang-orang Cina<sup>23</sup>. Mereka yang tergolong kerja wajib mempunyai tanggung jawab ganda yaitu sebagai tenaga kerja diperkebunan dan digaji, tetapi mereka masih punya tanggung jawab terhadap desa yaitupada penguasa desa terutama ketika penguasa memerlukan untuk panen. Pengerahan tenaga kerja perempuan melalui agen perantara Cina biasanya dengan pemberian uang muka pada perempuan-perempuan desa sebagai ikatan kerja<sup>24</sup>. Sasaran mereka adalah dari kelompok petani. Selama dalam kerjawajib desa, pihak perkebunan juga tidak membayar upah, sedangkan tenaga kerja perempuan yang jadi sasaran adalah mereka yang ditinggal suami dalam rangka mencari kerja di luar desanya.

Perlakuan gender dalam perkebunan terikat juga dengan sistem upah. Pengupaham per jam untuk buruh laki-laki berkisar antara 3-4 sen, sedangkan untuk buruh perempuan menerima 2-3 sen<sup>25</sup>. Penghasilannya yang rendah tidak men-

---

<sup>23</sup> Fatia Nadia. "Tenaga kerja Wanita di perkebunan Teh Malabar Afdeligen Cianjur Regenschapen Priangan Tahun 1880-1900". Skripsi Sarjana Fakultas Sastra UGM tahun 1987, hlm. 21..

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 22.

<sup>25</sup> Mubyarto, dkk. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1992, hlm. 111.



cukupi untuk memenuhi kehidupan keluarga. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari perempuan buruh pemetik akan mempekerjakan anak-anaknya. Perbedaan upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan juga terjadi di perkebunan Sumatera Timur yang tidak menunjukkan kenaikan selama kurang lebih 30 tahun, seperti dalam tabel dibawah ini. Permasalahan lain yang dihadapi buruh perempuan adalah produktivitasnya dinilai rendah dibanding buruh laki-laki. Padahal sebenarnya pekerjaan yang memerlukan ketekunan dan ketelitian lebih baik jika dikerjakan perempuan. Di Jawa Timur 3 perusahaan tembakau 78,3 tenaga kerjanya adalah perempuan<sup>26</sup>. Pekerjaan yang lain untuk perempuan adalah sebagai pengurus rumah tangga orang-orang Belanda atau orang-orang kaya pribumi. Pekerjaannya seperti biasa mereka lakukan dirumahnya, tetapi untuk kepentingan majikannya.

Dalam masyarakat desa pra kapitalis peran perempuan sangat penting. Lalu lintas yang ada di desa hampir semua ditanganiperempuan. Laki-laki sangat kurang tahu urusan-urusan uang dan mudah dibujuk. Jika beras simpanan habis atau menipis, suami yang ditanya akan makan dari mana, akan menjawab “terserah istri saya”<sup>27</sup>. Seorang suami petani hampir sepanjang hari membajak, mencangkul, pengawasi pengairan sawahnya serta memikul beban. Sementara istrinya menuai, menjaga ternak, menyiapkan makan, mengurus pakaian, serta membawa hasil bumi ke pasar desa. Sementara lain perempuan menenun, memintal, membakar tembikar, mengumpulkan hasil hutan serta mengemudikan perekonomian rumah tangga. Rasanya tanpa

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 126.

<sup>27</sup> JH Boeke. *Pra Kapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983. hlm. 28

bantuan perempuan tidak ada seorangpun di desa dapat hidup secara mandiri, karenanya istri dan tanah adalah hakiki bagi manusia laki-laki<sup>28</sup>.

Perempuan di pedesaan dapat dikelompokkan dalam dua peran yaitu peran tradisi dan peran transisi<sup>29</sup>. Peran tradisi atau domestik mencakup peran perempuan istri dan ibu yang mengatur rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi pengertian wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. Ketika menjalankan peran tradisi, perempuan mendampingi suami, melayani bahkan mengabdikan pada suami, mengatur, menyiapkan dan menyajikan kebutuhan pangan dan gizi seluruh keluarga. Sebagai anggota rumah tangga mendidik anak, mengelola kebersihan dan kenyamanan rumah tinggal mereka. Sementara peran transisi perempuan ikut aktif dalam kegiatan perekonomian sesuai dengan kemampuan, pendidikan dan kesempatan serta tersedianya jenis pekerjaan.

Keberadaan tenaga kerja di masa kolonial diatur dalam *Ordonance* no. 647 tahun 1925 tentang tenaga kerja anak-anak dan perempuan. Tahun 1969 keluar *Gouvernmen Declared Act* no. 14 dan Article no. 10 Ac no. 144 tahun 1969 yang mengatur: a. standar keselamatan, b. standar keselamatan kerja dan kesehatan dalam industri, c. standar tenaga kerja dan d. kompensasi kesehatan dan rehabilitasi dalam kecelakaan industri<sup>30</sup>. Kebijakan tersebut seharusnya menjadi jaminan akan keselamatan perempuan diluar rumah tangganya ketika ia tidak mendapat-

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Handewi P Suliem. "Potensi dan Partisipasi Wanita Dalam kegiatan Ekonomi Pedesaan. *Prisma Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial* No. 6 tahun 1992, LP3ES, hlm. 19

<sup>30</sup> Ninasapti Triaswati. "Woman and Children Labour Force in the Indonesia". *Indonesian Quarterly* vol. XXIV No. 1 1996, CSIS. hlm. 19-20.



kan perlindungan suaminya. Ada tiga masalah yang dihadapi perempuan bekerja: 1) Indonesia adalah negara yang pluralistik dalam etnik dan kebudayaan; 2) adanya hal itu tidak mungkin untuk membuat generalisasi bahwa perempuan berkedudukan rendah tanpa mempelajari kedudukan perempuan dalam konteks budaya dari masing-masing suku di Indonesia. Dalam masyarakat Minangkabau mendudukan perempuan sejajar dengan pria karena perempuan menjaga harta pusaka keluarga; 3) situasi dilematis yang dihadapi perempuan Indonesia merupakan hasil suatu proses interaksi dari berbagai faktor sosial dan politik yang berkembang di Indonesia<sup>31</sup>.

Keberadaan perempuan dalam sektor produksi telah menimbulkan perdebatan antara anggota *Volksraad* tahun 1925 dan wakil pemilik perkebunan, mengenai apakah perempuan diizinkan bekerja pada malam hari atau tidak<sup>32</sup>. Anggota *Volksraad* yang semua laki-laki mendukung usul yang melarang perempuan kerja malam hari, mereka beranggapan bahwa pemerintah wajib melindungi perempuan secara fisik dan perempuan juga harus berada ditengah-tengah keluarga. Kalau perempuan diizinkan kerja malam maka akan mengabaikan suami dan anak-anaknya. Keharusan berada di rumah menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk lemah. Sedangkan izin untuk bekerja adalah konsep Barat yang dipengaruhi oleh agama Kristen, yang mengajarkan perempuan adalah the Weaker Vessel, demi kepentingan perempuan sendiri maka mereka tidak diijinkan untuk bekerja di luar rumah kecuali dalam keadaan tertentu saja.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Fauzie Ridjal, dkk. Eds. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993. hlm. 108.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 109

<sup>33</sup> *Ibid*



Tenaga kerja di perkebunan tidak jarang mengalami nasib buruk, karena kedatangannya diperkebunan baik sebagai tenaga kerja atau calon istri. Para calon istri kadang tidak sampai pada calon suami karena keburu diambil orang lain. Dalam hal ini pihak atasan ikut campur dalam perjodohan tersebut. Jika pengawas Belanda menginginkan untuk dijadikan gundik atau Nyai maka perempuan diambil tanpa mengubris kepentingan calon suami<sup>34</sup>. Perjodohan seperti itu akhirnya menjadi umum dan “pergundikan” bentuk yang memenuhi kebutuhan yang mendapat toleransi masyarakat kulit putih, sedangkan kaum pribumi tak bisa berbuat apa-apa. Kehadiran perempuan di perkebunan kadang memicu konflik antara orang Jawa dan Cina atau antara orang Asia dan Belanda. Oleh karena Belanda yang pegang kekuasaan maka mereka punya hak pilih pertama<sup>35</sup>. Selanjutnya RP Suyono mencontohkan kejadian tanggal 1 Juni 1917 di Deli ada seorang administrator yang sedang bertugas memeriksa kuli laki-laki dan perempuan yang lewat, wanita yang cantik diberi tanda garis sebagai kode akan dipakai dikemudian hari. Perlakuan administrator dan asistennya tidak hanya membatasi diri pada perempuan lajang saja. Bahkan seorang kuli laki-laki mengadukannya pada yang berwenang di Deli agar istrinya yang dipakai sebagai selir oleh asisten di perkebunan dapat dikembalikan<sup>36</sup>.

Di perkebunan teh paling tidak ada tiga faktor yang mendorong masuknya buruh perempuan diperkebunan yaitu komersialisasi tanah, industri ekonomis dan tingginya tingkat pengangguran. Peneliti Fatia menjelaskan terbukanya ke-

---

<sup>34</sup> Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991, hlm. 152.

<sup>35</sup> RP Suyono. *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial. Penelusuran Kepustakaan Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005, hlm. 116

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 116-117



sempatan bagi perempuan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan telah menciptakan otonomi perempuan sepenuhnya dalam keluarga. Banyak perempuan melakukan poliandri atau menjadi istri simpanan mandor. Saat ini banyak perempuan juga meninggalkan keluarga untuk menjadi pekerja jauh dari desanya yaitu sebagai Tenaga Kerja Wanita, meskipun sering mendapat pelecehan seksual tetapi mereka tetap ingin pergi. Pelecehan seksual terhadap perempuan menurut teori feminisme sebagai akibat perbedaan jenis kelamin<sup>37</sup>. Sistem patriakal dianggap bias keladi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam sistem tersebut perempuan dianggap sebagai kelas dua baik di rumah tangga maupun di masyarakat.

### **Konsepsi Etika dan Moralitas**

Didasarkan kepada keyakinan bahwa etika dan moralitas merujuk kepada persoalan yang sama. Makna epistemologis dari kedua istilah tersebut adalah sama, meskipun istilahnya berbeda. Gering Supriyadi dalam modul “Etika Birokrasi” yang ditulisnya memberikan uraian mengenai konsepsi Etika dan Moralitas dari Solomon (1987) dan Frankena (1982) sehingga lebih jelas lagi perbedaan diantara kedua konsep tersebut. Uraian tersebut akan dikutip kembali dalam modul ini, sebagaimana berikut. Menurut Solomon, terdapat dua perbedaan antara etika, moral dan moralitas. Etika pada dasarnya merujuk kepada dua hal antara lain :

1. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat.

---

<sup>37</sup> Agus Joko Pitoyo. *Pekerja Perempuan di Luar Negeri Melawan Pelecehan, Merajud Keberdayaan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Kebijakan UGM, 2005, hlm. 24



2. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.
3. Moral, dalam pengertian umum menaruh penekanan kepada karakter atau sifat-sifat individu yang khusus, diluar ketaatan kepada peraturan. Maka moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya.
4. Sedangkan moralitas mempunyai makna yang lebih khas sebagai bagian dari etika.

Moralitas berfokus kepada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas. orang yang mengingkari janji yang terah diucapkannya dapat dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipercaya atau tidak etis tetapi bukan berarti tidak bermoral. Namun menyiksa anak atau meracuni mertua bisa disebut tindakan tidak bermoral. Jadi tekanannya disini pada unsur keseriusan pelanggaran.

Konsepsi Moralitas di sisi yang lain, dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh seseorang memiliki dorongan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika moral. Tingkat moralitas seseorang akan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman, dan karakter individu adalah sebagian diantara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat moralitas seseorang. Dorongan untuk mencari kebenaran dan kebaikan senantiasa ada pada diri manusia, yang membedakan tingkat moralitas adalah kadar kuat tidaknya dorongan tersebut (Supriyadi, 2001: 6-7).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> <http://eprints.ipdn.ac.id/23/2/ISI.pdf>, hlm.33

## **Perubahan Moralitas dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya**

Setiap manusia dalam hidupnya pasti mengalami perubahan atau perkembangan, baik perubahan yang bersifat nyata atau yang menyangkut perubahan fisik, maupun perubahan yang bersifat abstrak atau perubahan yang berhubungan dengan aspek psikologis. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam manusia (internal) atau yang berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor itulah yang akan menentukan apakah proses perubahan manusia mengarah pada hal-hal yang bersifat positif atau sebaliknya mengarah pada perubahan yang bersifat negative. Berbicara tentang pembentukan moral, maka tidak bisa lepas dari aspek perubahan atau perkembangan manusia. Tentu dalam pembentukan moral ada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti halnya perubahan manusia pada umumnya. Menurut beberapa ahli pendidikan, perubahan manusia atau yang lebih spesifik mengenai pembentukan moral dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal faktor mana yang paling dominan mempengaruhi proses perubahan tersebut. Perbedaan tersebut diakibatkan karena berbedanya sudut pandang atau pendekatan yang digunakan oleh masing-masing tokoh.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/2963/3/4104034\\_Bab2.pdf,hlm.4](http://eprints.walisongo.ac.id/2963/3/4104034_Bab2.pdf,hlm.4)

## Karakter Bangsa

Karakter secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “Kasario” berarti cetak biru atau format dasar”sidik” seperti sidik jari. Dalam hal ini Karakter adalah *Given* atau sesuatu yang sudah ada dari sananya. Namun istilah karakter sebenarnya menimbulkan ambiguitas. Tentang Ambiguitas terminologi “karakter”, Mounier (1956) mengajukan dua cara interpretasi. Ia melihat karakter sebagai dua hal, yaitu pertama sebagai sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja dalam diri kita, karakter yang demikian ini dianggap sebagai sesuatu yang telah ada/ kodrat (*given*). Kedua karakter juga bisa dipahami sebagai tingkat kekuatan melalui nama seseorang individu mampu menguasai kondisi tersebut. Karakter yang demikian disebutnya sebagai sebuah proses yang dikehendaki (*willed*).

## Pengertian Identitas Nasional

Istilah identitas nasional (*national identity*) berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas (*identity*) secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jatidiri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain (ICCE, 2005:23). Sedangkan kata nasional (*national*) merupakan identitas yang melekat pada kelompok- kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok (*collective action* yang diberi atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-



atribut nasional (ICCE, 2005:25). Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah.<sup>40</sup>

Faktor-faktor Identitas Nasional Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi:

---

<sup>40</sup> Dwi Sulisworo, dkk, 2012, *Identitas Nasional, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan* | Hibah Pembelajaran Non Konvensional, hlm.5-6

1. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis ekologis dan demografis Kondisi geografi-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.
2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia (Suryo, 2002).

Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia, yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20.

### **Unsur-unsur Identitas Nasional**

Identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentukan identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa.

- 1) **Suku bangsa** : adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang mana coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia

terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.

- 2) **Agama** : bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agam resmi negara namun sejak pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.
- 3) **Kebudayaan** : adalah pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukungpendukung untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
- 4) **Bahasa** : merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perambang yang secara arbiter dibentuk atas unsurunsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Dari unsur-unsur Identitas nasionak tersebut diatas dapat dirumuskan pembagiannya menjadi dua bagian sebagai berikut :



- 1) Identitas Fundamental; yaitu Pancasila yang merupakan falsafat bangsa, dasar negaram dan ideologi negara
- 2) Identitas instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata Perundang-undangan, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”<sup>41</sup>

## **Faktor-faktor Pembentuk Identitas Nasional**

### **a. Primordialisme**

Kata kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa dan adat istiadat merupakan faktor-faktor primordial yang dapat membentuk bangsa-bangsa. Primordialisme tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama, tetapi juga melahirkan persepsi yang sama tentang masyarakat negara yang dicita-citakan. Walaupun ikatan kekerabatan dan kesamaan budaya itu tidak menjamin terbentuknya suatu bangsa, karena mungkin ada faktor yang lain yang lebih menonjol, namun kemajemukan secara budaya mempersukar pembentukan suatu nasionalisme baru (bangsabungsa) karena perbedaan ini akan melahirkan konflik nilai.

### **b. Keagamaan (Sakralitas Agama)**

Kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat, atau ikatan ideologi doktriner yang kuat dalam suatu masyarakat merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa-nega-

---

<sup>41</sup> Rowland B. F. Pasaribu, *Bab 3 Identitas Nasional*, hlm. 50-51

ra. Ajaran-ajaran agama dan ideologi doktriner tidak menggambarkan semata-mata bagaimana seharusnya hidup (dalam hal ini cara hidup yang suci, agama menjanjikan surga, *ideologi doktriner* menjanjikan masyarakat tanpa kelas), karena menggambarkan cara hidup yang seharusnya dan tujuan suci. Walaupun kesamaan agama atau ideologi tidak menjamin bagi terbentuknya suatu bangsa-negara, sebagaimana ditunjukkan dengan kenyataan lebih dari sepuluh Negara Arab untuk Islam, puluhan negara Amerika Latin untuk Katholik, dan sejumlah negara komunis, namun faktor ini ikut menyumbangkan bagi terbentuknya satu nasionalitas.

### **c. Pemimpin Bangsa**

Kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Pemimpin ini menjadi panutan sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai “penyambung lidah” masyarakat. Berdasarkan masyarakat yang tengah membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya. Kemudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti tokoh dwitunggal Sосkarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito di Yugoslavia.

#### **d. Sejarah Bangsa**

Persepsi yang sama tentang asal-usul (nenek moyang) dan/atau persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti penderitaan yang sama yang disebabkan dengan penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas (sependeritaan dan sepenanggungan), tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antar kelompok masyarakat. Solidaritas, tekad, dan tujuan yang sama itu dapat menjadi identitas yang menyatukan mereka sebagai bangsa sebab hal-hal ini akan membentuk konsep ke-kita-an dalam masyarakat. Sejarah tentang asal-usul dan pengalaman masa lalu ini biasanya dirumuskan (cenderung didramatisasikan), dan disosialisasikan kepada seluruh anggota masyarakat melalui media massa (film dokumenter, film cerita, dan drama melalui televisi dan radio). Khusus bagi generasi baru, konsep sejarah ini disampaikan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah dalam mata ajaran Sejarah Perjuangan Bangsa (Sejarah Nasional).

#### **e. Perkembangan Ekonomi**

Perkembangan ekonomi (industrialisasi) akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan semakin bervariasi kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat saling bergantung di antara berbagai jenis pekerjaan. Setiap orang bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin kuat suasana saling bergantung antar anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi maka semakin besar pula solidaritas dan persatuan dalam



masyarakat. Solidaritas yang ditimbulkan dengan perkembangan ekonomi itu disebutkan oleh pula sebagai solidaritas organis. Hal ini berlaku dalam masyarakat industri maju, seperti Eropa Barat, Jepang, dan Amerika Utara.

### **Parameter Identitas Nasional**

Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat dan teknologi, sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis. Sesuatu yang terjadi dalam suatu inasyarakat dan mencari ciri atau identitas nasional biasanya mempunyai indikator sebagai berikut :

1. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud niclalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat-istiadat dan tata kelakuan.
2. Lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan.
3. Alat-alat pelengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan

manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan yang merupakan tempat ibadah (borobudur, prambanan, masjid dan gereja), peralatan manusia (pakaian adat, teknologi bercocok tanam), dan teknologi (pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain).

4. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, seperti di Indonesia dikenal dengan bulu tangkis.

### **Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional.**

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dengan negara yang lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat trans nasional menjadi semakin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain terkait dengan masalah narkoba, pencucian uang (*money laundering*), peredaran dokumen keimigrasian palsu dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi mulai memudar. Hal ini ditunjukkan dengan semakin merajalelanya peredaran narkoba dan psikotropika sehingga sangat merusak kepribadian dan moral bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa. Jika hal tersebut tidak dapat dibendung maka akan mengganggu terhadap ketahanan nasional di segala aspek kehidupan bahkan akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai identitas nasional.



## **Integrasi Nasional Indonesia dan Identitas Nasional**

Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Untuk mewujudkannya diperlukan keadilan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik disamping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Dengan demikian upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu terus dilakukan agar terwujud integrasi Bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakekatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan. Pada akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman dan tentram. Jika melihat konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, Kalimantan Barat dan Papua merupakan cermin dan belum terwujudnya Integrasi Nasional yang diharapkan. Sedangkan kaitannya dengan Identitas Nasional adalah bahwa adanya integrasi nasional dapat menguatkan akar dari Identitas Nasional yang sedang dibangun.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 51-53

## Kesatuan dalam Membentuk Identitas Nasional

Sebagai sebuah negara kesatuan (unitary state), sudah selayaknya dipahami benarmakna “kesatuan” tersebut. Dengan memahami secara benar makna kesatuan, diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki pandangan, tekad, dan mimpilndikator Keberhasilan.

Filosofi dasar persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditemukan pertama kali dalamkitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam kitab itu ada tulisan berbunyi “*Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa*”, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua”. Frasa inilah yang kemudian diadopsi sebagai semboyan yang tertera dalam lambing negara Garuda Pancasila. Semangat kesatuan juga tercermin dari Sumpah Palapa Mahapatih Gajah mada. Sumpah ini berbunyi: *Sira Gajah Mahapatih Amangku bhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dampo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”*.

Terjemahan dari sumpah tersebut kurang lebih adalah: Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “*Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa*”.



Informasi tentang Kitab Sutasoma dan Sumpah Palapa ini bukanlah untuk bernostalgia ke masa silam bahwa kita pernah mencapai kejayaan. Informasi ini penting untuk menunjukkan bahwa gagasan, hasrat, dan semangat persatuan sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia. Namun dalam alam modern pun, semangat bersatu yang ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa terasa sangat kuat.

Jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, misalnya, para pemuda pada tahun 1928 telah memiliki pandangan sangat visioner dengan mencita-citakan dan mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang betbangsa dan bertanah air Indonesia, serta berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itu, jelas belum ada bahasa persatuan. Jika pemilihan bahasa nasional didasarkan pada jumlah penduduk terbanyak yang menggunakan bahasa daerah tertentu, maka bahasa Jawalah yang akan terpilih. Namun kenyataannya, yang terpilih menjadi bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan tidak adanya sentimen kesukuan atau egoisme kedaerahan. Mereka telah berpikir dalam kerangka kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dengan demikian, peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah inisiatif original dan sangat jenius yang ditunjukkan oleh kalangan pemuda pada masa itu. Peristiwa inilah yang membentuk dan merupakan kesatuan psikologis atau kejiwaan bangsa Indonesia.

Selain kesatuan kejiwaan berupa Sumpah Pemuda tadi, bangsa Indonesia juga terikat oleh kesatuan politik



kenegaraan yang terbentuk dari pernyataan kemerdekaan yang dibacakan Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia secara resmi menjadi entitas politik yang merdeka, berdaulat, dan berkedudukan sejajar dengan negara merdeka lainnya. Makna kesatuan selanjutnya adalah kesatuan geografis, teritorial atau kewilayahan. Kesatuan kewilayahan ini ditandai oleh Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang menjadi tonggak lahirnya konsep Wawasan Nusantara. Dengan adanya Deklarasi Juanda tadi, maka batas laut teritorial Indonesia mengalami perluasan dibanding batas teritorial sebelumnya yang tertuang dalam *Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie 1939* (Ordinasi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) peninggalan Belanda. Deklarasi Juanda ini kemudian pada tanggal 18 Februari 1960 dalam Undang-Undang No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia. Konsep Wawasan Nusantara sendiri diakui dunia internasional pada tahun 1978, khususnya pada Konferensi Hukum Laut di Geneva. Dan puncaknya, pada 10 Desember 1982 konsep Wawasan Nusantara diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau lebih dikenal dengan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS Dengan penegasan batas kedaulatan secara kewilayahan ini, maka ide kesatuan Indonesia semakin jelas dan nyata.

Konsep kesatuan psikologis (kejiwaan), kesatuan politis (kenegaraan) dan kesatuan geografis (kewilayahan) itu-



lah yang membentuk “ke-Indonesia-an” yang utuh, sehingga keragaman suku bangsa, perbedaan sejarah dan karakteristik daerah, hingga keanekaragaman bahasa dan budaya, semuanya adalah fenomena ke-Indonesia-an yang membentuk identitas bersama yakni Indonesia. Sebagai sebuah identitas bersama, maka masyarakat dari suku Dani di Papua, misalnya, akan turut merasa memiliki seni budaya dari suku Batak, dan sebaliknya. Demikian pula, suku Betawi dan Jakarta memiliki kepedulian untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan pranata sosial di suku Dayak di Kalimantan, dan sebaliknya. Hubungan harmonis seperti ini berlaku pula untuk seluruh suku bangsa di Indonesia. Ibarat tubuh manusia, jika lengan dicubit, maka seluruh badanpun akan merasa sakit dan turut berempati karenanya. Dengan demikian, Indonesia adalah melting pot atau tempat meleburnya berbagai keragaman yang kemudian bertransformasi menjadi identitas baru yang lebih besar bernama Indonesia. Indonesia adalah konstruksi masyarakat modern yang tersusun dari kekayaan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ideologi yang tersebar di bumi nusantara. Gerakan separatisme atau upaya-upaya kearah disintegrasi bangsa, adalah sebuah tindakan ahistoris yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan tersebut.

Disamping kesatuan psikologis, politis, dan geografis diatas, penyelenggaraan pembangunan nasional juga harus didukung oleh kesatuan visi. Artinya, ada koherensi antara tujuan dan cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang

dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, hingga Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, maka program-program pembangunan di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pada hakekatnya membentuk derap langkah yang serasi menuju kepada titik akhir yang sama. Bahkan keberadaan lembaga politik, pelaku usaha sektor swasta, hingga organisasi kemasyarakatan (*civil society*) sesungguhnya harus bermuara pada tujuan dan cita-cita nasional tadi. Ini berarti pula bahwa pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bukanlah tanggungjawab dari seseorang atau instansi saja, melainkan setiap warga negara, setiap pegawai/pejabat pemerintah, dan siapapun yang merasa memiliki identitas ke-Indonesia-an dalam dirinya, wajib berkontribusi sekecil apapun dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

## Daftar Pustaka

### Referensi Buku

- Abdullah, Irwan. (1997). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- JH, Boeke. (1983). *Pra Kapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2006). *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Mansoer, Fakh. (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marbun, S. F. (1997). *Peradilan Administrasi dan Upaya administratif di Indonesia*. liberty, Yogyakarta.
- Mosse, Julia Cleves. (1996). *Gender Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubyarto, dkk. (1992). *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Munir, Misbahul. (2010) *Produktivitas Perempuan: Studi Analisis Produktivitas Perempuan dalam Konsep Ekonomi Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Nadia, Fatia. (1987). "Tenaga kerja Wanita di perkebunan Teh Malabar Afdelingen Cianjur Regenschapen Priangan Tahun 1880-1900". Skripsi Sarjana Fakultas Sastra UGM tahun 1987, hlm. 21.
- Ninasapti, Triaswati. (1996). "Woman and Children Labour Force in the Indonesia". Indonesian Quarterly Vol. XXIV No. 1 1996, CSIS.

- Pitoyo, Agus Joko. (2005). *Pekerja Perempuan di Luar Negeri Melawan Pelecehan, Merajud Keberdayaan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Kebijakan UGM.
- Politikon, Zoon. *Nilai, Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat, Etika, Moral, Peraturan, Hukum, Penduduk, Warga Negara, Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII*.
- Purbopranoto, Kuntjoro. (1981). *Perkembangan hukum dan administrasi Indonesia*. Bincipta. Bandung.
- Ridjal, Fauzie, dkk. Eds. (1990). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- RP Suyono. (2005). *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial*. Penelusuran Kepustakaan Sejarah. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sartono, Kartodirdjo dan Djoko Suryo. (1991). *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suliem, Handewi P. (1992). "Potensi dan Partisipasi Wanita Dalam kegiatan Ekonomi Pedesaan." Prisma Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial No. 6 tahun 1992, LP3ES.
- Sulisworo, Dwi, dkk, (2012). *Identitas Nasional, Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional*.
- Yamin, moh. (1960). *Naskah Persiapan undang undang dasar 1945 jilid III*. Yayasan prapantja. Jakarta.
- Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI, Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan I*.

Widodo, et.al. (2002). *Peran yang berhubungan dengan urusan atau pekerjaan rumah tangga*. Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Pembentukan Istilah. Yogyakarta: Absolut.

**Referensi Internet**

<http://diklat.bnn.go.id/wp-content/uploads/2018/02/Nasionalisme-Gol-III.pdf>

[http://eprints.walisongo.ac.id/2963/3/4104034\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/2963/3/4104034_Bab2.pdf)

<http://eprints.ipdn.ac.id/23/2/ISI.pdf>

[http://eprints.walisongo.ac.id/2963/3/4104034\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/2963/3/4104034_Bab2.pdf)



## MODUL KEDUA

# BELA NEGARA DI LINGKUNGAN PEREMPUAN INDONESIA



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA





## MODUL 2

### BELA NEGARA DI LINGKUNGAN PEREMPUAN INDONESIA

Materi	Modul ini berisi pengetahuan dasar tentang peran perempuan dalam usaha bela negara terutama bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai bela negara yang terdiri atas Cinta Tanah Air, Kesadaran Berbangsa & bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa & negara serta memiliki kemampuan awal bela negara di lingkungan rumah/tempat tinggalnya, disekolah maupun ditempat bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan gender,
Kompetensi Utama	Peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai bagaimana kaum perempuan dapat melakukan kegiatan dalam usaha pembelaan negara di lingkungan rumah/tempat tinggal, di sekolah dan ditempat bekerjanya berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Kompetensi Pendukung	<p>Pada akhir sesi pembelajaran, peserta diharapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu menjelaskan bagaaimana konsep bela negara dapat dilakukan oleh kaum perempuan dilingkungan rumah/ tempat tinggalnya , disekolahmaupun dilingkungan tempat bekerjanya.</li><li>2. Dapat menunjukkan contoh-contoh bagaimna bentuk usaha bela negara yang dilakukan oleh kaum perempuan dilingkungan rumah/tempat tinggalnya, di sekolah atau di lingkungan kerjanya berdasarkan prinsip kesetaraan jender.</li><li>3. Dapat menjelaskan hubungan bela negara dengan aktivitas perempuan baik dilingkungan rumah/tempat tinggalnya, diskolah maupun di tempat bekerja.</li></ol>
----------------------	--

## SESI 2 : BELA NEGARA DI LINGKUNGAN PEREMPUAN INDONESIA

❑ **Waktu :** 120 Menit

❑ **Kompetensi Utama:**

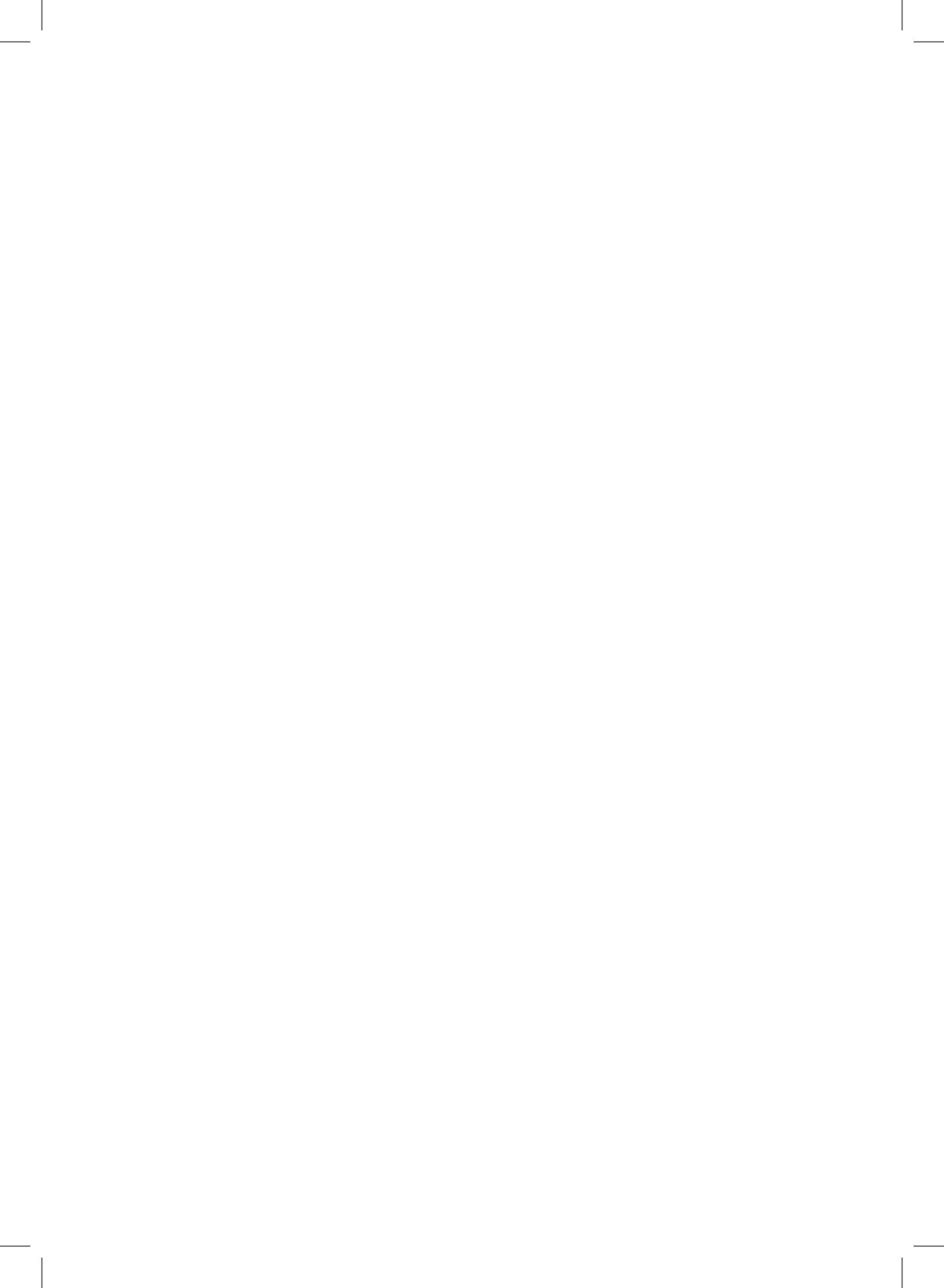
Peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai bagaimana kaum perempuan dapat melakukan kegiatan dalam usaha usaha pembelaan negara dilingkungan rumah/tempat tinggal, di sekolah dan ditempat bekerjanya berdasarkan prinsip prinsip kesetaraan gender.

❑ **Kompetensi Pendukung :**

1. Mampu menjelaskan bagaimana konsep bela negara dapat dilakukan oleh kaum perempuan di lingkungan rumah/tempat tinggalnya , disekolah maupun di lingkungan tempat bekerjanya .
2. Dapat menunjukkan contoh-contoh bagaimana bentuk usaha bela negara yang dilakukan oleh kaum perempuan di lingkungan rumah/tempat tinggalnya, di sekolah atau di lingkungan kerjanya berdasarkan prinsip kesetaraan jender.
3. Dapat menjelaskan hubungan aktivitas perempuan dalam kegiatan bela negara dengan baik dilingkungan rumah/tempat tinggalnya, disekolah maupun di tempat bekerja.

- ❑ **Metode:**
  1. Curah pendapat
  2. Diskusi kelompok
  
- ❑ **Alat/bahan:**
  1. Spidol, lem, lakban
  2. Metaplan merah dan biru
  3. Flipchart, kertas piano
  4. Lembar kegiatan bela negara
  5. Presentasi ppt
  6. Film pendek
  
- ❑ **Alur Fasilitasi:**
  1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi dan pemahaman umum.
  2. Curah pendapat. Fasilitator mengajak peserta untuk memahami contoh contoh perilaku sehari hari tentang rasa Cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa & bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, Rela berkorban untuk bangsa & negara serta memiliki kemampuan awal bela negara, masing masing contoh diberikan diatas metaplan warna biru, hijau,kuning,merah dan putih. Lalu ditempelkan di *flipchart*.
  3. Fasilitator mengklasifikasi jawaban peserta, menampilkan daftar pengertian tentang contoh kegiatan bela negara tersebut dan hasil jawaban peserta. Ajak peserta mendiskusikan hal tersebut.

4. Fasilitator menayangkan presentasi PP tentang kegiatan bela negara yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan .
5. Fasilitator membagi peserta ke dalam 4 kelompok.
6. Setelah mendiskusikan formulir tersebut, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
7. Fasilitator menayangkan presentasi PP tentang berbagai bentuk kegiatan bela negara yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan.
8. Di akhir sesi, fasilitator menayangkan film pendek. Ajak peserta mendiskusikan secara cepat pesan film pendek tersebut.
9. Fasilitator menutup sesi dengan menjelaskan hasil pembelajaran.



## MODUL 2

# WAWASAN KEBANGSAAN DAN TEORI BELA NEGARA DIKAITKAN DENGAN PEREMPUAN INDONESIA

### URGENSI PEMBAHASAN TENTANG BELA NEGARA

Urgensi pembahasan bela negara timbul dari keresahan negara akan ancaman-ancaman yang datang dari dalam dan dari luar, dengan tujuan utama untuk melemahkan generasi muda, sehingga negara akan dengan mudah dikuasai dan dihancurkan. Oleh sebab itu, dalam mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pertahanan menjadi pionir dalam menggemakan kembali konsep Bela Negara bagi perempuan Indonesia dalam perspektif perustamaan gender di era generasi milenial.

Konsep bela negara bagi perempuan ini merupakan sebuah konsep yang lahir dari proses panjang berbangsa dan bernegara, bahkan sejak Indonesia masih disebut dengan Nusantara. Konsep bela negara ini, yang sekarang sudah diatur dengan baik, ini merupakan perwujudan dari keseriusan pemerintah dalam mengembalikan jati diri bangsa yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945, tanpa ada kompromi lagi terhadap hal-hal yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya perang non-fisik.

Perang dapat terjadi pada semua aspek salah satunya adalah dari aspek kultur, karena perang masa kini tidak



lagi dengan cara mengerahkan kekuatan Alutsista dan bukan pula menguasai ruang wilayah, akan tetapi menguasai sumber-sumber perekonomian termasuk menguasai aturan hukum (*rule of law*) dari sebuah Negara, misalnya cuci otak dengan tujuan agar menggantikan Pancasila dgn terlebih dulu mengubah UUD 1945 dengan cara menimbulkan kekaucauan dengan perselisihan berwarna SARA, kemudian infiltrasi ke dalam negara dalam bentuk Ipoleksosbudaghankam (Menhan FGD II Sun Kur BN 13 November 2015).

Terkait dengan hal itu, bela negara bagi perempuan amat urgensi untuk diterapkan, sebagai sebuah kebutuhan bangsa Indonesia masa kini dalam memperlengkapi diri hidup di iklim berdemokrasi. Diharapkan secara maksimal bangsa Indonesia dapat dengan pintar menempatkan diri sebagai individu WNI yang membela negara di atas segala hal, namun selaras dengan asas-asas HAM dan demokrasi. *Cross-cutting* di antara ketiga hal tersebut itulah yang menjadikan penelitian bela negara ini menjadi sebuah penelitian yang amat menarik untuk dilakukan.

Seperti judul modul tentang konsep bela bagi kaum perempuandi negara modern, maka kita perlu juga membahas unsur-unsur modernisme, antara lain masalah gender, keterbukaan informasi, profesionalisme, ketepatan waktu, tepat sasaran, dan menghasilkan profit. Unsur-unsur ini pertama-tama harus dilihat sebagai tantangan di era globalisasi yang erat dengan kompetisi ekonomi dan kewirausahaan, dimana masing-masing individu dituntut untuk selalu terdepan dan terbaik.



Dalam kaitannya dengan unsur-unsur modernisme itu, Indonesia dapat memperkuat posisi diplomasinya dengan lebih aktif berperan dalam mewujudkan perdamaian regional, terutama dalam isu Afganistan, Palestina, dan Rohingnya. Mayoritas Muslim Sunni Indonesia haruslah memiliki kedewasaan dalam berbangsa, bernegara, dan beragama, sehingga tidak mencampuradukkan ideologi lain ke dalam Pancasila, serta tidak mencari ideologi baru. Seni dalam berpikir jernih tentu tidak didapat tiba-tiba, tetapi memerlukan proses, terutama membaca buku, berdiskusi, ikut konferensi internasional, dan mengikuti modul-modul bela negara yang sudah dibuat oleh Ditjen Potan Kemhan RI.

Dalam kaitan antara bela negara dan kedudukan Indonesia di ASEAN, maka perlu diingat bahwa ASEAN sekarang sudah mengubah wajah pertahanannya menjadi “*Our Eyes*”, sehingga efeknya adalah intelijen Indonesia harus mampu memilah-milah informasi yang bisa diberikan secara kolektif, namun jangan pernah mengirimkan data postur pertahanan RI. Disinilah intelijen dituntut perannya dalam membela negara secara intelektual.

Konsep bela negara modern itu sendiri bukanlah sebuah konsep baru yang berseberangan dengan pakem yang sudah dibuat, namun di dalam konsep itu didefinisikan kembali apa itu bela negara masa kini dan bagaimana menghadapi ancaman per ancaman secara rinci, dan apabila perlu dijelaskan pula lingkungan strategis dan konteks politik yang menjadi latar belakang ancaman itu, dan bagaimana ancaman bisa masuk dengan mudah ke tubuh bangsa dan ne-

gara Indonesia. Sebab apabila ancaman itu telah berhasil diidentifikasi, maka negara akan dengan cepat, tanggap, dan senyap dalam melakukan pengawasan dan tindakan, sertaantisipasi.

Secara demokrasi, para ahli HAM seringkali mengingatkan bahwa proses perjuangan HAM merupakan bagian dari kehidupan bernegara, oleh sebab itu HAM juga perlu digaris bawahi di dalam konsep bela negara; dalam pengertian bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga kegiatan-kegiatan bela negara itu akan menjadi napas kehidupan setiap insan Indonesia secara autopilot, tanpa harus ada paksaan.

Selain itu, dalam mewujudkan *civil society* yang madani, maka arus keterbukaan informasi merupakan suatu kondisi ilmiah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, namun sayangnya bangsa Indonesia dilanda isu berita bohong sebagai pemanas tahun politik. Isu ini dapat diantisipasi dengan peran semua WNI sebagai wujud nyata bela negara, yakni melakukan klarifikasi sebelum membagikan berita di media sosial, banyak membaca untuk meningkatkan wawasan pengetahuan umum dan daya pikir, banyak terlibat kegiatan diskusi, serta meningkatkan kapabilitas diri sesuai fungsi dan satuan kerja masing-masing, sehingga waktu dipergunakan dengan bijak bagi kemajuan diri, yang juga turut berarti bagi kemajuan bangsa.



Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tourraine, alokasi waktu merupakan ciri khas orang modern yang penting dalam melakukan kegiatan-kegiatan bela negara, sebab pihak-pihak yang mau menghancurkan NKRI juga mengalokasikan waktu mereka, sehingga kita sebagai WNI yang baik, haruslah bersikap luwes dan siap sedia dalam membagi waktu dengan baik, sehingga tidak ada waktu yang terbuang percuma, tanpa ada prestasi yang mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia.

Sebelum membicarakan tentang peran perempuan dalam bela negara, menjadi amat krusial untuk mengingatkan kembali bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan mungkin terjadi tanpa melibatkan perempuan. Tentara yang kuat pasti lahir dari didikan seorang ibu yang tangguh. Siapapun di dunia ini mengalami kehidupan di dalam kandungan selama 9 (sembilan) bulan 10 hari, disapih, dan merangkak. Tidak ada orang yang hebat langsung berjalan, namun setiap orang pasti melewati masa bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa.

Penyair India terkenal Rabindranath Tagore pernah mengatakan bahwa perempuan adalah akar kehidupan karena di dalam diri perempuan lah kehidupan manusia dimulai, oleh sebab itu siapa saja menghormati perempuan, maka ia menghormati kehidupan itu sendiri. Menurut Indeks Kemanusiaan PBB, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masih belum menghormati perempuan secara utuh; dalam pengertian penegakan hukum untuk kasus-kasus perlindungan perempuan --seperti misalnya

pemeriksaan, upah buruh, perempuan, TKI, dan hak reproduksi perempuan, saat ini mungkin termasuk isu pelakor--masih amat lemah.

Di dalam konteks ideal, negara haruslah menghormati setiap perempuan di dalam negaranya. Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler, sehingga interpretasi negara terhadap perempuan haruslah didasarkan pada rasionalitas kebutuhan berbangsa dan bernegara, yang artinya setiap WNI perempuan merupakan aset penting dalam mendukung dan melaksanakan program-program bela negara.

## **Modul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara**

Melihat ancaman-ancaman yang ada saat ini, program bela negara perlu disebarluaskan ke seluruh Indonesia dalam bentuk pembelajaran yang interaktif, dapat berupa Moodle dan Aplikasi Bergerak Bela Negara di dalam Google Play dengan sasaran anak muda umur 17-25 tahun, sehingga anak muda Indonesia dapat menempatkan Pancasila dan UUD 1945 dalam memandang segala hal kehidupan. Untuk dapat menjamin program bela negara berjalan dengan baik, maka keaktifan mereka dinilai sebagai poin tersendiri oleh Guru atau Dosen mereka. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dalam hal ini sebagai penyokong dana dan Universitas Pertahanan akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan sosialisasi dan pembuatan aplikasi tersebut, serta melakukan FGD lanjutan apabila diperlukan.



Modul bela negara yang dikonsepsikan ini memiliki unsur-unsur bela negara, yang tidak dirinci dalam tiap aktivitas/kegiatan, namun menjadi ciri khas aktivitas/kegiatan tersebut. Unsur-unsur Dasar Bela Negara yang dimaksud antara lain:

1. Cinta Tanah Air
2. Kesadaran Berbangsa & bernegara
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
4. Rela berkorban untuk bangsa & negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara

### **Contoh-Contoh penerapan nilai-nilai Bela Negara tersebut antara lain:**

#### **1. Melestarikan budaya**

Secara umum, UNESCO membagi kategorisasi budaya ke dalam 2 (dua) jenis, yakni terlihat (*tangible*) dan tak terlihat/tak benda (*intangible*). Oleh sebab itu di dalam kategori yang *tangible*, perempuan Indonesia melestarikan budaya daerahnya dengan cara ikut les tarian tradisional dan mengetahui cara memasak makanan tradisional, walaupun di dalam kegiatan *tangible* tersebut sebetulnya juga sudah mencakup unsur *intangible*.

Untuk kategori *intangible*, perempuan Indonesia juga dapat memahami bersikap dan berbudaya seperti bangsa Indonesia di dalam forum akademik maupun konferensi internasional. Seperti misalnya mengikuti ajang pemilihan bakat dan

kecantikan dengan menggunakan tenun tradisional, namun apabila diwawancara oleh wartawan internasional, mereka juga harus memahami sejarah bangsa Indonesia, sehingga tidak memalukan bangsa Indonesia atau tidak hanya sekedar diukur dari kecantikannya.

## **2. Belajar dengan rajin bagi para pelajar**

Jumlah pelajar perempuan masih melebihi jumlah pelajar laki-laki, namun mayoritas disini bukanlah menjadi parameter agar pelajar perempuan lebih banyak belajar daripada pelajar laki-laki, namun menjadi salah satu faktor pembangunan masa depan bangsa bahwa pelajar perempuan sudah seharusnya mendapatkan hak yang sama, jangan ada perbedaan peran gender. Sebagai contoh pelajar perempuan dapat menjadi Ketua OSIS, Komandan Menwa, Komandan Paskibraka, dan lain sebagainya.

## **3. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara**

Perempuan Indonesia yang baik adalah mereka yang mencintai Indonesia, oleh sebab itu mereka harus memahami segala peraturan yang berlaku yang berkenaan dengan jabatan atau kepangkatannya, serta hak dan kewajibannya. Sebagai contoh mengerti tentang peraturan bela negara, membaca modul bela negara, turut aktif sebagai peserta atau trainer pelatihan bela negara, dan lain sebagainya.

## **4. Mencintai produk-produk dalam negeri**

Produk dalam negeri Indonesia bisa saja belum sebaik produk luar, namun apresiasi dari bangsa sendiri amat diper-



lukan, sebagai contoh perempuan Indonesia dapat menggunakan alat-alat kecantikan atau make up dari *beauty product* lokal, seperti misalnya jamu pelangsing, lulur mandi, minuman kesehatan, dll.

Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap perempuan Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti (Subagyo, 2014, p.6):

- (1) Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling);

Perempuan tentu saja tidak perlu ikut siskamling karena kegiatan tersebut untuk kaum laki-laki, namun sebagai perempuan Indonesia yang baik, dapat turut mendukung kelancaran siskamling seperti misalnya membuatkan kopi untuk petugas siskamling, membangun suami yang akan ikut siskamling, dan menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk siskamling.

- (2) Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri;

Saat ini telah banyak komunitas yang berfokus pada *post-disaster peacebuilding*. Dari pemberitaan, cukup banyak voluntir perempuan yang turut ambil bagian, terutama mahasiswa Mapala atau Menwa. Perempuan lebih luwes dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, serta lebih banyak menggunakan perasaan dan memiliki rasa penyayang yang tinggi, oleh sebab itu kebutuhan voluntir sering kali melibatkan perempuan.



Contoh di luar negeri LSM MSF lebih banyak mengirimkan dokter-dokter perempuan ke daerah konflik bagi ibu-ibu yang tengah mengandung atau melahirkan di zona konflik karena kehadiran mereka dianggap “sesama teman perempuan” yang lebih mampu mengenal kebutuhan-kebutuhan atau urusan-urusan perempuan.

- (3) Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN;

PPKn dahulu merupakan pelajaran yang membosankan karena terlihat hanya sekedar kata-kata bijaksana dan moralitas, akan tetapi justru penerapannya menjadi sulit di masa milenial ini. Sebab sejatinya rasa nasionalisme dapat berjalan beriringan dengan rasa religiusitas. Saat ini radikalisme yang marak terjadi seolah-olah berhadapan-hadapan dengan perjuangan membela HAM, padahal seseorang yang religius sudah dianggap memahami HAM yang terkandung di dalam religiusitas itu sendiri. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah terutama Kemendikbud dalam hal pembaharuan kurikulum PPKn yang lebih mengena pada problematika perempuan masa kini, seperti misalnya bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga yang baik agar terbebas dari hutang, bagaimana meningkatkan pendidikan dan *skill*, belajar bahasa lokal, menjadi guru di daerah terpencil, dan lain sebagainya.

- (4) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka. Sebagai warga negara yang baik

sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadaikan dan mengatasi berbagai macam ATHG/ ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI/ Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI. Nilai-nilai bela negara sudah semestinya ditanamkan sejak dini. Murid-murid perempuan perlu diajarkan bagaimana bersikap secara sopan santun dan beretika, serta di kalangan profesional maupun lingkungan pekerjaan, perempuan Indonesia haruslah memiliki kemampuan bela negara yang mumpuni, seperti misalnya ikut aktif bernyanyi Indonesia Raya setiap upacara, rajin apel pagi bagi ASN, bekerja sesuai tanggungjawabnya, tidak korupsi, dan lain sebagainya.

Subagyo<sup>1</sup> (2014, p.66-69) mengatakan alternatif meningkatkan kesadaran bela negara di tengah masyarakat Indonesia dapat dipetakan sebagai berikut:

### 1. Aspek Ideologi

- ❑ Meningkatkan sosialisasi empat pilar kebangsaan di tengah masyarakat, khususnya kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh intelektual, dll.
- ❑ Meningkatkan sosialisasi empat pilar kebangsaan di berbagai lembaga pendidikan agama, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi melalui revisi kurikulum atau muatan mata pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

---

<sup>1</sup> Dalam bukunya, *Bela Negara: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*.



- ❑ Membuat leaflet, brosur, pamflet, baliho, dan spanduk tentang empat pilar kebangsaan yang disebar dan dipasang di berbagai tempat umum sehingga dapat diakses oleh setiap masyarakat.
- ❑ Melakukan pelatihan TOT Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Bela Negara kepada tokoh adat dan tokoh agama sebagai alat yang ampuh untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan di tengah masyarakat.
- ❑ Melakukan sosialisasi dan pelatihan empat pilar kebangsaan, wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air kepada para caleg Pemilu 2014 di tengah masyarakat.

## **2. Aspek Politik**

- ❑ Meninjau kembali berbagai perda, seperti Perdasus dan Perdasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan serta mendorong perda, Perdasus dan Perdasi yang bernuansa NKRI.
- ❑ Membuat brosur, leaflet, dan berbagai media lain yang isinya tentang penulisan sejarah Indonesia dalam bingkai NKRI untuk dibagikan kepada seluruh siswa di lembaga pendidikan sehingga dapat memahami sejarah Indonesia secara benar.
- ❑ Melakukan pengawasan yang ketat, transparan dan akuntabel terhadap proses penyaluran dana otonomi daerah dan otonomi khusus sehingga sesuai dengan peruntukannya.
- ❑ Mendorong Pemda dan DPRD untuk selalu turun ke

tengah masyarakat melakukan dialog dan diskusi dengan elemen masyarakat tentang pentingnya nasionalisme, patriotisme dan bahaya terorisme.

- ❑ Memberdayakan resolusi konflik dengan menggali kearifan lokal, adat istiadat dan nilai-nilai lokal di tengah masyarakat dalam memfilter potensi konflik sosial.

### **3. Aspek Ekonomi**

- Menciptakan lapangan kerja yang layak kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi pengangguran.
- Mendorong masuknya investasi di berbagai daerah, khususnya daerah konflik dan daerah perbatasan sehingga akan menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan.
- Memberdayakan UMKM dan Koperasi di berbagai daerah sehingga akan terwujud pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik dan sarana prasarana jalan, jembatan dan lain-lain dalam menunjang kegiatan dunia usaha dalam rangka pembangunan di daerah.
- Menumbuhkan semangat enterprenurship (kewirausahaan) di kalangan masyarakat sehingga akan melahirkan industri kreatif berbasis kearifan lokal.
- Menggali sumber kekayaan alam, potensi pariwisata dan potensi ekonomi lainnya guna menunjang pembangunan daerah.
- Meyakinkan kepada masyarakat bahwa sumber keka-

yaan alam yang melimpah di Indonesia untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.

- Memberikan bantuan dana yang mencukupi untuk pembangunan daerah sehingga masyarakatnya maju dan tidak mudah diprovokasi oleh para pelaku teror dan lain-lain.

#### **4. Aspek Sosial Budaya**

- Memberdayakan forum keagamaan, forum adat, dan forum budaya antar masyarakat guna mencegah potensi konflik sosial.
- Meningkatkan akses masyarakat dalam sektor pendidikan dan kesehatan sehingga terwujud kehidupan sosial masyarakat yang layak.
- Melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama, solidaritas sosial, bhineka tunggal ika, dan kesetiakawanan sosial di tengah elemen masyarakat.
- Melakukan sosialisasi deradikalisasi melalui ustadz dan dai di setiap pesantren di tengah masyarakat dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan pro NKRI melalui pastur dan pendeta.
- Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat korban konflik sehingga tidak timbul rasa dendam dan tidak terprovokasi kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan dendam.

#### **5. Aspek Pertahanan dan Keamanan**

- Menjamin kepastian rasa aman masyarakat yang



dilakukan oleh TNI-Polri sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman.

- ❑ Menggerakkan siskamling, poskamling dan roda keliling di lingkungannya, dan kewajiban tamu wajib lapor RT setempat untuk mendeteksi aksi separatisme dan terorisme di tengah masyarakat. • Menggerakkan gerakan pramuka, menwa, karang taruna, serta berbagai kegiatan lainnya di tengah masyarakat, khususnya generasi muda untuk meningkatkan bela negara.
- ❑ Memberdayakan berbagai ormas, LSM, dan tokoh masyarakat sebagai garda terdepan dan perisai hidup dalam memerangi separatisme dan terorisme.
- ❑ Melakukan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, tegas dan cepat terhadap berbagai aksi separatisme dan terorisme.
- ❑ Melakukan pengetatan dan pengawasan terhadap orang asing yang masuk di wilayah Indonesia guna mendeteksi pergerakan para provokator gerakan separatisme dan terorisme.
- ❑ Melakukan operasi gabungan TNI-Polri melalui patroli terkoordinasi secara rutin untuk mencegah aksi dan gerakan terorisme dan separatisme.

Dari kelima aspek tersebut, maka modul berikut ini akan lebih berfokus kepada perempuan, sebab modul bela negara secara umum telah dibuat oleh Kemenhan dan POLRI. Berikut ini adalah modul bela negara dan perempuan 2018 hasil olahan dari Unhan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Modul Pertama yang akan dibahas adalah Modul Wawasan Kebangsaan dan Teori Bela Negara.

## **WAWASAN KEBANGSAAN UNTUK PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL**

*Trigger* : Murid diberikan permasalahan yang diimajinasikan, seperti misalnya terjadi gempa bumi di sebuah kampung, lalu apa yang dapat dilakukan seorang murid perempuan.

Capaian

Pembelajaran : Untuk Mengetahui Jati Diri Perempuan Indonesia.

Kompetensi

Umum : Setelah mengikuti pelatihan ini, murid mampu menjelaskan jati diri perempuan Indonesia, bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh perempuan di lingkungan pendidikan, dan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

Kompetensi

Khusus :  
✓ Setelah mengikuti pelatihan ini, murid mampu melihat problematika yang sedang dihadapi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.  
✓ Murid diharapkan mampu membuat pilihan-pilihan solusi berdasarkan jati

dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.

- ✓ Murid diharapkan mampu memilih solusi terbaik bagi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.
- ✓ Murid diharapkan mampu mempresentasikan solusi yang telah dipilih tersebut dan mampu menjelaskan moral reasoning dibalik pemilihan itu, serta mengkaitkannya dengan jati diri seorang perempuan Indonesia.

- Pojok Trainer :
- ✓ Alat bantu kognitif, seperti misalnya pembagian booklet tentang Pancasila dan buku kecil berisi materi yang menjelaskan posisi perempuan Indonesia yang berprestasi di dunia.
  - ✓ Time keeping.
  - ✓ Metode pembelajaran dapat berupa games dan FGD.

## **WAWASAN KEBANGSAAN UNTUK PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN ATAU PROFESI**

- Trigger* : Perempuan profesional diberikan permasalahan yang diimajinasikan, seperti misalnya terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh atasan, lalu bagaimana mengatasinya



atau contoh kasus tentang peran seorang pimpinan perempuan yang harus mengurus anak, bersamaan dengan tugasnya harus pergi dinas luar negeri untuk mewakili perusahaannya, bagaimana perempuan Indonesia ini dapat membagi waktunya dengan bijaksana.

#### Capaian

Pembelajaran : Capaian Pembelajaran: Untuk Mengetahui Jati Diri Perempuan Indonesia.

#### Kompetensi

Umum : Setelah mengikuti pelatihan ini, perempuan profesional mampu menjelaskan jati diri perempuan Indonesia, bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh perempuan di lingkungan pekerjaan atau profesi, dan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

#### Kompetensi

Khusus :  
☞ Setelah mengikuti pelatihan ini, perempuan profesional mampu melihat problematika yang sedang dihadapi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.  
☞ Perempuan profesional diharapkan mampu membuat pilihan-pilihan solusi berdasarkan jati dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.

- ☞ Perempuan profesional diharapkan mampu memilih solusi terbaik bagi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.
- ☞ Perempuan profesional diharapkan mampu mempresentasikan solusi yang telah dipilih tersebut dan mampu menjelaskan moral reasoning dibalik pemilihan itu, serta mengkaitkannya dengan jati diri seorang perempuan Indonesia.

- Pojok Trainer :
- ☞ Alat bantu kognitif, seperti misalnya pembagian booklet tentang Pancasila dan buku kecil berisi materi yang menjelaskan data World Bank dan PBB tentang perempuan pekerja di dunia.
  - ☞ Timekeeping.
  - ☞ Metode pembelajaran dapat berupa games dan FGD.

## **WAWASAN KEBANGSAAN UNTUK PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN ATAU PERBATASAN**

- Trigger* : Perempuan pemukiman/perbatasan diberikan permasalahan yang diimajinasikan, seperti misalnya terdapat keluarga di desa yang putrinya tak kunjung pulang sebagai

TKW atau misalnya contoh kasus terjadi pembangunan pabrik semen yang menyebabkan kerusakan alam, apa yang dapat dilakukan oleh para perempuan di desa tersebut.

#### Capaian

Pembelajaran : Untuk Mengetahui Jati Diri Perempuan Indonesia.

#### Kompetensi

Umum : Setelah mengikuti pelatihan ini, perempuan pemukiman/perbatasan mampu menjelaskan jati diri perempuan Indonesia, bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh perempuan di lingkungan pemukiman/perbatasan, dan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

#### Kompetensi

Khusus : 

- ✓ Setelah mengikuti pelatihan ini, perempuan pemukiman/ perbatasan mampu melihat problematika yang sedang dihadapi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.
- ✓ Perempuan pemukiman/perbatasan diharapkan mampu membuat pilihan-pilihan solusi berdasarkan jati dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.



- ✓ Perempuan pemukiman/perbatasan diharapkan mampu memilih solusi terbaik bagi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.
- ✓ Perempuan pemukiman/perbatasan diharapkan mampu mempresentasikan solusi yang telah dipilih tersebut dan mampu menjelaskan moral reasoning dibalik pemilihan itu, serta mengkaitkannya dengan jati diri seorang perempuan Indonesia.

- Pojok Trainer :
- ✓ Alat bantu kognitif, seperti misalnya pembagian booklet tentang Pancasila dan buku kecil berisi materi yang menjelaskan data World Bank dan PBB tentang perempuan pemukiman/perbatasan di dunia.
  - ✓ Timekeeping.
  - ✓ Metode pembelajaran dapat berupa games dan FGD.

## **TEORI BELA NEGARA UNTUK PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL**

**Materi *Softskill* yang diberikan:** Dalam hal pemberian materi ini, maka dikepedepankan keaktifan para murid dan mahasiswa, agar trainer tidak mengajar satu arah, namun lebih

menggali potensi masing-masing murid atau mahasiswa seberapa paham mereka tentang bela negara. Oleh sebab itu langkah awal, trainer dapat bertanya tentang definisi bela negara kepada masing-masing murid dan mahasiswa. Misalnya dengan trigger pertanyaan seperti bagaimana seharusnya diaspora Indonesia dapat tetap membela negaranya dari luar negeri.

**Capaian Pembelajaran :** Untuk Mengindikasikan sejauh mana masing-masing murid atau mahasiswa memahami tentang bela negara.

**Kompetensi Umum :** Setelah mengikuti pelatihan ini, perempuan di lingkungan pendidikan formal dan nonformal mampu memiliki pemahaman yang sama tentang bela negara, bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh perempuan di lingkungan pendidikan formal dan nonformal, dan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

**Kompetensi Khusus :**

- ☞ Setelah mengikuti pelatihan ini, perempuan pendidikan mampu melihat problematika yang sedang dihadapi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.
- ☞ Perempuan pendidikan diharapkan mampu membuat pilihan-pilihan solusi untuk membela negaranya sebagai seorang perempuan Indonesia.
- ☞ Perempuan pendidikan diharapkan mampu memilih solusi terbaik bagi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.



- ☞ Perempuan pendidikan diharapkan mampu mempresentasikan solusi yang telah dipilih tersebut dan mampu menjelaskan moral reasoning dibalik pemilihan itu, serta mengkaitkannya dengan bela negara seorang perempuan Indonesia.

**Pojok Trainer :**

- ☞ Alat bantu kognitif, seperti misalnya pembagian modul ini.
- ☞ Timekeeping.
- ☞ Metode pembelajaran dapat berupa games dan FGD.

## **TEORI BELA NEGARA UNTUK PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN ATAU PROFESI**

**Materi *Softskill* yang diberikan :** Dalam hal pemberian materi ini, maka dikepedepankan keaktifan para perempuan profesional, agar trainer tidak mengajar satu arah, namun lebih menggali potensi masing-masing perempuan profesional dalam hal sudah sejauh mana mereka telah membela negaranya. Oleh sebab itu untuk langkah awal, trainer dapat bertanya tentang definisi bela negara kepada masing-masing perempuan profesional. Misalnya dengan trigger pertanyaan seperti apakah mereka sudah puas dengan gaji dan prestasi yang telah didapat selama ini sebagai pimpinan ataupun karyawan di lingkungan pekerjaan masing-masing.

***Capaian Pembelajaran* :** Untuk Mengindikasikan sejauh mana masing-masing perempuan profesional telah membela negaranya.

**Kompetensi Umum :** Setelah mengikuti pelatihan ini, perempuan di lingkungan pekerjaan atau profesi mampu memiliki pemahaman yang sama tentang bela negara, bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh perempuan di lingkungan pekerjaan atau profesi, dan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

**Kompetensi Khusus :**

- ✓ Setelah mengikuti pelatihan ini, perempuan profesional mampu melihat problematika yang sedang dihadapi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.
- ✓ Perempuan profesional diharapkan mampu membuat pilihan-pilihan solusi untuk membela negaranya sebagai seorang perempuan Indonesia.
- ✓ Perempuan profesional diharapkan mampu memilih solusi terbaik bagi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.
- ✓ Perempuan profesional diharapkan mampu mempresentasikan solusi yang telah dipilih tersebut dan mampu menjelaskan moral reasoning dibalik pemilihan itu, serta mengkaitkannya dengan bela negara seorang perempuan Indonesia.

**Pojok Trainer :**

- ✓ Alat bantu kognitif, seperti misalnya pembagian modul ini.
- ✓ Timekeeping.
- ✓ Metode pembelajaran dapat berupa games dan FGD.

## TEORI BELA NEGARA UNTUK PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN ATAU PERBATASAN

**Materi *Softskill* yang diberikan :** Dalam hal pemberian materi ini, maka dikepedepankan keaktifan para perempuan pemukiman/perbatasan, agar trainer tidak mengajar satu arah, namun lebih menggali potensi masing-masing perempuan pemukiman/perbatasan dalam hal sudah sejauh mana mereka telah membela negaranya. Oleh sebab itu untuk langkah awal, trainer dapat bertanya tentang definisi bela negara kepada masing-masing perempuan pemukiman/perbatasan. Misalnya dengan trigger pertanyaan seperti apakah mereka sudah puas dengan hasil lading mereka hari dan mengkaitkannya dengan kebutuhan pangan nasional, serta dalam konsep gambaran besar tentang bela negara.

***Capaian Pembelajaran* :** Untuk Mengindikasikan sejauh mana masing-masing perempuan pemukiman/perbatasan telah membela negaranya.

***Kompetensi Umum* :** Setelah mengikuti pelatihan ini, perempuan di lingkungan pemukiman atau perbatasan mampu memiliki pemahaman yang sama tentang bela negara, bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh perempuan di lingkungan pemukiman atau perbatasan, dan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

***Kompetensi Khusus* :**

- ☞ Setelah mengikuti pelatihan ini, perempuan pemukiman/perbatasan mampu melihat problematika yang sedang dihadapi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.



- ☞ Perempuan pemukiman/perbatasan diharapkan mampu membuat pilihan-pilihan solusi untuk membela negaranya sebagai seorang perempuan Indonesia.
- ☞ Perempuan pemukiman/perbatasan diharapkan mampu memilih solusi terbaik bagi dirinya sebagai seorang perempuan Indonesia.
- ☞ Perempuan pemukiman/perbatasan diharapkan mampu mempresentasikan solusi yang telah dipilih tersebut dan mampu menjelaskan moral reasoning dibalik pemilihan itu, serta mengkaitkannya dengan bela negara seorang perempuan Indonesia.

**Pojok Trainer :**

- ☞ Alat bantu kognitif, seperti misalnya pembagian modul ini.
- ☞ Timekeeping.
- ☞ Metode pembelajaran dapat berupa games dan FGD.

Sebelum masuk ke dalam materi yang akan diberikan di tiap lingkungan perempuan, berikut ini diferensiasi subyek di dalam tiap modul adalah sebagai berikut:

- Status sosial-ekonomi (tidak bekerja, penghasilan tetap, tidak tetap, dsb),
- Umur,
- Tingkat kemampuan bela negara (sertifikasi bela negara),
- Posisi tinggal (menetap, diaspora, karyawan kontrak di luar negeri, dsb),

- ☑ Level keikutsertaan (sebagai peserta, pelatih inti, pembina, dsb).

Pedoman : Pedoman Pembinaan Kurikulum Diklat Bela Negara Tahun 2016.

## **MATERI AJAR WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL**

Materi Umum yang Diberikan

### 1) Pengetahuan Sishanneg:

- ✓ Kedudukan perempuan di dalam Sishanneg
- ✓ Wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa perempuan Indonesia

### 2) Ancaman Perempuan Generasi Milenial

- ✓ Ancaman-ancaman nirmiliter masa kini
- ✓ Upaya yang telah dilakukan pemerintah
- ✓ Upaya yang belum dilakukan pemerintah

### 3) Problematika Bidang Pendidikan Formal dan Nonformal dan Pilihan Solusinya

- ✓ Gambaran umum pendidikan di Indonesia
- ✓ Peran perempuan dalam bidang pendidikan
- ✓ Cerita sukses perempuan yang telah melakukan kontribusi serta memberdayakan bidang pendidikan menjadi lebih baik

## **MATERI AJAR WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN ATAU PROFESI**

Materi Umum yang Diberikan

- 1) Pengetahuan Sishanneg:
  - ✓ Kedudukan perempuan di dalam Sishanneg
  - ✓ Wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa perempuan Indonesia
- 2) Ancaman Perempuan Generasi Milenial
  - ✓ Ancaman-ancaman nirmiliter masa kini
  - ✓ Upaya yang telah dilakukan pemerintah
  - ✓ Upaya yang belum dilakukan pemerintah
- 3) Problematika Bidang Pekerjaan atau Profesi dan Pilihan Solusinya
  - ✓ Gambaran umum wanita pekerja di Indonesia
  - ✓ Peran perempuan dalam bidang pekerjaan atau profesi
  - ✓ Cerita sukses perempuan yang telah melakukan kontribusi serta memberdayakan bidang pekerjaan atau profesi menjadi lebih baik

## **MATERI AJAR WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN ATAU PERBATASAN**

Materi Umum yang Diberikan

- 1) Pengetahuan Sishanneg:
  - ✓ Kedudukan perempuan di dalam Sishanneg
  - ✓ Wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa perempuan Indonesia

- 2) Ancaman Perempuan Generasi Milenial
  - ✓ Ancaman-ancaman nirmiliter masa kini
  - ✓ Upaya yang telah dilakukan pemerintah
  - ✓ Upaya yang belum dilakukan pemerintah
- 3) Problematika Bidang Lingkungan Pemukiman atau Perbatasan dan Pilihan Solusinya
  - ✓ Gambaran umum lingkungan pemukiman atau perbatasan di Indonesia
  - ✓ Peran perempuan dalam bidang lingkungan pemukiman atau perbatasan
  - ✓ Cerita sukses perempuan yang telah melakukan kontribusi serta memberdayakan bidang lingkungan pemukiman atau perbatasan menjadi lebih baik

## **MATERI AJAR BELA NEGARA BAGI PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL**

- 1) Materi kemampuan awal Bela Negara bagi murid perempuan antara lain:
  - ✓ Pemahaman peran perempuan dalam Bela Negara
  - ✓ Peraturan baris berbaris
  - ✓ Peraturan penghormatan
  - ✓ Paskibraka
  - ✓ Caraka malam
- 2) Materi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara bagi murid perempuan:
  - ✓ Sejarah peran perempuan dalam proses kemerdekaan Indonesia

- ✓ Sejarah peran perempuan dalam iklim demokrasi
- ✓ Informasi perempuan Indonesia berprestasi yang diakui dunia
- ✓ Pembelajaran (lesson learned) dari negara-negara lain tentang kedudukan perempuan di dalam bela negara

3) Materi Ekstrakurikuler yang dapat diberikan:

- ✓ Membentuk paduan suara perempuan yang melatih anak-anak kecil dan generasi muda menyanyikan lagu-lagu nasional, daerah, serta memainkan alat musik daerah
- ✓ Meningkatkan pemahaman akan local wisdom, misal bahasa daerah, obat alternative/jamu, tarian daerah, obyek wisata untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air

## **MATERI AJAR BELA NEGARA BAGI PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN ATAU PROFESI**

1) Materi kemampuan awal Bela Negara bagi perempuan profesional antara lain:

- ✓ Pemahaman peran perempuan dalam Bela Negara
- ✓ Peraturan baris berbaris
- ✓ Peraturan penghormatan sesuai pangkat dan jabatan

2) Materi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara bagi perempuan profesional:

- ✓ Sejarah peran perempuan dalam proses kemerdekaan Indonesia
- ✓ Sejarah peran perempuan dalam iklim demokrasi

- ✓ Informasi perempuan Indonesia berprestasi yang diakui dunia
  - ✓ Pembelajaran (lesson learned) dari negara-negara lain tentang kedudukan perempuan di dalam bela negara
- 3) Materi lain yang dapat diberikan:
- ✓ Membentuk paduan suara perempuan untuk menyanyikan lagu-lagu nasional, daerah, serta memainkan alat musik daerah
  - ✓ Meningkatkan pemahaman akan local wisdom, misal bahasa daerah, obat alternative/jamu, tarian daerah, obyek wisata untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air

## **MATERI AJAR BELA NEGARA BAGI PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN ATAU PERBATASAN**

- 1) Materi kemampuan awal Bela Negara bagi perempuan pemukiman/perbatasan antara lain:
- ✓ Pemahaman peran perempuan dalam Bela Negara
  - ✓ Peraturan baris berbaris
  - ✓ Peraturan mengadakan acara untuk hari-hari besar nasional
- 2) Materi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara bagi perempuan pemukiman/perbatasan:
- ✓ Sejarah peran perempuan dalam proses kemerdekaan Indonesia
  - ✓ Sejarah peran perempuan dalam iklim demokrasi
  - ✓ Informasi perempuan Indonesia berprestasi yang diakui dunia

- ✓ Pembelajaran (lesson learned) dari negara-negara lain tentang kedudukan perempuan di dalam bela negara

3) Materi lain yang dapat diberikan:

- ✓ Membentuk paduan suara perempuan untuk menyanyikan lagu-lagu nasional, daerah, serta memainkan alat musik daerah
- ✓ Meningkatkan pemahaman akan local wisdom, misal bahasa daerah, obat alternative/jamu, tarian daerah, obyek wisata untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.

## Daftar Pustaka

Modul Bela Negara Kemenhan RI.

Modul Bela Negara POLRI

Pedoman Pembinaan Kurikulum Diklat Bela Negara Tahun 2016

Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia.

Subagyo. 2014. Bela Negara: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi.

Tourraine, Alain. La critique de la modernisme.

Morgenthau, Hans J. Politic among nations





## MODUL KETIGA

# ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



## MODUL 3

### ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN

Materi	Modul ini berisi pengetahuan dasar tentang ancaman yang dapat menimpa kaum perempuan baik dalam lingkup individu, kelompok maupun negara.
Kompetensi Utama	Peserta memperoleh pemahaman menyeluruh tentang ancaman yang dapat menimpa kaum perempuan baik secara individu; kelompok maupun negara untuk selanjutnya mampu menjadi fasilitator pelatihan bela negara bagi kaum perempuan.
Kompetensi Pendukung	. Pada akhir sesi pelatihan, para peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjelaskan kepada kaum perempuan tentang berbagai jenis ancaman yang dapat menimpa kaum perempuan terhadap individu, kelompok dan negara;</li><li>2. Menjelaskan ancaman insani berperspektif gender baik terhadap individu maupun kelompok</li><li>3. Menjelaskan peran perempuan dalam menghadapi ancaman terhadap individu, kelompok dan negara</li></ol>

## SESI 3 : ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN

- Waktu: 120 Menit
- Kompetensi Utama:

Peserta memperoleh pemahaman menyeluruh tentang ancaman yang dapat menimpa kaum perempuan baik secara individu;kelompok maupun negara untuk selanjutnya mampu menjadi fasilitator pelatihan bela negara bagi kaum perempuan.
- Kompetensi Pendukung:

Pada akhir sesi pelatihan, para peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk:

  1. Menjelaskan kepada kaum perempuan tentang berbagai jenis ancaman yang dapat menimpa kaum perempuan terhadap individu, kelompok dan negara;
  2. Menjelaskan ancaman insani berperspektif gender baik terhadap individu maupun kelompok
  3. Menjelaskan peran perempuan dalam menghadapi ancaman terhadap individu, kelompok dan negara
- Metode:
  1. Curah pendapat
  2. Diskusi kelompok
- Alat/bahan:
  1. Spidol, lem, lakban

2. Metaplan merah dan biru
3. Flipchart, kertas piano
4. Lembar tentang berbagai bentuk ancaman
5. Presentasi ppt
6. Film pendek

## **ALUR FASILITASI**

Pengenalan ancaman

1. Fasilitator membuka sesi pelatihan.
2. Fasilitator menjelaskan aturan permainan.
3. Fasilitator menempelkan lembaran koran (yang memuat tulisan tentang berbagai jenis ancaman) di dinding/papan tulis.
4. Fasilitator membagikan kertas tempel warna-warni kepada seluruh peserta.
5. Fasilitator meminta peserta untuk mengenali berbagai jenis ancaman yang mereka ketahui dari lembaran koran, menuliskannya pada kertas tempel, dan kemudian menempelkannya di atas lembaran koran tersebut.
6. Berikan waktu selama 15 menit atau semua peserta sudah berusaha semaksimal mungkin mengenali berbagai jenis ancaman.
7. Mintalah masing-masing peserta untuk maju ke depan menjelaskan jenis-jenis ancaman yang telah dituliskan dan ditempel sesuai persepsi mereka.

8. Fasilitator menjelaskan apakah ancaman sesuai persepsi peserta memang merupakan salah satu jenis ancaman, dan bagaimana dampaknya bagi perempuan.
9. Fasilitator mengevaluasi pemahaman para peserta tentang jenis-jenis ancaman.
10. Peserta yang paling sedikit menempelkan kertas (asumsinya paling sedikit mengenali ancaman) diberikan hukuman untuk menceritakan pengalaman dirinya dalam menghadapi satu jenis ancaman.
11. Sesi pengenalan ancaman ditutup.
  - a. Peran perempuan dalam menghadapi ancaman
    1. Fasilitator membuka pelatihan.
    2. Fasilitator menjelaskan aturan dasar bermain peran.
    3. Fasilitator meminta peserta untuk mengenali ancaman terhadap perempuan, memahami dampaknya terhadap perempuan, dan bagaimana perempuan mengatasi ancaman tersebut.
    4. Fasilitator meminta kelompok beranggotakan 3-4 peserta untuk bermain peran dalam mengatasi ancaman yang sepakat untuk dipilih. Peran yang dimainkan: perempuan ibu rumah tangga, perempuan aktivis/advokasi, perempuan



- penentu kebijakan (gubernur, bupati, kepala desa), perempuan legislator, dan lainnya
5. Fasilitator membantu menjelaskan peran perempuan dalam menghadapi ancaman tersebut.
  6. Sebelum ditutup, para peserta melakukan refleksi atas peran yang telah dimainkan.





## MODUL 3

### ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia modern dengan segala kompleksitas masalah yang dihadapi, konsep keamanan dalam politik dunia- yang bersifat tradisional dan menekankan penggunaan solusi militer dalam mengatasi ancaman-dipandang sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan pendekatan keamanan nontradisional yang lebih menekankan arti penting keamanan insani (*human security*). Ancaman terhadap suatu negara dan/atau masyarakat, termasuk di dalamnya perempuan, tidak selalu bersumber dari ancaman militer. Ancaman nonmiliter pun harus diantisipasi mengingat dampaknya yang luas kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok.

#### 2. BAHAN AJAR

##### a. Keamanan Tradisional vs Keamanan Nontradisional

Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Keamanan tidak lagi dipahami semata bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan blok Timur, namun juga meliputi aspek-aspek ekonomi, pembangunan, sosial politik, hak asasi manusia, lingkungan hidup, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya. Keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan

konflik ataupun kerjasama antar negara, tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat.<sup>1</sup>

Kejahatan internasional—seperti: terorisme, penyelundupan manusia, kejahatan lingkungan, kejahatan HAM, dan sebagainya—menunjukkan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan internasional. Silang hubungan yang berlangsung dalam proses perubahan global, regional, dan domestik telah membentuk spektrum ancaman, baik internasional maupun domestik yang bersifat kompleks. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan ke dalam lima dimensi: politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiap-tiap dimensi keamanan memiliki: unit, nilai, karakteristik, dan ancaman yang berbeda.<sup>2</sup>

Konsep keamanan tradisional dipandang banyak pihak mengalami pergeseran ke arah perlunya konsep baru tentang keamanan non-tradisional. Dilihat dari sumber ancaman (*the origin of threats*), ancaman dalam konsep keamanan tradisional selalu dianggap datang dari negara asing. Sekarang ini, menurut konsep keamanan non tradisional, ancaman dapat berasal dari lingkungan domestik maupun internasional. Sementara itu, bila dilihat dari hakikat ancaman (*the nature of threats*), konsep keamanan tradisional melihat ancaman selalu bersifat militer dan karena itu pendekatan yang digunakan juga bersifat militeristik.

---

<sup>1</sup>Simon Dalby, "Security, Modernity, Ecology: The Dilemmas of Post Cold War Security Discourse", *Alternatives: Global, Local, Political*, 1992, Vol. 17 No. 1, hlm.102—103.

<sup>2</sup>Barry Buzan, *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold War Era*, (Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991), hlm.2.

Sementara menurut konsep keamanan non tradisional bahwa dalam perkembangan nasional dan internasional, sebagaimana disebut diatas, telah mengubah sifat ancaman menjadi lebih rumit dan kompleks. Dengan demikian, persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain, seperti: ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, bahkan isu-isu lain—seperti: demokrasi, HAM, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, dan terorisme sehingga ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional diakibatkan dari adanya proses interaksi aktor negara dan non negara.<sup>3</sup> Aspek kemanusiaan menjadi penting dalam rangka memengaruhi penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik internasional.<sup>4</sup>

## **b. Keamanan Insani**

Keamanan insani adalah konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu warganegara sehingga setiap individu manusia bisa mendapatkan keamanan dan kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan.<sup>5</sup> Keamanan insani didasarkan atas pandangan konstruksi sosial yang berasumsi dari apa yang dimaksud “aman”: aman dari apa, untuk siapa, dan bagaimana; dan mendefinisikannya berdasarkan hasil

---

<sup>3</sup>A.A. Banyu Perwita dan Y.M.Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT.RemajaRosda Karya, 2006),hlm.123—125.

<sup>4</sup>Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktek*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),hlm. 182.

<sup>5</sup>Kanti Bajpai, *Human Security: Concept and Measurement*. Kroc Institute Occasional Paper #19, (New Delhi: School for International Studies, Jawaharlal Nehru University, 2000), hlm. 3.

kesepakatan aktor yang terlibat dalam diskursus sosial. Keamanan insani menekankan pada keadilan dan emansipasi serta menghubungkan politik domestik ke dalam hubungan internasional. Gagasan keamanan insani menghadapkan negara dan kedaulatannya terhadap kedaulatan individu warga negara. Keamanan insani berusaha menggeser pemikiran keamanan dari dominasi keamanan negara ke keamanan manusia, yang mencakup masalah: kesejahteraan sosial, perlindungan HAM, kelompok minoritas, masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik. Masalah utama yang menjadi perhatian dalam keamanan insani adalah demokratisasi dan HAM.

Keamanan insani juga dapat dideskripsikan dari pandangan sebagaimana dirumuskan oleh UNDP<sup>6</sup>. Pasca-Perang Dingin menimbulkan adanya pemahaman baru bahwa cara-cara militer tidak dapat digunakan lagi untuk mengatasi konflik internasional (sebagaimana doktrin keamanan tradisional) jika mengingat akar masalah dari konflik itu sangat luas dan kompleks. Atas dasar itulah, diperlukan pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik berdasarkan akar permasalahan; dan akar masalah itu ternyata bersumber dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama, lingkungan hidup, bencanaalam, dan obat-

---

<sup>6</sup>UNDP (*The United Nations Development Programme*) adalah jaringan pembangunan global PBB; sebuah organisasi yang mengusahakan perubahan dan membuat negara-negara terhubung pada pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk membantu masyarakatnya membangun kehidupan yang lebih baik. UNDP berada di 177 negara dan wilayah, termasuk Indonesia; bekerja bersama masyarakat dengan solusi mereka sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan pembangunan global dan nasional. Lebih lanjut tentang UNDP, lihat <http://www.id.undp.org/content/indonesia>.



obatan terlarang. Konsep baru ini dipandang lebih bersifat holistik dan komprehensif karena menyangkut semua segi kemanusiaan.<sup>7</sup>

Konsep keamanan insani lahir pada satu momen sejarah yang sangat penting, yang memungkinkan perlunya pertimbangan untuk merumuskan kembali tentang konsep keamanan yang lebihbisa memenuhi perkembangan isu-isu keamanan global. Dua momen sejarah yang melatarbelakangi lahirnya konsep keamanan insani adalah berakhirnya Perang Dingin—sebagai konsep keamanan yang dibangun atas dasar geopolitik—dan munculnya ancaman global dari fenomena terorisme transnasional. Keamanan insani merupakan konsep keamanan yang berbeda sama sekali dengan pendahulunya (konsep keamanan tradisional), di mana sebagai konsep baru mencoba mendefinisikan kembali tentang apa yang dimaksud “aman” (aman dari ancaman apa). Keamanan insani juga mendefinisikan kembali peran dan bentuk-bentuk ancaman terhadap kemanusiaan. Dalam dunia yang terus berubah, pertanyaan keamanan tidak terkait dengan geopolitik dan isu-isu perimbangan kekuatan militer. Pertanyaan tentang keamanan dan ketidakamanan muncul dari adanya masalah: penyakit,

---

<sup>7</sup>UNDP, “Redefining Security: The Human Dimension”, *Current History*, 1994, Vol. 94, hlm. 229—236.

kelaparan, pengangguran, konflik sosial, kejahatan, politik yang represif, dan terorisme.<sup>8</sup>

Hoadley memberikan pandangannya tentang keamanan insani sebagai konsep baru tentang keamanan yang lebih menarik. Menurutnya, keamanan insani muncul pada saat pengaruh Perang Dingin semakin berkurang, sedangkan pengaruh penyebaran paham kemanusiaan internasional dan perlindungan HAM semakin mendapatkan peran dalam isu-isu keamanan internasional. Hal ini sebenarnya merupakan cerminan dari individualisasi hukum internasional yang mulai diterima secara bertahap. Subjek hukum internasional tidak hanya negara, namun bisa saja individu.<sup>9</sup>

Konsep keamanan insani berperan sebagai instrumen legitimasi dalam intervensi kemanusiaan. Sebagai instrumen intervensi kemanusiaan, keamanan insani dapat menjadi landasan campur tangan di wilayah domestik suatu negara dengan tujuan terbentuknya keamanan bagi semua. Dalam pandangan Hoadley, isu-isu utama dalam keamanan insani meliputi keamanan individu dari kejahatan dan kekerasan, akses kepada dasar-dasar dan sumber kehidupan bagi setiap orang, perlindungan terhadap individu dari kejahatan dan terorisme, penyakit yang pandemik, kejahatan politik, perlindungan HAM,

---

<sup>8</sup>Peter J. Burgess, "Non Military Security Challenges", dalam C.A. Snyder, *Contemporary Security and Strategy*, 2<sup>nd</sup> Edition, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 63—64.

<sup>9</sup>Stephen Hoadley, "The Evolution of Security Thinking: An Overview", dalam S.Hoadley dan J. Ruland, *Asian Security Reassessed*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2006), hlm. 20—22.



kebebasan dari kejahatan berbasis gender, hak atas komunitas budaya dan politik, pencegahan dari kelangkaan sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan dari kerusakan, serta polusi—baik udara maupun air.<sup>10</sup>

### c. Persepsi Ancaman

Persepsi ancaman adalah sebuah keadaan, dimana individu memersepsikan sebuah situasi sebagai situasi yang negatif dan merasakan perlunya melindungi diri. Terdapat dua tipe ancaman yang bisa muncul pada individu: ancaman personal (*personal threat*) dan ancaman antar kelompok (*intergroup threat*). Ancaman personal adalah ancaman yang terjadi ketika individu berpikir bahwa dirinya merasa terancam. Jenis ancaman ini terkadang disebut ancaman individu secara langsung (*self-directed threat*).<sup>11</sup>

Ancaman antar kelompok secara umum sama dengan ancaman personal; yang membedakan adalah ancaman yang dirasakan oleh individu berkaitan dengan kelompoknya. Sebuah ancaman terhadap kelompok dialami ketika anggota dari sebuah kelompok merasakan bahwa kelompok yang lain akan membahayakan mereka.<sup>12</sup> Dalam konteks teori ancaman antar kelompok, ancaman antar kelompok merupakan pengalaman

---

<sup>10</sup>Stephen Hoadley, *Ibid.*, hlm. 20—22.

<sup>11</sup>Brian F. Redmond, “Self Efficacy and Social Cognitive Theories”,

<sup>12</sup>Brian F. Redmond, *Ibid.*



dimana seorang individu memersepsikan bahwa kelompok lain akan membahayakan diri/kelompok mereka.<sup>13</sup>

Menurut Stephanet. *al.*, persepsi ancaman memiliki beberapa tipe: ancaman realistik (*realistic threat*), ancaman simbolik (*symbolic threat*), dan kecemasan antar kelompok (*intergroup anxiety*).<sup>14</sup> Berikut ini masing-masing penjelasannya:

### 1. Ancaman Realistik

Pada awalnya, ancaman realistik merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Levine & Campbell dan dikenal dengan *realistic group conflict theories* (RGCT). Persepsi terhadap ancaman realistik dapat terjadi dalam dua level: individu (*personal*) dan kelompok. Pada level *personal*, ancaman realistik mengacu kepada ancaman yang berhubungan dengan fisik atau materiil yang nyata dan membahayakan individu, seperti: rasa sakit, siksaan, kematian, kerugian dalam bidang ekonomi, serta ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan individu. Pada level kelompok, individu melihat ancaman sebagai sesuatu yang dapat membahayakan keberadaan kelompok.

### 2. Ancaman Simbolik

Ancaman simbolik adalah ancaman yang berhubungan dengan agama, nilai-nilai, kepercayaan, ideologi, falsafah,

---

<sup>13</sup>Walter G.Stephan, Oscar Ybarra, dan Kimberly R.Morrison, "Intergroup Threat Theory", dalam T.D. Nelson (Vol. Eds.), *Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination* (hlm. 43—59), (New York: Psychology Press, 2009), hlm. 44.

<sup>14</sup>Stephan, Ybarra dan Morrison, *Ibid.*, hlm. 45.

moralitas, identitas sosial, dan harga diri dari individu atau kelompok. Persepsi terhadap ancaman simbolik adalah bagaimana “cara hidup” dari individu/kelompok luar dapat mengancam individu atau kelompoknya. Beberapa peneliti menghubungkan ancaman simbolik secara langsung dengan sikap antar kelompok. Ketika nilai-nilai, kebiasaan, atau tradisi dihalangi oleh kelompok luar (*outgroup*), individu akan cenderung bersikap negatif terhadap kelompok luar.<sup>15</sup>

### 3. Kecemasan Antar kelompok

Kecemasan antar kelompok yang melibatkan antisipasi terhadap interaksi antar kelompok yang negatif, awalnya merupakan jenis ancaman yang terpisah. Namun, berdasarkan perkembangan terakhir bahwa kecemasan antar kelompok dikelompokkan sebagai subbagian dari ancaman antar kelompok yang berpusat pada kekhawatiran terhadap interaksi dengan anggota kelompok luar. Kekhawatiran ini muncul dari berbagai sumber yang berbeda, termasuk diantaranya kekhawatiran bahwa kelompok luar akan memanfaatkan kelompok dalam (*ingroup*) dan kekhawatiran bahwa kelompok luar akan memersepsikan kelompok dalam berprasangka. Tipe ancaman ini berorientasi pada emosi, yang muncul dari kekhawatiran pada diri sendiri, baik karena individu takut terhadap konsekuensi perilaku atau psikologis,

---

<sup>15</sup>Walter G. Stephan dan C.W. Stephan, “Intergroup Anxiety”, *Journal of Social Issues*, Vol. 41 No. 3, 1986, hlm. 157—175.

ataupun karena mereka takut terhadap evaluasi dari anggota kelompok dalam atau kelompok luar.

Menurut Stephanef. *al.*, terdapat empat faktor yang dapat memengaruhi persepsi ancaman, yaitu: hubungan antar kelompok (*intergroup relation*), dimensi budaya (*cultural dimension*), faktor situasional (*situational factor*), dan perbedaan individu (*individual differences*).

#### 1. Hubungan Antar kelompok

Hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sangat memengaruhi persepsi ancaman. Kekuatan kelompok, sejarah konflik, dan besar anggota kelompok menjadi faktor yang berperan dalam hubungan antar kelompok ini.

#### 2. Dimensi Budaya

Dimensi budaya mengacu kepada nilai-nilai, standar, peraturan, norma-norma, dan kepercayaan pada satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ketika perbedaan akan hal-hal tersebut semakin mencolok, ancaman yang muncul pada masing-masing kelompok semakin meningkat.

#### 3. Faktor Situasional

Faktor-faktor situasional seperti *setting* dimana interaksi antarkelompok berlangsung, bagaimana interaksi terjadi, tingkat dimana norma-norma hadir diantara masing-masing kelompok, tujuan dari interaksi, dan situasi kooperatif atau kompetitif dari interaksi sangat memengaruhi persepsi

ancaman yang terjadi antarkelompok. Di samping itu, bagaimana tingkah laku individu ketika terjadi interaksi juga berpengaruh.

#### 4. Perbedaan Individu

Individu yang kurang memiliki kontak personal dan cenderung asing dengan kelompok luar akan memiliki kepercayaan diri yang rendah sehingga cenderung merasa terancam ketika berinteraksi dengan kelompok luar.

#### d. Pengertian Ancaman

Dalam *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, ancaman baik yang bersifat aktual maupun potensial merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara. Saat ini dan ke depan, sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri; dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara; bersifat nasional, regional, maupun internasional. Sesuai dengan prediksi dan prioritasnya, ancaman dikelompokkan dalam bentuk nyata dan belum nyata. Dampak yang ditimbulkan akibat ancaman tersebut harus diakui telah merambah semua aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Ancaman militer (belum nyata) dapat berupa ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara atau ancaman bersenjata yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman militer dapat berupa: agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, ancaman keamanan laut dan/atau udara, serta perang saudara atau konflik komunal yang sewaktu-waktu dapat timbul.

Ancaman tidak hanya datang dari negara lain dalam bentuk ancaman kekuatan militer sudah disadari oleh beberapa analis dan para pembuat kebijakan sejak beberapa dekade yang lalu.<sup>16</sup> Subtansi keamanan insani dapat ditemukan dalam konsep keamanan yang dikemukakan oleh para penganut teori kritis yang mempersoalkan bangunan negara (*state*) sebagai tatanan patriarkal. Sebagai contoh Ketahanan Nasional yang digagas oleh Indonesia, keamanan komprehensif Jepang, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Pada tahun 1994, UNDP menjelaskan konsep keamanan insani yang mencakup: *economic security, food security, health security, enviromental security, personal security, community security, dan political security*. Secara ringkas, UNDP mendefinisikan keamanan insani sebagai keamanan dari berbagai ancaman kronis, seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan; dan perlindungan dari gangguan yang mendadak dan merugikan dalam pola kehidupan sehari-hari, baik di rumah,

---

<sup>16</sup>Misalnya konsep *insecurity dilemma* dan beberapa perhatian terhadap keamanan anak-anak dan perempuan, ditunjukkan oleh tulisan Caroline Thomas, Sorensen, J.T. Matthew, Norman Myers, Neville Brown, beberapa teoretisi saling ketergantungan, dan para penganut pandangan kosmopolitanisme dalam HAM.

<sup>17</sup>Edy Prasetyono, "Human Security", materi disampaikan dalam FGD Propatria di Hotel Santika, Jakarta, 11 September 2003.

di lingkungan kerja, maupun di masyarakat.<sup>18</sup> Jadi, secara umum, definisi keamanan insani menurut UNDP mencakup bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan bebas dari apa yang diinginkan (*freedom from want*).<sup>19</sup>

Ada perbedaan pendapat dari beberapa sarjana mengenai konsep keamanan insani dalam arti sempit dan arti luas. Sebagai contoh, dalam arti sempit, Mack yang merupakan seorang pendukung arti sempit berpendapat bahwa ancaman kejahatan politik ditujukan kepada masyarakat oleh sebuah negara ataupun aktor politik lainnya. Ia mendukung keamanan insani sebagai proteksi terhadap individu dan masyarakat dari perang dan segala bentuk kejahatan. Dari sisi arti luas, perdebatan keamanan insani tidak hanya berkonsentrasi terhadap ancaman kejahatan belaka, tetapi juga kebebasan dari rasa takut serta kebebasan dari apa yang diinginkan. Holds mengatakan bahwa keamanan insani berkonsentrasi pada proteksi masyarakat dari krisis bahaya ancaman kehidupan, terlepas dari apakah ancaman berakar pada aktivitas antropogenik ataukah kejadian alami, apakah mereka

---

<sup>18</sup>*Human security issafety from such chronic threats such as hunger, disease and repression; and protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life—whether in homes, in jobs or in communities.*

<sup>19</sup>Konsep keamanan insani menurut UNDP sebenarnya merupakan sintesa dari perdebatan antara pembangunan dan perlucutan senjata berdasarkan laporan dari beberapa komisi—misalnya: Komisi Brant, Komisi Bruntland, dan Komisi *Global Governance*—yang menggeser fokus keamanan dari keamanan nasional/negara menuju keamanan insani. Konsep keamanan insani menurut UNDP menandai pergeseran hubungan internasional yakni perubahan norma tentang hubungan antara kedaulatan negara dan HAM, yang kemudian melahirkan konsep *Responsibility to Protect* (R2P). Dengan demikian, gagasan UNDP secara langsung mengaitkan keamanan insani dengan HAM dan hukum humaniter. Lihat Edy Prasetyono, *Ibid*.

berbohong di dalam atau di luar negara, dan apakah langsung ataupun secara struktural. Menurut Holds bahwa keamanan insani menjadi pusat keamanan yang pada prinsipnya berfokus kepada masyarakat keduanya, baik individu maupun kelompok secara umum. Inilah orientasi keamanan yang berfokus kepada kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari apa yang diinginkan.

Studi keamanan (*security studies*) memandang sebuah keamanan bukan hanya seputar keamanan sebuah kelompok besar saja, melainkan tiap-tiap individu justru memerlukan perhatian lebih untuk memperoleh keamanan di kesehariannya. Studi keamanan telah memperluas objek keamanannya. Untuk menghadapi perkembangan zaman, keamanan insani perlu diberikan perhatian lebih karenabanyak individu warga dunia mendapatkan ancaman setiap hari. Ancaman tersebut berupa kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pengungsi, penindasan, penyakit, SARA, dan lain-lain.

#### **e. Bentuk/Jenis Ancaman**

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter disebutkan bahwa ancaman nonmiliter adalah usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non militer dilakukan oleh aktor negara atau aktor non negara dari luar atau dalam negeri atau kolaborasi keduanya. Sasaran

ancaman non militer adalah di wilayah aktual yakni terjadi di sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta di wilayah konseptual yakni terjadi di wilayah perumusan kebijakan atau perumusan aturan perundang-undangan.

Eskalasi ancaman nonmiliter disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman yang akan memengaruhi kondisi pertahanan negara, mulai dari eskalasi ancaman rendah, sedang, hingga tinggi. Eskalasi ancaman rendah jika kondisi kehidupan bermasyarakat belum ada gejala yang dapat memicu konflik di seluruh wilayah Indonesia. Eskalasi ancaman sedang jika kondisi dinamis sosial kemasyarakatan terganggu akibat serangan ancaman nonmiliter; meskipun ada ancaman tetapi dinilai belum sampai pada tahap membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Eskalasi ancaman tinggi jika kondisi dinamis sosial kemasyarakatan terganggu akibat serangan ancaman nonmiliter dalam berbagai dimensinya sehingga negara dalam kondisi bahaya yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.

Sementara itu, merujuk *Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter*, macam ancaman nonmiliter dikelompokkan menurut: dimensi ideologi, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi teknologi, dimensi keselamatan umum, dan dimensi legislasi. Berikut masing-masing penjelasannya.

#### 1. Ancaman Non militer Berdimensi Ideologi

Ancaman nonmiliter berdimensi ideologi meliputi ancaman dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ancaman



yang berasal dari dalam negeri berupa: (1) menurunnya nilai-nilai kebangsaan; (2) bahaya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila; (3) paham anarkis oleh kelompok radikal dengan alasan keagamaan; (4) menguatnya ego kedaerahan (primor dialisme sempit); (5) aliran sesat/menyimpang; dan (6) separatisme. Sementara itu, ancaman yang berasal dari luar negeri dapat berupa: terorisme (ISIS, AlQaeda, Jemaah Islamiah, Jamaah Ansharut Tauhid, *Foreign Terrorist Fighter*), nilai-nilai liberalisme, dan komunisme.

## 2. Ancaman Non militer Berdimensi Politik

Ancaman non militer berdimensi politik dari dalam negeri berupa: disintegrasi bangsa, bias dan euforia demokrasi yang anarkis, mobilisasi massa/penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan dan/atau menumbangkan Pemerintah, konflik vertikal, dan pelanggaran HAM. Ancaman nonmiliter berdimensi politik dari luar negeri berupa: pengungsi luar negeri/imigran gelap dan spionase asing.

## 3. Ancaman Non militer Berdimensi Ekonomi

Ancaman non militer berdimensi ekonomi, antara lain: (1) pencucian uang; (2) penguasaan sumber daya alam; (3) penebangan kayu ilegal; (4) pertambangan ilegal; (5) pencurian ikan; (6) perdagangan manusia; (7) penyelundupan dan peredaran narkoba; (8) korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (9) inflasi yang tinggi; (10) membanjirnya produk luar negeri; (11) kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan

kemiskinan; (12) infrastruktur yang buruk; dan (13) besarnya utang luar negeri Pemerintah dan swasta.

#### 4. Ancaman Nonmiliter Berdimensi Teknologi

Ancaman nonmiliter berdimensi teknologi yaitu: (1) kejahatan siber: pembobolan situs, pencurian data, penyebaran virus/program jahat; (2) kejahatan perbankan; (3) penyadapan secara ilegal; (4) pembajakan hak cipta; (5) penyalahgunaan Teknologi Informasi melalui berbagai media daring untuk tujuan propaganda, intimidasi, penyebaran opini menyesat-konyang dapat mendorong gerakan sosial bermotif politik, dan/atau motif lain yang mengancam kedaulatan negara; (6) pencurian potensi sumber daya genetik, penyalahgunaan agensia biologi yang berakibat mengganggu; dan (7) ulah *hacker* jahat hingga tidak berfungsinya peralatan atau fasilitas sistem tertentu, atau berhentinya secara total fasilitas seluruh sistem, atau dikendalikannya suatu sistem oleh pihak lain dari jarak jauh sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka.

#### 5. Ancaman Nonmiliter Berdimensi Keselamatan Umum

Ancaman nonmiliter berdimensi keselamatan umum berupa bencana alam dan bencana nonalam. Macam bencana alam yaitu tsunami, gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, banjir, kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, dan kekeringan; sedangkan macam bencana nonalam yaitu bioterorisme dan wabah penyakit menular,

gagal teknologi dan gagal modernisasi, serta pencemaran lingkungan.

#### 6. Ancaman Nonmiliter Berdimensi Legislasi

Ancaman nonmiliter berdimensi legislasi dalam bentuk intervensi asing melalui kelompok tertentu atau LSM yang ingin memengaruhi dan/atau memaksa proses ratifikasi perjanjian internasional serta proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kepentingan-nyasehingga merugikan kepentingan negara. Ancaman nonmiliter berdimensi legislasi yang lain yaitu adanya keinginan daerah yang membuat suatu kebijakan bersifat ego kedaerahan, yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dapat membahayakan keutuhan NKRI.

Skala dampak ancaman non militer dilihat dari luas wilayah yang terpengaruh yaitu lokal, regional, dan nasional. Skala dampak bersifat *lokal* jika ancaman tidak terlalu besar dan dampaknya terbatas pada sebagian wilayah tertentu dalam lingkup kabupaten/kota; tidak langsung mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penggelaran kekuatan pada unsur-unsurkekuatan bangsa yang ada di wilayah yang terkena dampak dan menjadi kegiatan harian fungsi masing-masing sesuai bentuk dan sifat ancaman nonmiliter. Skala dampak bersifat *regional*, di mana ancaman yang dihadapi berskala sedang, dampak meluas pada beberapa wilayah/daerah dalam 1—3 provinsi, namun belum berdampak



langsung pada kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa secara menyeluruh. Penggelaran kekuatan pada unsur kekuatan bangsa yang ada di wilayah, namun dapat meminta perkuatan penanganan dari unsur utama di tingkat pusat. Skala dampak bersifat *nasional* jika ancaman yang dihadapi besar atau nasional dan mengganggu kepentingan nasional yang dampaknya berakibat langsung pada kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa secara menyeluruh. Penggelaran kekuatan menjadi tanggung jawab unsur utama tingkat pusat dengan tetap memberdayakan unsur-unsur kekuatan bangsa yang ada di wilayah.

#### **f. Ancaman Berperspektif Gender**

Ancaman terhadap perempuan dapat berupa : (1) kejahatan kekerasan berbasis gender; (2) pembatasan akses perempuan kepada sumber penghidupan; (3) radikalisme dan terorisme; (4) kesehatan dan penyakit; (5) kejahatan politik; (6) pelanggaran HAM; (7) pelanggaran terhadap hak atas komunitas budaya; (8) bencana, kerusakan lingkungan, dan polusi; (9) kelangkaan sumberdaya alam. Berikut beberapa praktik yang baik (*best practices*) ketika perempuan terpapar ancaman dan bagaimana mereka mengatasinya.

#### **#1 Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan**

Perdagangan manusia (*human trafficking*) sebagai salah satu perlakuan terburuk dalam pelanggaran harkat dan martabat

manusia, bukanlah hal baru. Deputi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa secara empiris sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan.<sup>20</sup> Praktik jual belimanusia terutama perempuan dan anak sudah lama terjadi, malahan mengalami perubahan bentuk dan pola penjarangan korban dari waktu ke waktu. Saat ini, perdagangan manusia sungguh memprihatinkan. Selain jumlahnya korban yang semakin bertambah, juga terbentuk jaringan antar pelaku (*trafficker*) yang cukup rapi. Modus operandinya pun semakin canggih.

Dalam budaya masyarakat yang patriarki, masih terdapat diskriminasi gender. Perempuan dan anak perempuan seolah hanya menjadi pelengkap seksualitas dan dianggap rendah. Budaya yang sudah mengakar sejak dahulu sulit sekali diubah. Kondisi ini diperparah oleh kemiskinan, pengangguran, kawin usia dini, serta budaya masyarakat yang hanya mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Dalam kondisi terjepit secara ekonomi dan sosial, mudah sekali diiming-imingi dan ibujuk oleh para calo. Mereka dijanjikan bekerja di kota dan/atau diluar negeri dengan upah yang tinggi, namun sesungguhnya yang terjadi adalah penipuan.

---

<sup>20</sup>Laki-laki yang menjadi korban pada umumnya adalah remaja laki-laki yang dipekerjakan di jermal (alat penangkap ikan berupa pagar dari pancang yang dipasang di tepi laut, diberi pintu seperti bubu, dan dibelakangnya dipasang jaring besar yang dapat diangkat) atau korban *paedofilia*.



Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia umumnya bermula dari kegiatan migrasi. Globalisasi telah mempermudah proses migrasi dari satu negara ke negara lainnya. Peluang bermigrasi ini kemudian dimanfaatkan dan dieksploatasikan sedemikian rupa menjadi lahan empuk untuk berbagai kegiatan perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan sesungguhnya tidak lain adalah bentuk migrasi yang dilakukan dengan tekanan, bukan atas kemauan sendiri. Dalam praktiknya, perempuan direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan.<sup>21</sup> Menurut Koentjoro, perdagangan perempuan tidak lepas dari masalah prostitusi sebagai bentuk industri, di mana ada peningkatan kebutuhan masyarakat dalam hal ini. Perdagangan perempuan salah satunya dimotivasi oleh pemenuhan “permintaan pasar” (baca laki-laki) dan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tanpa peduli bahwa perempuan—yang dijual sebagai pekerja seks dan tidak diberi keuntungan sepersen pun—menjadi pihak yang paling menderita serta seluruh hak-haknya sebagai manusia telah habis dirampas.<sup>22</sup>

Di Indonesia, undang-undang yang khusus mengatur *trafficking* sudah disahkan yakni UU No. 21 Tahun 2007 tentang

---

<sup>21</sup>Musdah Mulia, “Perdagangan Wanita di Mata *Women of Faith*”, *Majalah Basis*, No. 05, Mei–Juni 2004, hlm.69.

<sup>22</sup>Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: CV Qalam, 2004), hlm. 339.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* secara khusus dapat terlindungi. Ancaman hukuman bagi pelaku *trafficking* tidak lagi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang oleh beberapa kalangan dianggap belum memberi perlindungan karena ancaman hukumnya masih terlalu ringan, tetapi sekarang dapat menggunakan UU No. 21 Tahun 2007 yang ancaman hukumannya sangat berat.

Pengertian *trafficking* dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih luas dibandingkan dengan KUHP, dengan memasukkan proses dan definisi korban maupun pelaku. Pasal 1 angka (1) mendefinisikan *trafficking* sebagai berikut: “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari banyak orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi<sup>23</sup> atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

---

<sup>23</sup>Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk

Berdasarkan pengertian UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan beberapa konvensi PBB yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak, terdapat beberapa bentuk perdagangan orang: (1) perburuhan migran legal maupun ilegal; (2) pekerja rumah tangga (PRT); (3) pekerja seks komersial/eksploitasi seksual (termasuk pedofilia); (4) adopsi palsu anak; (5) pengantin pesanan (*mai-order bride*); (6) pengemis; (7) industri pornografi, peredaran obat terlarang; dan (8) penjualan organ tubuh.<sup>24</sup>

Untuk mencegah meningkatnya tindak pidana perdagangan orang tidak hanya cukup dengan ditetapkannya UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi perlu diketahui faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan orang tersebut. Merujuk berbagai penelitian, faktor utama yang memicu terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak adalah kemiskinan. Kondisi miskin berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan keluarga karena tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di samping itu, sosial kontrol keluarga—dalam arti pengawasan keluarga terhadap anak—juga menjadi rendah disebabkan kesibukan orang tua mencari nafkah di luar rumah. Untuk keluar dari kondisi yang memprihatinkan ini, tidak jarang

---

mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Lihat Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>24</sup>Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro, “*Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2009, Vol. 9 No. 1, hlm. 125—134.



orang tua tanpa sadar melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai agama, seperti: adanya keterlibatan orang tua dalam tindak pidana perdagangan perempuan dan anak mereka sendiri. Berdasar kenyataan ini, maka salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah pencegahan perdagangan perempuan dan anak melalui pemberdayaan sosial keluarga.<sup>25</sup>

### **Pemberdayaan Keluarga**

Goode menyatakan bahwa keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka. Istilah “keluarga inti” dalam ilmu Antropologi biasa disebut dengan keluarga *batih*, *somah*, *umpi*, dan sebagainya. Keluarga inti ini di negara-negara Barat disebut dengan istilah *nuclear family*. Beberapa keluarga inti biasanya terdiri daritiga atau empat kelompok yang hidup bersama dan terikat dalam keluarga besar—disebut dengan *extended family*.<sup>26</sup>

Pemberdayaan adalah proses penguatan kemampuan (fisik, mental, sosial, dan ekonomi) yang ada pada perseorangan, keluarga, kelompok, atau komunitas yang tujuannya adalah mewujudkan kemandirian. Kemandirian ini dikembangkan melalui penyadaran, pemampuan, pelibatan (partisipasi), pendampingan, pemihakan, pembelaan, dan pembentukan jaringan kerja. Pemberdayaan keluarga adalah upaya meningkatkan

---

<sup>25</sup>Abu Hanifah, “Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 2008, Vol. 13 No. 2, hlm.50.

<sup>26</sup>J. William Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 90.



pemahaman kesadaran dan kemampuan keluarga dalam mendayagunakan potensi fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang dimiliki sehingga mampu mandiri dalam melaksanakan fungsi dan peran<sup>27</sup> keluarga secara optimal, serta menjalin hubungan yang harmonis antar sesama anggota keluarga dan dengan lingkungannya. Pemberdayaan peran keluarga adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan motivasi keluarga dalam mendayagunakan potensi fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang dimiliki keluarga sehingga diharapkan keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peran keluarga secara optimal serta menjalin hubungan yang harmonis antara keluarga dan lingkungannya.

### **Pencegahan dan Penanganan Korban**

Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah rentan menghadapi permasalahan tindak perdagangan manusia adalah Kabupaten Indramayu. Berbagai data menyebutkan bahwa kasus perdagangan perempuan di Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terkait hal ini, Pemkab Indramayu telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan korban. Sebagai upaya pencegahan, Pemkab Indramayu membuat beberapa program:

---

<sup>27</sup>Fungsi keluarga adalah reproduksi, keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, kasih sayang, reaktif, perlindungan, ekonomi, sosialisasi, pembinaan lingkungan, kontrol sosial, serta tanggung jawab sosial dalam turut serta menata dan memelihara lingkungan kehidupan yang kondusif. Peran dapat diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang harus ditampilkan sesuai dengan kedudukannya.



sosialisasi, wajib belajar di madrasah, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pagelaran musik, dan materi trafficking masuk dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah.<sup>28</sup>

## 1. Sosialisasi

Sasaran dari program sosialisasi adalah siswa/siswi SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, serta remaja. Upaya sosialisasi yang dilaksanakan Pemkab Indramayu dilakukan dengan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan penyebaran pamflet/leaflet yang berisi tentang informasi terkait *trafficking* dan perlindungan perempuan. Adapun leaflet / pamflet / media sosialisasi yang digunakan Pemkab Indramayu untuk bersosialisasi antara lain: (i) leaflet tentang *trafficking* dikeluarkan oleh P2TP2A Indramayu; (ii) stiker mengenai hak anak dan perempuan; (iii) buku saku bagi anggota Gugus Tugas Indonesia oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, USA id, dan IOM (*International Organization for Migration*) Indonesia; (iv) panduan dalam mengembangkan perda pencegahan dan penanganan *trafficking*; (v) leaflet tentang pencegahan *trafficking* oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jawa Barat; (vi) leaflet tentang KDRT oleh BPPKB Jawa Barat; (vii) leaflet tentang pencegahan pornografi oleh BPPKB Jawa Barat; dan

---

<sup>28</sup>Antik Bintari dan Nina Djustiana, "Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat", *CosmoGov*, Vol.1 No.1, April 2015, him. 142—144.

(viii) leaflet tentang *bullying* oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia.

## 2. Wajib Belajar di Madrasah

Untuk memberikan pemahaman agama sejak dini, Pemkab Indramayu mengeluarkan kebijakan, dimana isi dari kebijakan tersebut mewajibkan seluruh siswa SD untuk mengikuti kegiatan madrasah. Selain itu, ada kewajiban bagi seluruh siswi untuk menggunakan seragam sekolah panjang sebagai upaya untuk mencegah tindakan pornografi.

## 3. Usaha Ekonomi Produktif

Program ini dilaksanakan sejak tahun 2012. Program ini dilakukan sebagai upaya agar masyarakat tidak mencari pekerjaan di luar wilayah Indramayu. Pemkab Indramayu memberikan modal bagi masyarakat terpilih untuk dapat berwirausaha mandiri. Adapun modal yang diberikan bukan dalam bentuk uang, melainkan waserda atau warung serba ada. Program ini diharapkan dapat mengurangi minat masyarakat untuk merantau keluar Indramayu mencari pekerjaan, dimana seringkali masyarakat tertipu saat mencari pekerjaan.

## 4. Pagelaran/Konser Musik

Sebagai upaya sosialisasi, Polres Indramayu mengadakan pagelaran musik yang mengkampanyekan

bahaya *trafficking*. Dalam pelaksanaannya, Polres Indramayu bekerjasama dengan beberapa pihak.

#### 5. Materi *Trafficking* dalam Kurikulum Pendidikan

Bila mengingat bahaya *trafficking* dapat menjerat siapa saja, maka Dinas Pendidikan Indramayu bekerjasama dengan BPPKB Indramayu dan Polres Indramayu memasukkan isu *trafficking* sebagai materi dalam kurikulum pendidikan yang harus dipahami siswa/siswi di sekolah.

Dalam upaya penanganan, terdapat program berbasis pelayanan yang diberikan kepada korban. Secara umum, penanganan terhadap korban *trafficking* meliputi tiga hal: identifikasi, rehabilitasi, dan reintegrasi.<sup>29</sup>

1. *Identifikasi*; untuk mengidentifikasi orang-orang yang tereksplotasi sebagai korban *trafficking*, bukan mengidentifikasi pelaku *trafficking*, lalu memindahkan orang/korban tersebut ke penampungan atau tempat yang lebih aman untuk kemudian dilanjutkan dengan tindakan rehabilitasi.
2. *Rehabilitasi*; merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi korban *trafficking*. Lamanya korban untuk direhabilitasi tergantung pada tingkat kondisi korban. Menurut IOM, apabila seseorang telah teridentifikasi sebagai korban *trafficking*, korban harus ditempatkan pada suatu penampungan atau rumah aman yang menyediakan lingkungan yang aman dan

---

<sup>29</sup>Antik Bintari dan Nina Djustiana, *Ibid.*, hlm. 145—146.



terlindung bagi pemulihan korban dan tindak lanjut prosesnya. Penampungan atau rumah aman tersebut dikenal juga dengan sebutan *shelter*. Selama proses rehabilitasi berlangsung, korban untuk sementara waktu ditempatkan di *shelter*, baik yang disediakan oleh Pemkab Indramayu ataupun yang berasal dari masyarakat—contohnya Puan Amal Hayati As-Sakienah. Apabila korban membutuhkan pertolongan medis, maka layanan kesehatan dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu. Hal ini dikarenakan jika dibutuhkan visum pada saat proses hukum, maka pihak Kepolisian lebih mudah merujuknya.

3. *Reintegrasi*; bertujuan untuk membantu korban *trafficking* kembali berintegrasi dengan keluarga dan lingkungannya. Reintegrasi sosial sangat diperlukan agar keluarga korban dan lingkungan di sekitarnya dapat menerima keberadaan korban kembali. Dalam hal ini, BPPKB Indramayu dan Dinas Sosial memiliki peran penting dalam melaksanakan proses reintegrasi.

## **#2 Perempuan Sebagai Pelaku Bom Bunuh Diri**

Salah satu ancaman terhadap keamanan masyarakat, baik domestik maupun internasional adalah terorisme. Terorisme masih tetap menunjukkan wajahnya sebagai sebuah fenomena yang kompleks, di mana kekerasan digunakan untuk memperoleh kekuatan (*power*) guna mengubah, mengganti, atau memengaruhi keadaan politik, sosial, dan ekonomi yang dipandang merugikan,

tidak adil, dan menyengsarakan, yang menyebar luas secara akut. Dalam dua dekade terakhir, terorisme telah mengalami transformasi global dan memperbaiki diri, baik secara teknis maupun kemampuan menyebarkan ancaman yang sangat serius dengan capaian global. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda yang faktual bahwa terorisme telah menyurut. Justru sebaliknya, terorisme terus bertahan dan berkembang di seluruh dunia, bahkan dengan globalisasi, terorisme telah mengubah ruang lingkup dan penyebarannya.<sup>30</sup>

Keamanan insani sebagai sebuah pendekatan baru non tradisional, relevan untuk menekan perkembangan terorisme global karena, *pertama*, dapat melakukan identifikasi dan deskripsi berkaitan dengan latar belakang maupun faktor-faktor penyebab timbul dan perkembangannya terorisme internasional sebagai akibat dari hegemoni barat dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup, sumber daya alam, hukum internasional, dan hak asasi manusia sehingga dunia Barat dipandang sebagai pihak yang harus bertanggung jawab karena menimbulkan konflik dan ketidakadilan serta ketimpangan global yang harus dilawan. *Kedua*, jika faktor penyebab terorisme akibat ketidakadilan dunia Barat dalam mengelola politik internasional yang tidak adil, maka dengan keamanan insani dapat dirumuskan upaya perbaikan hubungan Timur-Barat bersendikan tata kelola yang adil, bermartabat, tidak berstandar

---

<sup>30</sup>James D.Kiras, "Terorism and Globalization", dalam J. Baylis dan S. Smith (Vol. Eds.), *The Globalization of World Politics*, 3<sup>rd</sup> editon, (New York:Oxford University Press, 2005), hlm. 495.

ganda, dan berdasarkan prinsip kesamaan dan keseimbangan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, reformasi PBB khususnya Dewan Keamanan patut untuk dipertimbangkan sehingga tidak didominasi oleh kepentingan-kepentingan Barat. Sementara itu, jika terorisme global disebabkan oleh faktor kapitalisme/ liberalisme Barat sehingga menyebabkan pemiskinan negara berkembang, penguasaan sumber-sumber keuangan oleh Barat, eksploitasi sumber daya alam oleh industri-industri liberalistik, maka melalui keamanan insani sebab-sebab tersebut dapat ditekan melalui program-program restrukturisasi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan internasional agar memberikan kebijakan yang adil dan seimbang dalam sektor keuangan terhadap negara berkembang sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional mereka, di samping juga mendorong perlunya kebijakan pembangunan yang memerhatikan dan melestarikan lingkungan hidup dengan prinsip membangun tanpa merusak lingkungan di samping terus dikembangkan upaya-upaya menemukan bahan baku substitutif dalam industri. Semuanya untuk mencegah pemiskinan negara dunia ketiga, yang boleh jadi untuk saat ini menjadi lingkungan yang subur untuk tumbuhnya benih-benih terorisme global. Restrukturisasi IMF, Bank Dunia, dan Ecosoc sangat mendesak untuk dilakukan.

Jika terorisme global disebabkan oleh faktor ideologi keagamaan, keamanan insani sebagai sebuah pendekatan dapat berperan secara efektif mengembangkan sebuah perangkat



penyelaras sebagai antitesis fundamentalisme ideologi agama dengan mengembangkan dan mengimplementasikan perlunya ideologi baru yang berwawasan kemanusiaan, baik dalam tataran kehidupan nasional(domestik) maupun dalam tataran hubungan antara aktor-aktor internasional. Ideologi baru ini, di samping berbasis nilai-nilai kemanusiaan, juga berbasis pada nilai-nilai kemanfaatan, toleransi, kerjasama, dan moderasi.

Viotti dan Kauppi menyebutkan tiga faktor yang melatarbelakangi perkembangan terorisme: faktor domestik maupun global, ideologi, dan lingkungan. Teroris adalah individu yang secara kejiwaan berada dalam posisi kepribadian yang terbelah. Mereka berada dalam pengalaman kekerasan, kekejaman secara imajiner dari hasil pemahaman dan persepsi mereka terhadap orang-orang yang dipandang kejam, tidak adil, rakus, dan hegemonik dan itu harus dilawan. Teroris sebagian besar dalam melakukan aksi terornya dilandasi oleh ideologi tertentu (komunisme, fasisme, fundamentalis, dan lain-lain). Dalam perspektif ideologi, ide-ide yang bertentangan dengan ideologi yang dianutnya adalah musuh yang harus dilenyapkan dengan segala cara. Faktor lingkungan mengaitkan terorisme dengan lingkungan dimana seseorang dibesarkan. Individu yang dibesarkan dalam kultur penuh penindasan dan kekerasan akan cenderung melakukan hal yang sama dalam penyelesaian persoalan yang dihadapinya. Kekerasan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai tujuan. Terlepas dari ketiga faktor di atas, setiap individu atau kelompok kteroris tidak pernah terlepas

dari masyarakatnya, baik secara ideologis, psikologis ,politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.<sup>31</sup>

Kegley dan Wittkopf menekankan pendapat bahwa terorisme internasional menampilkan ciri-ciri baru yang sebelumnya tidak ditemukan. Aksi terorisme saat ini melibatkan suatu jaringan global melalui sel-sel yang sulit dideteksi yang beroperasi di berbagai negara serta melakukan koordinasi dan perencanaan yang sistematis sebelum suatu serangan dilancarkan. Kelompok teroris memanfaatkan arus globalisasi untuk memfasilitasi aktivitas mereka, di mana batas-batas tradisional negara tidak lagi menjadi hambatan untuk menjalankan operasi mereka. Penggunaan teknologi yang canggih juga menjadi ciri baru dari gerakan terorisme. Penggunaan internet untuk menyebarkan informasi pembuatan bom atau untuk menampilkan gambar bagaimana kelompok teroris melakukan eksekusi terhadap korban yang diculik, merupakan perkembangan terbaru dalam pemanfaatan media massa untuk menyebarkan ketakutan dan kepanikan pada pihak lawan. Penggunaan serangan bunuh dirisecara massal yang digerakkan oleh kebencian yang mendalam terhadapsasarannya, merupakan elemen yang sulit diatasi hanya dengan respon militer

---

<sup>31</sup>Paul R.Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relation and World Politics: Security,Economy and Identity*, (Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997), hlm. 166—167.

karena para pelakunya justru melihat kematian sebagai senjata yang ampuh untuk mencapai tujuan politik.<sup>32</sup>

## Radikalisasi Teorisme di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, salah satu akar terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal memaksakan kehendak.<sup>33</sup> Radikalisme merupakan pandangan yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai, tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Pada akhirnya, radikalisme cenderung identik dengan tindak kekerasan bahkan sampai pada bunuh diri menuju kebermaknaan hidup yang diyakininya.<sup>34</sup>

Definisi terorisme hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi yang mempelajari terorisme. Berbagai definisi terorisme belum menjadi kesepakatan secara universal. Pemerintah Indonesia melalui UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>32</sup>Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*, (Belmont:Wadsworth, 2003), hlm. 113.

<sup>33</sup>Pernyataan Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan Idris dalam Rapat Koordinasi Program Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT(18/02/16); lihat Khoirul Anam, "Direktur Deradikalisasi BNPT Sebut Terorisme Layaknya Kentut", <https://damailahindonesiaku.com/direktur-deradikalisasi-bnpt-sebut-terorisme-layaknya-kentut.html>.diakses pada tanggal 12 Mei 2013.

<sup>34</sup>Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 38.



Terorisme mendefinisikan terorisme sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas nasional.

Ideologi radikal berakar dari paham dan fanatisme agama atau kepercayaan yang keliru.<sup>35</sup> Sebuah model radikalisasi yang cukup berpengaruh diperkenalkan oleh Quintan Wiktorowicz. Dalam penelitian terhadap berbagai komunitas ekstremis muslim di Inggris, ditemukan bahwa mereka yang rentan terlibat dalam kelompok terorisme adalah individu-individu yang pemahaman ilmu agamanya kurang mendalam.<sup>36</sup>

Wiktorowicz menyatakan bahwa permulaan dari proses radikalisasi yaitu pada saat seseorang mulai membuka dirinya terhadap ide-ide dan dunia baru yang dianggap benar sehingga meninggalkan pandangan lamanya. Tahap ini disebutnya sebagai pengenalan kognitif (*cognitive opening*). Menurut Wiktorowicz bahwa keluhan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan personal merupakan faktor-faktor dari luar yang mendorong individu

---

<sup>35</sup>Fathurin Zen, *Radikalisme Retoris* (Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012), hlm.205.

<sup>36</sup>Alex P. Schmid, *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*, (The Hague: ICCT, 2013), hlm. 23—24.

bergabung ke dalam kelompok radikal. Tahapan selanjutnya adalah pencarian religi (*religious seeking*). Pada tahapan ini seseorang mulai mencari makna dari keagamaan. Mereka mulai aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti diskusi-diskusi maupun ceramah-ceramah, baik secara terbuka maupun tertutup.

Berikutnya adalah tahap *framing*. Para pendakwah dari kelompok radikal yang memiliki kredibilitas menyampaikan dakwahnya untuk menarik individu-individu yang masih rentan tersebut supaya tertarik masuk ke dalam kelompoknya. Teknik-teknik agitasi dan dalil-dalil keagamaan digunakan untuk meyakinkan para calon anggota kelompok. Pada tahap sosialisasi(*socialisation*), individu-individu mulai mendapatkan instruksi-instruksi keagamaan yang memfasilitasi indoktrinasi, membangun identitas eksklusif, dan melakukan perubahan nilai-nilai keyakinan. Tahap akhir adalah internalisasi(*internalization*). Pada tahap ini, individu mulai memahami dan mendalami ideologi barunya dan menanamkan pada keyakinannya sebagai ideologi yang paling benar. Selanjutnya, individu-individu tersebut bergabung dalam kelompok radikal dan siap untuk melakukan aksi terorisme.

Gerakan radikal—khususnya yang berbasis agama—di Indonesia bukan barang baru, tetapi telah mengakar sejak lama di masyarakat.<sup>37</sup> Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo merupakan

---

<sup>37</sup>Hasan Hamka dkk, *Blueprint Deradikalisasi*, (Jakarta: BNPT, 2013), hlm.10.



sebuah gerakan kelompok radikal yang ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Islam Indonesia (NII). Kartosuwiryo menentang Pemerintah RI yang tidak menerapkan syariat Islam dalam mengatur dan mengelola negara. Hal ini dinilainya sebagai sebuah pengkhianatan terhadap umat Islam di Indonesia. Akibat pertentangan tersebut, Kartosuwiryo melakukan gerakan pemberontakan dengan tujuan mendirikan NII yang diproklamasikan di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949.<sup>38</sup> Gerakan berbasis keagamaan ini merupakan embrio dari gerakan kelompok teroris Jemaah Islamiah (JI) yang telah melakukan beberapa kali aksi pengeboman di beberapa tempat di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Psikologi UI, proses bergabungnya seseorang dengan kelompok teroris di Indonesia sebagian besar terjadi dengan cara bertemu dengan orang-orang yang telah terlibat lebih dulu. Pertemuan tersebut berlangsung dalam konteks mereka sedang mempelajari Islam seperti di pesantren, majelis taklim, sekolah, kampus, dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka dibesarkan dalam keluarga Islam yang menekankan pelaksanaan syariat Islam dalam kondisi apapun. Dengan demikian, segalanya telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, mereka mencari pembenaran eksternal yang dalam tinjauan psikologi disebut “extra punitive” sehingga nonmuslim, pemerintah, militer, dan orang asing seperti orang

---

<sup>38</sup>Hasan Hamka dkk, *Ibid.*, hlm. 10—11.

Amerika adalah sebagian dari mereka yang harus disalahkan.<sup>39</sup> Mereka harus kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kebenaran yang mereka pahami dan ikuti. Jika tidak mengikuti keinginan mereka, harus dilawan dengan jihad seperti yang dilakukan saat ini.

Proses perekrutan dilakukan dengan menysasar orang-orang yang sedang mengalami krisis identitas. Melalui para guru, kerabat, dan/atau teman dalam organisasi; subjek ditawarkan informasi keagamaan yang dibutuhkan ataupun langsung ditawarkan untuk berkomitmen membela perjuangan Islam maupun balas dendam terhadap individu, kelompok, ataupun organisasi yang dianggap sebagai musuh-musuh Islam. Mereka dijanjikan sebuah pekerjaan, kehidupan yang lebih enak—bahkan surga bagi mereka yang menjadi *syuhada*, mati karena membela Islam. Para anggota baru yang direkrut didorong terus untuk meninggalkan identitas lamanya dan mengganti identitas baru seperti kelompoknya. Jika sudah demikian, subjek melupakan seluruh kepentingan pribadi mereka dan menggantinya dengan kepentingan tujuan organisasi.<sup>40</sup>

Kelompok teroris terus menyebarkan paham radikal melalui berbagai macam cara. Pola penyebarannya berkembang dengan cara-cara yang konvensional (seperti melalui ceramah langsung atau tatap muka) sampai pada penggunaan teknologi modern dengan memanfaatkan internet sebagai media.

---

<sup>39</sup>Sarlito W. Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologis* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), hlm. 49.

<sup>40</sup>Sarlito W. Sarwono, *Ibid.*, hlm. 50.



Radikalisasi terorisme juga dilakukan melalui penerbitan majalah, buletin, dan situs-situs yang menyebarkan propaganda jihad dengan senjata, petunjuk pembuatan bom, cara-cara penyerangan, dan lainnya yang mengarah pada kegiatan serangan terorisme.

Secara garis besar, radikalisasi terorisme di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat pola: (i) melalui media massa baik berupa radio, buku, majalah, internet; (ii) komunikasi langsung yaitu dalam bentuk ceramah, dakwah, dan diskusi; (iii) hubungan kekeluargaan yaitu melalui bentuk pernikahan, kekerabatan dan keluarga; dan (iv) lembaga pendidikan baik itu umum maupun pesantren. Sebagai bukti terus berjalannya proses radikalisasi terorisme di Indonesia, hingga saat ini terjadi fenomena bergabungnya para pemuda-pemudi Indonesia menjadi anggota ISIS. Menghilangnya 15 orang Indonesia dari kelompok wisata di Turki dan ditangkapnya 15 orang Indonesia oleh aparat keamanan Turki di wilayah perbatasan Turki-Suriah mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan tempat yang subur bagi berkembangnya paham radikal teroris.

### **Perempuan Sebagai Martir**

Sabtu pagi tanggal 10 Desember 2016, Tim Datasemen Khusus (Densus) 88 menangkap perempuan bercadar bernama Dian Yulia Novi (27 tahun) di kamar kos yang beralamat di Jalan Bintara Jaya VIII RT 04/09, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Di tempat itu, ditemukan sebuah bom



aktif yang tersimpan di dalam tas ransel hitam dan rencananya akan diledakkan di Istana Negara. Dian adalah perempuan pertama Indonesia yang rencananya akan menjadi pelaku bom bunuh diri. Martir perempuan ini lazim disebut “pengantin”. Pada umumnya, mereka tidak bertugas sendirian karena selalu ada laki-laki yang mendampingi dalam pelaksanaannya.

Setelah menangkap Dian, Densus 88 membekuk Ika Puspitasari alias Salsabila di Purworejo dan Jumiatun Muslim alias Atun alias Bunga alias Umi Delima yaitu istri Santoso—pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang tewas tertembak pada Operasi Tinombala. Ketiga perempuan ini telah *berbaiat* ke Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi yang bermarkas di Irak.

Ketertarikan para perempuan tersebut menjadi pengantin yakni karena doktrin Daulah Islamiyah yang tak lain adalah ISIS/NIIS. Kepala Bagian Mitrapopenmas Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol. Awi Setiyono menjelaskan bahwa doktrin ini meyakinkan soal aksi *amaliyah* (serangan langsung ke sasaran) bagi pengikutnya. Intinya, jika belum mampu ke Suriah maka mereka bisa melakukan *amaliyah* di negerinya masing-masing. “Itulah yang memotivasi para teroris di Indonesia,” kata Awi yang mendapatkan keterangan tersebut melalui proses penyidikan. Dian sendiri mengaku tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan para pendukung NIIS/ISIS di Indonesia. Ia baru tertarik dengan kegiatan para jihadis saat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan.



Hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, kita dikejutkan dengan kasus peledakan tiga gereja di Surabaya. Puji Kuswati bersama kedua anak perempuannya meledakkan diri di Gereja Kristen Indonesia, sementara suami dan kedua anak lelakinya meledakkan diri di dua gereja yang lain yakni Gereja Pantekosta dan Gereja Santa Maria Tak Bercela. Bagaimana mungkin orang tua mengajak anak-anaknya melakukan teror bom bunuh diri dengan dalih jihad? Peristiwa tertangkapnya beberapa perempuan Indonesia yang akan menjadi pelaku dan pelaku bom bunuh diri membuat banyak pihak terkejut. Fenomena apakah yang menyebabkan perempuan menjadi pelaku bom bunuh diri di Indonesia?

Tertangkapnya Dian, Ika, dan Atun sebagai pelaksana aksi bom bunuh diri, diakui beberapa ahli terorisme sebagai sebuah fenomena baru di Indonesia. Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris, tujuan teroris menasar kaum perempuan sebagai pelaku aksi bunuh diri adalah untuk menggecoh aparat penegak hukum karena sosok teroris di Indonesia selama ini selalu diidentikkan dengan laki-laki. Alasan lainnya, perempuan juga dianggap lebih mudah dipengaruhi, terutama untuk kaum perempuan yang memiliki masalah dalam keluarga. Perempuan bisa menjadi lebih militan bila mereka merasa menjadi korban dalam konflik rumah tangga atau perceraian. Ketika sudah dicuci otak dengan pemahaman radikal, ia bisa menjadi militan dalam menjalankan misi yang diinstruksikan kepadanya.

Menurut Dian bahwa melakukan bom bunuh diri bukan berarti dirinya telah kehilangan harapan dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Akan tetapi hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan prioritas sebagai jihad *fisabilillah* (hanya karena Allah semata). Ia tidak takut dengan murka Allah meskipun tindakannya akan melukai bahkan membunuh banyak orang. Dalam surat wasiatnya, Dian meminta maaf kepada suaminya karena pernah membuat kesalahan. Dalam interogasi, kepolisian akhirnya mengetahui jika keluarga Dian tengah mengalami masalah. Pengalaman Dian menjadi TKW selama 4,5 tahun pun menunjukkan dirinya berasal dari keluarga kurang mampu. Ditambah lagi dengan pemahaman agama yang kurang membuatnya sangat mudah dipengaruhi.

Meskipun di Indonesia termasuk baru, namun pemanfaatan kaum perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri bukanlah hal yang baru di luar negeri. Contohnya dua anak gadis berseragam sekolah yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Nigeria tanggal 9 Desember 2016 lalu. Bom tersebut menewaskan 30 orang dan melukai 57 orang lainnya di sebuah pasar Kota Madagali di kawasan timur laut Nigeria.

Pada tahun 1990-an, seorang perempuan Tamil meledakkan diri dengan bom yang dipasang pada ikat pinggang. Bom tersebut meledak ketika ia membungkuk di depan Perdana Menteri Rajiv Gandhi, seolah mau memberikan penghormatan. Aksi ini merupakan balas dendam 330 perempuan Tamil yang tergabung dalam *Female Black Tigers* atas perkosaan yang

dilakukan *Peace Keeping Force India* di wilayah Tamil, di mana pada saat itu Rajiv menjabat sebagai perdana menteri.

Mekanisme “pemaksaan perempuan” juga menciptakan kelompok “Black Widow” yang menyerang sekolah di Rusia pada tahun 2004. Mereka adalah para perempuan yang suaminya dibunuh tentara Rusia pada Perang Chechnya. Pada banyak kasus lain; suami, anak, atau saudara laki-laki mereka disandera hingga mereka rela menjadi martir bom bunuh diri.

Kekejaman sangat mungkin menempatkan perempuan menjadi korban untuk dijadikan pelaku bunuh diri. Di Irak, berdasarkan laporan *Daily Mail*, 80 orang perempuan dinodai. Tidak hanya secara psikologis, tetapi juga sosial untuk kemudian mereka dihadapkan pada pilihan melakukan bom bunuh diri demi mengembalikan kehormatan dirinya. Itulah satu-satunya jalan untuk membersihkan dosa akibat diperkosa.

Di Indonesia, fenomena pemanfaatan kaum perempuan sebagai pelaku teror diperkirakan tidak akan berhenti dengan tertangkapnya Dian. Perubahan pola rekrutmen seperti ini harus diwaspadai karena berpotensi dilakukan dalam jumlah besar. Beberapa tempat yang harus dicermati adalah sekolah, kampus, pesantren, dan lingkungan perkantoran. Mereka akan menyasar wanita muda yang mengalami kekecewaan. Para perempuan itu dijanjikan untuk dinikahi, kemudian dipengaruhi dengan ideologi-ideologi radikal. Jika sebelumnya perempuan hanya ikut pengajian dan penyiapan logistik, sekarang dan ke depan dijadikan martir.

Fakta meningkatnya jumlah perekrutan perempuan di ISIS juga terlihat dari hasil studi yang diterbitkan dalam *Journal Science Advances and Involved* berjudul “*Women’s Connectivity in Extreme Networks*”. Studi yang melibatkan ribuan peneliti tersebut menunjukkan bahwa meskipun laki-laki lebih banyak berperan di garis depan, namun faktor pengikat organisasi teroris ini sebenarnya adalah kaum perempuan. Tim tersebut berhasil mengidentifikasi sekitar 24.883 laki-laki dan 16.931 perempuan berdasarkan tingkah lakunya di dunia maya, yang memiliki keterlibatan dengan ISIS. Para peneliti menemukan bahwa meski secara jumlah personel laki-laki lebih banyak, namun perempuanlah yang paling efektif dalam berkomunikasi sehingga kelompok-kelompok kecil yang menyebar di beberapa tempat tersebut menjadi kuat ikatannya.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei *Saiful Mujani Research and Consulting*, terdapat sekitar 0,8 persen warga Indonesia yang mendukung kelompok ISIS. Walaupun jumlahnya kecil, namun para simpatisan di Indonesia dinilai berpotensi menjadi martir dalam melakukan aksi terorisme. Simpatisan ISIS di Indonesiatermasuk yang terkuat di Asia Tenggara. Menurut SMRC, hal ini disebabkan karena mereka sudah canggih, terutama para *master mind*-nya. Para teroris ini tak hanya mengerti teknologi, tetapi juga hubungan per orang sehingga jumlahnya akan terus bertambah.

Banyak perempuan yang sudah lama bergabung dengan kelompok-kelompok militan dan jihadis, akan tetapi biasanya

berperan pasif. Namun, belakangan ada kecenderungan para perempuan diterjunkan dalam aksi-aksi bunuh diri. Perempuan Indonesia dalam kelompok-kelompok ekstrim sekarang mengikuti jejak perempuan-perempuan di belahan dunia lain dengan aksi-aksi mematikan. Peningkatan partisipasi aktif para perempuan seiring dengan makin canggihnya jaringan media sosial. Lewat jaringan media sosial, propaganda jihadis makin mudah diakses, khususnya oleh kaum perempuan.

### **#3 Perempuan dan HIV AIDS**

Persoalan HIV/AIDS di Indonesia sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Hal tersebut didukung datapeningkatan jumlah orang dengan HIV/AIDS yang terinfeksi HIV (orang dengan HIV dan AIDS/ODHA) yang tidak lagi hanya pada kelompok yang semula dianggap sebagai kelompok rentan dan orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) yang artinya bukan hanya orang HIV positif, tetapi juga keluarga, pasangan, sahabat, atau pendampingnya (bisa HIV positif atau HIV negatif).

Jika pada awalnya kelompok yang berisiko tinggi HIV adalah mereka yang berperilaku seksual tertentu—kelompok homoseksual, kelompok heteroseksual yang berganti-ganti pasangan, pekerja seksual, dan mereka yang menggunakan jarum suntik tidak steril (pengguna narkoba suntik)—kini HIV/AIDS juga menginfeksi perempuan, istri atau ibu rumah tangga yang setia pada suami atau pasangannya. Di Indonesia,

data terakhir dari Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah perempuan positif HIV dari kalangan ibu rumah tangga mencapai 6.230 orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan perempuan pekerja seks yakni 2.021 orang. Data ini merupakan total dari tahun 1987 hingga 2013. Paparan HIV/AIDS tidak lagi hanya pada kelompok yang selama ini telah terstigma, tetapi juga telah merambah kelompok paling rentan yaitu perempuan dan bayi-bayi.<sup>41</sup>

Bagi perempuan ibu rumah tangga, realitas terkena HIV/AIDS berkaitan dengan konstruksi sosial budaya masyarakat yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak sama. Masih adanya ketimpangan sosial antara relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan, membuat kondisi perempuan ibu rumah tangga menjadi buruk, walau terkena dari suaminya sendiri. Dalam beberapa kasus, bagi perempuan ibu rumah tangga yang terkena HIV AIDS juga mempunyai beban ganda, seperti: merawat suami yang sakit, merawat anak yang kemungkinan juga tertular, mencari nafkah karena beban pengeluaran akan semakin besar. Belum lagi adanya stigma dan diskriminasi yang terjadi dari masyarakat yang belum memahami HIV AIDS secara komprehensif.

---

<sup>41</sup>Nurul Arifin, "Membuka Mata Masyarakat: Menghapus Diskriminasi dan Stigma Perempuan dengan HIV/AIDS", *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, 2005, No. 43, hlm. 49.



## Strategi Pemberdayaan Perempuan

Di era otonomi daerah, keterlibatan pemerintah daerah otonom dalam pemberdayaan perempuan untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS menjadi sangat penting. Pemerintah daerah otonom sebagai level pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki kewenangan yang lebih dari cukup untuk menentukan strategi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan kesehatan melalui kegiatan pengarus utamaan gender.<sup>42</sup> Sebagai contoh pemberdayaan potensi perempuan lokal dalam penanggulangan epidemi virus HIV/AIDS di Jayapura, Papua dilakukan oleh pemda mengingat angka prevalensi virus HIV/AIDS di Provinsi Papua tertinggi di Indonesia.<sup>43</sup>

Iffe mengusulkan tiga strategi yang bisa dilakukan untuk mengalirkan kekuatan/kekuasaan (*power*) terhadap ketidakberuntungan (*disadvantaged*) yakni melalui: kebijakan dan perencanaan, aksi politik dan sosial, serta pendidikan dan peningkatan kesadaran.<sup>44</sup> Merujuk hal tersebut, Sari dan Suwartiningsih menemukan tiga aspek yang perlu menjadi fokus perhatian dalam pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Salatiga yaitu aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek

---

<sup>42</sup>Betty Wahyu Nilla Sari dan Sri Suwartiningsih, "Pemberdayaan Perempuan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Salatiga", *KRITIS - Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Vol. 22 No. 2, 2013, hlm. 129.

<sup>43</sup>Maimunah, Iskandar Nugraha, Diah Ariani A., dan Lina Puryanti, *Pemberdayaan Perempuan Lokal Dalam Penanggulangan Epidemi Virus HIV/AIDS di Propinsi Papua*, (Surabaya: Universitas Airlangga, tanpa tahun).

<sup>44</sup>Jum Iffe, *Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice*, (Longman, Australia: Longman, 1995), hlm. 4.



ekonomi. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang integral dan salingterkait sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara parsial.<sup>45</sup>

a. *Aspek Politik* — Sejauh ini, sebenarnya sudah cukup banyak kebijakan Pemerintah yang berusaha menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA). Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk menyetarakan peran perempuan dan laki-laki. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Peningkatkan keterwakilan perempuan melalui lembaga legislatif sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Peningkatan jumlah perempuan di kelompok elite diharapkan berkorelasi dengan peningkatan akses, partisipasi, dan kontrol perempuan pada umumnya terhadap sumber daya dan meningkatkan manfaat yang diterima perempuan dari sumber daya tersebut. Harapan berikutnya, perempuan di kelompok elit juga dapat memengaruhi persepsi dan pemikiran laki-laki dalam organisasinya sehingga terbentuk kesadaran terhadap kesetaraan gender.
2. Menyusun peraturan daerah tentang keterwakilan perempuan dalam setiap kelembagaan masyarakat di

---

<sup>45</sup>Betty Wahyu Nilla Sari dan Sri Suwartiningsih, *Op. cit.*, hlm. 129—133.



tingkat kelurahan dan kecamatan. Selama ini, kaum perempuan memang dilibatkan dalam banyak kegiatan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun demikian, dalam kegiatan-kegiatan tersebut, perempuan cenderung hanya sebagai pelengkap daftar hadir.

3. Mensyaratkan penggunaan teknologi dan sistem kerja yang pro gender terhadap investor baru maupun investor yang akan memperpanjang ijin usahanya sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan secara sama oleh laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, dalam pengumuman lowongan kerja, tidak perlu lagi dicantumkan jenis kelamin tertentu.
- b. *Aspek Sosial Budaya* — Kehidupan sosial budaya turut membentuk kesenjangan gender dalam masyarakat. Dalam aspek ini, beberapa strategi yang lebih menekankan perhatian kepada masalah hubungan laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut.
1. Memberikan pelayanan konseling yang profesional kepada ibu rumahtangga dan PSK agar kedua kelompok rentan ini dapat menghargai diri dan hidupnya sama dengan mereka menghargai pasangannya. Diharapkan, akan terbentuk kesadaran pada ibu rumah tangga dan PSK tentang bagaimana kehidupan dan kesehatan mereka sangat

- berharga sehingga setiap orang harus memperlakukan mereka secara manusiawi.
2. Memberikan pelayanan konseling dan *mobile voluntary counseling test* (VCT) untuk memudahkan mereka yang ingin melakukan tes VCT tetapi tidak tahu caranya.
  3. Meningkatkan pemahaman tentang HIV/AIDS secara komprehensif melalui sosialisasi pada semua jenjang pendidikan dan masyarakat (termasuk ibu rumah tangga dan PSK) terkait masalah penularan, pencegahan, dan pendeteksian HIV/AIDS sejak dini. Pemahaman yang salah di kalangan masyarakat akan menyebabkan penilaian yang tidak benar kepada sesamanya yang telah terinfeksi HIV/AIDS.
  4. Memberikan pendampingan bagi ibu rumah tangga dan PSK yang terinfeksi HIV/AIDS sehingga tidak menjadi sumber daya manusia yang merasa inferior, putus asa, tetap percaya diri, berpikir positif, dan tidak berpikir untuk secara sengaja menularkan HIV/AIDS kepada orang lain.
  5. Pemantauan kesehatan PSK dan pelanggan. Pemantauan dapat berbentuk pemeriksaan dan perawatan serta pengobatan kesehatan PSK maupun pelanggan secara rutin. Saat ini, pemeriksaan kesehatan secara rutin Kota Salatiga baru diberikan kepada PSK, namun belum diberikan kepada pelanggan. Pemeriksaan ini menjadi media yang tepat untuk mendeteksi keberadaan penyakit menular seksual (PMS).



6. Meningkatkan dan memperluas sosialisasi penggunaan kondom perempuan sebagai pengganti kondom laki-laki karena secara fungsional lebih menguntungkan perempuan.
  7. Meningkatkan pemahaman tentang hak atas kesehatan reproduksi dikalangan masyarakat, khususnya pada kaum laki-laki. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi di kalangan laki-laki sangat diperlukan agar mereka menghormati dan turut menjaga serta melindungi hak-hak reproduksi perempuan selain hak-hak reproduksi mereka sendiri. Perlu ditekankan bahwa apabila laki-laki melindungi dan menjaga kesehatan reproduksinya, berarti dia juga melindungi dan menjaga kesehatan reproduksi pasangannya, yang selanjutnya juga berarti menjaga kesehatan generasi-generasi penerusnya.
- c. *Aspek Pendidikan* — Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak reproduksi diri sendiri maupun lawan jenis.
1. Menerbitkan buku panduan pendidikan seks sejak dini untuk setiap tahapan tumbuh kembang anak. Pemahaman seks yang benar dalam setiap tahap tumbuh kembang anak, mencegah anak-anak mencari informasi dari sumber yang tidak jelas. Dalam jangka panjang, setelah remaja dan dewasa, mereka akan tahu dan paham tentang

- hak reproduksinya serta bagaimana seharusnya menjaga, merawat, dan menghormati organ reproduksinya.
2. Mengintegrasikan pendidikan tentang hak atas kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dalam kurikulum pada semua jenjang pendidikan.
  3. Meningkatkan kesadaran kaum perempuan maupun laki-laki bahwa pekerjaan domestik bukanlah pekerjaan non produktif. Oleh karena itu, ibu rumah tangga tidak perlu memberikan kompensasi atas sumberdaya yang diperoleh melalui suaminya.
  4. Memberi pembekalan kepada setiap pasangan yang akan menikah tentang perlunya menghormati dan menjaga kesehatan reproduksi diri sendiri dan pasangan.
- d. Aspek Ekonomi — Ketidak berdayaan untuk mengakses sumber daya membuat perempuan tidak memiliki posisi tawar yang kuat terhadap laki-laki. Oleh karenanya, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi agar tidak tergantung kepada laki-laki untuk mengakses sumber daya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Beberapa strategi yang perlu disusun aspek ekonomi adalah sebagai berikut.
1. Peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan melalui pendidikan dan pelatihan agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja sehingga tenaga kerja perempuan tidak lagi dianggap sebagai tenaga kerja pengganti yang murah.



2. Membentuk kelompok usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi yang pada gilirannya juga akan meningkatkan pendapatan.
3. Menjalin kerja sama dengan masyarakat dunia usaha untuk kegiatan pasca produksi hasil produksi ibu rumah tangga maupun (mantan) PSK sekaligus mendorong penyusunan standar kualitas dan harganya, sebagai awal untuk mengakses pasar.
4. Penyediaan dana usaha dalam bentuk dana bergulir atau pinjaman lunak perseorangan maupun kelompok usaha.
5. Peningkatan investasi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Semakin banyak tenaga kerja perempuan yang terserap di sektor formal maupun informal, diharapkan semakin mengurangi jumlah perempuan yang berprofesi PSK.

Pemberdayaan perempuan harus berorientasi kepada kesetaraan gender, sehingga pemberdayaan perempuan tidak menekankan perhatian kepada perempuan saja, melainkan kepada hubungan antara perempuan dan laki-laki. Upaya pemberdayaan perempuan ini tidak cukup dengan peran pemerintah saja. Pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat luas, baik lembaga swadaya masyarakat, komunitas atau kelompok masyarakat, perorangan, lembaga pendidikan, maupun dunia usaha.

## 5. Caleg Perempuan dalam Pusaran Politik Uang

Perempuan dan politik merupakan konsep yang mempertemukan antara sekelompok orang berjenis kelamin perempuan dan negara. Ruang politik merupakan bagian tak terpisahkan dari serangkaian kepentingan negara dalam menaungi berbagai kepentingan rakyatnya. Ruang politik terbuka diwujudkan melalui agenda negara yang bernama Pemilihan Umum. Kebijakan pengarusutamaan gender Indonesia di bidang politik membolehkan adanya kuota minimal 30 persen bagi setiap partai untuk merekrut perempuan sebagai calon wakil rakyat yang dituliskan dalam pasal 65 ayat 1 UU No. 12 tahun 2003. Regulasi formal terus bergulir hingga hadirnya UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang memuat keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen pada partai—kemudian disempurnakan dengan UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Ada sembilan pasal yang mengatur keterwakilan perempuan di dalam partai politik.<sup>46</sup>

Meraih kekuasaan dalam politik bukanlah pekerjaan mudah karena melibatkan seabrek strategi, intrik, rekayasa bahasa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah uang. Menurut deLespinasse, uang merupakan salah satu kekuatan dalam politik, selain pena (media) dan pedang. Meraih tahta atau kekuasaan dalam genggamannya seorang politisi hampir dipastikan sulit

---

<sup>46</sup>Sigit Pamungkas, *Pemilu, Perilaku Pemilih, dan Kepartaian*, (Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism, 2010).

manakala ia tidak memiliki uang yang memadai untuk membiayai sosialisasi dan kampanye.

Uang memang bukan segalanya, namun tanpa uang, para politisi dan partai politik akan sulit meraih kekuasaan—kecuali bagi para politisi yang telah memiliki modal sosial di masyarakat. Politisi yang memiliki popularitas dan elektabilitas di mata publik karena sudah banyak berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Politisi seperti ini tidak banyak jumlahnya. Sementara politisi yang baru maju menjelang pileg jumlahnya di kisaran 90 persen lebih. Artinya, politisi dadakan tersebut harus didukung kekuatan uang. Jika tidak, ia tidak akan bersosialisasi maksimal melalui beragam atribut kampanye, seperti: poster, baliho, kartu nama caleg, dan berkontribusi pada beragam kegiatan bagi konstituen dan tim suksesnya. Untuk menjadi calon anggota DPR, seorang caleg memerlukan modal milyaran rupiah. Belanja caleg menjelang pileg sangat fantastis. Hal ini berpengaruh terhadap peredaran uang di suatu daerah. Menurut media massa lokal, dua bulan menjelang pileg, peredaran uang di Sulawesi Selatan mencapai 4,2 triliun. Dalam peredaran uang tersebut, politik uang (*money politics*) jelas berkontribusi secara signifikan.

Politik uang tidaklah dibenarkan dalam meraih sukses dalam dunia politik. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa caleg yang melakukan politik uang tidaklah sedikit. Politik uang juga senantiasa dikemas dengan beragam cara dalam kampanye. Sebagai contoh, seorang caleg memberikan sembako



kepada konstituen, uang dengan dalih biaya transportasi dalam kampanye, barang berupa sarung dan sebagainya. Lebih parah lagi adalah memberikan uang menjelang hari H pencoblosan. Caleg X memberikan Rp. 50 ribu, sementara caleg Y memberikan Rp. 75ribu.Pada kenyataannya, memberikan uang kepada calon pemilih belum tentu dirinya dipilih. Oleh karena itu, seorang caleg harus memiliki kompetensi yang memadai dan kepedulian yang telah dibangun sebelumnya untuk meraup suara. Ia dituntut untuk memahami kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya dan memperjuangkannya kelak jika terpilih.

### **Perempuan Anti-Politik Uang**

Organisasi perempuan memiliki peran penting di dalam melakukan akomodasi politik perempuan. Upaya memersatukan para caleg perempuan pun dilakukan oleh NARASITA melalui Forum Komunikasi Perempuan Politik DIY. Beberapa aksi damai telah dilakukan dengan mengumandangkan keberpihakan terhadap caleg perempuan. Upaya publikasi dan pelebaran ke ranah media diwujudkan pada kolom Jendela koran Minggu Pagi. Gerakan mewujudkan motto bersama BERSIAP (Bersih, Efisien, Aspiratif) diinisiasi dalam Forum Perempuan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota, DPRD DIY, DPR RI, DPD RI pada tanggal 8 Januari 2014. Beberapa poin yang disampaikan dalam forum tersebut adalah sebagai berikut: (1) turut menciptakan sistem politik yang Bersih, Efisien, dan Aspiratif; (2) perempuan caleg DIY berkomitmen untuk menciptakan Pemilu



yang antipolitik uang, santun, beretika, dan berbudaya; (3) perempuan caleg DIY berkomitmen untuk taat pada aturan dan undang-undang yang berlaku, mengembangkan jaringan di masyarakat sebagai pendukung, dan bermitra demi tujuan kesejahteraan rakyat; dan (4) perempuan caleg DIY juga memiliki komitmen untuk tanggap dan responsif terhadap persoalan masyarakat.<sup>47</sup>

#### **#4 Upaya PRB Melalui Gerakan PKK**

Pada tanggal 13 Oktober 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengangkat tema "Women and Girls - the [in]Visible Force of Resilience" dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).<sup>48</sup> Menurut terminologi, ketangguhan (*resilience*) merupakan kapasitas sistem, komunitas, atau masyarakat yang potensial terpapar bahaya untuk beradaptasi dengan cara menolak atau berubah untuk mencapai dan memelihara tingkatan fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh sejauh mana sistem sosialnya dapat mengatur dirinya secara mandiri untuk meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana-bencana yang terjadi sebelumnya demi perlindungan masa depan yang lebih baik dan memperbaiki langkah-langkah

---

<sup>47</sup>Anis Izdiha, "Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 41.

<sup>48</sup>Jika dialihbahasakan secara bebas, kurang lebih berarti "Perempuan dan Anak Perempuan – Kekuatan yang (Tidak) Tampak Menuju Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana".

pengurangan risiko.<sup>49</sup> Mengapa isu ini penting untuk diangkat oleh UN/ISDR<sup>50</sup> sebagai tema kampanye pengurangan risiko bencana?

Sering kita saksikan di televisi, bagaimana penderitaan kaum perempuan dan anak-anak (perempuan) setelah kejadian bencana. Ditampilkan secara dramatis penuh cucuran airmata. Sesungguhnya, perempuan dan anak perempuan memang mengalami dampak dari kejadian bencana secara tidak seimbang dibandingkan laki-laki sebagai akibat dari status gender mereka di dalam masyarakat. Namun, media massa seringkali lupa bahwa perempuan juga menjadi bagian penting dalam aktivitas tanggap darurat. Perempuan ternyata sangat efektif dalam menggerakkan massa. Mereka membentuk kelompok dan jaringan laksana para aktor sosial yang bekerja untuk memenuhi tekanan kebutuhan masyarakat korban. Pengalaman kejadian gempa bumi Bantul Mei 2006 dan erupsi Gunungapi Merapi September 2010 telah menjadi buktinya.

### **Perempuan Lebih Rentan**

Mengapa perempuan lebih rentan ketika terjadi bencana? Enarson menyatakan bahwa perempuan “dibuat” menjadi lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun masyarakat. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumber

---

<sup>49</sup>UN/ISDR, *Terminology on Disaster Risk Reduction*, (Geneva: UN/ISDR, 2009), hlm. 10.

<sup>50</sup>UN/ISDR adalah lembaga PBB yang khusus menangani strategi pengurangan risiko bencana.



daya, misalnya: jaringan sosial dan pengaruh, informasi, keterampilan, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan memegang kendali atas pengambilan keputusan.<sup>51</sup>

Perempuan “dianggap” bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik, seperti: mengurus anak, orang tua yang berusia lanjut, dan anggota keluarga yang memiliki ketidaksempurnaan fisik/mental. Mereka tidak memiliki kebebasan berpindah tempat untuk mencari pekerjaan setelah mengalami bencana. Laki-laki sering berpindah tempat, meninggalkan rumah tangga yang harus diambil alih tanggung jawabnya oleh perempuan dengan angka statistik yang terus meningkat.<sup>52</sup>

Rumah atau tempat tinggal seringkali hancur akibat bencana alam. Banyak keluarga yang terpaksa mengungsi ke tempat perlindungan sementara. Keterbatasan fasilitas untuk hidup sehari-hari, misalnya sarana untuk memasak akan menambah beban domestik perempuan. Pada saat yang bersamaan, beban ekonominya juga bertambah karena (terpaksa) harus memfungsikan sedikit kebebasan dan mobilitas yang dimiliki untuk mencari alternatif sumber pendapatan keluarga. Ketika sumber daya ekonomi perempuan berkurang,

---

<sup>51</sup>Elaine Enarson, *Gender and Natural Disasters*, (Geneva: Recovery and Reconstruction Department, ILO, 2000), hlm. 5.

<sup>52</sup>Juniawan Priyono, “Ketidakadilan Gender dalam Penanganan Pascabencana di Provinsi NAD”, *Jurnal Kebencanaan Indonesia*, 1(2), 2009, hlm. 85.

maka posisi tawar mereka di dalam rumah tangga juga terpengaruh secara signifikan.<sup>53</sup>

Beberapa kajian juga menunjukkan adanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan/pelecehan seksual setelah kejadian bencana alam di tempat pengungsian. Temuan Tim Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh menunjukkan bahwa 74% atau 108 dari 146 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan penyintas tsunami di Aceh adalah kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual ini terjadi di ranah domestik sejumlah 44 dari 80 kasus (55%) dan mayoritas terjadi di ranah publik sejumlah 64 dari 66 kasus (97%). Secara sepintas, tindak kekerasan ini tidak jauh berbeda dari sejumlah temuan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan bukan penyintas. Penelusuran lebih mendalam terhadap 108 kasus tersebut menunjukkan adanya kekhususan pengalaman yang terkait dengan kondisi pengungsian dan sejarah panjang konflik bersenjata di Aceh. Kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di barak sejumlah 60 dari 108 kasus (55%) dengan porsi yang hampir seimbang di antara ranah domestik dan publik. Perbandingan mencolok adalah kekerasan seksual yang terjadi di tenda, di mana kekerasan di ranah publik adalah empat kali lipat daripada kekerasan di ranah domestik.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Juniawan Priyono, *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>54</sup>Tim Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, *Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi di Aceh: Sebagai Korban juga Survivors*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2006).



## Peran Perempuan

Dengan mengusung tema "Women and Girls - the [in] Visible Force of Resilience", perempuan dan anak perempuan diberdayakan untuk berkontribusi sepenuhnya dalam pembangunan berkelanjutan melalui upaya PRB. Khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pemerintahan, serta perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan sosial ekonomi yang merupakan pendorong utama risiko bencana.

PRB merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas-sektor dan lintas-wilayah, serta meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam implementasinya, masyarakat merupakan subjek, objek, sekaligus sasaran utama upaya PRB dan berupaya mengadopsi dan memerhatikan kearifan lokal (*local wisdom*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai subjek, masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses saluran informasi formal dan non-formal sehingga upaya PRB secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, prasarana, dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan PRB. Dalam rangka menunjang dan memperkuat daya dukung tersebut, sejauh memungkinkan upaya PRB harus menggunakan dan memberdayakan sumber daya setempat. Dalam hal ini termasuk—tetapi tidak terbatas pada—sumber dana, sumber daya alam, keterampilan, proses-proses ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain sumber daya lembaga Pemerintah dan nonpemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan media massa; kita juga memiliki sumber daya lain yang dapat berperan serta dalam PRB yakni organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tim Penggerak PKK yang anggotanya kebanyakan perempuan—meskipun unsur keanggotaan laki-laki juga ada—merupakan para relawan yang menyediakan sebagian waktunya untuk PKK. Sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumah tangga sosok sentral dalam keluarga. Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan teknis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait.

Bukti nyata terkait upaya PRB melalui Gerakan PKK sudah ada. Dua tahun berturut-turut (2008-2009), Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Ibu Dyah Suminar memperoleh penghargaan *Ksatria Bakti Husada Kartika* dari Departemen Kesehatan RI atas keberhasilannya dalam penanggulangan bencana dan situasi krisis daerah, peningkatan peran posyandu oleh PKK, strategi pengembangan dan pengenalan produk dalam kewirausahaan, melaksanakan sosialisasi untuk memotivasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga, dan sebagai motivator pembentukan tim pembangunan desa binaan. Selain itu, juga dinilai berhasil dalam menggerakkan pelaksanaan gerakan sayang ibu, serta aktif dalam perbaikan gizi masyarakat.



Sepuluh Program Pokok PKK merupakan cerminan upaya PRB yang sesungguhnya. Sebagai contoh: kepedulian terhadap lanjut usia dengan membentuk Poksila (Pokja I) dan program pengembangan kehidupan berkoperasi (Pokja II). Program pangan (Pokja III) dengan peningkatan kualitas pangan keluarga melalui penyuluhan pengolahan makanan, penganekaragaman makanan, "13 pesan" gizi seimbang, dan usaha ekonomi produktif. Membentuk kelompok-kelompok wanita tani dengan membentuk kelompok wanita tani dan mengadakan kegiatan kelompok wanita tani dengan memanfaatkan halaman dan tanah pekarangan melalui HATINYA PKK (Halaman Asri Indah dan Nyaman).

Program Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga (Pokja III) meningkatkan pemasyarakatan perumahan yang sehat dan layak huni dengan: (a) melakukan pendataan rumah sehat/kurang sehat; (b) mengikuti penyuluhan perumahan yang sehat dan layak huni; (c) menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar lingkungan sehat dan indah melalui: SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) yang bersih dan lancar, MCK (Mandi Cuci Kakus) ada tempatnya sendiri, air bersih (kriteria air bersih yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau, tidak mengandung bibit penyakit, penggunaannya sehemat mungkin), tempat sampah agar tersedia didalam rumah dan disekitar rumah dalam keadaan yang baik sehingga dapat menampung sampah agar tidak berserakan, penanaman tanaman lindung dan tanaman hias; dan (d) melaksanakan azas Tribina.



Program Kesehatan (Pokja IV) memantapkan kualitas dan kuantitas posyandu dengan: (a) menyelenggarakan posyandu balita dengan kegiatan: (i) KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) menimbang bayi dan balita bersama Bidan Desa/para medis melayani pengobatan sederhana untuk bayi dan balita; dan (ii) Gizi: memberikan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk bayi dan balita yang telah ditimbang, memberikan vitamin A dosis tinggi untuk bayi dan balita pada bulan Februari dan Agustus, memberikan tablet Fe (tambah darah untuk WUS), penyuluhan gizi (memberikan penyuluhan anemia, memberikan penyuluhan GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), memberikan penyuluhan tentang cacingan, memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif), imunisasi, menanggulangi diare; (b) bersama bidan desa/para medis menyelenggarakan posyandu lansia dengan kegiatan: menimbang para lansia, mengukur tensi para lansia, memeriksa kesehatan, dan memberikan PMT. Penyuluhan Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin) serta membudayakan hidup sehat dan bersih melalui: (a) penanggulangan penyakit menular; (b) gerakan kebersihan; dan (c) mengelola dengan baik MCK, SPAL, dan tempat sampah. Keluarga mitra aktif mengikuti kegiatan dan mengajak masyarakat sekitar untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Program Kelestarian Lingkungan Hidup (Pokja IV) meningkatkan perilaku hidup bersih dalam keluarga dan lingkungan: (a) mengikuti penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), yang terdiri dari 16 poin: pemeriksaan



kehamilan, pertolongan persalinan, KB, penimbangan balita, kesehatan gigi dan mulut, miras/napza (narkoba), bebas asap rokok, gizi, air bersih, jamban sehat, sampah, air limbah, cuci tangan, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), dana sehat/JKM (Jaminan Kesehatan Masyarakat), dan obat sederhana/TOGA; (b) melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pokja IV juga memasyarakatkan pelestarian lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi keluarga dengan: (a) memelihara sumber air; (b) menjaga kelestarian fungsi hutan sehingga sumber air akan terpelihara; (c) memanfaatkan lahan tidur dan lahan kritis untuk ditanami tanaman yang bermanfaat; dan (d) mengajak warga masyarakat yang lain untuk ikut melaksanakan kegiatan diatas.

Program Perencanaan Sehat (Pokja IV) dalam bentuk, *pertama*, perencanaan sehat dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dengan mengikuti program KB dan mengajak warga masyarakat yang belum ber-KB untuk ikut ber-KB. *Kedua*, perencanaan sehat dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas melalui: (a) penundaan usia kawin; (b) pengaturan kelahiran (KB); dan (c) perilaku ketahanan keluarga. Ketiga, gerakan menabung dengan memiliki tabungan (tabungan dapat berupa uang, tanaman keras, dan ternak) dan mengajak warga masyarakat yang lian untuk ikut menabung.

Pengurangan risiko bencana yang efektif memerlukan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penerapan kegiatan PRB dapat memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan

masyarakat yang terpapar ancaman/bahaya. Partisipasi komunitas dalam PRB harus digalakkan melalui kebijakan khusus, pengaktifan jejaring, pengelolaan sukarelawan, pengakuan peran dan tanggung jawab, dan delegasi serta pembagian kewenangan dan sumber daya yang diperlukan. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.

### **#5 Kearifan Perempuan Suku Dani dalam Mengatasi Bencana Kekeringan**

Pegunungan Jayawijaya adalah “rumah” bagi Suku Dani. Mereka hidup dari berburu dan meramu hasil hutan dan sungai yang terdapat di sekitar kampung. Suku Dani juga membuka hutan menjadi ladang-ladang pertanian. Pembukaan hutan menjadi ladang dan penjagaan keamanannya adalah tugas kaum laki-laki suku Dani, sedangkan penanaman dan pemeliharaan tanaman yang lebih memerlukan kepekaan perasaan terhadap alam menjadi tugas kaum perempuan. Pembagian tugas initercermin pula dalam permukiman mereka. Kaum lelaki bertugas membuka kampung, membangun rumah, dan menjaga ketenteramannya. Kaum perempuan bertugas memelihara hunian seisinya, termasuk menumbuh-kembangkan generasi penerus. Itulah konsep kesepasangan dalam budaya suku Dani. Sungguh memang tidak mudah menjadi perempuan suku Dani. Kisah tragis Liwa tidaklah berarti kaum perempuan suku Dani gampang menyerah karena mereka dikenal kuat dalam bekerja.



Mereka juga memiliki kearifan lokal dalam mengatasi bencana, khususnya bencana kekeringan.

### **Sosio-Kultural Suku Dani**

Pada jalur pegunungan tengah Papua tinggal lima suku pedalaman, yaitu: Damal, Dani, Moni, Nduga, dan Mee. Suku-suku ini memiliki karakter, kepemimpinan, dan budaya yang hampir sama termasuk dialek bahasa. Perkampungan suku Dani pertamakali ditemukan di lembah Baliem ratusan tahun yang lalu. Seorang peneliti dari Amerika, Richard Archold, sekitar tahun 1935 mengadakan kontak dengan suku Dani untuk yang pertama kalinya. Sebutan “Dani” sebenarnya diberikan untuk orang Moni (*Moni* berarti orang asing) yang bermukim di dataran tinggi Paniai. Kata *moni* ini selanjutnya berubah menjadi *ndani* untuk mereka yang tinggal di Baliem. Penduduk lembah Baliem sendiri menyebut diri mereka *nut akuni pallimeke*, yang berarti kami dari Baliem. Suku Dani merupakan petani yang terampil dan telah menggunakan kapak batu, alat pengikis, pisau yang terbuat dari tulang binatang, bambu, tombak kayu, dan tongkat untuk menggali.

Suku Dani tinggal dalam kelompok-kelompok yang masih memiliki hubungan kekerabatan dalam sebuah *usilimo* atau *sili*. Beberapa *sili* yang berdekatan biasanya memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. Kelompok *sili* yang dibentuk oleh adanya hubungan darah dan/atau atas dasar persatuan teritorial

dan politik berkembang menjadi kampung. Sebuah kampung dipimpin oleh seorang kepala suku dengan didampingi seorang panglima perang. Kedudukan panglima perang dalam struktur kehidupan masyarakat Dani yang sangat penting menunjukkan tingginya tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai gangguan terhadap ketenteraman lingkungannya. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di daerah hutan dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Gangguan tersebut bisa datang dari binatang buas, bencana alam, dan atau suku-suku lain.

Sebagian besar masyarakat suku Dani memeluk agama Kristen. Meskipun demikian, banyak diantara upacara-upacara adat masih bercorak budaya lama yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, terutama masyarakat yang berada di tempat terpencil di daerah pegunungan. Suku Dani percaya terhadap *rekwas*. Kebanyakan upacara keagamaan diiringi dengan nyanyian, tarian, dan persembahan terhadap nenek moyang.

### **Bencana Kekeringan**

Pada bulan Desember 1986, bencana kelaparan melanda Kecamatan Kurima, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Bencana yang terjadi akibat kemiskinan dan tragedi kemarau panjang ini menyebabkan sedikitnya 169 korban tewas. Masyarakat terlalu menikmati buah pandan (kelapa hutan) yang menjadi makanan sampingan sehingga tidak sempat menanam umbi untuk



makanan pokok, padahal tanpa menanam umbi-umbian mereka tidak bisa makan. Selain itu, kemarau panjang membuat lahan perkebunan di wilayah tersebut gagal panen. Kondisi itu masih diperparah lagi dengan turunnya hujan deras yang mengakibatkan bencana longsor di beberapa kawasan perkebunan/ladang.

Belum lekang pula dari ingatan kejadian di tahun 1997. Keganasan alam menimpa penduduk Jayawijaya, dimana sebagian besar penduduknya yang tinggal di lereng-lereng pegunungan yang sulit dijangkau itu dilanda kekeringan panjang, yang belum pernah dialami sebelumnya. Kemudian menyusul bencana kebakaran hutan yang semakin menambah penderitaan. Umbi-umbian penopang hidup sehari-hari matikan tidak dapat tumbuh lagi. Sementara itu, tidak tersedia sumber pangan alternatif lainnya.

Kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang dampak kerugiannya berlangsung pelan namun pasti, dan biasanya kerusakan yang ditimbulkan bukanlah kerusakan fisik. Pada dasarnya, kekeringan merupakan kondisi kekurangan air untuk mencukupi kebutuhan pokok. Kekeringan biasanya terjadi akibat kondisi cuaca yang menyimpang dari kondisi normal, yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Penyimpangan tersebut dapat berupa kurangnya curah hujan dibandingkan pada kondisi normal.

Berdasarkan penyebabnya, kekeringan di Jayawijaya dibagi menjadi: kekeringan meteorologis, hidrologis, pertanian,

dan kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan meteorologis merupakan kekeringan yang semata-mata diakibatkan oleh watak iklim wilayah. Pada saat-saat tertentu, suatu wilayah mengalami kekurangan air karena curah hujan lebih kecil daripada nilai penguapan air. Wilayah tersebut biasanya selalu kekurangan air pada musim kemarau sehingga masyarakat sudah terbiasa dan mampu menyesuaikan aktivitasnya dengan iklim setempat. Meskipun demikian, penyimpangan musim masih dapat terjadi. Musim kemarau berlangsung lebih panjang daripada biasanya sehingga terjadilah bencana kekeringan.

Kekeringan hidrologis merupakan gejala menurunnya cadangan air (debit) sungai, waduk, dan danau; serta menurunnya permukaan air tanah sebagai dampak kejadian kekeringan. Kekeringan jenis ini biasanya disebabkan oleh kekeringan meteorologis, khususnya di wilayah yang kawasan hutannya sempit dan/atau mengalami kerusakan. Oleh karena itu, keberadaan dan kelestarian hutan perlu dipertahankan agar dapat menyimpan air yang cukup.

Kekeringan pertanian merupakan kekeringan yang berdampak pada pertumbuhan tanaman. Kekeringan muncul karena kadar lengas tanah berada dibawah titik layu permanen atau istilahnya tanaman telah mengalami cekaman air. Dampak dari ketiga jenis kekeringan tersebut adalah terjadinya kekeringan sosial ekonomi, yaitu saat pasokan dan permintaan barang dan jasa terganggu, juga menurunnya cadangan pangan yang menimbulkan kelaparan dan bahkan kematian.



Laporan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) berjudul “Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability” menunjukkan adanya dampak perubahan iklim yang sudah dan mungkin terjadi dimasa depan. Laporan tersebut dibuat menggunakan data yang jauh lebih banyak dibandingkan laporan serupa pada tahun 2001. Disimpulkan adanya “high confidence” yang berarti 80 persen kemungkinan untuk menyatakan bahwa perubahan suhu yang terjadi akhir-akhir ini telah berdampak kepada banyak sistem fisik dan biologis alam.

Khusus untuk wilayah Indonesia, laporan IPCC mengindikasikan bahwa hanya satu lokasi yang mengalami perubahan fisik alam, yaitu Papua. Berdasarkan data tahun 1970—2004, kenaikan rerata suhu tahunan di Indonesia mencapai 0,2—1 derajat Celcius. Dampaknya adalah menurunnya produksi pangan, yang berakibat lebih jauh meningkatkan risiko bencana kelaparan. Selain itu juga mengakibatkan peningkatan kasus gizi buruk dan diare, serta perubahan pola distribusi hewan dan serangga sebagai vektor penyakit. Pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah masyarakat miskin karena kemampuan beradaptasi mereka yang rendah sebagai akibat minimnya sumberdaya yang dimiliki. Kehidupan mereka cenderung sangat bergantung kepada sumberdaya yang rentan terhadap kondisi iklim.

Perubahan iklim ternyata memiliki karakteristik gender. *Pertama*, perempuan mengalami dampak berbeda dan lebih buruk akibat perubahan iklim akibat peran sosial, diskriminasi, dan



kemiskinan. *Kedua*, perempuan tidak diwakili kepentingannya dalam pengambilan keputusan terkait dengan perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan upaya mitigasi. Perempuan harus diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan karena memiliki perspektif dan keahlian khusus yang dapat disumbangkan.

### **Pengarusutamaan Gender dalam PRB**

Berdasarkan hasil Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Resiko Bencana (*World Conference on Disaster Reduction*) dan dalam rangka mengadopsi Kerangka Kerja Aksi 2005-2015 dengan tema 'Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana' memberikan kesempatan untuk menggalakkan suatu pendekatan yang strategis dan sistematis dalam meredam kerentanan dan risiko terhadap bahaya. Konferensi tersebut menekankan perlunya mengidentifikasi cara-cara untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana.

Bencana dapat diredam secara berarti jika masyarakat mempunyai informasi yang cukup dan didorong pada budaya pencegahan dan ketahanan terhadap bencana, yang pada akhirnya memerlukan pencarian, pengumpulan, dan penyebaran pengetahuan dan informasi yang relevan tentang bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Berkaitan dengan gender, diperlukan usaha-usaha, antara lain: memastikan kesetaraan



akses kesempatan memperoleh pelatihan dan pendidikan bagi perempuan dan konstituen yang rentan dan menggalakkan pelatihan tentang sensitivitas gender dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pelatihan tentang pengurangan risiko bencana. Suatu perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan, perencanaan dan proses-proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan risiko bencana, termasuk yang terkait dengan penjajagan risiko, peringatan dini, pengelolaan informasi, pendidikan, dan pelatihan.

Mengapa perempuan lebih rentan terhadap bencana? Enarson menyatakan: "... gender membentuk dunia sosial di dalamnya, dimana berbagai peristiwa alam terjadi." Perempuan "dibuat" menjadi lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun masyarakat. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumberdaya, misalnya: jaringan sosial dan pengaruh, transportasi, informasi, keterampilan (termasuk didalamnya melek huruf), kontrol sumber daya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan memegang kendali atas pengambilan keputusan; padahal itu semua penting dalam siklus penanggulangan bencana. Perempuan juga menjadi korban pengelompokan gender terkait pekerjaan. Mereka terwakili dalam industri pertanian, wirausaha, dan sektor ekonomi informal; dengan upah kerja dibawah UMR, keamanan kerja yang terbatas, tidak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi untuk menyuarakan aspirasinya. Sektor pertanian dan

informal pada umumnya yang paling terkena dampak peristiwa bencana alam. Oleh karena itu, perempuan lebih dari mewakili satudi antara penduduk yang tidak memiliki pekerjaan setelah terjadi bencana.

Pengalaman di negara-negara lain membuktikan adanya hubungan positif yang kuat antara perhatian gender dan partisipasi kaum perempuan terhadap tingkat keberhasilan proyek dan kesinambungan pengelolaan air bersih untuk mengatasi bencana kekeringan. Kaum perempuan merupakan kolektor, pengangkut, pengguna, dan pengelola utama air untuk keperluan rumah tangga. Kaum perempuan juga menjadi promotor dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi di lingkungan rumah tangga dan masyarakat. Sangat disayangkan jika pandangan kaum perempuan tidak terwakili secara sistematis dalam lembaga pembuat keputusan.

Proyek penyediaan air dan sanitasi seharusnya bisa memberikan kesempatan yang luas untuk mempersempit kesenjangan ini. Fokus pada gender akan memberi manfaat yang lebih besar dari sekedar kemampuan program penyediaan air dan sanitasi yang baik, yang tercermin dalam beberapa aspek, yaitu: proses penyediaan yang lebih baik, pengoperasian dan pemeliharaan yang lebih baik, pengembalian biaya, dan kesadaran terhadap higiene. Adapaun manfaatnya adalah sebagai berikut. *Pertama*, manfaat ekonomi dimana akses yang lebih baik pada sumber air akan memberikan waktu yang lebih banyak untuk melakukan aktivitas mendatangkan pendapatan,



memenuhi kebutuhan anggota keluarga, serta memberikan kesejahteraan dan waktu luang untuk kesenangan kaum perempuan. *Kedua*, manfaat kepada anak-anak dimana mereka tidak terikat pada pekerjaan mengumpulkan air yang menghabiskan waktu. Hal ini akan membuat anak-anak perempuan dapat mengikuti kegiatan sekolah kembali. Dampaknya akan terlihat antar generasi. *Ketiga*, pemberdayaan terhadap kaum perempuan dimana keterlibatan dalam program penyediaan air dan sanitasi akan memberdayakan kaum perempuan. Terlebih lagi jika kegiatan tersebut dihubungkan dengan program yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan sumberdaya produktif seperti pengembangan usaha kecil dan menengah.

### **Petik Pelajaran dari Koragi dan Popugoba**

Kampung Koragi dan Popugoba adalah dua diantara sekian banyak kampung yang pernah mengalami kekeringan dan kebakaran hutan di Kabupaten Jayawijaya. Kedua kampung ini secara geografis terletak di daerah pegunungan. Kondisi tanah dan batuan umumnya terdiri dari batu kapur/gamping dan granit, sedangkan di sekeliling lembah merupakan campuran antara endapan lumpur, tanah liat, dan lempung.

Kampung Koragi berada dalam wilayah Kecamatan Yalengga, sedangkan Kampung Popugoba berada di wilayah Kecamatan Asolokobal. Pada musim kering tahun 1997-1998, Kampung Koragi mengalami kegagalan panen, padang rumput

terbakar, mata air mengecil dan banyak diantaranya yang berhenti mengalir. Warga yang kelaparan terpaksa menjual babi untuk membeli makanan. Beberapa keluarga harus mengungsi untuk menghindari kebakaran lahan disekitar tempat tinggalnya. Kekeringan di Popugoba menyebabkan kurang lebih 20orang meninggal karena kelaparan. Binatang peliharaan, seperti: babi, ayam, dan anjing mati karena tidak ada makanan. Kaum perempuan harus mengambil air minum dari Sungai Baliem yang berjarak 10 km menuruni gunung dengan berjalan kaki selama 3—4 jam.

Tanaman pertanian di Kampung Koragi dan Popugoba, antara lain: ubi jalar, keladi, jagung, kedelai, wortel, cabai, mentimun, kol, sawi, buncis, kacang tanah, kacang panjang, tebu, jahe, dan bayam. Tanaman ubi jalar ditanam bersama tanaman pertanian lainnya dengan sistem tumpang sari di pematang atau bedeng. Sementara itu, tanaman perkebunan yang ditanam adalah kopi, mangga, pepaya, alpukat, markisa, dan jeruk. Tidak semua hasil tanaman pertanian dan perkebunan dikonsumsi oleh keluarga. Ubi jalar, keladi, dan sayur-sayuran adalah jenis tanaman yang dikonsumsi keluarga sehari-hari. Sebagian hasil kebun buah dipisahkan untuk dikonsumsi sendiri maupun disimpan sebagai persediaan di musim kering, sedangkan lainnya dijual atau ditukar dengan kebutuhan rumah tangga. Sebagai hasil upaya tanggap bencana yang mereka lakukan, perempuan suku Dani juga sedang dalam proses

mengembangkan keterampilan baru, yaitu mengelola sumberdaya alam dan pertanian dalam lingkungan yang sesuai.

Apabila ladang sudah siap ditanami, maka kaum perempuanlah yang menanam bibit tanaman, seperti: *hipere* (ubi) dan talas. Selanjutnya, perempuan pula yang memelihara tanaman di ladang hingga dapat dipetik hasilnya. Saat ini, sayur-mayur mulai banyak ditanam di ladang. Hasilnya sebagian dijual ke pasar. Pada awalnya, kegiatan ini tidak berorientasi pada keuntungan ekonomis, melainkan untuk kepentingan sosialisasi saja. Biasanya hasil ladang ditukar dengan babi. Suku Dani adalah masyarakat subsisten yang menggantungkan kehidupannya pada kekayaan yang diberikan alam sekitarnya. Kegiatan jual-beli hasil ladang merupakan kegiatan baru bagi masyarakat Dani.

Tidak ada hasil sungai yang diambil untuk dijual. Jika mendapat ikan atau udang dari sungai kecil di dekat kampung hanya untuk dikonsumsi sendiri. Hasil hutan disekitar kampung yang biasa diambil untuk dijual adalah daun paku, kayu bakar, kelapa hutan, dan madu. Semua orang memiliki akses yang sama ke hutan. Orang yang paling sering ke hutan dan ke sungai adalah laki-laki, sedangkan perempuan bekerja dilahan pertanian (kebun ubi). Kedua kampung juga memiliki peraturan adat yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Masyarakat Kampung Koragi dan Kampung Popugoba belum memiliki koperasi maupun bank. Bila ada kebutuhan, penduduk kampung biasanya meminjam uang dari gereja

setempat. Seluruh keluarga memiliki akses yang sama untuk meminjam uang di gereja. Uang pinjaman biasanya dikenakan bunga dan memiliki batas waktu pengembalian. Selain gereja, pihak lain yang berperan dalam memberikan pinjaman uang adalah teman dan sanak famili. Uang pinjaman dari teman dan atau sanak famili ini biasanya tidak dikenakan bunga dan batas waktu pengembalian berdasarkan kesepakatan. Sebagian besar penduduk kampung belum mengenal kebiasaan menabung di bank. Hanya beberapa keluarga saja yang sudah memiliki tabungan di bank. Hampir semua penduduk kampung lebih sering menyimpan kelebihan uangnya untuk membeli anak babi atau ayam agar bisa dipelihara dan dijual kembali.

Berbagai cara dilakukan warga kampung untuk mencegah dan mengatasi kekurangan makanan akibat bencana kekeringan, yaitu: (i) menghalangi meluasnya api ke pemukiman dan kebun dengan membuat parit pembatas; (ii) mencari sisa ubi dikebun yang belum mengering untuk dimakan karena biasanya ubi yang ditanam diantara bebatuan yang agak lembab belum mengering; (iii) memakan pisang sebagai pengganti ubi jalar dan keladi; (iv) meminta makanan dari sanak famili di kampung lain yang tidak terkena bencana; (v) menjual ternak untuk membeli makanan di pasar; (vi) menukar ternak dengan makanan dari kampung tetangga.

Bencana kekeringan dan kebakaran hutan / lahan memengaruhi pendapatan keluarga. Beberapa cara yang dilakukan penduduk kampung, yaitu: (i) hanya mengambil kayu,

madu, dan daun paku (untuk sayur) di area yang tidak kering untuk kemudian dijual; (ii) menjual ternak sebelum mati kekurangan makanan karena tidak mampu lagi memberi makanan; (iii) melapor ke kepala kampung mengenai bencana yang terjadi.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh kaum perempuan di Kampung Popugoba dan Koragi untuk mengurangi pengeluaran. *Pertama*, mengurangi bahkan menghentikan pembelian gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, teh, dan kopi; kecuali garam dan minyak tanah. *Kedua*, mengurangi besarnya sumbangan keluarga (biasanya berupa uang atau barang) untuk acara budaya dan acara keagamaan di kampung. *Ketiga*, mengurangi besarnya sumbangan untuk sanak saudara yang meminta sumbangan. *Keempat*, mengurangi pengeluaran untuk rokok dan sirih pinang.

Ketiadaan akses jalan—yang ada hanyalah jalan setapak—membuat hubungan perekonomian dari kampung dan sebaliknya tidak lancar. Penduduk kampung kesulitan membawa hasil tanaman atau ternak yang akan dijual ke pasar dalam jumlah banyak. Demikian juga sebaliknya, ketika membawa barang-barang dari kota ke kampung. Hasil panen yang mudah rusak dan tidak bisa dijual ke pasar dengan segera sangatlah mengurangi pendapatan keluarga. Pasar yang terdekat dengan kampung Popugoba adalah Pasar Misi, yang harus ditempuh dengan berjalan kaki menuruni gunung selama 1,5 jam hingga tiba di kampung Maima. Kemudian berjalan kaki lagi sekitar 15 menit



untuk sampai di jalan raya, dimana angkutan umum (mobil) menuju kekota Wamena melintas.

Beberapa hal penting ditemukan ketika mempelajari pengetahuan dan budaya perempuan suku Dani mengenali kejadian alam. Orang Dani menentukan datangnya musim panas dan musim hujan dengan melihat posisi matahari pada waktu terbit. Apabila matahari terbit di ufuk timur dan posisinya condong ke utara maka itu memberi tanda musim kering/panas mulai tiba. Apabila posisi matahari pada waktu terbit apabila condong ke selatan maka itu pertanda musim basah/hujan. Mereka tidak mengenal sistem perhitungan ataupun angka-angka untuk menentukan posisi lintang dan bujur. Jika di pagi hingga matahari naik sepenggalah nampak awan tipis di Puncak Trikora, maka pertanda musim kering tiba. Pada musim kemarau memang jarang sekali terdapat awan rendah seperti: *Stratus*, *Stratocumulus*, maupun *Nimbostratus*. Pembelajaran bagi semua bahwa dimanapun suku Dani tinggal, mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan alam. Keselarasan dan keseimbangan dengan alam benar-benar dipahami dengan baik.

Bagi orang Papua, *noken* merupakan simbol perdamaian dan juga kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua. Nama sejenis kantong ini boleh berbeda sesuai dengan suku masing-masing tapi penggunaan dan manfaatnya pasti sama, yaitu untuk menampung atau menyimpan hasil bumi, seperti: petatas, ubi, dan keladi. Bahkan ada beberapa suku di Papua yang menggunakan *noken* untuk menggendong bayi mereka dan juga



anak-anak babi. Orang Dani mengenalnya dengan nama “su”. *Noken* memiliki konsep biologi (serat yang diambil dari pohon dan daun tikar), geografi (kekayaan alam yang bisa dijadikan apa saja), teknologi (berupaya membuat wadah untuk mengangkut), etnografi (fokus pada suatu benda atau kegiatan budaya), hingga filosofi (harus ditransfer kepada anak-anak muda supaya mempertahankan budaya nenek moyang) yang terkait satu sama lainnya. Diperlukan keterampilan khusus untuk membuat *noken* dan hanya diperbolehkan bagi kaum perempuan. *Noken* merupakan simbol penting bagi kesuburan pertanian. Jika dilihat sepintas, ukurannya memang kecil namun dapat menyimpan berbagai macam barang, termasuk anak babi. *Noken* juga merupakan sumber kesuburan kandungan seorang perempuan. Jika memiliki *noken* yang bagus, sudah tentu akan melahirkan anak-anak yang sehat. Seorang perempuan yang tidak tahu membuat *noken* dianggap belum dewasa, belum mandiri, belum mampu bekerja, dan belum layak untuk menikah.

Perempuan suku Dani memiliki kearifan lokal untuk mengatasi bencana kekeringan dengan praktik-praktik terbaik, yaitu: (i) mengelola ekosistem secara berkelanjutan melalui perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik; (ii) mengembangkan ketahanan pangan untuk memastikan ketahanan keluarga dan komunitas terhadap bencana kekeringan; dan (iii) memiliki sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat, terutama sistem-sistem yang mudah dipahami dengan *pranatomangsa*.

## #6 Perempuan dan Sumber Daya Air

Penduduk dunia yang diperkirakan berjumlah 9,8 miliar pada tahun 2050 akan menghadapi kelangkaan air bersih. Padahal hingga saat ini, pasokan air sudah berkurang hampir sepertiganya dibandingkan pada tahun 70-an ketika bumi baru dihuni 1,8 milyar penduduk. Bagaimana dengan Indonesia? Cadangan air di Indonesia hanya mampu memenuhi 1.700 m<sup>3</sup> per orang per hari. Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan rerata cadangan air dunia yakni di atas 2.000 m<sup>3</sup> per orang per hari.

Meskipun 70 persen permukaan bumi tertutup air, namun sesungguhnya hanya sekitar 2,5 persen saja yang berupa air tawar, yang lainnya merupakan air asin. Itu pun tidak sampai 1 persen yang bisa dikonsumsi, sedangkan sisanya merupakan air tanah yang dalam atau berupa es di kutub. Tidaklah pada tempatnya jikalau orang mengeksploitasi air secara berlebihan. Mereka memanfaatkan air seolah-olah air berlimpah dan merupakan “barang bebas”; padahal semakin terbatas jumlahnya akan berlaku hukum ekonomi, dimana air merupakan benda ekonomis. Sebagai bukti, masyarakat pedesaan harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk mendapatkan air di musim kemarau. Orang rela bersusah payah dan berani membayar mahal untuk membeli air ketika terjadi krisis air.

Adanya permasalahan air yang sedang dialami dunia ini telah mendorong dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian



perlunya upaya bersama dari seluruh komponen bangsa dan bahkan dunia untuk dengan kebersamaan memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya air secara berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya air seperti cara lama yang dilakukan sendiri-sendiri atau secara terbatas oleh instansi-instansi pemerintah dan para ahli bidang hidrologi sudah tidak dapat secara efektif mengatasi permasalahan. Pengalaman menunjukkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan tidak dapat diselesaikan sendirian oleh pemerintah dan karena itu perlu melibatkan banyak pihak diluar instansi pemerintah. Berbekal kesadaran akan pentingnya air sebagai sumber kehidupan baik masa kini maupun masa datang yang dibutuhkan oleh berbagai sektor, maka air merupakan urusan semua orang. Ungkapan 'Water is everybody business' yang telah mendunia menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam pengelolaan sumberdaya air.

Air merupakan barang ultra esensial bagi kelangsungan hidup manusia, bahkan para ahli memprediksi bahwa air akan menjadi sumber konflik di abad ke-21. Bocoran laporan terkini dari Pentagon yang dikutip The Observer menyebutkan bahwa akan terjadi kekurangan air yang dahsyat (*catastrophic shortage*) di masa mendatang yang akan mengarah pada menyebarnya perang. Di sisi lain, kita juga sering bersikap "take it for granted" terhadap air. Bahkan, dalam ilmu ekonomi dikenal adanya "water-diamond paradox", di mana air yang begitu esensial dinilai begitu murah, sedangkan mutiara yang hanya sebatas perhiasan dinilai begitu mahal.

Seiring bertambahnya penduduk dan eskalasi pembangunan ekonomi, maka fungsi ekonomi dan sosial air sering terganggu karena semakin kritisnya suplai air; di sisi lain permintaan terus meningkat. Melihat kekhawatiran inilah, maka sumber daya air kemudian tidak lagi diperlakukan sebagai barang publik murni (*pure public good*) sehingga pemanfaatannya *pun* kemudian diatur dalam berbagai bentuk aturan main.

Kemajuan pesat yang telah dicapai dalam pembangunan di Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, ternyata juga diiringi oleh kemunduran kemampuan daya dukung sumber daya alam sebagai penyangga kehidupan. Kemunduran ini terjadi baik dalam kemampuan sumberdaya alam yang terbaharui (*renewableresources*), seperti: air, udara, tanah, dan hutan; maupun sumberdaya alam yang tidak terbaharui (*non-renewableresources*), seperti: minyak dan gas bumi, serta mineral. Air merupakan salah satu sumberdaya alam dan kebutuhan hidup yang paling penting dan merupakan unsur dasar bagi semua perikehidupan di bumi. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung.

Saat ini di Indonesia, masalah ketersediaan sumberdaya air tidak lagi menjadi masalah yang mudah dipecahkan, bahkan telah menjadi isu nasional bahwa di berbagai pusat pertumbuhan—terutama di Jawa, Bali, dan Lampung—telah terjadi krisis air bersih. Air termasuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui oleh kemampuan purifikasi diri oleh alam, sehingga sering dianggap sebagai sumberdaya alam yang tidak

bisa habis atau sumberdaya alam tidak terbatas. Air adalah milik umum dan karena itu terkesan gratis sehingga penggunaannya seringkali dilakukan secara tidak hemat dan kurang hati-hati. Anggapan tersebut keliru karena saat ini air telah menjadi sumberdaya alam yang terbatas jumlahnya. Hal ini terjadi karena air, di satu pihak air memiliki siklus tata air yang relatif tetap, sedangkan di pihak lain pemakaiannya terus bertambah seiring dengan penambahan populasi penduduk. Permasalahan lain adalah kualitas air yang secara alami tidak baik atau terus menurun akibat kecerobohan aktifitas manusia.

Untuk mengingatkan kita bahwa bumi kita yang terdiri dari tanah dan air merupakan anugerah Tuhan ini sangat kecil dan sangat rapuh namun harus kita pelihara, maka kita dan semua negara anggota PBB memperingati Hari Air Sedunia (*World Water Day*) setiap tanggal 22 Maret. Peringatan ini sebagai wahana untuk memperbarui tekad untuk melaksanakan Agenda 21 yang dicetuskan pada tahun 1992 dalam United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, atau secara populer disebut sebagai *Earth Summit*. Tema-tema yang dipilih sebagai peringatan setiap tahun sejak tahun 1994 adalah: Peduli akan Sumberdaya Air adalah Urusan Setiap Orang (1994), Perempuan dan Air (1995), Air untuk Kota-kota yang Haus (1996), Air Dunia: Cukupkah? (1997), Air Tanah Sumber Daya yang Tak Kelihatan (1998), Setiap Orang Tinggal di Bagian Hilir (1999), Air untuk Abad 21 (2000), Air untuk Kesehatan (2001), Air untuk

Pembangunan (2002), Air untuk Masa Depan (2003), Air dan Bencana (2004), Air untuk Kehidupan (2005), Air dan Kebudayaan (2006), Menanggulangi Kelangkaan Air (2007), Tahun Sanitasi Internasional (2008), Air Lintas batas (2009), Air Bersih untuk Dunia yang Sehat (2010), Air untuk Perkotaan (2011), Air dan Ketahanan Pangan (2012), Tahun Kerja Sama Air Internasional (2013), Air dan Energi (2014), Air dan Pembangunan Berkelanjutan (2015), Air dan Lapangan Pekerjaan (2016), Air Limbah (2017), dan Solusi Air Berbasis Alam (2018).

Meskipun *Earth Summit* tahun 1992 merupakan tonggak penting, namun dimensi sosial dan lingkungan dari agenda dunia tentang air telah mulai terbentuk lebih awal yaitu pada tahun 1972 atau dua tahun setelah dicanangkannya peringatan Hari Bumi dalam *the United Nations Conference on Human Environment* yang diselenggarakan di Stockholm. Pada konferensi ini telah dideklarasikan bahwa pencemaran air telah mencapai tingkat yang membahayakan sehingga diperlukan upaya untuk melindungi sumberdaya alam bumi yang mencakup udara, air, tanah, serta flora dan fauna. Dalam kurun waktu 20 tahun kemudian diselenggarakan *The Dublin Conference on Water and the Environment* (1992) yang melahirkan pandangan baru dunia tentang air atau yang sekarang disebut dengan “The Dublin Principles”, dimana keberlanjutan (*sustainability*) menjadi prinsip penting dalam pengembangan sumberdaya air. Dalam perkembangannya, *The Dublin Principles* ini menjadi referensi

dari beberapa pandangan yang saling bersaing dalam pengembangan sumberdaya air.

Disatu sisi, LSM dan relawan serta organisasi masyarakat sipil cenderung menekankan pada kata-kata: *affordable*, *equitable*, dan *basic right*; sedangkan organisasi-organisasi yang berorientasi kepada pembiayaan lebih menekankan kepada kata-kata *economic value* dan *economic good*. Berikut diuraikan secara singkat hasil *Earth Summit* yang diselenggarakan lebih dari 20 tahun yang lalu, yang melahirkan Agenda 21 dan pada khususnya *Chapter 18* yang terkait dengan sumberdaya air yang selanjutnya menjadi tonggak penting berkembangnya prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya air. Selain secara tegas menyetujui dan mengadopsi *The Dublin Principles* kedalam Agenda 21, *Chapter 18* menyatakan bahwa sumberdaya air perlu dilindungi dengan mempertimbangkan fungsinya dalam ekosistem akuatik maupun peranannya sebagai sumber air dalam rangka memenuhi dan mempertemukan antara pasokan dan kebutuhan air untuk kegiatan manusia. Selanjutnya adalah diterimanya pendekatan ekosistem (*the ecosystem approach*) sebagai pendekatan yang rasional dan ilmiah dalam pengembangan sumberdaya air.

Dokumen UNCED mengelaborasi kebutuhan untuk mempromosikan pendekatan multisektor yang dinamis dan interaktif yang perlu dilaksanakan pada tingkatan Daerah Aliran Sungai (DAS), wilayah sungai, dan subwilayah sungai. Dokumen ini juga menekankan perlunya untuk melindungi, mengonservasi,



dan mengelola sumberdaya air berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan penduduk asli/setempat dalam kerangka kebijakan pengembangan ekonomi nasional. Kepada kelompok masyarakat terkena dampak diberikan peranan yang sah (*legitimate*) dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Hal yang serupa adalah dikenalnya *riparian rights* atas air untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia meskipun pada sungai lintasbatas negara. Diantara berbagai kegiatan yang diidentifikasi, isu-isu yang dianggap penting lainnya adalah masalah-masalah pengelolaan sungai lintasbatas negara, banjir dan kekeringan, dan asesmen serta analisa atas risiko. Hal penting lainnya adalah perlu dikenali bahwa air permukaan dan air tanah hendaknya dipandang sebagai dua elemen yang saling bergantung satu sama lain (*interdependent*) dalam siklus hidrologi.

Air untuk kehidupan (*water for life*). Hal ini tepat sekali mengingat air merupakan kebutuhan hidup yang sangat vital bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Bahkan dapat dipastikan bahwa tanpa ada air, tidak akan ada kehidupan. Air diperlukan untuk air minum dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga, memproduksi bahan pangan, mencuci, menghasilkan energi, sebagai media transportasi, proses-proses industri, dan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Sumber kehidupan ini persediaannya terbatas dan semakin hari semakin terpolusi oleh kegiatan manusia sendiri, namun demikian masih banyak orang yang tidak mempunyai akses ke air. Sekalipun air merupakan

sumber daya yang terbatas, konsumsi air telah meningkat dua kali lipat dalam 50 tahun terakhir dan kita gagal mencegah terjadinya penurunan mutu air. Pada saat yang sama, jurang antara tingkat pemakaian air di negara-negara kaya dan negara-negara miskin semakin dalam. Dewasa ini 1,2 milyar penduduk dunia tidak mempunyai akses ke air bersih dan hampir dua kali dari jumlah itu tidak mempunyai fasilitas sanitasi dasar yang memadai.

Tantangan yang sungguh berat untuk dapat mencapai Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDG) dan Rencana Pelaksanaan Johannesburg yang telah disepakati pada KTT Pembangunan Berkelanjutan, termasuk sasaran untuk mengurangi jumlah orang yang tidak mempunyai akses ke air bersih dan sanitasi memadai sebanyak 50% pada tahun 2015, dan menyediakan air bersih kepada 200.000 orang dan fasilitas sanitasi yang baik kepada 400.000 orang setiap harinya kepada masyarakat dunia.

Ketersediaan air bersih hingga kini pada cakupan nasional baru mencapai sekitar 60 persen. Artinya masih ada 40 persen atau sekitar 90 juta rakyat Indonesia terpaksa mempergunakan air yang tak layak secara kesehatan untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini seyogyanya menjadi perhatian semua pihak untuk bagaimana mempertahankan kualitas lingkungan, mengembalikan fungsi hutan sebagai penyimpan air, melakukan revitalisasi air tanah yang merupakan sumber air bersih bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, dan sebagainya. Upaya-

upaya tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan air yang memadai bagi masyarakat, baik dalam kualitas maupun kuantitas, yang merupakan prasarat bagi kehidupan yang sehat dan produktif. Dalam pemanfaatan sumberdaya air perlu ditingkatkan usaha-usaha konservasi, pengendalian daya rusak, dan pendayagunaan sumberdaya air melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berkeadilan.

### **OTDA dan Konflik SDA**

Semakin langkanya sumber daya air di berbagai daerah, terutama air bersih untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, maka jika tidak diantisipasi sejak sekarang bisa menimbulkan konflik antardaerah. Konflik ini terjadi karena pemahaman yang salah terhadap otonomi daerah, berlomba-lombanya daerah untuk memacu pendapatan asli daerah, serta pemahaman yang keliru terhadap pengelolaan sumber daya air. Karena ketidaktahuannya, sebagian pejabat pemerintah ada yang berasumsi bahwa sumber daya air merupakan milik eksklusif suatu daerah. Oleh karena itu, mereka merasa berhak mengeksploitasi sumber daya air berdasarkan kebijakan pemerintahannya sendiri. Padahal, sama halnya dengan udara, air merupakan milik bersama yang pemanfaatannya tidak boleh dibatasi berdasarkan wilayah administrative pemerintahan. Daerah yang memiliki sumber daya air misalnya, tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi terkait dengan daerah hulu yang merupakan daerah tangkapan dan resapan air. Begitupun sumber daya air



yang melimpah di suatu daerah, tidak mungkin dimanfaatkan sendiri karena harus didistribusikan untuk daerah di bagian hilir. Oleh karena itu, harus ada kesepakatan antardaerah menyangkut pengelolaan air. Ada yang bertindak sebagai produsen dan ada daerah yang bertindak sebagai distributor. Namun, yang sering terjadi sekarang ini, daerah pemasok air sering memaksakan kehendak kepada daerah yang menjadi distributor atau konsumen air, misalnya dengan menentukan tarif yang cukup tinggi. Tindakan ini dilakukan biasanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, daerah pemasok air mengetahui daerah konsumen pasti tidak akan berdaya karena tidak memiliki sumber alternatif lainnya. Di sinilah mulai muncul konflik, yang tidak jarang disertai tindakan balasan.

Untuk menghindari konflik antardaerah akibat persoalan air ini, undang-undang tata ruang harus mengatur lebih tegas lagi persoalan air ini. Selain itu, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional yang diketuai Kepala Bappenas hendaknya bertindak lebih proaktif untuk mencegah terjadinya konflik antardaerah akibat persoalan air.

### **UU SDA dan Privatisasi Air**

Dengan semakin langkanya sumber daya air di berbagai daerah, terutama air bersih yang menjadi kebutuhan dasar manusia, pada masa depan hal ini akan menjadi sumber konflik di masyarakat. Itu akan dipicu dengan berlakunya otonomi daerah,

yang memberi wewenang besar pada setiap daerah untuk mengelola sumber daya di daerahnya masing-masing. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik maka langkah yang dianjurkan antara lain dengan menerapkan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air (UU PSDA).

Kiprah swasta yang kemungkinan akan mendominasi pengelolaan air bersih pascapengesahan Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA), perlu disikapi kritis. Oleh karena itu, yang terutama harus dipikirkan adalah pembentukan perangkat untuk melindungi rakyat miskin agar tetap memperoleh air bersih. Kalau sampai hak ini terabaikan, berarti pemerintah melanggar SDG yang sudah disepakati bersama. Kekhawatiran ini bisa dijawab dengan pemantauan serius terhadap semua perusahaan pengelola air bersih. Meskipun dikelola swasta, jika ada perangkat yang mengawasi ketat pelaksanaannya maka masalah dapat diminimalisir.



## Daftar Pustaka

- Arifin, Nurul. (2005). "Membuka Mata Masyarakat: Menghapus Diskriminasi dan Stigma Perempuan dengan HIV/AIDS". *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*. No. 43. hlm. 49—60.
- Bajpai, Kanti. (2000). *Human Security: Concept and Measurement*. Kroc Institute Occasional Paper #19. New Delhi: School for International Studies, Jawaharlal Nehru University.
- Bintari, Antik dan Djustiana, Nina. (2015). "Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat". *CosmoGov*. Vol.1 No.1. hlm. 124—148.
- Burgess, Peter J. (2008). "Non Military Security Challenges". dalam C.A. Snyder. *Contemporary Security and Strategy*. edisi ke-2. New York: Palgrave Macmillan.
- Buzan, Barry. (1991). *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in Post-Cold War Era*. Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Dalby, Simon. (1992). "Security, Modernity, Ecology: The Dilemmas of Post Cold War Security Discourse". *Alternatives: Global, Local, Political*. 17(1). hlm. 95—134.
- Enarson, Elaine. (2000). *Gender and Natural Disasters*. Geneva: Recovery and Reconstruction Department, ILO.
- Golose, Petrus Reinhard. (2009). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

- Mulia, Musdah. (2004). "Perdagangan Wanita di Mata *Women of Faith*". *Majalah Basis*. No. 05. Mei – Juni .
- Perwita, A.A. Banyu dan Yani, Y.M. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Prasetyono, Edy. (2003). *Human Security*. materi FGD Propatria di Hotel Santika. Jakarta. 11 September.
- Priyono, Juniawan. (2009). "Ketidakadilan Gender dalam Penanganan Pascabencana di Provinsi NAD". *Jurnal Kebencanaan Indonesia*. 1(2). hlm. 83—99.
- Ruby, Charles L. (2002). "The Definition of Terrorism". *Analyses of Social Issues and Public Policy*. hlm. 9—14.
- Sari, Betty Wahyu Nilla dan Suwartiningsih, Sri. (2013). "Pemberdayaan Perempuan Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Salatiga". *KRITIS - Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*. Vol. 22 No. 2. hlm. 118—135.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2012). *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologis*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Schmid, Alex P. (2013). *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: a Conceptual Discussion and Literature Review*. The Hague: ICCT.
- Stephan, Walter G. dan Stephan, Cookie W. (1996). "Intergroup Anxiety", *Journal of Social Issues*. 41(3). hlm. 157—175.
- Stephan, Walter G., Ybarra, Oscar dan Morrison, Kimberly R. (2009). "Intergroup Threat Theory". dalam T.D. Nelson (Vol. Eds.). *Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination* (hlm. 43—59). New York: Psychology Press.



- Tim Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh. (2006). *Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi di Aceh: Sebagai Korban juga Survivors*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- UN/ISDR. (2009). *Terminology on Disaster Risk Reduction*. Geneva: UN/ISDR.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- UNDP. (1994). "Redefining Security: The Human Dimension". *Current History*. No. 94. hlm. 229—236.
- Viotti, Paul R. dan Kauppi, Mark V. (1997). *International Relation and World Politics: Security, Economy and Identity*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Zen, Fathurin. (2012). *Radikalisme Retoris*. Jakarta: Bumen Pustaka Emas.





## MODUL KEEMPAT

# PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DAN PEMBUDAYAAN BELA NEGARA KAUM PEREMPUAN



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA



## MODUL 4

### PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DAN PEMBUDAYAAN BELA NEGARA KAUM PEREMPUAN

Materi	Modul ini merupakan lanjutan dari modul-modul sebelumnya dan membahas mengenai aplikasi dan pengembangan nilai-nilai bela negara, serta upaya pembudayaan nilai-nilai tersebut yang berdasarkan pada karakteristik dan kebutuhan perempuan Indonesia.
Kompetensi Utama	Kaum perempuan memahami pentingnya terlibat dalam bela negara., memahami dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah inspiratif perempuan Indonesia dari masa ke masa. Serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai bela negara sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki
Kompetensi Pendukung	Pada akhir sesi pembelajaran, peserta diharapkan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Perempuan Indonesia mampu memahami pentingnya turut berperan aktif dalam upaya bela negara;</li><li>• Perempuan Indonesia mampu melaksanakan dan membudayakan bela negara di dalam kehidupan sehari-harinya;</li><li>• Bentuk internalisasi dan implementasi nilai bela negara yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, situasi kondisi dan ancaman di lingkungan tempat</li></ul>

	<p>mereka tinggal dan isu-isu strategis nasional Indonesia saat ini;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perempuan Indonesia mampu berperan dan melaksanakan bela negara sesuai dengan latar belakang, kapasitas, dan kapabilitas yang dimilikinya.</li></ul>
--	---

## **SESI 4 : PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DAN PEMBUDAYAN BELA NEGARA KAUM PEREMPUAN**

- Waktu: 120 Menit
- Kompetensi Utama:

Kaum perempuan memahami pentingnya terlibat dalam bela negara., memahami dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah inspiratif perempuan Indonesia dari masa ke masa. Serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai bela negara sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki
- Kompetensi Pendukung:
  1. Perempuan Indonesia mampu memahami pentingnya turut berperan aktif dalam upaya bela negara;
  2. Perempuan Indonesia mampu melaksanakan dan membudayakan bela negara di dalam kehidupan sehari-harinya;
  3. Bentuk internalisasi dan implementasi nilai bela negara yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, situasi kondisi dan ancaman di lingkungan tempat mereka tinggal dan isu-isu strategis nasional Indonesia saat ini;
  4. Perempuan Indonesia mampu berperan dan melaksanakan bela negara sesuai dengan latar belakang, kapasitas, dan kapabilitas yang dimilikinya.
- Metode:
  1. Curah pendapat
  2. Diskusi kelompok

- Alat/bahan:
  1. Spidol, lem, lakban
  2. Metaplan merah dan biru
  3. Flipchart, kertas piano
  4. Lembar beda gender dan seks
  5. Presentasi ppt
  6. Film pendek
  
- Alur Fasilitasi:
  1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi dan pemahaman umum.
  2. Curah pendapat. Fasilitator mengajak peserta untuk mampu memahami pentingnya turut berperan aktif dalam upaya bela negara, mampu melaksanakan dan membudayakan bela negara di dalam kehidupan sehari-harinya, melakukan internalisasi dan implementasi nilai bela negara serta melaksanakan bela negara sesuai dengan latar belakang kapasitas yang dimilikinya; Masing masing penjelasan di metaplan warna biru,kuning,hijau dan putih . Lalu ditempelkan di flipchart.
  3. Fasilitator mengklasifikasi jawaban peserta, menampilkan daftarkegiatan pengembangan nilai dan pembudayaan bela negara bagi kaum perempuan. Setelah itu . Ajak peserta mendiskusikan hal tersebut.
  4. Fasilitator menayangkan presentasi PP tentang definisi pentingnya kaum perempuan turut terlibat dalam usaha pembelaan negara
  5. Fasilitator membagi peserta ke dalam 4 kelompok.
  6. Fasilitator menayangkan presentasi PP tentang berbagai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh kaum perempuan dalam usaha usaha bela negara ,
  9. Di akhir sesi, fasilitator menayangkan film pendek. Ajak peserta mendiskusikan secara cepat pesan film pendek tersebut.
  10. Fasilitator menutup sesi dengan menjelaskan hasil pembelajaran.



## MODUL 4

### PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DAN PEMBUDAYAAN BELA NEGARA KAUM PEREMPUAN

#### 1. Pendahuluan

Bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Bela negara bukan hanya merupakan tugas militer melainkan tugas seluruh warga negara sesuai amanat di dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 27 dan 30. Melalui modul ini diharapkan peserta ataupun fasilitator mampu memahami bahwa bela negara tidak serta merta hanya berurusan dengan peperangan ataupun angkat senjata, peserta dan fasilitator diharapkan mampu mengenali dan memahami berbagai bentuk bela negara yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Modul ini merupakan modul ke-5 dari rangkaian modul “Peningkatan Kapasitas Perempuan Bela Negara” yang berisikan 5 (lima) topik modul, yaitu 1) Wawasan Kebangsaan dan Jati Diri Bangsa, 2) Sistem Pertahanan semesta, 4) Konsep Bela Negara, 4) Nilai-nilai Bela Negara, 5) Pengembangan Nilai-nilai dan Pembudayaan Bela Negara Kaum Perempuan. Modul ini akan menguraikan contoh-contoh dan konsep bela negara dalam berbagai bentuk, sehingga peserta dan fasilitator mampu memahami bahwa bela negara dapat dilakukan oleh seluruh perempuan Indonesia, tanpa terkecuali. Modul ini disusun dengan harapan mampu bersifat lebih aplikatif dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai bela negara bagi perempuan Indonesia. Pada setiap sub bab pembahasan disampaikan tujuan



yang diharapkan dapat tercapai setelah pembahasan materi tersebut dilakukan. Pendekatan yang digunakan akan lebih banyak menggunakan percontohan, studi kasus, dan *lesson learned* agar sasaran pembelajaran lebih mudah tercapai. Metode, pendekatan, serta contoh yang disampaikan hanya merupakan panduan awal. Fasilitator diharapkan dapat secara kreatif mengembangkan materi yang disampaikan di modul ini, sesuai dengan kebutuhan dan sasaran sosialisasi yang dituju.

Modul ini ditulis dengan mengupayakan bahasa dan penyampaian yang komunikatif dan sesederhana mungkin, dengan harapan modul ini mampu menjangkau dan membawa pemahaman bagi perempuan Indonesia di seluruh kalangan yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Secara substansi modul ini menggunakan pedoman Tataran Dasar Bela Negara yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan RI, namun pada implementasinya disesuaikan dengan perspektif gender, rencana strategis dan fokus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, serta isu-isu strategis nasional seperti terorisme, lingkungan, keamanan siber, pembentukan karakter bangsa, kemandirian ekonomi, dll.

## **2. Metode Sosialisasi Bela Negara bagi Perempuan Indonesia**

- a. Tujuan: Agar fasilitator memahami tahapan dalam penanaman nilai bela negara bagi perempuan Indonesia
- b. Sasaran: Fasilitator

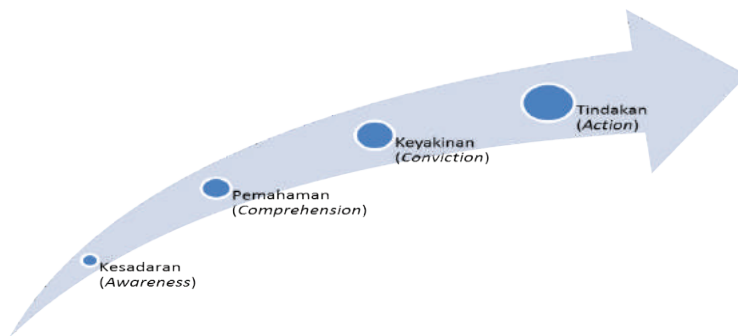
Dalam upaya menyampaikan materi dan memahami peran perempuan dalam bela negara, maka metode sosialisasi yang digunakan akan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu pendekatan



teori, pemetaan awal (*assessment*) sasaran dan metode pembelajaran yang digunakan.

### Pendekatan Teori Efek Hirarki (*Hierarchy of Effect Theory*)

Pada dasarnya teori ini merupakan teori komunikasi yang digunakan untuk melakukan pemasaran. Teori ini memiliki banyak versi dan model, namun yang akan digunakan dalam modul ini adalah model ACCA dari Russell H. Coney (1961).



#### 1) Kesadaran (*Awareness*)

Tahap pendekatan pertama yang digunakan adalah membangun kesadaran perempuan Indonesia mengenai betapa pentingnya peran perempuan baik di ranah domestik sebagai ibu, istri, dan anak di dalam keluarga inti. Serta peran perempuan di ranah publik sebagai pelayan publik, tokoh inspiratif, ataupun penggerak masyarakat, dsb. Oleh karena itu pada modul ini, akan dibangun kesadaran melalui pemaknaan perempuan dari perspektif filosofis dan etimologis dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pengenalan dan penyadaran potensi ancaman di tempat tinggal dan tempat beraktivitas pun diperlukan bagi para perempuan Indonesia, karena dengan begitu mereka akan

mampu melakukan tindakan bela negara sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Cara: penyadaran peran strategis perempuan, tanggung jawab, identifikasi ancaman yang ada di lingkungan mereka melalui internalisasi nilai-nilai bela negara.

## 2) Pemahaman (*Comprehension*)

Setelah terbangunnya kesadaran akan peran penting yang ia miliki dan ancaman nyata yang ada sekitarnya, selanjutnya perempuan Indonesia diharapkan mampu memahami secara utuh peran dan tanggung jawab besar yang diembannya untuk membangun bangsa dan negara sesuai dengan kapabilitas yang dimilikinya. Bagaimana dengan posisi mereka saat ini dapat turun berperan dalam menjaga kesatuan, keutuhan, dan kebanggaan NKRI dan turut menangkal adanya ancaman yang ada di lingkungannya melalui internalisasi nilai-nilai bela negara.

## 3) Keyakinan (*Conviction*)

Pemahaman yang utuh diharapkan mampu menghantarkan pada terbangunnya keyakinan yang kuat, bahwa keberadaan perempuan Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meyakini bahwa pelaksanaan tanggung jawab atas peran mereka saat ini, memiliki dampak besar dan strategis bagi bangsa Indonesia.

## 4) Tindakan (*Action*)

Setelah memiliki keyakinan yang kuat bahwa perempuan Indonesia memegang peranan besar dan strategis bagi bangsa dan negara, kemudian perempuan

Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan peran mereka saat ini yang dengan sebaik-baiknya dan terpacu untuk mengimplementasikan internalisasi nilai-nilai bela negara di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang mereka miliki. Tindakan bela negara yang dilakukan diharapkan dapat menangkal kemungkinan ancaman baik yang terjadi di lingkungan sekitarnya ataupun pada skala nasional.

### **Pemetaan Awal (*Assessment*) Sasaran Peserta Sosialisasi Perempuan Bela Negara**

Sebelum fasilitator melakukan sosialisasi dan penyampaian materi, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan dianalisis terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar sosialisasi dapat lebih tepat sasaran dan tercapainya tujuan sosialisasi. Hasil dari pemetaan awal ini dapat menjadi bahan bagi fasilitator untuk menyusun dan menyesuaikan contoh kasus, materi, dan implementasi bela negara pada sasaran yang dituju. Hal ini dikarenakan setiap komunitas masyarakat memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri yang tidak dapat disamaratakan dengan komunitas lainnya. Kekhasan ini pun akan menghasilkan jenis ancaman yang berbeda dan bentuk bela negara yang berbeda pula di setiap daerah. Oleh karena itu, fasilitator dinilai sangat perlu melakukan pemetaan awal dan analisis ke-9 aspek di bawah ini, sebelum dilaksanakannya kegiatan sosialisasi.

Sejarah	Geografis	Ekonomi
Pendidikan	Sosial-Budaya	Keseharian
Mata Pencaharian	Kelembagaan Lokal & Tokoh Sentral	Model & Media Komunikasi

- **Sejarah**

Setiap wilayah dan kebudayaan memiliki nilai dan kejadian historis tersendiri. Nilai dan kejadian historis di wilayah-wilayah yang akan didatangi dapat menjadi bahan materi sosialisasi ataupun justru menjadi lampu merah bagi fasilitator agar tidak membahas hal tersebut di ranah publik ataupun pada saat sosialisasi berlangsung. Sebagai contoh, fasilitator akan memberikan sosialisasi bela negara kepada perempuan di Aceh, lalu mengungkit kejadian pemberontakan GAM di Aceh tanpa mempertimbangkan dengan masak dampak dari materi yang disampaikan. Apabila hendak mengambil contoh salah satu kejadian sejarah di Aceh, maka sebaiknya sampaikanlah kejadian sejarah yang tidak akan membuka perdebatan ataupun rasa sakit hati pada masyarakat atau perempuan Indonesia yang menjadi sasaran sosialisasi.

Sejarah di wilayah sasaran dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran ataupun pembakar semangat bela

negara. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, sasaran peserta dapat lebih mudah memahami implementasi bela negara karena fasilitator menggunakan contoh terdekat dari kehidupan mereka. Sejarah dalam hal ini dapat merupakan peristiwa perjuangan kemerdekaan; peristiwa bersejarah pada masa orde lama, orde baru ataupun reformasi; sejarah terkait asal usul budaya dan wilayah, dsb.

Analisis yang dapat dilakukan: Adakah peristiwa bersejarah terkait perjuangan kemerdekaan di wilayah tersebut? Kejadian sejarah apa yang menjadi khas wilayah tersebut? Bagaimanakah perempuan Indonesia di wilayah tersebut memaknai peristiwa sejarah yang terjadi didaerahnya? Pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa tersebut? Apa yang dapat mereka lakukan saat ini terkait dengan pelajaran yang dipetik dari peristiwa bersejarah tersebut?

- **Geografis**

Analisis geografis dapat melihat karakter masyarakat yang dituju. Hasil dari analisis geografis dapat melihat juga pola keseharian, lingkungan pekerjaan dan juga karakteristik umum masyarakat. Karakteristik umum masyarakat yang berdiam di wilayah pesisir cenderung lebih terbuka daripada masyarakat yang tinggal di pedalaman, khususnya dengan datangnya orang ataupun nilai baru. Hasil dari analisis geografis pun berkaitan dengan nilai bela negara “Cinta Tanah Air”, fasilitator dapat menguji pengetahuan dan seberapa jauh perempuan setempat mengenal batas atau potensi yang ada di wilayahnya. Mengenal batas dan potensi wilayah menjadi penting, khususnya bagi perempuan yang tinggal di lingkungan permukiman perdesaan. Hal ini dikarenakan perempuan Indonesia yang memiliki pekerjaan

sebagai ibu rumah tangga, ataupun bekerja di kebun (bagi wilayah perdesaan), memiliki waktu dan kesempatan yang lebih banyak untuk memperhatikan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitar. Adanya kerusakan alam, pelanggaran batas wilayah (bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan darat), ataupun pendatang baru yang mencurigakan dapat dengan lebih cepat dideteksi (*early warning system*) oleh komunitas perempuan di suatu wilayah. Potensi alam dan geografis yang ada dapat dijadikan bahan materi penerapan bela negara bagi perempuan setempat dengan meningkatkan kesadaran dan rasa kepemilikan dengan lingkungan sekitar.

Analisis yang dapat dilakukan: Dimanakah letak geografis wilayah tersebut, apakah pesisir, pedalaman, perdesaan, atautkah perkotaan? Bagaimanakah letak geografis tersebut berpengaruh terhadap keseharian masyarakat? Potensi Sumber Daya Alam apa saja yang terdapat di wilayah tersebut? Sudahkah kaum perempuan di wilayah tersebut mengetahui dan menyadari akan pentingnya potensi tersebut? Bagaimana cara mereka memanfaatkan potensi geografis tersebut? Tindakan apa saja yang telah dilakukan kaum perempuan di wilayah tersebut untuk menjaga potensi sumber daya alam yang dimiliki? Seberapa dalam kaum perempuan di wilayah tersebut menguasai kondisi geografis di wilayahnya? Tahukah ia batas wilayah tempat ia tinggal?

- **Ekonomi**

Aspek ekonomi dilihat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan kaum perempuan di wilayah yang dituju. Tingkat kesejahteraan mempengaruhi bentuk dan aksi bela negara yang dapat kaum perempuan di wilayah sasaran

aplikasikan. Apabila tingkat kesejahteraan di daerah tersebut tinggi, maka nilai bela negara seperti pada poin keempat, yaitu rela berkorban bagi bangsa dan negara dapat diwujudkan. Perempuan bela negara yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, dapat saling tolong menolong dan rela memberikan bantuan baik dalam bentuk materiel atau yang terlihat (*tangible*) ataupun imateriel, sedangkan bagi perempuan yang tingkat kesejahteraannya belum terlalu tinggi, maka nilai rela berkorban dapat ditanamkan dan diaplikasikan dalam bentuk-bentuk yang imateriel atau tidak terlihat (*intangible*). Pada aspek ekonomi ini, agar para fasilitator dapat melihat dan memetakan nilai-nilai rela berkorban bagi bangsa dan negara seperti apa yang dapat ditanamkan dan diimplementasikan oleh perempuan di lingkungan tersebut.

Analisis yang dapat dilakukan: Bagaimanakah tingkat kesejahteraan kaum perempuan di wilayah tersebut? Darimanakah sumber kesejahteraan tersebut, apakah dari kemandirian pribadi atau pendapatan suami/orang tua? Apabila tingkat kesejahteraan tergolong menengah ke atas, sudahkah mereka mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Apabila tingkat kesejahteraan tergolong menengah ke bawah, bagaimanakah bentuk implementasi bela negara yang telah mereka lakukan?

- **Sosial-Budaya**

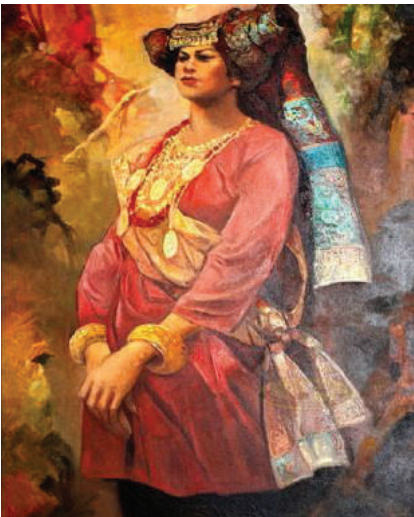
Perilaku dan keseharian seorang manusia ataupun suatu komunitas tidak terlepas dari lingkungan sosial budaya yang membentuknya. Guna mempermudah fasilitator menyampaikan materi bela negara kepada kaum perempuan di suatu wilayah atau komunitas, maka diperlukan analisis



sosial budaya mengenai latar belakang komunitas tersebut. Khususnya bagi kaum perempuan yang tinggal di wilayah permukiman adat, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak melanggar norma adat yang berlaku.

Analisis yang dapat dilakukan: Bagaimana karakteristik umum kaum perempuan di wilayah tersebut? Bagaimana peran, posisi, dan tugas perempuan dalam struktur sosial budaya masyarakat tersebut? Materi bela negara yang akan disampaikan apakah sudah sejalan dengan adat istiadat, dan norma sosial-budaya masyarakat setempat?

#### Contoh Pendekatan untuk Lingkungan Permukiman Adat



Gambar xx. Ilustrasi Bundo Kandung  
Sumber:<http://www.liteneasy.co.id/west-sumatra>

Dalam cerita rakyat Minangkabau, dikenal ada seorang raja perempuan yang memimpin Kerajaan Pagaru-yuang dengan arif dan bijaksana, raja perempuan tersebut dikenal dengan sebutan Bundo Kandung. Bundo Kandung merupakan penjaga dan penegak keadilan di Kerajaan Pagaruyuang, Minangkabau. Naskah *Kaba Cindua Mato*, merupakan salah satu dari

empat naskah yang secara lengkap menjelaskan mengenai kepemimpinan Bundo Kandung di Kerajaan Pagaruyuang. Elfira (2007) menyampaikan bahwa, dalam naskah tersebut dapat dilihat bahwa perempuan dapat menduduki posisi politik

tertinggi di dalam masyarakat. Bundo Kanduang digambarkan sebagai seorang yang berbakat, pintar, bijak, dan tegas, sehingga ia termasuk salah seorang raja perempuan yang memiliki kekuatan yang besar di dunia. Tidak hanya tegas dan berkuasa, Bundo Kanduang pun memimpin kerajaan secara demokrasi dan membagikan kewenangannya kepada empat menteri kerajaan. Kebijakan kerajaan akan diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat atau konsensus dengan anggota kabinet kerajaan. Selain sebagai seorang raja perempuan, Bundo Kanduang pun memiliki peran sebagai seorang ibu. Bundo Kanduang dikenal sebagai seorang ibu yang mengasuh, memelihara, penuh perhatian dan kasih sayang. Berbeda dengan sosoknya saat menjadi seorang raja perempuan yang tegas, saat menjadi seorang ibu, Bundo Kanduang digambarkan sebagai seorang ibu yang lembut, sensitif, perhatian dan penuh kasih. Kelembutan Bundo Kanduang sebagai seorang ibu, terlihat dari kedekatannya dengan anak angkatnya yaitu Cindua Mato. Cindua Malam naskah ini digambarkan lebih dekat dengan Bundo Kanduang daripada ibu kandung yang melahirkannya.<sup>1</sup>

Selain kisah Bundo Kanduang, cerita rakyat lainnya yang erat dengan kebudayaan Minangkabau adalah kisah Malin Kundang yang sudah populer di masyarakat Indonesia secara umum. Malin Kundang mengajarkan nilai moral untuk berbakti kepada orang tua, khususnya Ibu, serta tidak melupakan tanah kelahirannya. Dari kedua kisah ini terlihat betapa besarnya peran seorang perempuan dalam kebudayaan Minangkabau. Perempuan dalam kebudayaan

---

<sup>1</sup>Di dalam naskah Kaba Cindua Mato, Bundo Kanduang secara linguistik disebutkan sebagai raja perempuan, bukan ratu. Keseharian dan perilaku Bundo Kanduang di dalam kerajaan pun selayaknya raja laki-laki pada umumnya (Elfira, 2007).

Minangkabau memiliki sosok perempuan tangguh yang memiliki jiwa pemimpin, namun berhati lembut dan memiliki kedekatan erat dengan keluarga khususnya anak.

Sistem keadatan Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal (garis keturunan berdasarkan darah keluarga ibu) pun turut menegaskan pentingnya peran perempuan di dalam adat Minangkabau. Meskipun Minangkabau menganut sistem matrilineal, di dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat Minangkabau memiliki landasan lain yang menyelaraskan adat dengan agama Islam, hal ini tercermin dari kalimat petatah-petitih yang dijadikan dasar dalam berkehidupan di alam minangkabau "*adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*", yang artinya adat berlandaskan syariat Islam, syariat Islam berlandaskan kitab Al-Qur'an dan Hadist. Nuansa Islam pun sangat kental di daerah Minangkabau yang dikenal sebagai serambi Mekkah Indonesia ini. Masyarakat Minangkabau menerapkan kehidupan Islami yang berpadu dengan adat lokal.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila fasilitator akan menyampaikan materi bela negara, agar disesuaikan dan diselaraskan pula antara posisi perempuan dalam keadatan Minangkabau dan syariat-syariat atau peran perempuan di dalam Islam. Fasilitator diingatkan agar menyampaikan contoh dan materi bela negara yang tidak akan menimbulkan perdebatan atau perlawanan dari masyarakat adat setempat. Fasilitator dapat menggunakan contoh-contoh tugas perempuan di ranah keadatan dan agama Islam yang secara tidak langsung telah mengandung dan menerapkan nilai-nilai bela negara.

- **Mata Pencaharian**

Hasil kajian dari analisis mata pencaharian dapat menjadi salah satu masukan bagi implementasi bela negara kaum perempuan di wilayah tersebut. Bermata pencaharian yang 'halal' atau sesuai dengan ketentuan tanpa melakukan pelanggaran nilai-nilai maupun hukum merupakan salah satu perilaku dan kegiatan yang telah mengandung makna-makna dan mengimplementasikan bela negara. Fasilitator dapat mengarahkan perempuan Indonesia walaupun dengan berbagai latar belakang, agar serius dalam melakukan pekerjaan yang dimilikinya.

Niat dalam melakukan pekerjaan pun agar ditanamkan, selain melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan asas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga berlandaskan asas manfaat. Fasilitator agar menekankan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak hanya berperan bagi pribadi dan internal keluarga, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Apapun mata pencaharian yang dilakukan, agar dibangkitkan jiwa patriotisme perempuan Indonesia bahwa pekerjaan yang ia lakukan memiliki makna besar tidak hanya bagi dirinya pribadi, tetapi juga membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat luas. Dengan adanya penekanan pada hal ini, diharapkan perempuan Indonesia mampu melaksanakan apapun pekerjaannya dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas dalam mendukung pembangunan negara dan membantu sesama masyarakat.

Analisis yang dapat dilakukan: Apa saja mata pencaharian di wilayah tersebut? Bagaimana posisi dan peran perempuan dalam bermatapencaharian di daerah tersebut? Bagaimana mereka memanfaatkan potensi wilayah yang ada sebagai sumber mata pencaharian? Bagaimana tingkat kemandirian kaum perempuan di wilayah tersebut?

- **Kelembagaan Lokal**

Analisis kelembagaan lokal dibutuhkan oleh fasilitator untuk lebih mudah menghimpun komunitas perempuan di suatu wilayah. Keberadaan kelembagaan lokal merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh fasilitator untuk bekerja sama dalam melakukan implementasi bela negara di wilayah tersebut. Dari kelembagaan lokal dapat dilihat juga siapa tokoh yang berperan aktif sebagai penggerak masyarakat di wilayah tersebut. Tokoh tersebut lah yang nantinya dapat dijadikan agen perubahan bagi kaum perempuan di wilayah tersebut.

Analisis yang dapat dilakukan: Apa saja lembaga formal dan informal yang terdapat di wilayah tersebut? Bagaimana masing-masing lembaga tersebut mampu mempengaruhi dan menggerakkan warga/kaum perempuan di wilayah tersebut? Lembaga mana yang lebih dekat dengan warga? Siapakah tokoh sentral di lembaga tersebut yang dapat mewakili kaum perempuan setempat?<sup>2</sup>

Sedangkan untuk tokoh sentral dapat ditemukan melalui kelembagaan lokal di wilayah setempat. Namun, selain itu tokoh sentral dapat dilihat pula dari siapakah sosok yang dituakan dan pendapatnya akan mampu menggerakkan warga di wilayah tersebut. Setiap wilayah memiliki pola tersendiri mengenai tokoh sentral yang berpengaruh di wilayah tersebut, sebagai contoh: 1) masyarakat di wilayah perkotaan umumnya lebih memandang dan mendengar pendapat tokoh yang berada pada skala lokal dan nasional (bukan skala permukiman), seperti pemuka agama, pemimpin wilayah ataupun tokoh politik; 2) pada daerah perdesaan dan

---

<sup>2</sup>Agung Wibowo, "Metodologi Partisipatif: Pemetaan Sosial Ekonomi", Paparan pada Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Peduli Gambut 2018.



pedalaman pada umumnya tokoh sentral yang berperan adalah yang berada dekat dengan warga (skala permukiman), seperti ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun tokoh adat; 3) tokoh sentral yang memiliki peran besar di wilayah Indonesia bagian timur adalah tokoh agama (pastor/pendeta) dan tokoh adat; 4) untuk di wilayah Indonesia bagian barat tokoh sentral umumnya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

Analisis yang dapat dilakukan: Siapa saja tokoh yang menonjol dan berpengaruh di wilayah tersebut? Mengapa tokoh tersebut menonjol di masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat setempat? Adakah tokoh perempuan di wilayah tersebut? Seberapa besar pengaruh tokoh perempuan di daerah tersebut?

- Model & Media Komunikasi

Analisis model dan media komunikasi dibutuhkan agar fasilitator dapat menyampaikan materi melalui jalur komunikasi yang telah terbangun di suatu masyarakat, sebagai contoh pertemuan rutin ibu pengajian, grup pertemanan dalam Facebook atau Whatsapp, kegiatan olahraga bersama, pertemuan rutin ibu PKK, pertemuan rutin Dharma Wanita, pertemuan pada jam istirahat perempuan yang bekerja di ladang, atau aktivitas keagamaan komunitas perempuan di gereja, masjid, dsb.

Penggunaan model dan media komunikasi yang telah digunakan di komunitas tersebut dapat menghemat waktu serta akan memudahkan fasilitator dalam melakukan pendekatan sosial budaya. Hal ini pun merupakan cara yang efektif dan efisien dalam penyampaian materi bela negara dikarenakan telah dikenal oleh masyarakat setempat. Bentuk

materi, nilai-nilai, dan implementasi bela negara yang akan disampaikan pun dapat disesuaikan dengan latar belakang perkumpulan atau tema-tema yang sedang dibahas dalam pertemuan atau media komunikasi tersebut.

Analisis yang dapat dilakukan: Bagaimana cara kaum perempuan di suatu komunitas berkomunikasi? Media apa yang mereka gunakan? Bagaimana informasi dapat tersebar di masyarakat? Kapankah waktu rutin kaum perempuan setempat melakukan pertemuan?

### Metode Pembelajaran yang Digunakan

Berikut ini merupakan metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh fasilitator dalam melakukan pelatihan dan penanaman nilai-nilai bela negara. Metode pembelajaran ini diperoleh dari hasil olah pikir penulis serta masukan dari berbagai sumber.



- **Pemutaran Video**

Pemutaran video inspiratif mengenai aktivitas perempuan yang mendukung dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Video merupakan sarana *audiovisual* yang dapat membantu fasilitator dalam menyampaikan dan mempermudah peserta pelatihan dalam menerima, memahami, serta mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Webster, *audiovisual* memiliki pengertian materi pelatihan atau

pendidikan yang secara langsung membangkitkan indera pendengaran dan penglihatan, melalui film, rekaman atau kumpulan foto yang digunakan salah satunya di dalam kelas belajar. Allen (1956) menyatakan bahwa *motion picture* atau gambar yang bergerak dapat digunakan untuk melatih keahlian *perceptual-motor*, mempengaruhi motivasi, perilaku dan pendapat.<sup>3</sup>

- **Tebak Tokoh**

Tebak tokoh dapat dilakukan dengan cara fasilitator menunjukkan foto profil perempuan-perempuan inspiratif Indonesia, kemudian menanyakan apakah para peserta pelatihan mengenal tokoh-tokoh tersebut. Setelah menyampaikan identitas tokoh tersebut, fasilitator kemudian menjelaskan mengenai peran tokoh-tokoh tersebut dan nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukannya pada ranahnya masing-masing tokoh. Pada akhir permainan tebak tokoh, fasilitator menanyakan nilai apa dan pelajaran apa yang dapat dipetik dari perjuangan tokoh tersebut, kemudian mengaitkannya dengan implementasi nilai-nilai bela negara. Fasilitator dapat menampilkan tokoh perempuan inspiratif yang bersifat umum lalu dilanjutkan tokoh-tokoh secara khusus yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya sasaran peserta pelatihan. Tokoh perempuan inspiratif tersebut berskala nasional dengan tema perjuangan yang umum dan dilanjutkan dengan tokoh perempuan inspiratif lokal setempat atau tokoh perempuan inspiratif lainnya yang memiliki nilai perjuangan bela negara yang sama dengan lingkungan sasaran pelatihan.

---

<sup>3</sup>William H. Allen, Chapter II: Audio-Visual Materials (Book Chapter), 1956. (London: Sage Publication, hal.125)



- **Sejarah**

Pembelajaran sejarah memiliki peran penting dalam pembentukan identitas bangsa. Sejarah merupakan salah satu aspek dalam pembentukan identitas nasional. Dengan memahami dan memaknai sejarah, maka diharapkan peserta pelatihan mampu mengidentifikasi dirinya dengan berbangga hati menjadi warga negara Indonesia dan mampu memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Pada hakikatnya, identitas adalah suatu ide atau gagasan mengenai 'siapakah kita' (*who we are*), bagaimana kita berrelasi dengan orang lain di luar kita (*the others*) dan lingkungan tempat kita tinggal. Identitas menandakan kesamaan kita dengan orang lain yang berada dalam posisi yang sama dan identitas juga menandakan perbedaan kita dengan orang lain yang tidak berada dalam posisi tersebut. Dalam hal ini, perbedaan (*difference*) merupakan penanda identitas untuk membedakan antar satu orang dengan orang lainnya (Woodward, 1997).

Para peserta pelatihan diharapkan mampu memperkuat identitas nasionalnya karena hal ini merupakan cerminan jati diri bangsa. Identitas menjadi penting, karena hal ini berrelasi dengan bagaimana perempuan Indonesia memaknai dirinya, merasa dirinya menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan bagaimana ia berperilaku sebagai warga negara Indonesia yang mampu dengan bangga mengakui, mencintai, memperjuangkan tanah air tercintanya, dan menempatkan diri dalam konteks dan situasi apapun khususnya di era globalisasi yang penuh dengan berbagai ancaman dan tantangan baru. Di sinilah, letak pentingnya penguatan identitas nasional dan juga rasa kepemilikan (*sense of belonging*) melalui pembelajaran sejarah.

- **Komunikasi Dua Arah**

Fasilitator memetakan permasalahan dan kondisi umum yang ada di lingkungan sasaran pelatihan melalui sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta pelatihan. Lalu fasilitator mengaitkan kondisi tersebut serta solusinya dengan penanaman nilai-nilai bela negara yang sesuai dengan kondisi komunitas tersebut. Peserta pelatihan diharapkan menyampaikan terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi, kemudian fasilitator menanggapi dengan diskusi bersama dan dikaitkan dengan implementasi nilai-nilai bela negara.

- **Pembelajaran Nilai atau *Lesson Learned***

Pembelajaran nilai merupakan hikmah yang diambil dari metode-metode yang telah disampaikan pada bagian metode pembelajaran lainnya.

- **Permainan atau *Outbond***

Permainan atau melakukan kegiatan luar atau dalam ruangan yang bersifat *outbond* diharapkan agar peserta pelatihan dapat memahami dan memetik nilai-nilai bela negara dari permainan yang telah dilakukan. Permainan harus bersifat edukatif dan merangsang peserta pelatihan untuk mampu memahami contoh-contoh perilaku bela negara dalam hal terkecil di sendi kehidupannya. Penggunaan metode permainan dan *outbond* diharapkan agar peserta pelatihan tidak merasa mudah bosan dalam penyampaian materi bela negara dan juga melatih psiko-motorik peserta pelatihan agar mampu lebih mudah dalam memahami nilai-nilai dan implementasi bela negara di kehidupan sehari-harinya.

### 3. Perempuan Indonesia dan Ibu Pertiwi : Perspektif Filosofis & Etimologis

Tujuan : membangun kesadaran dan kepercayaan diri bahwa perempuan memiliki posisi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sasaran : Fasilitator dan Peserta Pelatihan Perempuan Bela Negara

*“Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu **ibuku**. Indonesia, tanah yang suci, Tanah kita yang sakti, Di sanalah aku berdiri, M’njaga **ibu sejati**”*

Tahukah anda kutipan tersebut berasal dari mana?

Kutipan tersebut merupakan penggalan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Menurut anda, siapakah “ibu” yang dimaksud dalam lirik lagu Indonesia Raya tersebut?

Mari kita lihat sebuah kutipan lagi:

*“Di sana tempat lahir beta, **Dibuai dibesarkan bunda**, Tempat berlindung di hari tua, Tempat akhir menutup mata ... Indonesia **ibu pertiwi**, Kau kpuja kau kukasihi, Tenagaku bahkan pun jiwaku, Kepadamu rela kuberi”*

Tahukah anda kutipan tersebut berasal dari mana?

Kutipan tersebut merupakan penggalan lagu nasional Indonesia Pusaka, yang sudah sering kita dengar dan diajarkan kepada kita semenjak dari sekolah dasar.



Sadarkah anda, kedua lagu tersebut menggunakan frasa “ibu”, “bunda”, dan “ibu pertiwi” sebagai bentuk ungkapan dalam proses berkehidupan dan pembentukan jati diri kita serta merupakan ungkapan pengganti untuk menyebutkan negara kita tercinta, Indonesia?

Mengapa Ibu? Bukan Bapak?

Terdapat beberapa variasi konsep gender bangsa di dunia, yaitu ibu bangsa (*motherland*), bapak bangsa (*fatherland*), dan tanah air (*homeland*). Beberapa negara yang menganut konsep bapak bangsa (*fatherland*), diantaranya adalah negara Jerman, Belanda, Afrika, Arab, dsb. Sedangkan negara yang menggunakan konsep ibu bangsa (*motherland*) diantaranya adalah Indonesia, Rusia, Kanada, Australia, Inggris, India, dsb. Namun ada juga beberapa negara yang menggunakan kedua istilah tersebut, salah satu contohnya adalah Rusia. Di Rusia, tanah air diungkapkan dengan kata *Otečestvo* yang bersifat maskulin dan *Rodina* yang bersifat feminim<sup>4</sup>. Penggambaran *Rodina*



<sup>4</sup>Tata bahasa negara-negara di Eropa menggunakan gender pada kata benda. Terdapat kata yang bersifat maskulin, Penggunaan kata “ibu” tersebut menunjukkan bahwa bangsa dan budaya Indonesia menempatkan perempuan dalam posisi penting, feminim, ataupun netral.

dapat dilihat pada sebuah monumen di Volgograd, Rusia, yang dikenal sebagai *Rodina-mat' zovyot* atau *the motherland calls* (ibu bangsa memanggil). Adanya perbedaan konsep di setiap negara ini bergantung pada latar belakang sejarah, budaya, sosial, ataupun politik negara tersebut.

Sedangkan di Indonesia, masyarakatnya menggunakan frasa 'ibu pertiwi' sebagai penggambaran tanah air. Siapakah sebenarnya ibu pertiwi itu? Hal ini tentunya berkaitan dengan aspek sosial budaya yang terikat pada masyarakat Indonesia.

### Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa

Nenek moyang bangsa Indonesia menyebut tanah air sebagai Ibu Pertiwi (sanksekerta: *pṛthvī*, atau juga *pṛthivī*). Pertiwi merupakan seorang dewi dalam agama Hindu yang dikenal juga sebagai Ibu Bumi. Sedangkan dalam pandangan Jawa, bumi digambarkan sebagai sosok yang dapat menampung seluruh makhluk di dunia, kuat dan sentosa, serta berwatak suci.<sup>5</sup> Penggunaan konsep ibu bagi bumi dan tanah air berawal dari pemikiran bahwa bumi dan tanah air merupakan sebuah tempat lahirnya manusia dan peristirahatan terakhir manusia saat tiba waktunya kelak jasad akan berbaring. Bumi merupakan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia, tempat manusia bertumbuh, tempat manusia berproses dan tempat manusia berpulang. Bumi memiliki peran selayaknya seorang ibu yang melahirkan, merawat, memberikan makanan, pelajaran kehidupan dan menjaga anaknya hingga ia bertumbuh dewasa. Ibu dan bumi memiliki sifat pemberi, penopang kehidupan, rendah hati, pengorbanan tanpa batas, dan memberikan pengasuhan tanpa

---

<sup>5</sup>Pardi Suratno, Sang Pemimpin: Menurut Ashtrabrata, Wulang Reh, Tripama, dan Dasa Darma Raja (Yogyakarta: Adi Wacana, 2006), 66-67.

memandang batas ataupun perbedaan. Ibu memiliki nilai sakral karena menjadi satu-satunya pintu bagi lahirnya kehidupan.<sup>6</sup>

“Budaya Indonesia, baik dalam cerita maupun sejarahnya, menempatkan ibu dalam posisi penting. “Mengapa ibu? Karena dialah yang terdekat pada kita,” ujar Ibu Sis.

Dia menjelaskan, kata “ibu” yang berasal dari istilah kekerabatan itu mengalami perluasan makna karena budaya Indonesia menempatkan ibu sebagai orang yang diutamakan dan paling dihormati. Konsep itulah yang menghasilkan masyarakat dan lingkungan seperti yang ada sekarang.

“Kalau kita baca-baca cerita rakyat, di Kalimantan, Sulawesi, selalu ibu yang menjadi dasar semuanya,” kata Ibu Sis.

Oleh sebab itu kata “ibu” dipilih digunakan bukan hanya untuk perempuan, tapi lebih jauh dari itu, juga dalam konsep kenegaraan seperti ibu kota dan ibu pertiwi.

“Segala sesuatu yang berkaitan dengan inti biasanya dikaitkan dengan ibu sebagai tempat kita bertumpu, mengadu, mencari kehidupan, dan sebagainya,” kata Ibu Sis.

Konsep ibu pertiwi tidak berdiri sendiri, terdapat pula Bapa Angkasa (*dyaus pita*) yang di dalam agama Hindu dikenal sebagai Dyeus (dewa langit) dan merupakan suami dari Dewi Pertiwi. Bapak angkasa dipandang sebagai aspek maskulin yang memiliki sifat kuat dan penjaga. Keberadaan konsep Ibu Pertiwi dan Bapa Angkasa dalam falsafah nusantara merupakan bentuk keseimbangan timbal balik dalam memberikan kehidupan bagi mahluk di muka bumi Indonesia.

---

<sup>6</sup>Wawancara Kumparan.com dengan Felicia N. Utorodewo, Dosen Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Senin (6/2/17). <https://kumparan.com/@kumparannews/kisah-tentang-ibu-pertiwi>

Dalam pembentukan karakter bangsa, Presiden Soekarno menyampaikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai kepercayaan yang amat mendalam bahwa bangsa Indonesia beribukan pertiwi dan berbakakkan angkasa. Konsep ibu pertiwi dan bapak angkasa seringkali disampaikan dalam pidato Presiden Soekarno untuk menggambarkan aspek pertahanan keamanan dan membakar semangat warga Indonesia untuk turut bersedia membela negara demi kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Ibu pertiwi mencakup aspek darat dan laut Indonesia, sedangkan bapak angkasa mewakili aspek udara milik Indonesia.<sup>7</sup>

*Pernah di dalam satu pidato, secara berkembang, secara alegoris, saya berkata, hei rakyat Indonesia, hei wanita-wanita, sumbangkanlah kepada ibu pertiwi apa yang, -kembang-, dapat kau sumbangkan. Hiasilah sanggul Ibu Pertiwi dengan bunga-bunga yang engkau dapat persembahkan kepadanya.*

*Engkau dapat mempersembahkan bunga melati, persembahkanlah bunga melati. Engkau dapat mempersembahkan bunga cempaka, persembahkanlah bunga cempaka. ... Ya, meskipun engkau tidak bisa mempersembahkan bunga, tetapi engkau hanya dapat mempersembahkan sebutir pasir, persembahkanlah itu kepada Ibu Pertiwi. Berarti tiap-tiap manusia mempersembahkan kepada tanah airnya apa yang dapat ia persembahkan.*

*Ada orang yang mengabdikan kepada tanah air dengan menjadi juru tulis, itulah bunga yang ia persembahkan kepada Ibu Pertiwi. Ada orang yang bisa mengabdikan kepada tanah air dengan menjadi dokter, itulah bunga yang ia bisa persembahkan. ... Ada orang yang bisa mempersembahkan tenaganya sebagai petani, itulah bunga yang bisa ia persembahkan. Ada orang yang bisa mempersembahkan tenaganya sebagai buruh, itulah bunga yang ia bisa persembahkan.*

*Paragraf di atas merupakan salah satu penggalan amanat Presiden Soekarno pada pelantikan para taruna AMN menjadi perwira di Magelang pada 23 Desember 1963.*

---

<sup>7</sup>Iman Toto K. Rahardjo & Suko Sudarso (Editor), "Bung Karno: Masalah Pertahanan-Keamanan", (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 106 & 192.



*Kulihat ibu pertiwi, Sedang bersusah hati,  
Air matanya berlinang, Mas intannya terkenang.  
Hutan gunung sawah lautan, Simpanan kekayaan,  
Kini ibu sedang susah, Merintih dan berdoa.*

**Apa yang dapat perempuan Indonesia  
lakukan untuk  
Ibu Pertiwi tercinta?**

Siapakah perempuan Indonesia?

Menurut KBBI, perempuan adalah seorang manusia yang memiliki alat kelamin perempuan, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak-anak, dan menyusui, dan atau disebut juga wanita. Secara etimologis, perempuan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanksekerta, *per-empu-an*. *Per* dalam Sanksekerta memiliki makna mahluk dan *empu* bermakna mulia, tuan, ahli, atau mahir. Sehingga dapat disimpulkan kata perempuan memiliki makna mahluk yang mulia, memiliki kemampuan, mahir, pembuat suatu karya yang agung dan tuan bagi dirinya sendiri ataupun tuan pada rumah tempat ia tinggal.<sup>8</sup> Dalam bahasa Sunda, istri di dalam rumah tangga dikenal sebagai *pamajikan*, yaitu majikan atau tuan dari rumah tersebut. Perempuan dianggap sebagai 'pemilik' rumah yang memiliki kemampuan untuk mengelola segala urusan di dalam rumah tersebut.

Dalam kebudayaan Miringkabau dikenal adanya sosok *Bundo Kanduang* atau Ibu Sejati. *Bundo Kanduang* memiliki dan ditempatkan pada posisi mulia dan tinggi sejak ribuan tahun lalu.

---

<sup>8</sup>Zoetmulder dalam Pudjiastuti, 2009: 5. Pudjiastuti, Titik. 2009. Sita Berperasaan Perempuan sebuah makalah dalam Workshop on Old Javanese Ramayana: Texts, Culture, and History. ANRC, Gonda Foundation, EFEO, KITLV Jakarta, 26 – 28 Mei 2009.



la dianggap juga sebagai penyangga rumah atau keluarga. Perempuan memegang posisi sentral dan strategis dalam keluarga dan masyarakat, pengelola serta kunci penyelesaian segala masalah keluarga. Perempuan yang diumpamakan sebagai *Bundo Kanduang* pun berperan sebagai pemersatu dan penyelaras segala perbedaan, penjaga nilai dan peradaban.

Selain itu, perempuan juga berhubungan dengan kata *ampu* yang memiliki arti sokong, memerintah, penyangga, penjaga keselamatan atau wali. Maka, hal ini dapat bermakna pula perempuan sebagai penyokong atau penahan agar tidak runtuh, penyelamat, ataupun mampu memerintah. Perempuan merupakan penjaga negeri, penjaga generasi dengan ilmu yang dimilikinya.

Berdasarkan arti kata perempuan secara harfiah dan etimologis, maka perempuan Indonesia dapat bermakna warga negara Indonesia yang berjenis kelamin perempuan, yang memiliki kemampuan, mahir, mandiri, dan juga dapat berperan sebagai penyelamat bangsa dari keruntuhan. Secara filosofis dan etimologis dari konsep perempuan dan ibu pertiwi yang telah disampaikan, dapat kita lihat betapa besar peran dan tingginya derajat seorang perempuan di dalam berkehidupan di Indonesia.

Sudahkah kini anda menyadari betapa besar, istimewa dan pentingnya peran anda sebagai perempuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari serta berbangsa dan bernegara? Perempuan adalah kunci dari keluarga, bangsa dan peradaban. Perempuan memiliki peran strategis untuk membentuk akhlak generasi muda, melestarikan nilai, dan juga pembentukan karakter bangsa. Peran perempuan yang begitu besar dapat ditemukan dalam ranah domestik sebagai pencetak dan pendidik generasi bangsa, pemberi dan penyokong kehidupan ataupun dalam ranah publik sebagai seorang perempuan Indonesia yang

mandiri, memiliki kemampuan yang tinggi dan mampu menghasilkan suatu karya yang agung. Seperti yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya, persembahkanlah apa yang dapat kau persembahkan untuk ibu pertiwi. Maka, seluruh perempuan Indonesia dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara, sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya.

Bentuk kontribusi yang dilakukan adalah dengan menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (UUD 1945 Pasal 30) dan bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara (UUD 1945 pada pasal 27). Seperti apakah nilai-nilai bela negara yang dapat kita, selaku perempuan Indonesia aplikasikan dan internalisasi dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas pada Bab 6 dalam modul ini.

#### **4. Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia**

Tujuan:

- Menyadarkan bahwa perempuan Indonesia telah turut berperan aktif dalam perjuangan demi bangsa dari semenjak dahulu kala;
- Memahami perubahan bentuk perjuangan perempuan Indonesia dari masa dulu ke masa kini;
- Mampu meneruskan perjuangan-perjuangan tersebut sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan Indonesia saat ini;
- Memahami berbagai bentuk perjuangan perempuan masa kini;
- Mampu meneruskan perjuangan sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya.

Sasaran pembaca : peserta dan fasilitator pelatihan

Metode pembelajaran : 2 arah, *lesson learned*

Dalam sejarah Indonesia, beberapa tokoh perjuangan perempuan telah disampaikan dalam buku-buku sejarah dan juga pelajaran sejarah yang diterima di sekolah-sekolah. Bab ini akan membahas secara khusus peran perempuan Indonesia mulai dari masa kerajaan, perjuangan kemerdekaan, hingga masa modern saat ini.

Pada masa kerajaan, kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak hanya dipimpin oleh Raja yang berjenis kelamin laki-laki, melainkan juga raja-raja perempuan yang terkenal arif dan bijaksana pada masanya. Diantaranya adalah Ratu Shima di Kerajaan Kalingga-Jawa Tengah, Sri Isyana Tunggawijaya di Kerajaan Medang-Jawa Tengah, Sutanah Syah Alam Barisyah di Kerajaan Perlak-Aceh, dan Sutanah Nahrasiyah di Kerajaan Samudra Pasai-Aceh.

### ***Tahukah anda mengenai kerajaan Majapahit?***

Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut kitab Negarakertagama, kekuasaannya terbentang mulai dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian Timur.

Coba sebutkan siapakah pemimpin Majapahit yang anda ketahui? Pernahkah anda mendengar tentang Tribhuwana Tunggadewi? Tunggadewi merupakan salah satu raja perempuan Majapahit yang menjadi pelopor perluasan wilayah nusantara.

Tunggadewi merupakan salah satu raja perempuan ketiga yang berperan penting dalam perubahan di tubuh kerajaan Majapahit. Sebagai raja ia mampu menumpas pemberontakan,





Gambar xx. Ilustrasi Tribhuwana Tunggaladewi  
Sumber: wacana.co

membangun kepercayaan dan stabilitas politik di kerajaan Majapahit. Kebijakan Tribhuwana Tunggaladewi dituliskan dalam beberapa prasasti yang berisikan mengenai susunan birokrasi kerajaan Majapahit. Hasil nyata dari kepemimpinan Tunggaladewi adalah penaklukan wilayah Sadeng dan Keta serta perluasan wilayah kerajaan Majapahit, yang dicetuskan

oleh Gajah Mada dalam *Sumpah Palapa*, hingga ke wilayah Bali dan Sumatera.<sup>9</sup>

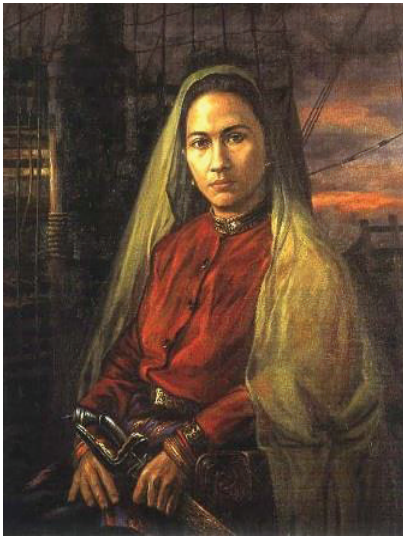
Perjuangan perempuan Indonesia sebagai tokoh yang dipahlawankan pada masa kemerdekaan disampaikan oleh Frederick & Soeroto (1982)<sup>10</sup> digolongkan ke dalam dua kategori peran. Pertama, perempuan yang berperan sebagai panglima atau tentara militer yang melawan dan menentang penjajahan Belanda. Perempuan-perempuan ini adalah Tjut Nya' Dien, Tjut Meutia, Nyi Ageng Serang, Christina Martha Tiahahu, Laksamana Keumalahayati dan *Inong Balee*-nya. Sedangkan golongan kedua adalah perempuan Indonesia yang berjuang di jalur non pertempuran dan cenderung ke ranah pendidikan seperti Kartini, Maria Walandau Maramis, Nyi Hadjar Dewantoro, dll. Rahayu

<sup>9</sup>Anah Nur Fitroh dan Aminuddin Kasdi, 2017, "Peran tribhuwana Tunggaladewi dalam Mengembalikan Keutuhan dan Perkembangan Kerajaan Majapahit tahun 1328-1350, *Avatara e-journal Pendidikan Sejarah*, Vol 5 No.2.

<sup>10</sup>Frederick, Willian & Soeri Soeroto, (1982), *Pemahaman Sejarah Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

(2014)<sup>11</sup> menyampaikan bahwa gerakan perempuan Indonesia dalam melawan penjajahan tidak hanya berasal dari kalangan para bangsawan dan juga panglima perang, melainkan juga para perempuan dari rakyat biasa seperti di Biak yang memiliki semacam gerakan mesianis para perempuan desa di masa pendudukan Jepang, gerakan para perempuan di Tondano (Minahasa) angkat senjata melawan penjajahan Belanda, gerakan buruh perempuan pada masa pra-pendudukan Jepang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta kisah-kisah perjuangan lainnya.

Pernahkah anda mendengar mengenai Laksamana Keumalahayati dan Armada *Inong Balee*?



Gambar xx. Ilustrasi Laksamana Keumalahayati  
Sumber: wikipedia.com

Laksamana Keumalahayati merupakan laksamana perempuan pertama di dunia. Berawal dari kesedihan dan kekesalan ketika suaminya meninggal oleh armada laut Portugis dalam perang Teluk Haru, Malahayati meminta kepada sultan Aceh saat itu, Sultan Saidil Mukammil Alaudi Riayat Syah, agar ia dibuatkan satu pasukan armada laut khusus yang prajuritnya terdiri dari para janda perang (*inong balee*). Malahayati memimpin

---

<sup>11</sup>Ruth Indiah Rahayu, "Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-Androsentris", "Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia", Pelatihan Dasar Gender, Seksualitas dan Maskulinitas, di GG. House, Gadag, Kabupaten Bogor, 20 - 23 Maret 2014

2.000 pasukan janda perang di garis terdepan pertempuran. Pada tahun 1599, Malahayati dan pasukannya berhasil melawan serdadu kapal milik Belanda tanpa rasa ragu dan takut. Mereka naik merangsek dan menyerang ke atas kapal milik Belanda, Malahayati berhasil menikam Cornelis de Houtman pimpinan Belanda pada kapal tersebut dengan rencong yang dibawanya. Tidak hanya dalam peperangan, Malahayati pun ahli dalam bidang diplomatik, ia dipercaya oleh sultan Aceh pada saat itu untuk mewakili Aceh dalam berbagai perundingan internasional dan berhasil kembali dengan membawa kabar baik bagi Kesultanan Aceh.<sup>1213</sup>

Setelah terjadinya terjadinya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para perempuan Indonesia pun menyatukan gerak langkah perjuangan dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928. Tanggal inilah yang kemudian menjadi Hari Ibu Nasional yang kita peringati setiap tanggal 22 Desember sebagai bentuk pengingat, mengenang dan menghargai pergerakan perjuangan perempuan Indonesia. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 600 perempuan dari berbagai latar pendidikan dan usia. Organisasi yang terlibat diantaranya adalah Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Aisyah, Wanita Mulyo, perempuan-perempuan Sarekat Islam, Darmo Laksmi, perempuan-perempuan Jong Java, Jong Islamten Bond, dan Wanita Taman Siswa.<sup>14</sup> Putusan hasil dari konferensi ini adalah :

---

<sup>12</sup>Pocut Haslinda Syahrul. MD. Perempuan Aceh, Dalam Lintas Sejarah Abad VIII-XXI. Hal:56

<sup>13</sup>Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi perniagaan Belanda pertama ke Nusantara pada tahun 1595-1597, yang menyatakannya perdagangan langsung dengan Hindia. Namun, dia seorang yang otoriter dan tidak bijaksana. (Robert Cribb dan Audrey Kahin, 2012: 169).

<sup>14</sup>Susan Blackburn, "Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang", (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia/KITLV, 2007).

1. Mendirikan badan federasi bersama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI);
2. Menerbitkan surat kabar, yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI;
3. Mendirikan *studiefonds* yang akan menolong gadis-gadis yang tidak mampu;
4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri;
5. Mencegah perkawinan anak-anak;
6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah agar:
  - Secepatnya mengadakan *fonds* (dana) bagi janda dan anak-anak;
  - Tunjangan bersifit *onderstand* (pensiun) jangan dicabut;
  - Sekolah-sekolah putri diperbanyak;
7. Mengirimkan mosi kepada *Raad* (pengadilan) agama agar setiap thalak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.<sup>15</sup>

Para perempuan modern yang dinobatkan sebagai pahlawan masa kini juga menunjukkan kiprahnya dalam membangun bangsa di masa pasca kemerdekaan ini. Tentunya bukan lagi dalam bentuk melawan kolonialisme seperti pada masa kerajaan ataupun pra kemerdekaan. Perubahan bentuk perjuangan perempuan Indonesia ditemukan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan bentuk ancaman dan kondisi bangsa saat ini. Perjuangan perempuan pahlawan modern tidak hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga lingkungan, sosial, ekonomi, dsb. Berikut ini merupakan beberapa tokoh inspiratif perempuan Indonesia yang dikenal juga sebagai perempuan pahlawan masa kini, baik dengan kiprahnya di depan ataupun di belakang layar:

---

<sup>15</sup>KOWANI hal.59



*“Di balik seorang tokoh, selalu tersembunyi peran dua perempuan, yaitu ibu dan istri.” – B.J.Habibie<sup>16</sup>*

*“Saya belajar menggunakan waktu secara maksimal sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik mengatur menu makanan murah tapi sehat, membersihkan rumah, menjahit pakaian, melakukan permainan edukatif dengan anak, menjaga suami, membuat suasana rumah yang nyaman, pendeknya semuanya yang harus dilakukan agar suami dapat memusatkan perhatiannya pada tugas-tugasnya. Saya belajar tidak mengganggu konsentrasinya dengan persoalan-persoalan rumah.”*

- Ainun dalam Habibie & Ainun: ...., 38



Gambar xx. Foto Ainun Habibie  
Sumber: tiwwidy.wordpress

Siapa yang tidak kenal Ainun Habibie? Perjalanan kisah hidupnya dengan Presiden ke-3 Indonesia, B.J. Habibie, telah menjadi inspirasi dan salah satu kisah cinta sejati terfavorit di Indonesia.

Hasri Ainun atau yang dikenal sebagai Ibu Ainun Habibie merupakan seorang dokter spesialis anak yang lebih memilih jalan hidup untuk membesarkan anak-anak dan

mendampingi sang suami. Meskipun ia meninggalkan profesinya sebagai seorang dokter spesialis dan lebih memilih untuk fokus kepada keluarga, hal ini tidak menyurutkan semangat pengabdianya di bidang sosial. Ia menaruh perhatian besar

<sup>16</sup>B.J. Habibie dalam sambutan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa bidang filsafat dan teknologi di Universitas Indonesia 30 Januari 2010.



terhadap yayasan-yayasan yang bergerak di bidang sosial seperti Yayasan Beasiswa Orbit dan Bank Mata untuk penyantun tunanetra.

Prestasi dan pencapaian yang didapatkan oleh B.J. Habibie saat ini dalam berbagai bidang tidak dapat dilepaskan dari peranan Ainun yang setia mendampingi dan selalu berusaha menjadi ibu serta istri yang baik bagi keluarga. Tidak hanya pintar secara akademis, Ainun pun disampaikan oleh Habibie merupakan sosok yang lembut, mampu menempatkan diri, penenang yang baik dan taat kepada agama.



Gambar xx. Susilo Bambang Yudhoyono bersama ibunya, istri dan cucunya

Jika ingin ditingkatkan derajat dan kemuliaan berbuat baiklah kepada Ibumu, dan sekali lagi kepada Ibumu, dan sekali lagi kepada Ibumu agar ia rela mendoakan kamu sebagaimana doa Ibunda Siti Habibah kepada Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada 9 September 1949, Siti Habibah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diharapkan kelak dapat menjadi seorang pemimpin Republik Indonesia. Bayi tersebut kemudian diberi nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang artinya seseorang yang memiliki kesetiaan lebih dan berhasil memenangkan setiap peperangan. Pasangan Soekotjo dan Siti Habibah memberi SBY kasih sayang dalam pusat pendidikan keislaman. Jika kasih sayang sang ayah lebih mendorong putranya untuk bekerja dan belajar keras serta disiplin, sang ibu lebih memperhatikan masalah keimanan dan ketaqwaan anaknya. Siti Habibah dikenal dengan kesederhanaan dan kelembutannya. Salah satu sumber

keberhasilan SBY menjadi RI 1 adalah berkat ibundanya yang taat beribadah. Salah satu tirakatnya itu adalah, dengan berpuasa dan berdoa serta berharap Allah SWT mengabulkan doanya, yaitu agar anak tercinta SBY bisa menjadi Presiden. Itu belumlah cukup bagi Siti Habibah, ia juga menutup setiap puasanya itu dengan shalat malam doa.<sup>17</sup>

Gambar ... Nancy Matthews, Ibunda Thomas Alfa Edison



Nancy Matthews, sosok ibu hebat yang berhasil membangkitkan rasa percaya diri anaknya hingga akhirnya Edison kecil tumbuh menjadi Thomas Alva Edison, salah satu penemu terbesar di dunia yang genius. Meskipun secara fisik anaknya agak tuli, namun itu semua bukan menjadi tembok penghalang yang berarti bagi Nancy untuk terus berjuang mengantarkannya ke tangga kesuksesan. Selama kariernya, Thomas Alva Edison telah mematenkan sekitar dari 1.093 hasil temuannya, termasuk bola lampu listrik, gramofon, juga kamera film.

Thomas di masa bella, secara fisik Edison kecil agak tuli dan dicap bodoh di sekolah, bahkan gurunya pernah meminta ibunya, Nancy untuk mengeluarkannya dari bangku sekolah. Meski demikian, ibunya tak patah arang dan membulatkan tekad bahwa anaknya bukan anak bodoh dan ia sendiri yang akan mendidik dan mengajarnya. Alhasil, Edison hanya mengenyam pendidikan formal di bangku sekolah selama tiga bulan, setelah itu pendidikannya diperoleh dari sang ibu yang mengajar Edison di rumah. Nancy mengajarkannya cara membaca, menulis, dan matematika. Ia juga sering memberi dan membacakan buku-buku bagi Edison, seperti buku-buku karya penulis Edward Gibbon, William Shakespeare dan Charles Dickens.

(dilansir dari <http://www.mensobsession.com/article/detail2/782/ibu-hebat-di-balik-orang-orang-hebat>)

<sup>17</sup>Keseluruhan paragraf dilansir dari <http://www.mensobsession.com/article/detail2/782/ibu-hebat-di-balik-orang-orang-hebat>. "Ibu hebat dibalik orang-orang hebat", Syulianita (editor), 16 Desember 2014.



Gambar xx. Aleta Baun dan Perempuan Penenun di Molo

Aleta Baun atau kerap disapa Mama Aleta lahir dan besar di Mollo, Nusa Tenggara Timur. Peraih penghargaan Goldman Environmental Prize 2013 ini dikenal karena kegigihannya dalam menjaga lingkungan, warisan leluhur, dan juga sebagai penggerak komunitas perempuan adat Mollo di Desa Fatukoto. Mama Aleta berjuang selama 13 tahun untuk menghentikan pengoperasian tambang batu marmer dan industri kehutanan yang hendak menambang di Gunung Anjaf. Perjuangan dimulai pada awal tahun 1990an ketika saat itu Gunung Anjaf dan Nausuf mulai dikeruk dan ditambang. Bagi masyarakat tersempit, gunung tersebut merupakan gunung yang sakral dan keramat bagi Suku Molo. Pada gunung tersebut masyarakat suku Molo menuliskan nama marga-marga mereka di sana. Apabila pertambangan terus dilakukan, maka sama saja artinya dengan menghilangkan identitas Suku Molo, selain itu dampak lain yang dialami warga adalah tercemarnya sumber mata air, penggundulan hutan, dan longsor. Pada tahun 1999 Mama Aleta memulai melakukan perlawanan dan menyampaikan protes

kepada perusahaan penambang. Bersama tiga wanita lain mereka menggalang dukungan dari desa ke desa berjalan kaki hingga enam jam. Protes tersebut mengakibatkan balasan kekerasan dari penambang dan Mama Aleta terpaksa lari ke hutan bersembunyi dari ancaman pembunuhan.

Puncaknya adalah di tahun 2006, Mama Aleta berhasil menggalang dukungan ratusan penduduk desa, yaitu sebanyak 150 wanita menenun di depan pintu tambang dan menduduki Bukit Anjaf dan Bukit Nausus di kaki gunung selama satu tahun. Kaum pria membantu dengan mengasuh anak, memasak, dan mengirim makanan pada kaum wanita yang terus menenun menghalangi penambang.<sup>19</sup> Atas desakan masyarakat di dalam dan di luar negeri yang mendukung para wanita penenun, penambangan akhirnya dihentikan pada tahun 2007. Pada tahun 2010, mereka secara resmi menarik diri dari lokasi penambangan.

*"Batu ini sudah tidak utuh, salah satu yang paling mudah memahami isu lingkungan, alam itu seperti tubuh manusia. Batu itu tulang, air itu darah, tanah itu daging dan hutan itu sebagai kulit, paru-paru dan rambut. Jadi merusak alam sama dengan merusak tubuh kita sendiri,"*

*"Asal muasal leluhur kami akan hilang ketika gunung batu dihancurkan, hutan dan sumber air rusak. **Perempuan, seorang ibu seperti saya adalah yang paling menderita. Kami yang bertanggung jawab menyediakan air dan makanan untuk keluarga,"** kata Aleta.*

---

<sup>19</sup>Agniya Khoiri, "Aleta Baun, Perempuan Pejuang Lingkungan di Timur Indonesia", CNN Indonesia, 22 April 2017, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170422102142-277-209416/aleta-baun-perempuan-pejuang-lingkungan-di-timur-indonesia>



*"Karena bicara sumber daya alam itu bicara yang mengaksesnya. Perempuan itu banyak mengakses sumber daya alam untuk pangan, dari sayur-sayuran dan lainnya."*

*"Perempuan bertanggung jawab menjaga identitas orang timur dan alam."*

*Penolakan dengan menenun sendiri, diungkapkan Aleta juga karena tenun menjadi identitas adat orang timur.*

*Dia mengungkapkan bahwa sejak kecil ia diajarkan ibunya menenun, juga soal tentang kekayaan alam, adat dan tanggung jawab perempuan.*

*"Perempuan bertanggung jawab menjaga identitas orang timur dan alam, karena mereka yang menenun. Sementara dengan laki-lakinya, kami berbagi peran saat berjuang. Mereka urus rumah, anak, bergantian. Kami juga bergotong royong di lahan orang lain agar dapat upah membiayai perjuangan," tutur Aleta lebih lanjut.*

Mama Aleta melanjutkan perlawanannya untuk proyek-proyek penambangan yang direncanakan akan terjadi di bagian barat Nusa Tenggara Timur. Salah satu upayanya adalah memetakan hutan-hutan tradisional sebagai bagian dari pengakuan hak-hak wilayah oleh masyarakat adat serta mempertahankan tanah dari eksploitasi tambang, minyak, dan gas disamping perkebunan komersil.<sup>20</sup> Ia juga memimpin upaya mengamankan dan menanam kembali hutan yang rusak oleh

---

<sup>20</sup>Agniya Khoiri, Op.Cit.



aktivitas penambangan dan menyerukan kemandirian ekonomi menggunakan pengetahuan lokal yang berfokus pada penanaman berkelanjutan dan penjualan kerajinan tangan lokal.



Gambar xx. Farha Ciciek

Farha Ciciek merupakan seorang aktivis perempuan yang bergerak di bidang perdamaian dan sosial. Ia pernah termasuk dalam 1000 perempuan dunia yang dinominasikan untuk menerima Nobel Perdamaian 2005, penghargaan *A Social Motivator* dari Ashoka Internasional atas upayanya melakukan pendekatan alternatif untuk kesetaraan gender di Indonesia,

penghargaan *She Can Award* dari Tupperware, dan *Kartini Award* dari PT. Telkom. Setelah berjuang selama hampir 20 tahun pada isu perdamaian dan gender, Farha mengambil keputusan penting pada tahun 2009. Pada tahun itu ia bersama suaminya memutuskan untuk tinggal di kampung halaman suaminya guna menjaga ibu (mertua) nya yang sudah semakin menua di Desa Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Desa tersebut saat itu merupakan desa miskin dan tertinggal yang dipenuhi isu rampok, pemerkosaan, maling, buta huruf atau rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, penyalahgunaan narkoba, penyakit HIV/AIDS, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Lily Tjahjandari, Turita Indah Setyani & Lifany Husnul Kurnia. *Nusantara philosophy: The study of meanings based on Indonesia's local wisdom in East Java and East Nusa Tenggara* dalam *Cultural Dynamics in a Globalized World*,



Sebagian besar warga Ledokombo tidak berpendidikan dan memilih menjadi buruh migran ataupun TKW di luar negeri. Sehingga, anak-anak di desa tersebut kehilangan sosok orang tua dan tidak memiliki pendampingan dalam proses bertumbuh dewasa, anak-anak di desa ini yatim piatu secara sosial.

Farha dan suaminya, Supohardjo, memutuskan untuk memberikan pendampingan, menjadi orang tua pengganti bagi anak-anak yang yatim piatu secara sosial tersebut dan mulai mengenalkan permainan tradisional seperti enggrang, serta menyulap halaman belakang rumah mereka menjadi taman bermain bagi anak-anak di Desa Ledokombo dan membuat komunitas yang kemudian diberi nama Tanoker.<sup>22</sup> Komunitas ini kemudian berkembang pesat dan menarik perhatian banyak orang untuk berkunjung ke Ledokombo. Kini, setiap tahun, Tanoker menggelar acara tahunan yang disebut Festival Egrang. Tidak hanya Festival Egrang, komunitas ini pun memberikan pelajaran tambahan bagi anak-anak di desa tersebut seperti matematika dan bahasa Inggris, melahirkan usaha kerajinan, masakan, pertanian dan pariwisata lokal. Para orang tua anak-anak di Ledokombo yang selama ini mencari nafkah di luar desa kini mulai kembali ke tanah kelahirannya dan turut membantu mengembangkan upaya yang dilakukan Farha dan suaminya. Harapan Farha perlahan-lahan mulai terwujud agar masyarakat desa dapat memperbaiki kesejahteraannya dan mampu memakmurkan dirinya sendiri.

***Sudahkah anda membaca kisah-kisah inspiratif perempuan Indonesia dari masa ke masa?***

***Dari contoh-contoh tersebut siapakah yang paling menginspirasi anda?***

***Adakah tokoh perempuan inspiratif lainnya di sekitar anda?***

***Pelajaran apa yang dapat anda tarik dari kisah-kisah mereka?***

---

*Proceeding of the Asia Pacific Research in Social Sciences and Humanities*, Depok-Indonesia, 7-9 November 2016. Published by Routledge. Hal. 632-634

<sup>22</sup>Tanoker dalam bahasa setempat memiliki arti kepompong.



## 5. Peran ganda perempuan: domestik dan publik

Wanita di samping sebagai istri, ibu diharapkan aktif dalam organisasi dimana suami bekerja, karena status istri sebagai pendamping suami dan menurut informasi turut menentukan kondisi suami. Untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat, pendidikan merupakan syarat yang mutlak (Soedarsono dan Murniatmo 1986:60).<sup>23</sup>

Pergeseran dan peran (pembagian kerja) antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan rumah tangga, terjadi ketika seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat dan Negara. Di mana peran wanita tidak hanya untuk dipimpin tetapi juga untuk memimpin. Hal itu harus mendapatkan pengakuan yang positif dan pasti.

Pembagian peran privat dan publik tidak relevan jika diterapkan dalam masyarakat Jawa, karena dalam masyarakat Jawa wanita sudah terbiasa dengan peran privat sekaligus publik. Hal ini terutama terjadi pada masyarakat Jawa golongan petani dan pedagang, dimana wanita mengurus rumah tangga (domestic) sekaligus mencari nafkah (ekonomipublik). Pola pembagian privat dan publik sesungguhnya telah dipatahkan oleh ideologi produksi yang menganut paham fungsionalisme struktural. Paham ini mengatakan bahwa pembagian privat-publik berlawanan dengan ideologi produksi. Menurut ideologi produksi, wanita juga memproduksi. Dalam SociologicalTheory atau dalam penjabaran teori sosiologi, Parsons mengatakan bahwa walaupun pengukuran yang dipakai untuk menilai status wanita dan laki-laki berbeda, namun status wanita sama dengan status laki-laki. Pola perkawinan menurut Parsons, merupakan hubungan antara dua orang yang sederajat (Saptari dan Holsner 1997:64-67).

---

<sup>23</sup><https://media.neliti.com/media/publications/159632-ID-peranan-perempuan-dalam-pembangunan-masy.pdf>



Dalam arti bahwa status perempuan diperoleh atas dasar status suami istri, dan dapat pula diperoleh atas dasar posisi pekerjaannya.

Mosse (1996:30-31) mengungkapkan bahwa dalam setiap masyarakat, antara laki-laki dan perempuan memiliki peran gender yang berbeda. Ada perbedaan yang mereka lakukan dalam komunitasnya sehingga status maupun kekuasaan mereka dalam masyarakat menjadi berbeda. Akan menarik jika ditemukan kedudukan suami istri dalam posisi seimbang. Gejala matrifokalitas pada masyarakat Jawa terlihat dengan adanya pandangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem peran sosial secara umum. Bahkan kedudukan dan peran seorang ibu dianggap penting dalam masyarakat Jawa karena kaum ibu tidak hanya mengasuh dan mendidik anak serta mendampingi suami, tetapi juga diperkenalkan untuk keluar rumah melakukan kegiatan ekonomi. Pada dasarnya peran serta perempuan sangat diperlukan untuk melestarikan kebudayaan yang sangat berguna bagi generasi selanjutnya. Perempuan tidak hanya perlu ditingkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilannya, tetapi perempuan harus mempunyai kebesaran jiwa dan keluhuran budi. Demi keberhasilan pembangunan diperlukan peran serta dari perempuan, oleh karenanya dorongan, bantuan moril, dan pengertian dari kaum laki-laki dari suami khususnya sangat diperlukan.<sup>24</sup>

Menurut Holleman (1971), kedudukan wanita (ibu) dalam rumah tangga dianggap sebagai belahan yang satu menentukan yang lainnya sebagai komplemen, untuk bersama-sama mewujudkan suatu keseluruhan yang organis dan harmonis yaitu keluarga. Wanita sebagai ibu dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama (tinggi) nilainya, yaitu sebagai "abdi" yang

---

<sup>24</sup>Ibid.



mempunyai kedudukan sebagai warga, yakni " anggota". Wanita dan laki-laki mempunyai kesamaan dalam arti menurut fungsi masing-masing. Adapun perbedaan yang ada dalam keluarga hanyalah mengenai kodrat yang khusus merupakan hidup kewanitaan. Dengan demikian wanita dalam keluarga mempunyai kedudukan antara lain sebagai teman hidup, kekasih, ibu, dalam arti tidak ada diskriminasi antara anggota keluarga. Wanita sebagai ibu berhak untuk menentukan dan berhak ikut melakukan kekuasaan bagi keselamatan dan kebahagiaan baik dalam bidang imaterial maupun material seluruh anggota.<sup>25</sup>

Menurut Sayogyo (1983), keikutsertaan perempuan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memajukan daerah adalah merupakan perwujudan dari perannya secara dinamis dari kedudukan dan status perempuan dalam suatu sistem sosial tempat perempuan tersebut berada. Sedangkan, Ihromi (1990) membedakan peranan dan kedudukan perempuan atas dua bagian, yaitu: (1) Peranan dan kedudukannya di dalam keluarga sebagai tenaga kerja domestik labor yang berhubungan dengan masalah-masalah mengurus rumah tangga, dan (2) Peranan dan kedudukannya di luar keluarga meliputi usaha untuk mencari nafkah untuk memperoleh penghasilan keluarga serta jangkauan sosial terhadap berbagai kegiatan di luar rumah tangga. Perbedaan peranan dan kedudukan tersebut dapat dipakai sebagai indikator dalam kaitan tugas dan kewajiban dari para wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini ada tugas kerja yang bersifat domestik dan tugas kerja yang bersifat kemasyarakatan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat, Indah Aswiyati.

<sup>26</sup>Ibid.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Munandar (1985), bahwa peranan wanita bukan saja hanya bekerja di dalam rumah tangganya, yaitu melayani, seperti mendidik, merawat, mengatur untuk dinikmati oleh orang lain atau menikmati bersama-sama dengan orang lain. Tetapi juga bekerja, yaitu melakukan kegiatan yang memberikan penghasilan untuk kebutuhan keluarga. Artinya tradisi perempuan sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomi (untuk mencari nafkah) di berbagai jenis kegiatan sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan kerja yang tersedia.<sup>27</sup>

## 6. Pengembangan Nilai Bela Negara

### ✓ Cinta Tanah Air

mewujudkan NKRI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia; mengenal proses terbentuknya NKRI agar dapat menjaganya dengan sepenuh jiwa dan raga, menggunakan produk dalam negeri; menjaga kekayaan alam dan lingkungan di tempat ia tinggal; mengenal batas-batas wilayah (khususnya bagi perempuan yang tinggal di wilayah perbatasan); melestarikan kesenian, kebudayaan, dan adat istiadat; memantau perkembangan dan selektif terhadap informasi melalui gadget dan teknologi; peka terhadap lingkungan sekitar: ancaman terorisme, kerusakan lingkungan, dll.

### ✓ Sadar Berbangsa dan Bernegara

menumbuhkan jiwa patriotisme dan menguatkan identitas nasional atau nasionalisme; menumbuhkan rasa kesatuan

---

<sup>27</sup>Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari - Juni 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/981-ID-peran-wanita-dalam-menunjang-perekonomian-rumah-tangga-keluarga-petani-tradision.pdf>



dan persatuan bangsa; memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara; mengaktifkan PKK sebagai Motivator, Fasilitator, serta Pembinaan (Pendidikan dan Pelatihan); Mengingat kembali pentingnya gotong royong.

- ✓ Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara memahami proses dan keistimewaan Pancasila hingga menjadi ideologi negara Indonesia, sehingga tidak terpengaruh paham-paham yang berupaya menggoyahkan kedaulatan NKRI; menanamkan nilai-nilai moral, kebersamaan, toleransi; mengajarkan nilai-nilai keIndonesiaan, mengenalkan keragaman budaya Indonesia.
- ✓ Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara bersedia menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, demi kemajuan bangsa; berprestasi.
- ✓ Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara Memiliki mental yang kuat dan kepercayaan diri yang tinggi, bahwa dirinya turut berperan besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan NKRI; pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan dan tahan uji.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wibowo, "*Metodologi Partisipatif: Pemetaan Sosial Ekonomi*", Paparan pada Pelatihan Tenaga Fasilitator Desa Peduli Gambut 2018.
- Anah Nur Fitroh dan Aminuddin Kasdi, 2017, "*Peran tribhuwana Tungadewi dalam Mengembalikan Keutuhan dan Perkembangan Kerajaan Majapahit tahun 1328-1350*", Avatara e-journal Pendidikan Sejarah, Vol 5 No.2.
- <sup>1</sup>Frederick, Willian & Soeri Soeroto, (1982), *Pemahaman Sejarah Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Iman Toto K. Rahardjo & Suko Sudarso (Editor), "*Bung Karno: Masalah Pertahanan-Kemamanan*", (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 106 & 192.
- Lily Tjahjandari, Turita Indah Setyani & Lifany Husnul Kurnia. *Nusantara philosophy: The study of meanings based on Indonesia's local wisdom in East Java and East Nusa Tenggara* dalam *Cultural Dynamics in a Globalized World*,
- Pardi Suratno, Sang Pemimpin: Menurut Ashtrabrata, Wulang Reh, Tripama, dan Dasa Darma Raja (Yogyakarta: Adi Wacana, 2006), 66-67.
- Pocut Haslinda Syahrul. MD. *Perempuan Aceh*, Dalam *Lintas Sejarah Abad VIII-XXI*. Hal:56
- Proceeding of the Asia Pacific Research in Social Sciences and humanities*, Depok-Indonesia, 7-9 November 2016. Published by Routledge. Hal. 632-634
- Proceeding of the Asia Pacific Research in Social Sciences and humanities*, Depok-Indonesia, 7-9 November 2016. Published by Routledge. Hal. 632-634
- Ruth Indiah Rahayu, "*Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belunggu Historiografi Indonesia-Androsentris*", "*Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia*", Pelatihan Dasar Gender, Seksualitas dan Maskulinitas, di GG. House, Gadog, Kabupaten Bogor, 20 - 23 Maret 2014
- Susan Blackburn, "Kongres Perempuan
- Tanoker dalam bahasa setempat memiliki arti kepompong.
- Tanoker dalam bahasa setempat memiliki arti kepompong.
- Tata bahasa negara-negara di Eropa menggunakan gender pada kata benda. Terdapat kata yang bersifat maskulin, Penggunaan kata "ibu" tersebut menunjukkan bahwa bangsa dan budaya Indonesia menempatkan perempuan dalam posisi penting. feminim, ataupun netral.



William H. Allen, Chapter II: Audio-Visual Materials (Book Chapter), 1956. (London: Sage Publication, hal.125)

Zoetmulder dalam Pudjiastuti, 2009: 5. Pudjiastuti, Titik. 2009. Sita Berperasaan Perempuan sebuah makalah dalam Workshop on Old Javanese Ramayana: Texts, Culture, and History. ANRC, Gonda Foundation, EFEO, KITLV Jakarta, 26 – 28 Mei 2009.

#### REFERENSI INTERNET

Agniya Khoiri, “*Aleta Baun, Perempuan Pejuang Lingkungan di Timur Indonesia*”, CNN Indonesia, 22 April 2017, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170422102142-277-209416/aleta-baun-perempuan-pejuang-lingkungan-di-timur-indonesia>

<https://media.neliti.com/media/publications/159632-ID-peranan-perempuan-dalam-pembangunan-masy.pdf>

Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari - Juni 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/981-ID-peran-wanita-dalam-menunjang-perekonomian-rumah-tangga-keluarga-petani-tradision.pdf>

Keseluruhan paragraf dilansir dari <http://www.mensobsession.com/article/detail/782/ibu-hebat-di-balik-orang-orang-hebat>. “Ibu hebat dibalik orang-orang hebat”, Syulianita (editor), 16 Desember 2014.

Wawancara Kumparan.com dengan Felicia N. Utorodewo, Dosen Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Senin (6/2/17). <https://kumparan.com/@kumparannews/kisah-tentang-ibu-pertiwi>



## MODUL KELIMA

# NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA BAGI PEREMPUAN



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA





## MODUL 5

### NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA BAGI PEREMPUAN

Materi	
Kompetensi Utama	Peserta mampu memahami konsep nilai-nilai bela negara bagi perempuan dan sebagai fasilitator mampu mengaplikasikannya bagi kehidupan masyarakat di pedesaan baik di lingkungan keluarga, pemukiman, pendidikan dan maupun pekerjaan.
Kompetensi Pendukung	Pada akhir sesi pembelajaran, peserta diharapkan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu menguasai materi nilai-nilai bela negara bagi perempuan yang disediakan Kementerian Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Universitas Pertahanan.</li><li>2. Mampu menganalisis peran perempuan dalam mewujudkan nilai-nilai bela negara di lingkungan pedesaan.</li><li>c. Mampu sebagai fasilitator nilai-nilai bela negara bagi perempuan pedesaan.</li></ol>

## **SESI 5 : NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA BAGI PEREMPUAN**

- **Waktu:** 120 Menit
- **Kompetensi Utama:**

Peserta mampu memahami konsep nilai-nilai bela negara bagi perempuan dan sebagai fasilitator mampu mengaplikasikannya bagi kehidupan masyarakat di pedesaan baik di lingkungan keluarga, pemukiman, pendidikan dan maupun pekerjaan.
- **Kompetensi Pendukung:**
  1. Mampu menguasai materi nilai-nilai bela negara bagi perempuan yang disediakan Kementerian Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Universitas Pertahanan.
  2. Mampu menganalisis peran perempuan dalam mewujudkan nilai-nilai bela negara di lingkungan pedesaan.
  3. Mampu sebagai fasilitator nilai-nilai bela negara bagi perempuan pedesaan.
- **Metode:**
  1. Curah pendapat
  2. Diskusi kelompok
- **Alat/bahan:**
  1. Spidol, lem, lakban
  2. Metaplan merah dan biru
  3. Flipchart, kertas piano



4. Lembar beda gender dan seks
  5. Presentasi ppt
  6. Film pendek
- **Alur Fasilitasi**

Setiap Sub Bagian Bahan Ajar diuraikan dengan tata urutan ;

- a. Pre Test. (contoh soal lihat Lampiran I hal 55)Pre Tes dilakukan dengan mengajukan dua atau tiga pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat, terkait dengan fenomena cinta tanah air, kesadaran bela negara dll yang menarik perhatian peserta.
- b. Penjelasan Teoritis

Pandangan umum dan uraian pendapat-pendapat ahli tiap bagian penting dijelaskan. Instrumen berupa regulasi, teori-teori maupun kebiasaan masyarakat lokal perlu dicermati. Persoalannya memang setiap daerah kaya dengan referensi tentang *local wisdom* dan pahlawan pahlawan oleh masyarakat setempat. Dalam setiap pertemuan agar tujuan, maksud dari konsep-konsep yang diuraikan lebih jelas maka studi kasus membantu para peserta untuk memahami topik yang sedang dibahas. Studi kasus dapat dilengkapi dengan film. Film yang dimaksud dalam bahan ajar ini adalah contoh kasus yang sudah ada di media internet atau media lainnya, sehingga membantu dalam menambah pengertian terhadap konsep yang dibahas. Kemudian agar suasana tidak jenu tutor/instruktur membuat simulasi sederhana, sehingga jika perlu alat peraga dan

- contoh-contoh yang akan diambil dari para peserta agar dipersiapkan lebih awal.
- c. Lembaran Kerja Peserta (Lihat Lampiran II halaman 57)  
Setiap pertemuan, peserta diberi lembaran kerja untuk mencatat hal-hal yang perlu didiskusikan.
  - d. Evaluasi/ Pos Test (Contoh Soal Lihat Lampiran III Halaman 58) Pos Tes digunakan mengukur kemampuan peserta selesai pelaksanaan pelatihan. Baik Pre Tes maupun Pos Test penting dilaksanakan, namun soal dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.
  - e. Untuk memonitor dan menilai proses pembelajaran fasilitator menyiapkan lembaran Kerja (Lihat Lampiran IV halaman 59)
  - f. Pengembangan materi dapat sesuai dengan kondisi, namun dalam lingkup persoalan bela negara (Lihat Rangkuman materi Lampiran V halaman 60)



## MODUL 5

### NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA BAGI PEREMPUAN

**Bahan Ajar Nilai-Nilai Bela Negara bagi Perempuan. Berdasarkan Undang-Undang no 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 dan 2**

Menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan (2015:60) dalam membangun kekuatan bangsa, dengan segenap pranata, prinsip dan kondisi yang diyakini kebenarannya serta digunakan sebagai instrumen pengatur kehidupan moral, identitas, karakter serta jatidiri bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 diperlukan komitmen dan kepatuhan seluruh warga negara adalah modalitas yang mampu mendinamisasikan pembangunan nasional di segala bidang. Dalam perspektif pertahanan negara nilai-nilai bela negara meliputi:

1. Cinta tanah air
2. Sadar akan berbangsa dan bernegara
3. Yakin kepada Pancasila sebagai Ideologi negara
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
5. Serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Kualitas warga negara termasuk perempuan harus memiliki nilai-nilai bela negara akan memperkuat sistem pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa. Bela negara menurut Hastuti (2015) dalam Tippe (2016:113) dibedakan menjadi dua yaitu non fisik dan fisik. Bela negara secara nonfisik lebih dititikberatkan pada tumbuhnya kesadaran. Untuk menangkal ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi. Bela negara secara fisik diartikan sebagai keterlibatan warga sipil dalam upaya pertahanan negara dengan terlibat langsung yang lazim dikenal dengan istilah mobilisasi.

Bela negara menurut Zamroni (2015:10) dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh segenap unsur bangsa dalam rangka menjaga, melindungi dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman dan gangguan, serangan, dan bahaya-bahaya lain baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Menteri Pertahanan Ryamizard Riachud pada tanggal 14 April 2016 di Universitas Pertahanan, Sentul-Bogor, dalam rangka pengukuhan kader bela negara, menekankan agar para kader intelektual bela negara bisa menjadi sumber pengetahuan tentang pertahanan dan bela negara. mempelajari segala buku yang sudah dikaji dan undang-undang, termasuk UUD 1945. (detiknews.com)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, tanggal 29 Maret 2016 dalam acara Seminar Nasional Kurikulum Pertahanan dan Bela Negara Universitas pertahanan (Unhan) di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemhan, Jakarta Pusat, bahwa: Mahasiswa harus berwawasan nusantara dan juga dituntut memiliki kepribadian. Komponen kuat bela negara ada di Perguruan Tinggi. Mahasiswa bisa menjadi kader intelektual bela negara.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas Pertahanan IV Letjen TNI I Wayan Midhio (2017). Unhan memosisikan eksistensinya sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang memfokuskan diri pada studi Ilmu Pertahanan dan bela negara. Berbagai kajian strategis terhadap isu pertahanan dan bela negara telah diupayakan lewat berbagai program pendidikan dengan tujuan menghasilkan kader intelektual bela negara yang tangguh. Dikesempatan yang sama rektor Unhan mengatakan bahwa perlunya menghasilkan kader intelektual bela negara sehingga tercapai tujuan nasional melalui sistem pertahanan negara yang kuat. Dengan demikian program Pelatihan Penguatan Partisipasi Politik Berperspektif Gender bagi Perempuan Potensial Perdesaan relevan dengan pembentukan kader intelektual bela negara untuk perempuan pedesaan.

Nilai nilai dan konsep bela negara tersebut dapat dipahami dalam kehidupan perempuan secara spesifik. Untuk memahami bagaimana bela negara dalam kehidupan perempuan Indonesia bertitik tolak dari pengalaman manajerial di lapangan



dan analisis teoritis. Pengalaman bangsa Indonesia dalam memacu semangat kepahlawanan bangsa Indonesia dapat dilihat dari tokoh-tokoh perempuan seperti Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika dan sebagainya.

Istilah perempuan dalam banyak literatur disebutkan "feminisme". Istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan gerakan politik, budaya atau ekonomi yang bertujuan untuk membangun hak-hak yang setara dan perlindungan hukum bagi perempuan. Feminisme melibatkan teori dan filsafat politik dan sosiologis yang berkaitan dengan isu perbedaan gender, serta gerakan yang mendukung kesetaraan gender untuk perempuan dan kampanye untuk hak-hak dan kepentingan perempuan. Meskipun istilah "feminisme" dan "feminis" tidak digunakan secara luas sampai tahun 1970-an, mereka sudah digunakan dalam bahasa publik lebih awal; misalnya, Katherine Hepburn berbicara tentang "gerakan feminis" dalam film tahun 1942 *Woman of the Year*. Julia Kristeva banyak menulis tentang Feminism dikaitkan dengan hak-hak politik perempuan dalam hukum dan tradisi di masyarakat.

Feminisme dapat didefinisikan sebagai gerakan politik, budaya dan ekonomi yang bertujuan untuk membangun hak dan perlindungan yang lebih besar bagi perempuan, serta gerakan yang mengkampanyekan hak-hak perempuan. Teori feminis muncul dari gerakan-gerakan feminis ini, dan termanifestasi dalam beragam disiplin. Feminisme telah mengubah perspektif tradisional pada berbagai bidang dalam kehidupan manusia, dari



budaya, ke geografi, sejarah, sastra, sosiologi, dan hukum. (Fayemi, 2010) Menurut Maggie Humm (1995) dan Rebecca Walker (1992), sejarah feminisme dapat dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang feminis pertama terjadi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang kedua terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an, dan yang ketiga memanjang dari tahun 1990-an hingga sekarang. Teori feminis muncul dari gerakan-gerakan feminis ini. Ini termanifestasi dalam berbagai disiplin ilmu seperti geografi feminis, sejarah feminis dan kritik sastra feminis.

Perempuan telah mengubah perspektif yang dominan dalam berbagai bidang dalam masyarakat Barat, mulai dari budaya ke hukum. Aktivis perempuan telah berkampanye untuk hak-hak hukum perempuan (hak kontrak, hak milik, hak suara); untuk hak perempuan atas integritas dan otonomi tubuh, untuk hak aborsi, dan untuk hak reproduksi (termasuk akses ke kontrasepsi dan perawatan prenatal berkualitas); untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan perkosaan, untuk hak tempat kerja, termasuk cuti hamil dan upah yang setara; melawan misogini; dan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi jender spesifik lainnya terhadap perempuan. Apa bila tema pembicaraan terkait perempuan maka kita bicara sekaligus masalah ketahanan keluarga. Untuk itu peran perempuan dalam bela negara sekaligus masalah ketahanan keluarga.

Pengertian ketahanan keluarga tidak sama dengan pengertian kesejahteraan keluarga (family well-being), namun

saling berkaitan. Pengertian kesejahteraan keluarga sudah diperkenalkan terlebih dahulu dibandingkan dengan pengertian ketahanan keluarga. Pengertian kesejahteraan keluarga diperkenalkan oleh para ahli ekonomi dan sosiologi umum yang berkaitan dengan output keluarga baik dimensi kesejahteraan fisik (physical well-being), kesejahteraan sosial (social well-being), kesejahteraan ekonomi (economical well-being), maupun kesejahteraan psikologi-spiritual (psychologicalspiritual well-being). Sedangkan istilah ketahanan keluarga (family strength or family resilience) dipromosikan oleh para ahli sosiologi keluarga yang mulai diperkenalkan mulai akhir tahun 1950 atau awal tahun 1960an. Istilah ketahanan keluarga lebih menunjukkan suatu kekuatan baik dari sisi input, proses, maupun output/ outcome bahkan dampak dari output/ outcome yang dirasakan manfaatnya bagi keluarga serta kekuatan daya juang keluarga (coping strategies) dalam menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya (Puspitawati, 2012).

Walaupun fenomena dunia barat dengan dunia timur berbeda, namun gerakan perempuan atau fenisme merupakan persoalan kemanusiaan. Dalam sejarah manusia sukses tidak terlepas dari kehidupan perempuan. Dalam Teologi Perempuan kalau dapat dijadikan contoh keberhasilan Nabi Muhammad tidak terlepas dari keberadaan Khadijah. seorang Pedagang kaya raya rela digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Demikian juga peran Bunda Maryam dalam melahirkan, membesarkan Nabi Isya.



Teologi perempuan adalah gerakan yang memper-timbangkan kembali tradisi, praktik, kitab suci, dan teologi agama dari perspektif perempuan. Beberapa tujuan teologi feminis termasuk meningkatkan peran perempuan di kalangan ulama dan otoritas agama, menafsirkan ulang citra dan bahasa yang didominasi laki-laki tentang Tuhan, menentukan tempat perempuan dalam kaitannya dengan karir dan keibuan, dan mempelajari gambar perempuan dalam teks suci agama.

Perempuan Kristen adalah cabang teologi feminis yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami agama Kristen dalam terang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena kesetaraan ini telah diabaikan secara historis, feminis Kristen percaya kontribusi mereka diperlukan untuk pemahaman yang lengkap tentang Kekristenan. Meskipun tidak ada set sekitar keyakinan di kalangan feminis Kristen, sebagian besar setuju bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan atas dasar karakteristik yang ditentukan secara biologis seperti seks. Masalah utama mereka adalah penahbisan wanita, dominasi laki-laki dalam pernikahan Kristen, dan klaim kekurangan moral dan rendah diri kemampuan wanita dibandingkan dengan pria. Mereka juga prihatin dengan keseimbangan pengasuhan antara ibu dan ayah dan perawatan keseluruhan wanita di gereja.

Perempuan Saudi diizinkan untuk mengemudi mobil suatu fenomena baru di dataran jazirah Arab. Feminisme Islam berkaitan dengan peran perempuan dalam Islam dan bertujuan untuk kesetaraan penuh semua Muslim, terlepas dari gender, dalam

kehidupan publik dan pribadi. Feminis Islam menganjurkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial yang didasarkan pada kerangka Islam. Meskipun berakar pada Islam, para pionir gerakan ini juga telah menggunakan wacana feminis sekuler dan barat dan mengakui peran feminisme Islam sebagai bagian dari gerakan feminis global yang terintegrasi. Para pendukung gerakan berusaha menyoroti ajaran-ajaran yang berakar dalam tentang kesetaraan dalam Al-Qur'an dan mendorong pertanyaan interpretasi patriarkal ajaran Islam melalui Al-Quran, hadits (ucapan Muhammad), dan syariah (hukum) terhadap penciptaan yang lebih setara dan masyarakat yang adil. Gerakan perempuan hindu di Bali menjadi fenomena global. Dalam penelitian I Wayan Suyadnya (2017). Perempuan Bali tidak hanya mengenal double –roles tetapi juga peran lain yang merupakan peran sosial (desa adat) sejak dulu. Di Bali menunjukkan bahwa globalisasi telah memotivasi munculnya penguatan identitas sosial mereka. Sekalian dipahami kebudayaan tumbuh seiring dengan pertumbuhan kapitalisme global dan informasi transparansi. Ketika globalisasi menjadi gelombang yang dapat dihindari yang menyerang semua negara di seluruh dunia jelas memberikan arti positif yaitu ketersediaan untuk melihat kehidupan orang-orang, terutama wanita, yang tinggal di bagian lain dunia. Di komunitas barat, perempuan dapat melakukan peran gkita mereka secara terbuka. Namun, dalam beberapa kasus, globalisasi juga memotivasi memperkuat peran produksi. Perempuan tidak lagi hanya melakukan peran domestik mereka.



Memiliki membawa perubahan dalam identitas wanita, terutama di Komunitas Asia, itulah secara sosial, etnis, dan secara tradisional berbeda dari komunitas barat. Itu Munculnya identitas global dalam peran perempuan, pada kenyataannya, berdampak pada kehidupan orang-orang di negara-negara dunia ketiga di Asia Tenggara khususnya Indonesia.

Teori sosiologis feminis berevolusi dari teori feminis pada umumnya, sebuah cabang ilmu baru tentang perempuan yang mencoba memberikan sistem ide tentang kehidupan manusia yang menggambarkan perempuan sebagai objek dan subjek.. Pengaruh gerakan feminis kontemporer pada sosiologi telah mendorong sosiologi untuk fokus pada isu-isu hubungan gender dan kehidupan perempuan. Banyak teori sosiologis sekarang membahas masalah ini; Teori fungsionalisme makro-sosial, teori konflik analisis dan teori sistem dunia. Neo-Marxian, semua menjelajahi rumah tangga dalam sistem politik sebagai cara untuk menjelaskan posisi bawahan perempuan secara sosial. Dalam Neo-Maxis pekerjaan perempuan sebagai : 1. Bagian pranata keluarga dikaitkan dengan sistem kapitalis. 2. Bagian pekejaan perempuan tidak dianggap penting bahkan dianggap bukan pekerjaan. 3. Kalau perempuan bekerja, maka pekerjaannya membosankan dan memperoleh upah yang rendah. (Komariah Emong Supardjaja,2006). Interaksionisme simbolis dan etnometodologi (dua teori mikrokosmos) meneliti bagaimana perbedaan gender diciptakan dan diciptakan kembali dalam hubungan antar individu. (Ritzer dan Goodman, 2003: 467)

Pertanyaan perempuan dalam konteks bela negara dapat menjawab pertanyaan yang diklasifikasikan pada; (1) Bela Negara merupakan hak dan kewajiban warga negara, bagaimana dengan perempuan Indonesia (2) Mengapa perempuan menjadi tersingkirkan dalam berbagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara? (3) Bagaimana kita dapat mengubah dan meningkatkan dunia sosial perempuan? (4) Bagaimana perbedaan antara perempuan satu dengan yang lain? (5) Bagaimana bentuk pengabdian dan peran perempuan dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan dan pemukiman?. Jawaban atas pertanyaan ini menghasilkan penjelasan tentang Nilai-nilai Bela Negara bagi Perempuan. Teori kebhinekaan perempuan melihat situasi perempuan berbeda dari situasi laki-laki, menjelaskan perbedaan dalam hal laki-laki dan perempuan, atau peran kelembagaan dan interaksi sosial, dan konstruksi ontologis perempuan sebagai “orang lain”. (Alice Rossi, 1997, 1983) Teori ketidaksetaraan gender, terutama oleh kaum feminis radikal, menekankan klaim-klaim perempuan terhadap hak-hak fundamental dan fundamental menggambarkan struktur peluang yang tidak seimbang yang diciptakan oleh sexisme. (Du Bois, 1973/1995)

Penindasan gender termasuk teori psikoanalisis feminis dan feminisme radikal yang pertama menggambarkan penindasan perempuan dari sudut pandang deskripsi psikoanalitik dari kecenderungan psikis laki-laki untuk mendominasi yang disebut kemudian dijelaskan dari sudut pandang kemampuan dan



kemauan laki-laki untuk menggunakan kekerasan untuk menundukkan perempuan (Lergermkitan Niebrugge, 1995). Teori penindasan struktural termasuk feminisme sosialis dan teori interseksionalisme. Feminisme sosialis menggambarkan penindasan sebagai sesuatu yang muncul bisnis sistem patriarkal dan kapitalis untuk mengontrol produksi dan reproduksi sosial. Teori interseksitas menelusuri konsekuensi dari kelas, ras, gender, preferensi afektif dan lokasi global untuk pengalaman hidup, sudut pandang kelompok dan hubungan di antara perempuan.

Jadi gerakan keagamaan perempuan merupakan gerakan yang ditemukan dalam beberapa agama untuk mempertimbangkan kembali tradisi, praktik, kitab suci, dan teologi agama-agama tersebut dari perspektif feminis. Beberapa tujuan teologi feminis termasuk meningkatkan peran perempuan di kalangan ulama dan otoritas agama, menafsirkan ulang citra dan bahasa yang didominasi laki-laki tentang Tuhan, menentukan tempat perempuan dalam kaitannya dengan karir dan keibuan, dan mempelajari gambar perempuan dalam teks suci agama. Implementasinya bela negara dalam perspektif kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak penting dirumuskan baik dalam lingkungan pemukiman, pendidikan maupun pekerjaan.

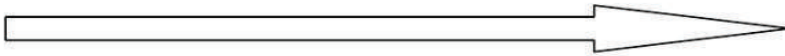
Dengan demikian terlihat kerangka pemikiran tentang perempuan cukup konstruktif dan sangat kompleks terhadap fenomena kehidupan termasuk nilai-nilai bela negara. Bagaimana



esensi bela negara dalam perspektif perempuan Indonesia?. Pertanyaan itu inti yang ingin diuraikan dalam modul ini. Kalau melihat perkembangan cara berpikir manusia sebagaimana dijelaskan Halkis (2016), manusia memiliki proses Paradigma.

Berpikir dari Narsis meningkat menjadi Positivis, Konstruktif, Kritis dan Pragmatis. Cara berpikir objek yang diteliti merupakan salah satu dimensi yang harus dipertimbangkan. Kalau perkembangan Paradigma Berpikir dapat digambarkan sebagai berikut;

Narsis--Positivis—Postpositivis---Fenomenologis—Critical  
Theory--Pragmatis--Virtual.



Gambar 1: Perkembangan Paradigma Berpikir dirumuskan Halkis (2016,p.31)

Dimensi kedua yang perlu diperhatikan adalah Perempuan yang memiliki karakter tersendiri. Kalau melihat esensi Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dalam Acara Penyerahan Penghargaan Anugerah Pelangi 2017 sesungguhnya implementasi peran perempuan dalam menanamkan nilai-nilai bela negara sangat luas. Menteri menjelaskan Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara utuh diukur melalui 24 indikator;

- a. Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak: terutama aspek akta kelahiran, informasi yang layak anak (tidak mengandung

- pornografi dan unsur kekerasan), dan partisipasi anak, termasuk peran anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor); Kemudian Pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: menekankan bahwa keluarga adalah pengasuh utama dan pertama, serta setiap anak harus ada yang mengasuh; stop perkawinan anak; serta semua infrastruktur (taman, ruang bermain dll) harus ramah anak.
- b. Pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak: pada intinya semua anak harus sehat, harus dijauhkan dari narkoba, miras dan rokok, serta semua bayi yang dilahirkan berhak memperoleh ASI eksklusif sampai 6 bulan;
  - c. Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya: pada intinya semua anak harus bersekolah (Wajib Belajar 12 Tahun), anak harus mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, positif dan kreatif, termasuk keikutsertaan anak dalam kegiatan-kegiatan budaya;
  - d. Perlindungan khusus bagi anak-anak yang tergolong 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi konflik dan bencana, pekerja anak, dll.

## 12.1 Konsep Cinta Tanah Air Bagi Perempuan

Hubungan rakyat dengan lingkungan sebuah keniscayaan. Masyarakat tidak bisa hidup tanpa air, tanah dan udara. Kebutuhan tersebut bagian dari negara dan dilindungi oleh negara. Sampai kapanpun manusia tidak bisa lepas dari wilayah. Seluruh warga negara wajib mempertahankan lingkungannya. Walaupun pemimpin silih berganti, namun kebutuhan manusia terhadap lingkungan mutlak dan tidak berubah. Kemudian ditambah dengan “cinta”, maka cinta tanah air memiliki makna bukan hanya bersifat fisik tetapi juga rohaniah. Untuk itu hidup bernegara bukan hanya komitmen bersama bersifat yuridis tapi didasari pada prinsip ukhuwah islamiah dan cinta kasih. Hubungan dan Perbedaan antara lelaki dengan perempuan tidak hanya bersifat fisik, tapi juga rohaniah.

Penjelasan tentang hubungan Perempuan dan lelaki ada dalam Kitab Suci agama Islam dan Kristen maupun Yahudi. Adam dan Hawa dibuang dari Sorga karena mereka makan buah terlarang. Seperti yang sakral ajarkan kepada kita, bahwa manusia dikeluarkan dari surga karena dosa. Kejatuhan Adam ini menjadi penyebab manusia hidup di alam fana. Akan tetapi justru manusia terlempar ke dunia mengharuskan diri untuk melakukan inovasi sebagai kunci untuk membuka gerbang pengetahuan, membutuhkan taubat untuk memastikan kemungkinan keselamatan. Hanya karena manusia belajar dari kesalahan yang dilakukan dan setelah penyesalan kami mencari pengampunan, Di sini para perempuan yang aktif mencari cinta



secara mandiri, memilih kebahagiaan mereka. Dengan demikian, kita dengan jelas menemukan bahwa cinta dan masalah seksual adalah positif, terutama hasrat cinta manusia yang bergairah dan alami untuk semua mencapai tujuan mereka.

Bagi seorang perempuan, dengan asumsi posisi sosialnya di lingkungan pemukiman masyarakat pedesaan tradisional dianggap sebagai objek. Perempuan yang di nilai baik orang yang cantik, banyak diam, pemalu mengarah pada keterasingan perempuan. Oleh karena itu, perempuan yang sebenarnya untuk orang yang menganggap peran perempuan objek, sementara arogansi hak untuk melepaskannya atau mengirimkannya saat dia memiliki keinginan. Perempuan mengikuti hati mereka dan memilih pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai kekasih; ini berarti baginya bahwa perempuan adalah objek bawaan, namun mereka harus memiliki pilihan untuk tunduk atau tidak, untuk menawarkan diri mereka sendiri tergantung pada keinginan mereka terlepas dari kesulitan yang mereka hadapi. Perempuan dituntut mampu secara intelektual, spiritual, emosional dan kemampuan mengatasi masalah.

Seorang perempuan yang memilih untuk memuaskan hasratnya adalah tindakan nyata keberanian untuk mencari pengalaman cinta merespons alami dari perasaan atau kebutuhan naluri. Pada dasarnya manusia membutuhkan kepuasan kecuali dia tidak bahagia sehingga dia meminta cinta yang tidak ortodoks. Kehidupan erotis untuk memiliki kehidupan yang aktif, terbebas dari moralitas hipokrit yang terkendala.

Perempuan sejak awal waktu di bawah otoritas ayah, suami atau moralitas suci-religius, membungkuk di bawah bimbingan agama, adat, moralitas atau atauran tradisi masyarakat. Pernikahan dan keluarga adalah struktur kunci di sebagian besar masyarakat. Meskipun kedua institusi ini secara historis terkait erat dalam budaya masyarakat pedesaan, hubungan mereka menjadi lebih kompleks. Hubungan antara pernikahan dan keluarga adalah topik yang menarik untuk dipelajari dalam persepektif sosiolog, namun nilai nilai dalam keluarga dalam membangun budaya atau bagian dari buadaya masyarakat termasuk kajian antropologi budaya. Cinta kasih terhadap asal usul nenek moyang merupakan ciri khas masyarakat desa tidak hanya desa agraris tapi juga desa maritim. Pernikahan juga terkait dengan asal usul, tidak boleh sesama muhrim dalam agama, dan tidak boleh satu suku dalam adat.

Apa itu pernikahan? Orang yang berbeda mendefinisikannya dengan cara yang berbeda. Bahkan sosiolog pun tidak bisa menyepakati satu arti. Untuk tujuan modul ini, kita akan mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak sosial yang diakui secara hukum agama, pemerintah dan adat antara dua orang, sehingga bebas hidup serumah dan melahirkan keturunan. Dalam menciptakan definisi yang inklusif, kita juga harus mempertimbangkan variasi, seperti apakah diperlukan hukum adat dan hukum agama, atau apakah lebih dari dua orang dapat terlibat pertimbangkan poligami. Variasi lain pada definisi perkawinan mungkin termasuk apakah pasangan dapat

mengadopsi anak, bagaimana menerima waris, status harta benda dan sebagainya. Harapan tradisional perkawinan bagi masyarakat desa diantaranya untuk mendapatkan anak-anak.

Banyak pengamat sosiologi keluarga tertarik pada hubungan antara institusi perkawinan dan institusi keluarga karena, secara historis, pernikahan adalah apa yang menciptakan sebuah keluarga, dan keluarga adalah unit sosial paling dasar di mana masyarakat dibangun. Baik pernikahan dan keluarga menciptakan peran status yang disetujui oleh masyarakat. Keluarga terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak dan rumah perkarangan menjadi model bagi keluarga tradisional desa Indonesia selama sebagian besar abad ke-20. Tetapi bagaimana dengan keluarga yang menyimpang dari model ini, seperti rumah tangga orang tua tunggal atau pasangan homoseksual tanpa anak? Haruskah mereka dianggap keluarga juga? Pemahaman itu juga berdampak terhadap keberadaan perempuan.

Pertanyaan tentang apa yang merupakan keluarga adalah bidang utama perdebatan dalam sosiologi keluarga, serta dalam politik dan agama. Konservatif sosial cenderung mendefinisikan keluarga dalam hal struktur dengan setiap anggota keluarga mengisi peran tertentu (seperti ayah, ibu, atau anak). Sosiolog, di sisi lain, cenderung mendefinisikan keluarga lebih dalam hal cara di mana anggota berhubungan dengan satu sama lain daripada pada konfigurasi status peran yang ketat. Di sini, kita akan mendefinisikan keluarga sebagai kelompok yang diakui secara

sosial (biasanya bergabung dengan darah, pernikahan, atau adopsi) yang membentuk hubungan emosional dan berfungsi sebagai unit ekonomi masyarakat. Silaturahmi dan mengunjungi tetangga dalam suka dan duka ciri khas masyarakat yang diperankan seorang perempuan sangat dominan. Perempuan sebagai ibu selain memiliki keutan yang tangguh juga perempuan simbol cinta kasih sayang.

Sosiolog mengidentifikasi perbedaan berbagai jenis keluarga berdasarkan bagaimana seseorang masuk ke dalam persoalan keluarga. Perbedaan-perbedaan ini memiliki signifikansi budaya yang terkait dengan masalah garis keturunan. Berdasarkan tiga paradigma sosiologis (Mooney, Knox, and Schacht, 2007 ) dalam pemahaman tentang apa yang membentuk keluarga dapat dijelaskan oleh interaksionisme simbolis, sosiologi kritis, dan fungsionalisme. Teori interaksionisme simbolik menunjukkan bahwa keluarga adalah kelompok salaing berhubungan satu dengan yang lain, peserta sebagai anggota keluarga dan bertindak sesuai dengan posisi dan kedudukannya itu. Keluarga adalah kelompok di mana orang berkumpul untuk membentuk koneksi kelompok utama yang kuat, mempertahankan hubungan emosional satu sama lain dalam jangka waktu yang lama. Keluarga-keluarga semacam itu dapat berpotensi mencakup kelompok teman-teman dekat sebagai keluarga. Sosiologi kritis menekankan bahwa perbedaan kekuasaan, bentuk-bentuk yang mendefinisikan unit keluarga "khas" tidak terlepas dari perubahan historis dalam struktur

ekonomi dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Keluarga besar pedesaan yang berbasis pertanian, berbeda dari keluarga-keluarga masa kini yang harus merespons. Untuk kondisi ekonomi pekerjaan tidak tetap, modernitas cairan, dan norma-norma gender dan kesetaraan seksual.

Perspektif fungsionalis lain lagi, karena mengutamakan kontribusi satu dengan yang lain terhadap kebersamaan. Keluarga sebagai kelompok yang melakukan peran penting bagi masyarakat baik secara internal (untuk keluarga itu sendiri) dan secara eksternal (untuk masyarakat secara keseluruhan). Legenda masyarakat desa selalu hidup bahkan tidak hanya sebagai cerita rakyat dari mulut kemulut tapi dapat member inspirasi dalam pembuatan cerita film. Keluarga menyediakan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial satu sama lain. Orang tua mengasuh dan mensosialisasikan anak-anak, suatu fungsi yang mempersiapkan anggota masyarakat baru untuk peran masa depan mereka. Sementara interaksionisme membantu kita untuk memahami pengalaman subyektif milik "keluarga" dan sosiologi kritis berfokus pada bagaimana keluarga mengatur diri mereka sendiri dalam menanggapi tekanan dan perubahan politik-ekonomi, fungsionalisme menerangi banyak tujuan keluarga dan peran mereka dalam pemeliharaan masyarakat seimbang (Parsons dan Bales 1956, Open Stax 2018).

Dalam lingkungan pendidikan modern zaman industri 4.0, semua serba digital dan otomatis. Ada tiga elemen penting dalam pendidikan. Pertama, tanggapan dari guru dan kepala sekolah



menawarkan ilmu, wawasan dan keterampilan yang penting bagi kehidupan, walaupun bersifat subjektif. Karena perkembangan terakhir pendidikan formal tidak banyak membantu dalam dunia industri era digital saat ini. Perhatian besar diberikan dalam desain dan instrumentasi untuk memastikan bahwa kurikulum sekolah tersebut dapat digitalkan dan valid di seluruh dunia kerja antar negara dan budaya. Melalui sarana ini termasuk menjaga nama baik bangsa dan bangsa sebagai warga negara. Untuk itu perlu dikembangkan dalam konteks perspektif pemangku kepentingan yang lain. Kedua, mengidentifikasi hubungan antara berbagai karakteristik guru dan sekolah, tetapi tidak dapat menetapkan sebab dan akibat. Ketiga, lintas negara perbandingan harus selalu mempertimbangkan pengaruh budaya pada arti tanggapan. Dengan kondisi zaman digital demikian maka peran perempuan di sekolah menjaga hubungan silaturahmi dengan para guru dan karyawan sekolah sangat penting. Karena guru dan karyawan yang membimbing secara formal.

Perempuan dalam membangun nilai-nilai kebangsaan terkait pengembang pendidikan kewarganegaraan di lingkungan keluarga sangat penting. Sebelumnya dalam sejarah bangsa kita, pendidikan kewarganegaraan secara luas terlihat sebagai bagian integral dari tujuan sekolah umum dan universitas. Namun, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menganut ajaran yang lebih tradisional banyak yang tidak menstimulasi kreativitas dalam pikiran siswa. Bagi banyak pendidik, kuliah adalah yang paling



umum mengutamakan metode pengajaran, dan siswa menghabiskan sebagian besar waktu mereka mendengarkan literasi instruktur mereka dari sebuah teks, menghafal fakta-fakta penting, tanggal, dan rincian sepintas lalu peristiwa sejarah yang signifikan sehingga terlihat membosankan dan tidak produktif.

Sementara kuliah bisa menjadi efektif strategi untuk instruksi, kita sekarang tahu bahwa mengembangkan keterampilan dan disposisi yang diperlukan untuk kewarganegaraan yang terlibat membutuhkan latihan. Pekerjaan kursus pendidikan kewarganegaraan harus mencakup peluang untuk siswa untuk terlibat sebagai warga negara sekarang daripada berfokus pada bagaimana mereka dapat terlibat sebagai warga negara di masa depan. Di abad 21 dunia kita, teknologi menyediakan siswa dengan berbagai cara untuk belajar dan terlibat sebagai warga negara dengan meneliti masalah, mencari solusi yang tepat untuk masalah komunitas, dan berkomunikasi dengan individu di berbagai negara dan di berbagai benua.

Seiring kemajuan teknologi, peluang siswa untuk belajar berlimpah, membantu mereka untuk lebih memahami hubungan mereka dengan masyarakat dan dunia. Saat tekanan akademis di sekolah meningkat, banyak mata pelajaran kewarganegaraan telah berubah. Kerugian bagi siswa dalam kursus seperti ini adalah bahwa mereka sering tidak memberikan jenis pengalaman belajar langsung itu mendorong pengembangan keterampilan dan komunitas masyarakat sipil bagi siswa. Agar siswa dapat mengolah sebuah komitmen untuk partisipasi masyarakat dan

menjadi anggota aktif yang dinamis, siswa membutuhkan kesempatan reguler untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran kewarganegaraan dari prasekolah hingga perguruan tinggi. Siswa tidak dapat diharapkan untuk terlibat secara sipil hanya dengan bacaan. Mereka hanya bisa belajar bagaimana menjadi terlibat secara sipil menjadi orang sipil.

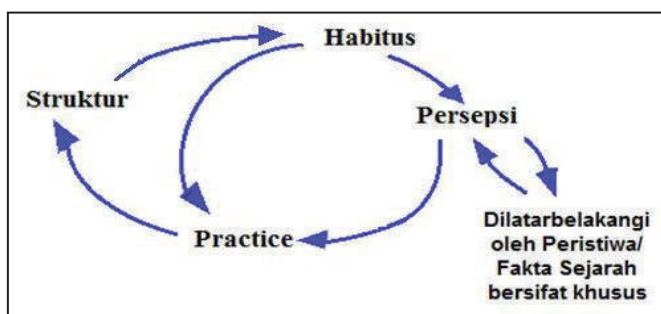
Persoalan pendidikan dan keluarga sangat kompleks. Perlu diperhatikan juga yang menjadi tren mengkhawatirkan pemerintah saat ini, lantaran mengindikasikan rapuhnya institusi perkawinan saat ini. Dampak sampingannya, yang langsung terasa, adalah gangguan psikologis bagi anak. Selain itu, data tersebut menunjukkan sepertiga penggugat berusia di bawah 35 tahun. Maraknya pernikahan muda selama satu dekade terakhir ternyata berbanding lurus dengan tingginya perceraian. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tiga tahun lalu sudah mengingatkan, angka perceraian di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Pasifik. Namun laju keputusan suami-istri membubarkan biduk rumah tangga tak kunjung surut. Dengan demikian, harapan keluarga sebagai andalan dalam membangun nilai-nilai bela negara namun masalah keluarga itu sendiri sangat rentan berbagai masalah.

## **12.2. Sadar Berbangsa Dan Bernegara Bagi Perempuan**

Kesadaran berbangsa dan berbernegara dalam literature barat disebut dengan nasionalisme. Menurut KBBI (Kamus Besar Haluan Negara), nasionalisme adalah suatu paham/ajaran untuk

mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme beriringan dengan patriotisme. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran rakyatnya. Bagi para pahlawan, tentunya sikap-sikap ini melekat kuat di hati mereka. Menurut Benedict Anderson (1983) para anggota bahkan negara terkecil pun tidak akan pernah tahu sebagian besar sesama anggota mereka, menemui mereka, atau bahkan mendengar tentang mereka, namun di pikiran masing-masing menghidupkan citra kebersamaan dalam persekutuan mereka. Kesadaran berbangsa atau nasionalisme bukanlah kebangkitan dari negara-negara untuk kesadaran diri: ia menciptakan negara-negara di mana mereka tidak ada namun, kelemahan formulasi ini adalah menunjukkan bahwa nasionalisme menyamar di bawah kepura-puraan palsu bahwa ia mengasimilasi 'penemuan' untuk 'fabrikasi' dan 'kepalsuan', bukan untuk 'membayangkan' dan 'penciptaan'. Dengan cara ini ia menyiratkan bahwa komunitas 'sejati' ada yang dapat menguntungkan dan disandingkan dengan negara-negara. Bahkan, semua komunitas lebih besar dari desa primordial dalam kontak tatap muka (dan mungkin bahkan ini) dibayangkan. Komunitas adalah untuk dibedakan, bukan karena kepalsuan / keaslian mereka, tetapi oleh gaya di mana mereka dibayangkan. Penduduk desa Jawa selalu tahu bahwa mereka terhubung dengan orang yang belum pernah mereka lihat, tetapi ikatan ini pernah dibayangkan secara khusus sebagai jaring kekerabatan dan klien tanpa batas dari Sabang sampai Meroke.

Menurut Bourdieu dalam *Homo Academicus* (1984) dijelaskan oleh Harker dalam *On Reproduction, Habitus and Education* (1984) pembentukan nilai kebangsaan melalui proses habitus dalam arena pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dikmaksud tidak hanya formal tapi juga lingkungan keluarga dan masyarakat. Persepsi-persepsi kita tentang fakta sejarah sebagai guru untuk dipelajari oleh generasi masa datang. Sejalan dengan Amir (2004) dalam Laksmi dan Fauziah (2016:87) bahwa kelompok intelektual atau kaum cendikiawan dan professional informasi menjadi mesin penggerak dan produsen pengetahuan nasionalisme dalam rangka pembentukan budaya informasi. Pembentukan kader intelektual bela negara menjadi penting karena merupakan upaya transfer ilmu, sikap dan metode dalam membela negara. Untuk itu Habitus diartikan Bourdieu sebagai proses pencekakan jangka panjang terhadap individu (process of inculcation) (Bourdieu, 1993). Adapun proses habitus Bourdieu dalam Harker (1984) sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Habitus

Sumber: *On Reproduction, Habitus and Education*. Richard K. Harker (1984)

Kesadaran nasional adalah rasa kebersamaan nasional itu merupakan pemahaman bersama bahwa kelompok masyarakat berbagi latar belakang etnis / linguistik / budaya yang berbeda-beda namun sama dan satu pikiran dan tindakan. Kebersamaan tersebut tergambar dalam symbol-simbol yang diadungkan secara bersama-sama, seperti garuda, bendera merah putih, monumen nasional dan sebagai. Secara historis, peningkatan kesadaran nasional telah menjadi langkah pertama menuju terciptanya sebuah bangsa. Kesadaran nasional dalam tingkat kesadaran seseorang, kolektif, dan pemahaman seseorang bahwa tanpa "mereka" tidak ada "kita". Ini adalah kesadaran belaka dari banyak sikap dan keyakinan bersama terhadap hal-hal seperti keluarga, adat istiadat, peran sosial dan gender, dll. Kesadaran ini memungkinkan seseorang untuk memiliki "identitas kolektif" yang memungkinkan mereka untuk memiliki pengetahuan tidak hanya di mana mereka berada, tetapi bagaimana tempat-tempat dan orang-orang di sekitar mereka begitu signifikan sehingga akhirnya menjadikan kolektif, sebuah bangsa. Singkatnya, kesadaran nasional dapat didefinisikan sebagai inti spesifik dari sikap yang menyediakan mode kebiasaan untuk memahami fenomena kehidupan. Nasionalisme pertama-tama membutuhkan kesadaran nasional, kesadaran akan komunalitas nasional dari sekelompok orang, atau bangsa (Banac,1984).

Kita lahir telah membawa agama, identitas suku, asal daerah. Kita diayomi oleh keterbawaan kita secara alami. Pada

masa mendatang ada kemungkinan bahwa kita bisa menyaksikan kehilangan perhatian kebebasan pribadi, yang merupakan salah satu yang penting sebagai Declaration of the Rights of Man and Citizen, untuk keuntungan subjektif, seksual, nasionalis, dan proteksionisme religius yang akan membekukan evolusi potensi laki-laki dan perempuan, mengurangi mereka untuk kebutuhan identifikasi kelompok asal mereka. (Kristeva, 1993) Untuk itu penting perempuan mengajarkan perjuangan keluarga dalam berbangsa terutama pada anak-anak mereka sendiri. Negara satu dengan negara yang lain dilihat pertama kali adalah simbol. Untuk itu simbol adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, yaitu kebersamaan kita. Semua bangsa memiliki simbol yang spesial bagi rakyatnya. Anak akan diajarkan tentang simbol nasional Indonesia. Burung Garuda berdiri di atas Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Di dada burung Garuda terdapat Pancasila dengan simbol-simbolnya. Perempuan ujung tombak untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan hal tersebut kepada anak-anak dalam keluarga dan lingkungan tempat mereka bermukim. Anak-anak harus mengetahui sejarah dan signifikansi dari simbol-simbol ini. Mereka akan dapat mencantumkan alasan mengapa simbol penting bagi suatu negara serta peristiwa yang melatarbelakanginya sehingga terjawab mengapa simbol-simbol tertentu yang melekat bagi bangsa Indonesia.

Perempuan di lingkungan pemukiman dalam kapasitasnya warga negara yang tinggal menetap di sebuah tempat adalah tuan

rumah bagi lingkungan tersebut. Hak hukum dan kewajibannya melekat pada perempuan. Perempuan berhak mendapatkan kenyamanan di lingkungannya. Apabila perempuan dapat memahami aktivitas mencurigakan dapat melaporkan kepada sang suami jika diruma, atau ketua adat dan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Suami yang bekerja di laut cukup lama meninggalkan pemukiman, maka perempuan bertindak menjaga lingkungan. Persolannya bagaimana masyarakat atau komunitas perempuan mendefinisikan aktivitas yang mencurigakan. Secara keseluruhan, peserta cenderung mendefinisikan aktivitas yang mencurigakan sebagai sesuatu yang luar biasa atau tidak ada pada tempatnya pemukiman tersebut. Dalam banyak kasus, orang memberi lingkungan sehari-hari mereka sebagai pengaturan normal di mana setiap penyimpangan akan memicu pemicu internal misalnya, kegiatan seseorang, bersepeda motor atau mobil yang tidak diketahui berkeliaran hilir mudik di dalam lingkungan atau dekat tempat kerja mereka, apalagi larut malam.

Hal ini sudah menjadi modus aktivitas kriminal tradisional, seperti seseorang mencuri, merampok dengan bersenjata atau membobol mobil. Dan yang lebih menakutkan lagi aktivitas yang dapat menjadi indikasi terorisme. Akan tetapi jangan semua yang mencurigakan disebut teroris. Responden perkotaan dan pinggiran kota lebih mungkin daripada responden pedesaan untuk menyebutkan sebuah kegiatan yang dapat menyebabkan tindakan teroris.



Di lingkungan pendidikan peran perempuan dalam menumbuk kesadaran berbangsa dan bernegara pada prinsipnya disekolah semua anak memiliki hak yang sama. Konvensi PBB berlaku untuk semua anak, apa pun asal etnis mereka, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin. Tidak masalah dari mana mereka berasal atau di mana mereka tinggal, apa mereka orang tua, apakah mereka memiliki kecacatan, atau apakah mereka kaya atau miskin. Semua anak pasti sama peluang untuk mencapai potensi penuh mereka. Mereka wajib dilindungi negara, tapi negara tidak aka nada apa-apa kalau warga negara dan pemerintah tidak bertindak, untuk itu peran perempuan terlibat langsung dalam menumbukan kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan pendidikan.

Bagi perempuan yang bekerja di lingkungan perusahaan besar biasanya memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR). Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan dapat didorong meningkatkan nilai bela negara dengan berbagai cara, diantaranya melibatkan aparat keamanan setempat dan dilaksanakan dalam rangkaian hari besar nasional. Misal kebersihan lingkungan, obat gratis, sunatan massal dan sebagainya dalam rangka peringatan hari kemerdekaan RI. Pekerja sosial sering berfungsi sebagai penghubung antara berbagai institusi untuk membantu pasien dan berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya untuk memastikan kesehatan pasien. Mereka akan menjadi akrab dengan, dan merujuk klien ke sumber daya komunitas. Pekerja sosial

menangani masalah hukum, seperti membantu audiensi dan memberikan kesaksian yang berhubungan dengan pasien mereka. Mereka juga terlibat dalam penelitian, pengembangan kebijakan dan advokasi untuk layanan. Dan tentu saja, pekerja sosial harus menyimpan catatan sejarah kasus dan menyiapkan laporan. Pekerjaan sosial dapat menjadi jenis pekerjaan yang membutuhkan banyak waktu lembur, dan memisahkan aspek-aspek emosional dari pekerjaan dari tugas yang diperlukan dapat menjadi pekerjaan yang sulit. Tetapi ada banyak sumber daya, termasuk situs web, buku, dan pengguna media sosial, yang dapat menawarkan saran yang bagus.

### **12.3 Analisis berkeyakinan terhadap Pancasila sebagai dasar negara bagi perempuan**

Menurut Halkis (2017) Pancasila tidak hanya sebagai ideologi negara bagi Indonesia tapi sudah menjadi Dunia Kehidupan (Lebenswelt). Ideologi tidak dapat disetarakan dengan agama. Pancasila sebagai Lebenswelt menunjukkan ruang kesadaran dalam ruang dan waktu dimiliki bangsa Indonesia, Artinya Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan bangsa Indonesia. Ideologi negara bukan hanya membangun identitas, namun menjadi kekuatan moral dalam penyelenggaraan negara. Pentingnya ideologi bagi Presiden Joko Widodo salah satu kebijakannya mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila, kemudian membuat lembaga baru yaitu; Unit Kerja Kepresidenan

Pembina Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pembentukan lembaga tersebut dinilai strategis ditengah maraknya isu keagamaan radikal yang cenderung pada ISIS pada satu sisi dan komunis yang dekat dengan Cina pada sisi lain. Namun sebagian kalangan menghawatirkan kalau lembaga tersebut hanya bersifat formalitas saya. Untuk itu penting meletakkan persoalan Pancasila diletakan dalam kerangka filosofis yang mendasarinya, sehingga eksistensi Pancasila masuk dalam struktur filsafat kontinental.

Pancasila dapat dilihat sebagai objek dan subjek. Kalau Pancasila dilihat sebagai teksterdiri dari 5 (lima) kalimat terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diinterpretasi, maka Pancasila ditempatkan sebagai objek. Pancasila memiliki ontologi, epsitemologi, dan axiologi sehingga dapat dijadikan objek kajian filsafat, untuk itu perlu kemampuan menganalisa tentang cara memkitang Pancasila dalam tradisi filsafat. Namun ketika Pancasila diletakan sebagai dasar negara, maka Pancasila sesungguhnya sebagai subjek bangsa Indonesia, Pancasila memberikan sovereign (kedaulatan) bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Pancasila sangat penting bagi bangsa poskolonial seperti Indonesia, negara lahir atas kehendak sendiri bukan diberikan kolonial.Sesuai dengan pendapat Bung Karno Pancasila merupakan weltanchaung bangsa Indonesia, yaitu kesadaran ruang dan waktu ke-Indonesiaan (Soekarno, 1945). Pancasila sebagai kesadaran, Cogito Cartesian sebagai kata kunci.

Lebih tujuh puluh tahun Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama (ko-teks) dan telah digunakan dalam mengatasi berbagai masalah (konteks)<sup>1</sup> tampaknya belum optimal digunakan ketika bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah krusial akhir-akhir ini, seperti membentuk partai politik, menentukan mitra koalisi, menentukan kepemimpinan bangsa bahkan mendeteksi kelompok radikal saja belum dapat digunakan sehingga bangsa Indonesia terlihat masih gamang hidup dengan jati dirinya sendiri. Padahal asal usul sebuah negara menjadi penentu keberadaan negara tersebut, untuk mengatur kehidupan rumah tangga suatu negara tersebut dan juga dalam berinteraksi dengan dunia di global.

Menurut Laksmi (2012:109) adanya interaksi antar individu yang terlibatlah yang berbeda yang menjadi produk budaya berbeda. Selanjutnya Laksmi & Fauziah (2016:223) watak dan karakter sangat menentukan peradaban suatu bangsa di masa depan. Budaya informasi (information culture) yang manusia ciptakan menunjukkan perilaku yang berkaitan dengan informasi (ibid: 1). Karena kebebasan dan keterbukaan informasi serta kecepatan akses mengubah cara hidup masyarakat dan juga berkaitan dengan kehidupan gender.

Perempuan sebagai bagian warga masyarakat berkembang membangun karakter bangsa. Karakter bangsa diartikan sebagai kondisi suatu komunitas yang memiliki sensibilitas, nilai, semangat dan etos kerja (Widianto, 2009; Laksmi & Fauziah, 2016). Menurut Koentjaraningrat (ibid: 223) Karakter bangsa

yang harus dimiliki adalah menghargai kualitas, memiliki kesabaran untuk meniti usaha dari awal, memiliki rasa percaya diri, nilai kedisiplinan dalam waktu dan pekerjaan serta bertanggungjawab. Karakter bangsa dalam suatu organisasi akan menciptakan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan produk dan jasa yang berkualitas.

Penghormatan terhadap nilai kebaikan, kejujuran, keberanian, ketekunan, disiplin diri, kasih sayang, kemurahan hati, ketergantungan bersifat universal. Semua orang menyadari kalau yang baik itu adalah baik dan buruk adalah buruk. Kebanyakan orangtua ingin menanamkan nilai-nilai semacam ini pada anak-anak mereka. Melakukan hal itu akan melindungi mereka dari pengaruh negatif masyarakat dan meletakkan dasar bagi mereka untuk menjadi warga negara yang baik. Kita tidak memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua jika kita tidak menanamkan moral yang kuat pada anak-anak. Tentu saja, ini sering lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Nilai mengajar membutuhkan waktu yang lama, sebuah upaya langka bagi banyak orangtua dewasa ini. "Ekonomi kita yang semakin kompetitif menciptakan lingkungan di mana ibu dan ayah menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja dan lebih sedikit jam dengan anak-anak mereka. Tentu agak berbeda dengan masyarakat pedesaan yang masih konservatif.

Bagaimanapun pengaruh itu terasa sejak saluran informasi melebar sampai ke pelosok negeri. Akibatnya, pengaruh luar seperti tekanan teman sebaya dan industri hiburan melalui

Internet, televisi, film, permainan video dan musik memiliki pengaruh yang lebih besar pada anak-anak, membentuk perspektif mereka lebih dari sebelumnya.

Dengan keadaan demikian, apa yang harus dilakukan orang tua? "Kita perlu meluangkan waktu bersama anak-anak kita dan membuat waktu yang kita miliki bersama mereka benar-benar diperhitungkan," . Bicarakan dengan mereka tentang apa yang benar dan salah, dan apa yang membentuk perilaku yang baik dan apa yang tidak. Lakukan percakapan semacam ini dengan anak-anak kita secara teratur sehingga topik nilai menjadi benar-benar "normal" dalam rumah tangga kita. Dengan begitu, di masa depan, jika anak-anak kita menghadapi teka-teki moral, mereka akan lebih nyaman membicarakan hal ini dengan kita daripada dengan rekan-rekan mereka. Jika kita tidak mengatasi masalah ini dengan anak-anak kita, masyarakat global akan mengisi kekosongan itu. Itu mungkin terdengar seperti tatanan tinggi, terutama jika sebagian besar dialog kita dengan anak-anak kita berkisar masalah sederhana, missal kita menanyakan "makan apa kita malam ini?" Namun, ada banyak cara untuk rangkai pelajaran tentang nilai ke dalam interaksi sehari-hari kita dengan anak-anak. Salah satu hal terpenting yang dapat kita lakukan adalah memberi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Mereka belajar dari melihat bagaimana kita memperlakukan mereka, mendengarkan interaksi Kita dengan orang lain dan mengamati apa yang Kita lakukan dalam situasi yang berbeda sepanjang hari.

Jika Kita ingin anak-anak kita menunjukkan nilai-nilai seperti kejujuran, harga diri, dan kasih sayang, maka kita perlu menunjukkan kualitas-kualitas ini sendiri. Semua pengajaran di dunia dapat dibatalkan jika anak-anak kita melihat kita berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan apa yang kita katakan. Anak-anak kita tidak akan merasa penting untuk terus bertahan jika kita secara rutin menyerah pada diet atau program olahraga, atau keluar dari kelas kuliah ketika mereka menjadi sulit. Mereka tidak akan berpikir penting untuk menindaklanjuti komitmen jika kita mundur untuk mengatur penggalangan dana mesjid, gereja atau gagal membawa mereka ke kebun binatang seperti yang kita janjikan. Mereka tidak akan berpikir ada yang salah dengan berbohong jika mereka mendengar kita memberitahu atasan kita bahwa kita sakit ketika kita tidak ingin pergi bekerja, atau jika telepon berdering dan kita memberi tahu anak kita untuk memberi tahu orang itu bahwa kita 'tidak pulang'.

Rencanakan belajar ayat ayat dalam Al Quran atau Alkitab bersama anak-anak kita, masing-masing menjelajahi kebajikan moral yang berbeda. Kita mungkin melakukan penelitian satu minggu untuk kejujuran atau rasa syukur, dan kemudian minggu berikutnya membaca apa yang dikatakan Al Quran tentang kasih sayang, Ar Rahman, atau belas kasih, kelembutan atau kemurahan hati. Bantu anak-anak kita melihat bahwa apa yang kita ajarkan kepada mereka tentang benar dan salah bukan hanya gagasan kita sendiri, tetapi berasal dari Firman Allah. Kita mungkin juga ingin melakukan beberapa pelajaran Al Quran



dengan anak-anak kita, masing-masing ditujukan untuk persoalan yang berbeda. Berfokuslah pada bagaimana dia menunjukkan kekuatan karakter tertentu ketika menghadapi situasi dan keadaan yang berbeda.

Perempuan yang tidak memiliki tujuan berjuang untuk bertahan hidup di alam kampung tidak ada kemajuan. Keberadaan mereka menyedihkan dari karena sedikit lahan yang tersedia, ditambah hanya dengan sedikit penghasilan yang dikirim oleh suami mereka. Kemiskinan dan penyakit-penyakit lain yang terkait dengan malnutrisi tersebar luas dan kematian akibat kelaparan, terutama di kalangan anak-anak, merupakan hal yang biasa dalam masyarakat terbelakang, namun kadang luput dari berita, semua orang dianggaptidak ada yang tahu atau biasa-biasa saja. Sejauh kapitalisme selalu mencari tingkat laba tertinggi, adalah demi kepentingan kelas penguasa untuk menjaga sistem politik tetap utuh dan menyempurnakan kebijakan buruh migran yang sesuai. Pengusaha kemudian dapat membenarkan upah bawah-subsisten yang dibayarkan kepada para pekerja dibawah upah minimum.

Pada dasarnya semua orang diberi fasilitas yang indah untuk mengekspresikan cinta kepada orang lain. Perasaan bebas untuk mengekspresikan dan memberi kepada diri kita dan satu sama lain melalui kesediaan kita untuk memberi dan peduli. Apa yang rumit tentang ini karena kita membuat orang lain merasa mereka harus mendaki gunung dan berenang lautan untuk membuat perbedaan. Yang perlu kita mengerti dengan teman-



teman kita adalah bahwa kehidupan manusia diberikan sama kepada kita semua, bukan sebagian tetapi totalitas. Matahari diberikan kepada semua orang. Itu tidak bersinar pada beberapa. Nilai kehidupan di rumah apa pun yang pernah ia tinggali. Karena ketika tiba waktunya bahwa kita semua dilucuti sampai tulang belulang di hadapan ilahi dan menghadapi kekekalan, kita akan memahami bahwa satu-satunya hukum yang harus kita ikuti adalah untuk mencintai diri kita dan satu sama lain.

Kehidupan anak-anak disekolah harus diperhatikan, kenapa? Sekolah, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mempromosikan kesehatan, kesejahteraan, dan pembelajaran semua siswa. Ketika sekolah secara aktif melibatkan orang tua dan melibatkan sumber daya masyarakat, mereka mampu merespons lebih efektif terhadap kebutuhan siswa yang berhubungan dengan kesehatan. Keterlibatan keluarga dan masyarakat mendorong kemitraan di antara sekolah, keluarga dan kelompok masyarakat, dan individu. Kemitraan ini menghasilkan berbagi dan memaksimalkan sumber daya. Dan mereka membantu anak-anak dan remaja mengembangkan perilaku yang sehat dan mempromosikan keluarga yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang orang tuanya terlibat dalam pendidikan mereka lebih cenderung: Beradaptasi dengan baik ke sekolah; Hadiri sekolah lebih teratur; Kerjakan pekerjaan rumah secara lebih konsisten; Dapatkan nilai dan nilai ujian yang lebih tinggi; Lulus dan melanjutkan kuliah; Memiliki keterampilan sosial yang lebih baik; Tampilkan perilaku



yang ditingkatkan; Memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang tua mereka, dan; Memiliki harga diri yang lebih tinggi.

Pancasila sebagai dasar negara dalam dunia pekerjaan perempuan berperan dalam memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam bertindak bagi dirinya sendiri, dan diwariskan kepada anak-anak mereka. Stereotip gender diperkuat dan dilegitimasi oleh peran tradisional pria dan perempuan untuk memiliki basis mereka dalam interpretasi konservatif budaya dan agama. Hak asasi manusia perempuan klaim ditolak sebagai bukan bagian dari budaya kita. Ini diperparah oleh esensi global dari diskriminasi gender sebagai budaya orang lain. Meskipun stereotip ini menembus semua aspek kehidupan perempuan, sering didukung oleh sistem konstitusional dan legal, hak asasi manusia perempuan terancam secara khusus di dunia keluarga, dan sering diatur oleh apa yang dikenal sebagai hukum privat/pribadi tentang perkawinan dan perceraian, perwalian anak-anak (dan kadang-kadang, perempuan) dan suksesi serta kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual dan kekerasan pasangan intim. Hak budaya sangat penting untuk pengakuan dan penghormatan martabat manusia dan harus disertakan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan. Padahal hak untuk mengekspresikan dan menikmati budaya seseorang dan agama dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional, itu tidak dapat dipenuhi dengan alasan hak asasi manusia fundamental lainnya. Perempuan tidak memiliki

hambatan dalam berpartisipasi untuk kebaikan, namun semuanya perlu pengorbanan.

## **12.4 Bentuk-Bentuk Rela Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara Bagi Perempuan**

Pengorbanan perempuan di zaman kolonial dan perang berbeda dengan kondisi aman di zaman sekarang. Pada zaman kolonial perempuan menjadi Pahlawan Nasional ikut serta mengusir penjajah kolonial Belanda. Para Perempuan-perempuan di pedesaan di lingkungan masyarakat pertanian selain melaksanakan tugas dalam mengurus rumah tangga, juga mendampingi suami untuk mengurus kebun, panen, dan sebagainya. Demikian juga dengan perempuan di desa nelayan, membantu suami mengurus bekal, hasil tangkapannya, peralatan jaring, pukat dan perahunya dan sebagainya. Sebagai orang tua, kita semua ingin anak-anak kita tumbuh menjadi warga yang bertanggung jawab dan orang baik. Kita ingin mereka belajar merasakan, berpikir dan bertindak dengan hormat diri mereka sendiri dan untuk orang lain. Kita ingin mereka mengejar kesejahteraan mereka sendiri, sementara juga memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Kita menginginkannya untuk mengakui dan menghormati prinsip demokrasi yang menjadi dasar negara kita didirikan. Kita ingin mereka untuk mengembangkan karakter yang kuat, mau mengorbankan waktu bahkan harta untuk belajar, berlatih dan berjuang untuk kebaikan.



Pencapaian kualitas akademis dan kesuksesan profesional yang dibangun di atas kekuatan moral dan kebajikan. Pendidikan yang berkualitas memberikan warga dengan alat untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat mereka. Dan imbalannya untuk mendorong pengembangan karakter anak-anak kita sangat besar. Penulis telah menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dengan nilai-nilai positif yang kuat lebih bahagia dan lebih baik di sekolah. Mereka juga lebih mampu menyeimbangkan keinginan pribadi mereka dan kebutuhan terhadap orang lain dan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Di sisi lain, jika anak-anak tidak belajar nilai dan perilaku yang tepat kapan mereka sangat muda, masalah bisa berkembang. Masalah-masalah ini bisa menjamur dan konsekuensi serius ketika anak-anak tumbuh dewasa, putus sekolah, penggunaan narkoba, kehamilan remaja, kejahatan kekerasan dan sebagainya.

Hal terpenting yang dapat kita lakukan untuk anak-anak kita adalah membantu mereka memperolehnya nilai dan keterampilan yang dapat mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Dengan memberikan contoh pahlawan-pahlawan nasional menjadi tauladan bagi mereka, Dengan demikian, mereka akan memiliki kesempatan terbaik untuk belajar di lingkungan dan di sekolah. Masalah lingkungan merupakan pemicu potensial bagi individu dari segala usia. Namun, kita hanya tahu sedikit tentang pengaruhnya terhadap anak-anak dan keluarga lainnya. Stres lingkungan sangat bermasalah bagi orang dewasa di akhir

kehidupan karena beberapa alasan. Tingkat yang lebih tinggi dari keterbatasan fungsional dan masalah kesehatan dapat mengurangi rasa penguasaan dan berpotensi meningkatkan perasaan kerentanan dan isolasi sosial.

Isyarat yang terlihat dari gangguan sosial dapat semakin menambah perasaan ancaman bagi penghuni di sebuah pemukiman. Kondisi perumahan yang berbahaya atau tidak menyenangkan dapat memperburuk pengasingan itu dengan semakin berkurangnya integrasi sosial. Sebagai tanda-tanda ketidaksamaan yang terus-menerus dan terus-menerus, masalah lingkungan sering kali berdampingan dengan indikator-indikator lain dari kerugian sosial di masyarakat, seperti layanan belanja, medis, transportasi, dan rekreasi yang inferior atau langka (LeClere, Rogers, & Peters, 1997; Lee, 1981). Penduduk yang lebih tua yang sumber dayanya dapat diakses hanya dari jarak jauh lebih mungkin dihukum, merasakan tambahan rasa ditinggalkan dari masyarakat. Kondisi-kondisi ini juga dapat menciptakan kesan penurunan kualitas hidup di daerah seseorang, membuat orang tua yang memiliki lebih sedikit sumber daya merasa ditinggalkan atau terperangkap dalam "lingkungan rentan" (Wilson, 1996), yang pada akhirnya menghasilkan kemarahan dan kesusahan.

Peran perempuan dalam lingkungan pendidikan dalam mewujudkan nilai-nilai rela berkorban dapat diwujudkan dengan berbagai aktivitas. Partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah memiliki potensi besar untuk menghilangkan kecurigaan



dan jarak antara orang dan sekolah dengan memelihara transparansi informasi dan budaya saling menghormati dan dengan bersama-sama mengejar peningkatan sekolah dengan berbagi visi, proses, dan hasil. Perubahan perilaku individu dan organisasi sangat penting untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Di negara-negara di mana struktur administrasi lemah, pendekatan bottom-up untuk memperluas kesempatan pendidikan dan pembelajaran berkualitas mungkin merupakan satu-satunya pilihan.

Namun demikian, ketika partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan cara top-down tanpa konsultasi yang lebih luas tentang tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan, konsekuensinya mungkin konflik antara aktor, rasa kewajiban yang kuat, kelelahan, inersia, dan disparitas dalam tingkat dan hasil partisipasi masyarakat di antara masyarakat. Aspek politik manajemen sekolah dan perbedaan sosio-kultural di antara penduduk memerlukan kehati-hatian, karena mereka cenderung mendorong partisipasi parsial atau nonpartisipasi dari masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah akan menghasilkan dampak jangka panjang hanya jika melibatkan berbagai aktor yang dapat mendiskusikan dan mempraktekkan kemungkinan meninjau kembali definisi komunitas dan bagaimana seharusnya.

Kerangka konseptual partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah terkait siapa yang menanggung biaya sekolah. Nyatanya walaupun UUD45 mengalokasikan dana 20 %

APBN untuk pendidikan kelihatannya partisipasi publik tetap tinggi. Bahkan sekolah-sekolah pavorit untuk melayani pendidikan istimewa tetap meningkat. Yang menanggung biaya pendidikan adalah pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan, karena kebijakan pendidikan dan diskusi internasional tentang peran masyarakat sering menekankan manfaatnya sebagai sarana untuk mengisi kesenjangan keuangan yang ditinggalkan oleh pemerintah. Di banyak negara berkembang, komunitas, secara historis, telah memainkan peran penting dalam penyediaan pendidikan. Di Indonesia berbasis komunitas dan organisasi berbasis agama mendukung ketentuan pendidikan. Ketika pemerintah di wilayah itu menggunakan pengaruh mereka sendiri pada pembangunan pendidikan. Selama periode tersebut, beberapa negara di kawasan itu menyatakan pendidikan dasar bebas biaya, menghasilkan peningkatan dramatis dalam belanja pendidikan publik.

Program penyesuaian struktural yang diadopsi di banyak negara miskin pada 1980-an dengan tujuan mengatasi krisis utang, menghambat pendidikan sekolah dengan anggaran pemerintah yang berkurang dan pengenalan biaya pengguna untuk pendidikan dasar, sementara pendidikan swasta memperluas kehadirannya dalam penyediaan pendidikan dasar. Di banyak negara berkembang, pendidikan dasar memiliki biaya hingga tahun 1999-an atau 2015-an, dan biayanya bervariasi di seluruh sekolah. Orang tua tidak hanya menanggung biaya langsung dan tidak langsung dari sekolah; mereka juga



berkontribusi terhadap sekolah dalam bentuk tenaga kerja (misalnya, konstruksi kelas) dan dalam bentuk tunai (yaitu, kontribusi, meskipun ada kebijakan penghapusan biaya). Namun, pendidikan swasta tidak berkelanjutan secara finansial di beberapa daerah dan tidak dapat dijangkau oleh anak-anak dari rumah tangga miskin. Lebih lanjut, banyak keluarga yang tinggal di daerah miskin di pedesaan tidak mampu membayar biaya sekolah dan kontribusi lain di tingkat sekolah dasar, dan banyak sekolah non-pemerintah pedesaan mengalami kesulitan untuk mengumpulkan biaya dari orang tua. Karena pengakuan bahwa biaya pendidikan yang tinggi menghalangi banyak anak-anak miskin untuk bersekolah, penghapusan biaya sekolah telah kembali populer di negara-negara berkembang sejak pertengahan 1990-an (Avenstrup, Liang, & Nellemann, 2004; UNESCO, 2008).

Namun demikian, pengenalan kembali kebijakan penghapusan biaya di banyak negara berkembang selama 20 tahun terakhir tidak menghentikan penyebaran sekolah swasta. Dalam konteks ini, membantu membagi sekolah-sekolah swasta menjadi dua kelompok: (a) sekolah swasta berbiaya tinggi yang menyediakan pendidikan berkualitas tinggi untuk anak-anak kaya di daerah perkotaan, dan (b) sekolah swasta berbiaya rendah yang sering mendapat dukungan keuangan dan dikelola oleh komunitas dan orang tua (Bray & Lillis, 1988; Knight & Sabot, 1990). Sementara beberapa berpendapat bahwa sekolah swasta berbiaya rendah hanya pengganti sekolah umum di daerah-



daerah di mana yang terakhir tidak ada, yang lain mempertahankan bahwa sekolah swasta memberikan pendidikan dasar lebih efektif biaya untuk orang miskin, bahkan di daerah di mana sekolah umum tersedia (Kingdon , 2007; Phillipson, 2008; Tooley & Dixon, 2005). Dengan demikian, penting untuk dicatat bahwa berbagai niat dan tuntutan untuk partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah telah menyebabkan peran yang berbeda dari masyarakat.

Tuntutan partisipasi orang tua terhadap pendidikan semakin tinggi. Rute pendek akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kekuatan masyarakat yang merupakan kekuatan untuk menuntut layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dengan secara langsung meningkatkan layanan mereka. Akuntabilitas dipastikan dengan membentuk komite manajemen sekolah atau dewan sekolah yang terdiri dari perwakilan orang tua dan anggota masyarakat ditambah seorang kepala sekolah untuk mendiskusikan rencana sekolah dan tantangan yang dihadapi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara kolaboratif. Di banyak negara berkembang, cukup sulit untuk memastikan jalan panjang akuntabilitas karena korupsi dan salah urus di pihak politisi dan pejabat pemerintah dan proses pemilihan yang tidak jelas. Dengan demikian, banyak perhatian diberikan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat yang mana perempuan berada di garis terdepan.

Dalam lingkungan pekerjaan perempuan pedesaan tidak banyak muncul, kecuali pekerjaan dalam bidang home industry.



Untuk keluarga petani dan nelayan perempuan mendukung usaha suami. Akan tetapi beberapa desa sudah mengalami perubahan sejak beberapa dasawarsa terakhir sehingga perempuan sudah mulai banyak bekerja pada bidang-bidang profesional. Sebagai para profesional menjalin kontak dengan ribuan pertanyaan, kekhawatiran, kesalahan, dan persimpangan jalan yang muncul dalam kehidupan pribadi dan profesional orang-orang. Mengamati lengkungan panjang dari banyak karier, memperhatikan bahwa kesalahan terburuk - yang membuat kita merasakan kesakitan, penyesalan, kesedihan dan penyesalan. Kita semua tahu etika di tempat kerja adalah bagian penting dari pekerjaan, dan organisasi yang mengikuti etika bisnis tertentu memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup, dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki sasaran untuk mendapatkan keuntungan, bahkan jika mereka harus melakukan beberapa kompromi untuk mencapai tujuan mereka. Kasus skandal, penipuan, dan penyimpangan baru-baru ini di berbagai organisasi telah menyebabkan etika di tempat kerja membuat keputusan ditentukan oleh yang kuat. Sementara bisnis fokus pada profitabilitas dan kesuksesan, sangat penting untuk melatih karyawan agar bersikap etis. Pelatihan etika membantu membangun tim yang kuat dan menumbuhkan profesionalisme di antara karyawan, sehingga meningkatkan produktivitas.

Etika kerja termanifestasi dalam perilaku karyawan yang tidak terlihat, terlihat oleh ketiadaannya. Setiap organisasi, terlepas dari industri, memiliki pedoman tertentu yang harus

dipatuhi oleh karyawannya. Beberapa etika tempat kerja umum termasuk: Masuk dan pekerjaan selesai tepat waktu, termasuk mengikuti makan siang dan istirahat tepat waktu, dan menghadiri pertemuan yang dijadwalkan tepat waktu. Kuncinya bertanggung jawab: Meletakkan upaya jujur di tempat kerja dan memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan tugas dan tenggat waktu yang ditentukan alih-alih pekerjaan pribadi.

**Berpakaian Profesional:** Menjadi berpakaian rapi dan mematuhi kode berpakaian perusahaan dan memakai kartu ID. **Bekerja sebagai Satu Tim:** Bekerja dengan baik dengan orang lain, menghormati orang lain, dan menjadi pemain tim yang baik. **Bekerja dengan sikap positif:** Menjadi menyenangkan dan sopan, dan mengambil tugas-tugas sulit dengan sikap yang ceria. Karyawan dengan etika yang kuat dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka mungkin tidak membutuhkan banyak persuasi, tidak seperti mereka yang menganggap etika kerja sebagai tantangan; tetapi semua orang perlu dilatih untuk bersikap etis di tempat kerja. Jadi, bagaimana Anda melatih karyawan untuk bersikap etis dalam dunia profesional? Nah, berikut ini ada 3 cara yang bisa Anda lakukan:

- a. **Kode Etik Tertulis:** Ini dengan jelas mendefinisikan etika yang harus dijaga dalam suatu organisasi. Tujuan mendefinisikan dan menulis kode etik adalah membiarkan karyawan tahu apa yang dapat diterima dan apa yang tidak ada dalam organisasi. Setiap karyawan - baru atau berpengalaman - harus dilatih untuk mengikuti Kode etik yang ada.

- b. Program Pelatihan Etika dan Kepatuhan: Selain menetapkan sasaran untuk tahun yang akan datang, organisasi harus lebih fokus pada pelatihan karyawan tentang etika kerja. Beberapa anggota manajemen tingkat atas dapat memimpin program pelatihan etika dan kepatuhan. Inisiatif semacam itu akan menekankan fakta bahwa karyawan harus berkultivasi dan mematuhi kode etik tempat kerja.
- c. Penting untuk mengkomunikasikan nilai-nilai etika dan Kode Etik kepada karyawan untuk membekali mereka dengan otoritas untuk mengambil keputusan etis yang tepat dalam situasi tertentu. Di atas segalanya, Anda membutuhkan tim yang baik dengan perilaku etis yang kuat untuk tumbuh dan menjadi perusahaan yang tata aturan dan etika.

#### **14.5 Bentuk-Bentuk Kemampuan Awal Bela Negara Bagi Perempuan**

Pada prinsipnya setiap warga negara, termasuk perempuan pedesaan berhak dan wajib ikut serta bela negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1, 2 (a) (b) (d), Tentang Pertahanan Negara Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan

dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi.

Kemampuan awal bela negara bagi perempuan pedesaan terletak pada kepedulian pada anak dan tugas posok sebagai pendamping suami. Ketika merencanakan lingkungan perawatan anak di rumah. Kalau bicara ideal secara fisik tentu akan kesulitan, tapi prinsipnya dapat memahami kebutuhan anak dari lahir hingga dewasanya. Untuk itu perlu persiapan merancang kebutuhan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah cedera dan kondisi yang tidak aman. Apabila layanan pada anak baik, maka perempuan telah mewujudkan nilai-nilai bela negara. Untuk itu perempuan harus berpikir tentang bagaimana ruang yang aman untuk anak-anak dalam perawatan tersebut. Untuk itu harus menyiapkan beberapa hal;

- a. Menyiapkan Ruang Perawatan Anak Anda; Anda akan memerlukan area untuk bermain, beristirahat, makan, penyimpanan, dan mengganti popok (jika Anda merawat bayi); Perhatian juga orang tua, saudara ataupun nenek untuk menitip bayi, apabila bekerja.
- b. Ruang bermain: Ruang bermain Anda harus terorganisasi dengan baik dan memiliki area yang berbeda. Anak-anak harus tahu di mana benda itu berada dan ke mana harus menyimpannya. Pertimbangkan untuk membuat "pusat" untuk setiap jenis permainan, seperti: Waktu bersama, dengan karpet untuk duduk dan tempat untuk menampilkan nama dan / atau gambar anak-anak dan keluarga mereka, kalender,



gambar yang menggambarkan jadwal harian mereka, aturan program, dll. Area membaca yang tenang dengan bantal atau kursi yang nyaman dan rak atau keranjang rendah untuk akses ke buku-buku sesuai usia, Seni dan kerajinan daerah, dengan berbagai perlengkapan seni, pensil, sumpit, meja, dan kursi.

- c. Area aktivitas otot kecil, dengan aktivitas mengikat dan menyortir sesuai usia, puzzle, mainan susun dan bersarang, dll.
- d. Area menulis, dengan bahan-bahan penulisan, notes dan kertas dan sebuah meja kecil dengan beberapa kursi
- e. Area aktivitas otot besar, dengan ruang untuk berlari, main bola, mendaki, titian menyeimbangkan, dll. (Ini mungkin juga ruang luar Anda)
- f. Tempat istirahat atau tidur: Tergantung pada usia anak-anak, tempat istirahat atau tidur mungkin terlihat berbeda. Bayi harus masing-masing memiliki tempat tidur bayi sendiri atau ruang tidur bayi yang aman, seperti halaman bermain atau keranjang bayi.
- g. Penggantian popok: Jika Anda merawat satu anak di popok, Anda akan membutuhkan area penggantian popok yang ditentukan. Ruang Anda juga harus memiliki tempat untuk menyimpan materi yang mengganti popok dari jangkauan anak-anak. Area ganti popok Anda harus diatur jauh dari persiapan makanan dan area makan.

- h. Area makan: Pertimbangkan di mana anak-anak akan makan camilan dan makanan. Anda harus memiliki area khusus untuk anak-anak untuk makan dengan nyaman. Ini mungkin termasuk kursi-kursi tinggi untuk bayi dan meja serta kursi anak-anak untuk ukuran yang lebih besar. Anda ingin ruang ini berada di lantai yang mudah dibersihkan. Selain itu, pikirkan di mana pengasuh akan duduk. Apakah ada tempat bagi Anda untuk duduk sementara Anda menyuapi bayi? Bisakah Anda duduk bergaya keluarga di meja bersama anak-anak yang lebih tua? Apakah Anda memiliki kursi goyang atau glider di mana pengasuh dapat memberi susu botol bayi?
- i. Penempatan furnitur: Baik Anda berada di Pusat Perawatan Anak Keluarga atau Pusat Perawatan Anak, Anda dapat mengatur perabotan dengan cara yang mempromosikan bermain dan belajar serta mencegah cedera. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat menggunakan furnitur rendah hingga menengah untuk membagi ruang tidur dan bermain Anda. Pertimbangkan juga bagaimana Anda dapat menempatkan furnitur Anda untuk memungkinkan kebebasan bergerak sekaligus mencegah aktivitas yang tidak aman seperti berlari atau memanjat. Pastikan bahwa pengasuh dapat dengan mudah melihat semua anak dari posisi apa pun di ruangan.
- j. Penyimpanan: Tentukan area tertentu untuk penyimpanan. Tentukan di mana Anda akan menyimpan bahan pembersih, obat-obatan, dan bahan berbahaya lainnya. Pastikan anak-



anak tidak dapat mengakses area dan terkunci untuk keamanan.

- k. Komunikasi keluarga: Tempat untuk memposting pengumuman, acara, menu, dan jadwal dapat menjadi cara yang bagus untuk berkomunikasi dengan keluarga. Papan buletin di lokasi yang terlihat dapat membantu. Selain itu, pikirkan tentang menggunakan meja atau rak untuk menampilkan karya anak-anak atau keranjang untuk orang tua yang diberikan tangan. Pastikan untuk menyimpan informasi terkini dan meletakkannya di tempat di mana keluarga dapat berhenti membaca tanpa menghalangi aliran lalu lintas saat pengantaran atau penjemputan.

Perempuan di lingkungan juga dituntut di lingkungan pemukiman untuk tanggap dalam menghadapi segala kemungkinan, termasuk bencana alam dan kerusuhan sosial. Menanggapi bencana alam secara tradisional dilihat sebagai tanggapan penuh kasih terhadap orang yang membutuhkan. Sementara belas kasih tetap menjadi inti aksi kemanusiaan, badan-badan bantuan semakin sadar akan fakta bahwa bantuan jarang netral dan bahwa tindakan mereka dapat memiliki konsekuensi jangka panjang, sebagaimana dibuktikan oleh tsunami tahun 2004 di Aceh. Dalam modul ini, penulis ingin menjelaskan beberapa hubungan antara bencana alam yang tiba-tiba, konflik, dan hak asasi manusia di lingkungan dalam kehidupan perempuan. Secara khusus, saya berpendapat bahwa



memasukkan perspektif hak asasi manusia ke dalam respons bencana alam adalah penting tidak hanya karena ia menegaskan hak dan martabat orang-orang yang rentan, tetapi juga karena dapat mencegah konflik setelah bencana.

Bencana alam didefinisikan oleh PBB sebagai: "konsekuensi dari peristiwa yang dipicu oleh bahaya alam yang membanjiri kapasitas respon lokal dan secara serius mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi suatu wilayah." Dengan kata lain, sebuah gempa yang hanya menyerang pulau tak berpenghuni bukanlah bencana alam. Juga bukan bencana alam ketika otoritas kota mampu merespons secara efektif terhadap banjir di komunitas mereka. Ada pertanyaan tentang bagaimana 'alami' adalah bencana alam. Sebagai contoh, korban yang menghancurkan Aceh 26 Desember 2004 jelas merupakan hasil dari badai tsunami itu sendiri lebih 167.000 tewas. Bukti jelas bahwa kemiskinan merupakan faktor penting dalam memahami dampak bencana alam. Upaya mendapatkan dana lebih besar dengan UU Otonomi Khusus Aceh.

Bencana alam memperburuk ketidaksetaraan gender dan kerentanan yang sudah ada sebelumnya. Mayoritas mereka yang meninggal dalam bencana alam adalah perempuan. Perempuan juga cenderung memiliki lebih sedikit akses ke sumber daya penting untuk kesiapsiagaan, mitigasi, dan rehabilitasi. Bantuan seringkali dapat bersifat diskriminatif jika tidak dimaksudkan demikian. Kebijakan pemerintah dapat memperkuat perpecahan



sosial. Untuk itu perempuan, peduli dengan lingkungan pemukiman, kemana akan lari ketika sudah ada tanda-tanda bencana, membawa anak-anak dan barang pokok yang diperlukan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia pendidikan secara historis terkait dengan sosial dan ekonomi faktor (industrialisasi, penurunan tingkat kesuburan, dan pendidikan formal); perempuan dibutuhkan di daerah-daerah selain rumah (sebagai guru dan pekerja). Zaman kolonial Belanda, peran wanita berevolusi untuk dimasukkan memelihara perkembangan intelektual anak-anak mereka, sehingga perempuan itu sendiri dibutuhkan pendidikan menjadi tercerahkan (Sadker dan Sadker 1994). Secara signifikan, di pasca-Era perang kemerdekaan dengan mempromosikan kemerdekaan kebutuhan perempuan untuk bekerja di luar rumah meningkat (Solomon 1985). Dengan dukungan yang meningkat dan permintaan untuk pendidikan publik, perempuan dibutuhkan untuk bekerja sebagai guru. Perempuan yang memasuki lembaga pendidikan tinggi bertemu dengan persoalan gender, yang diadakan untuk menurunkan standar akademik daripada laki-laki, menghadapi pengawasan ketat dan segregasi dari siswa laki-laki, dan secara keseluruhan dihadapkan pada gagasan bahwa mendidik laki-laki lebih berharga daripada mendidik perempuan. Pada 1970-an ke 2000-, sedikit perempuan yang masuk perguruan tinggi dan universitas menghadapi tantangan dominasi laki-laki, budaya persaudaraan,

profesor dan administrator yang berprasangka rendah terhadap perempuan.

Dinamika kelas di tingkat perguruan tinggi sekalaran pada bidang tertentu perempuan mewakili gender yang lebih besar dan demikian juga dunia profesional. Wanita dibedakan dari pria di dasar jenis kelamin dan jenis kelamin mereka dengan kecenderungan bahwa laki-laki dianggap sebagai norma dan wanita sebagai "orang lain" (Valian 1998). Akibatnya, wanita di perguruan tinggi telah mengadakan posisi yang secara tradisional kurang beruntung sebagai "orang lain" yang berpartisipasi dalam sistem yang dirancang di sekitar kebutuhan dan praktik manusia.

Proses disiplin progresif tidak dimaksudkan sebagai hukuman bagi karyawan, tetapi untuk membantu karyawan mengatasi masalah kinerja dan memenuhi ekspektasi pekerjaan. Disiplin progresif paling berhasil ketika membantu seorang individu untuk menjadi anggota organisasi yang berfungsi secara efektif. Disiplin progresif paling sering digunakan dengan karyawan yang bekerja setiap jam atau tidak bebas pajak. Karyawan yang digaji atau dikecualikan, dalam banyak situasi, tidak pernah bergerak melampaui tahap peringatan verbal tertulis karena mereka meningkatkan atau mencari pekerjaan di tempat lain.

Kegagalan itu, disiplin progresif memungkinkan organisasi untuk adil, dan dengan dokumentasi substansial, mengakhiri kerja karyawan yang tidak efektif dan tidak mau untuk meningkatkan. Langkah-langkah umum dalam sistem disiplin

progresif; Beritahukan karyawan tentang kinerja dan pastikan pemahamannya tentang persyaratan. Pastikan apakah ada masalah yang berkontribusi pada kinerja yang buruk. Masalah-masalah ini tidak selalu jelas bagi supervisor. Selesaikan masalah ini, jika memungkinkan; Tegur secara lisan karyawan untuk kinerja yang buruk. Beri tahu kepada karyawan bahwa Anda akan mendokumentasikan langkah-langkah selanjutnya dalam disiplin progresif dan penghentian itu dapat menghasilkan titik mana pun dalam proses disiplin progresif ketika majikan percaya bahwa karyawan tidak dapat meningkatkan meskipun peringatan berulang; Berikan peringatan lisan tertulis secara formal di file karyawan, dalam upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Perempuan dapat meningkatkan disiplin dan kinerja di lingkungan pekerjaan, apabila menjadiseorang karyawan.

Akan tetapi bagi masyarakat desa terutama masyarakat nelayan akan sulit untuk terlibat ditempat pekerjaan karena jauh tempat pekerjaan, hamper tidak melibatkan perempuan kecuali nelayan modern yang menggunakan kapal-kapal besar yang canggih. Bagi masyarakat petani tradisional juga demikian, pergi ke kebun di pinggir hutan yang jauh dari kampung menyulitkan perempuan untuk terlibat langsung di tempat pekerjaan suami. Untuk itu perempuan keluarga petani dan nelayan di desa lebih banyak mendukung usaha suami yang bersifat pendukung. Tidak jarang sang perempuan memperbaiki perahu yang rusak, atau memperbaiki rumah-rumah kebun yang ambruk dan sebagainya.

### 13. Catatan Penutup

Berdasarkan uraian di atas terlihat implementasi peran perempuan dalam nilai-nilai bela negara masuk dalam segala bidang kehidupan. Walaupun terdapat persoalan tradisional yang menghambat, perempuan pedesaan banyak berperan dalam menjalankan dan meningkatkan kehidupan keluarga dan lingkungan pemukiman tapi perubahan melalui perkebangan budaya masyarakat batas batas perempuan dan lelaki hampir menipis. Peran Perempuan di lingkungan pendidikan dan pekerjaan semakin meluas. Untuk itu berdasarkan Strategi Pertahanan Negara (2015:138) SDM Perempuan merupakan aset yang paling penting dalam usaha pertahanan negara. Kualitas dan kuantitas SDM menentukan kekuatan pertahanan, disertai dukungan teknologi pertahanan. SDM pertahanan militer dan nirmiliter harus dilatih dan diperlengkapi dengan baik, memiliki motivasi tinggi dan dengan kemampuan yang vital dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka pertahanan negara. Perempuan yang sudah terlatih dalam pendidikan bela negara termasuk dalam kader intelektual bela negara.

Pengertian kader Intelektual Bela Negara jika diuraikan secara etimologi (asal usul kata) merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan:

1. orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan, partai, dan sebagainya.

2. Intelektual dapat diartikan cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan
3. Bela adalah menjaga baik-baik, memelihara.
4. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.

Dari beberapa konsep di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Kader Intelektual Bela Negara dapat diartikan secara luas adalah semua warga negara yang menjadi calon pemimpin negara, sedangkan diartikan secara sempit adalah semua mahasiswa/i yang dididik dan dilatih untuk mendapatkan pengetahuan (knowledge) tentang isu pertahanan dan bela negara, kajian strategis, kebijakan negara, diwujudkan dalam sikap (attitude) berupa disiplin diri, loyalitas dan memiliki keterampilan (skill) khusus berupa manajemen dan leadership berwawasan kebangsaan Indonesia. Jadi kader intelektual bela negara adalah orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan, partai, kemasyarakatan dan sebagainya (Ninda, 2018).

Serangkaian proses pencapaian kualitas perpustakaan yaitu kualitas input perpustakaan, prosesnya dan outcomenya. Ketiganya menjadi dimensi penentu. Secara logis proses pencapaian kualitas perpustakaan adalah input disertai kesiapan mental, adanya proses layanan yang didukung dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta menghasilkan outcome yang

berkualitas sebagai produk dari rangkaian proses sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Perpustakaan dalam meningkatkan kualitas mahasiswa sebagai kader Intelektual Bela Negara dimasa mendatang. Output yang diharapkan dari pelatihan kader perempuan bela negara adalah menjadi kader intelektual bela negara yang memiliki pengetahuan (Knowledge) sesuai dengan KKN level 7 dan menguasai Ilmu Bela Negara dan memberi contoh di lingkungan kelompoknya, pemuda dan masyarakat pedesaan di Indonesia.

Kader Intelektual Bela Negara dapat diartikan secara luas adalah semua warga negara yang menjadi calon pemimpin negara, sedangkan diartikan secara sempit adalah semua perempuan yang telah dilatih dan didik untuk mendapatkan pengetahuan (knowledge) tentang isu pertahanan dan bela negara, kajian strategis, kebijakan negara, diwujudkan dalam sikap (attitude) berupa disiplin diri, loyalitas dan memiliki keterampilan (skill) khusus berupa manajemen dan leadership berwawasan kebangsaan Indonesia. Jadi kader intelektual bela negara adalah orang yang diharapkan memegang peran yang penting dalam masyarakat adat, petani, nelayan, pemerintahan, partai, ormas dan sebagainya. Proses Habitus (inculcation Process) atau istilah peneliti adalah proses pengkaderan fasilitator perempuan bela negara dalam era informasi. Laksmi Budaya informasi atau culture of knowledge rasa ingin tahunya tinggi. Budaya Informasi yang dimaksud adalah adanya proses budaya informasi dalam konteks membangun karakter bangsa

dan bela negara yang secara khusus berupa informasi-informasi relevan bagi perempuan pedesaan yang nantinya di sertifikasi sebagai kader intelektual bela negara.

Pelatihan Kementerian PPPA penting dikembangkan dalam rangka pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

Kemudian Modul ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Indikator-indikator Kesadaran Bela negara dapat diwujudkan dalam kehidupan Perempuan pedesaan. Secara umum diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas Kader Intelektual Bela Negara. Bourdieu (1993: 315) bahwa proses pencerdasan masyarakat adalah proses produksi budaya. Proses budaya melalui perpustakaan sebagai arena pendidikan. Karena menurut bourdeiu, hanya Hanya melalui metode-metode pendidikan yang baik menghasilkan masyarakat yang cerdas. Nilai-nilai bela negara diawali dengan adanya persepsi para pendiri Unhan berdasarkan fakta sejarah, mereka mempraktikkan dalam kehidupan



berbangsa dan bernegara sebagai pemimpin dan tokoh-tokoh pada level strategis, kemudian para tokoh tersebut membentuk struktur dalam hal ini membangun Unhan. yang salah satu misinya adalah mencetak para pemimpin melalui proses pengkaderan yaitu sebagai kader intelektual bela negara, yang membangun jaringan diseluruh Indonesia. Salah satu metodenya adalah menanamkan nilai-nilai bela negara bagaimana mahasiswa agar cinta kepada tanah airnya, kemudian menyadari bahwa mereka berbangsa dan bernegara, meyakini pancasila sebagai ideologi negara, sampai kepada kerelaannya membela bangsa dan negara dengan memiliki kemampuan awal bela negara. Dengan harapan nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan kekehidupan dimana mereka berada baik dilingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, 1983
- Banac, Ivo, *The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics*.  
Ithaca, N.Y. and London: Cornell University Press, 1984
- Fayemi, Bisi Adeleye, *Training Manual On Feminist Theory And Practice In Africa, For Action Aid International Women's Capacity Building Program*, Johannesburg, August 2010
- Halkis, Mhd, *Konstelasi Politik Indonesia, Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2017
- , *Gedabu, Termometer Paradigma Berpikir dan Bela Negara*, Universitas Pertahanan, Bogor, 2016
- Heilmann, Ann, Margaret Beetham, *New Woman Hibridities, Feminity, Feminism and international consumer culture, 1988-1930*, Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, 2004
- Humm, Maggie *The Dictionary of Feminist Theory*. (Columbus: Ohio State University Press), 1995. 251
- Kristeva, Julia, *Nations Without Nationalism*, translated by leon S. Roudiez Columbia University Press, Chichester, West Sussex, New York 1993
- Laksmi. 2012. *Interaksi, Interpretasi dan Makna*. Bandung: Karya Putra Darwati (KPD)
- \_\_\_\_\_ & Fauziah, Kiki. 2016. *Budaya Informasi*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi (ISIPII)

Nye, Andrea, *Feminism and Modern Philosophy; An Introduction*, published in the Taylor & Francis e-Library, 2004

Puspitawati, Herien, Tin Herawati, Atika Rahma,, *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga Di Propinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara*, Kerjasama: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia & Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, 2016

Sayers, Sean, Peter Osborne with an introduction by Christopher J.Arthur *Socialism, Feminism And Philosophy A Radical Philosophy Reader*, Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, 1990

Schieman, Scott, Stephen C. Meersman, *Neighborhood Problems and Health Among Older Adults: Received and Donated Social Support and the Sense of Mastery as Effect Modifiers*, *The Journals of Gerontology: Series B*, Volume 59, Issue 2, 1 March 2004, Pages S89–S97, <https://doi.org/10.1093/geronb/59.2.S89>.

Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Jakarta; Media Pressindo, 2006

Walker, Rebecca, "Becoming the Third Wave," in Ms. (January/February, 1992): 39-41

[http://journal.unair.ac.id/filerPDF/01-Balinese\\_Women\\_and\\_identities.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/01-Balinese_Women_and_identities.pdf)  
<http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Feminism>

## **Peraturan Khusus**

1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara
3. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2015
4. Tanggal : 20 November 2015 Tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia

